

KATA PENGHANTAR



Laporan Tahunan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2013 merupakan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kurun waktu Tahun Anggaran 2013, yang dijabarkan dalam Visi, Misi, Tujuan, serta sasaran program dan kegiatan yang diemban Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai perwujudan atas pelaksanaan amanat Peraturan Presiden 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PR.01.01 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2010-2014.

Secara garis besar Laporan ini menyajikan berbagai prestasi kerja sepanjang tahun 2013 pada masing-masing unit Eselon I dalam rangka implementasi Grand Strategi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu Menciptakan Supremasi Hukum, Memberdayakan Masyarakat untuk Sadar Hukum dan Hak Asasi Manusia, Memperkuat Manajemen dan Kelembagaan secara nasional, dan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi manusia.

Sejalan dengan semangat Reformasi Birokrasi yang diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari untuk meningkatkan kepercayaan publik atas kinerja dan pelayanan yang diberikan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terus meningkatkan kinerja demi terwujudnya akuntabilitas dan transparansi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Akhir kata semoga Laporan Tahunan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2013 ini dapat memberikan informasi yang akurat, tepat dan akuntabel bagi seluruh lapisan masyarakat serta bermanfaat bagi kejayaan bangsa .

Jakarta, Januari 2014
MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA

AMIR SYAMSUDIN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II RENCANA KERJA	5
A. VISI DAN MISI	5
B. TUJUAN	5
C. SASARAN	6
D. ARAH KEBIJAKAN	6
E. PROGRAM DAN KEGIATAN	9
F. REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM TAHUN 2013	11
G. ANGGARAN TAHUN 2014	13
BAB III PENCAPAIAN TARGET KINERJA	16
1. KEGIATAN/HASIL-HASIL YANG DICAPAI	16
Bidang Kesekretariatan	16
Bidang Peraturan Perundang-undangan	46
Bidang Administrasi Hukum Umum	82
Bidang Pemasyarakatan.....	124
Bidang Imigrasi	149
Bidang Hak Kekayaan Intelektual	209
Bidang Hak Asasi Manusia	214
Bidang Pengawasan	226
Bidang Pembinaan Hukum Nasional	242
Bidang Penelitian dan Pengembangan	270
Bidang Pengembangan Sumber Daya Hukum dan Hak Asasi Manusia	276
2. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DALAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA.....	293
BAB IV PENUTUP	294
A. KESIMPULAN	294
B. SARAN.....	294

Rencana Kerja Pemerintah yang tertuang dalam Rencana Kerja Kementerian/Lembaga telah dilaksanakan pada tahun 2013 terkait dengan arah pembangunan yang telah dicanangkan dalam RPJMN 2010 – 2014. RPJMN merupakan penjabaran visi, misi, dan Program Pemerintah yang memuat Strategi Pembangunan Nasional, Kebijakan Umum, Program Kementerian Lembaga, Dan Lintas Kementerian/Lembaga, Kewilayahan Dan Lintas Kewilayahan serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh.

Pembangunan hukum dan hak asasi manusia yang dilaksanakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak terlepas dari koridor kebijakan umum dan program yang ditetapkan sesuai dengan sasaran dari tugas dan fungsi kelembagaan. Pada tahun 2013 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melaksanakan pembangunan hukum dan hak asasi manusia melalui pelaksanaan 12 program utama yaitu :



yang diharapkan akan mewujudkan visi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk tahun 2010 – 2014 yaitu : **“Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum”**.

Penjabaran dan implementasi visi, misi dan strategi kelembagaan telah dan terus dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan khususnya dalam memenuhi target capaian hasil yang dimonitor perkembangannya secara periodik dalam laporan para pimpinan unit kerja pada rapat kerja yang dilakukan secara rutin dan berkelanjutan. Selain program utama yang direncanakan dan dikembangkan serta dilaporkan, terdapat juga program – program lintas kementerian/lembaga yang merupakan upaya pembaharuan dan percepatan pembangunan menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat secara serentak dan terpadu.

Kementerian Hukum dan HAM secara aktif melalui rapat koordinasi antar kementerian/lembaga memberikan laporan serta informasi data perkembangan pelaksanaan pembangunan internal yang mendukung terlaksananya kebijakan nasional seperti Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, Iklim Investasi dan Iklim Usaha, Prioritas Nasional Lainnya Bidang Perekonomian dan Prioritas Bidang Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Semua program tersebut adalah prioritas nasional dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan Iptek serta penguatan daya saing perekonomian.

Peran Kementerian Hukum dan HAM secara aktif dalam meningkatkan daya saing perekonomian melalui kebijakan dan pelayanan publik yang diberikan melalui perencanaan, penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku ekonomi dan pasar. Selain itu kebijakan internal dalam pelayanan legislasi, registrasi dan pengawasan keimigrasian, hak kekayaan intelektual, pengesahan badan hukum dan pengawasan kenotariatan juga sangat berperan dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam melakukan usaha perekonomian.

Hal - hal yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM kurun waktu Tahun 2013 untuk meningkatkan kinerja dan pemberian pelayanan publik kepada masyarakat antara lain Penataan Kelembagaan dan Audit Kelembagaan oleh Tim Independent yang progresnya saat ini menunggu hasil verifikasi Tim Independen dan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada warga masyarakat melalui Pelaksanaan fidusia secara *online*, penerapan Sistem IPAS (*Industrial Property Automation System*) pada Pelayanan Merek , Menerapkan Fasilitas *Autogate* Dalam Pemeriksaan Keimigrasian, Terimplementasinya Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) pada 3 (tiga) Perwakilan RI di luar negeri (KBRI Bangkok, KBRI Singapura dan KJRI Penang) serta 1 (satu) Kamar Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei, Penerapan layanan kunjungan berbasis IT yang terintegrasi dengan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) pada Lapas/Rutan, Sistem Aplikasi Pembebasan Bersyarat secara online untuk menyeragamkan metode pengurusan Pembebasan Bersyarat di semua UPT Pemasyarakatan, Kanwil Hukum dan HAM serta di

Ditjen Pemasyarakatan, Penyajian data jumlah penghuni, anggaran Bama, SDM petugas secara online dan real time serta dapat diakses oleh masyarakat melalui website smslap.ditjenpas.go.id, Peluncuran website napi craft merupakan media yang dikembangkan dalam upaya memperkenalkan dan memasarkan hasil karya WBP kepada masyarakat dapat diakses melalui www.napicraft.com dan pada bidang administratif melakukan Pemutakhiran data kepegawaian melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) serta Penggunaan Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) dalam persuratan.

Pada tahun 2014 akan dilaksanakan Pemesanan nama perusahaan berbasis *Honour System dan Disclaimer* sehingga waktu pemesanan nama yang awalnya 3-7 hari menjadi 1 hari, akan dibuatnya Aplikasi Permohonan Pengangkatan Notaris berdasarkan FIFO sistem untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan bebas KKN dalam pengangkatan notaris, dikembangkan Sistem IPAS (Industrial Property Automation System) untuk Paten dan Desain Industri dan melakukan penyelesaian Pembangunan Lapas/Rutan Baru sesuai amanat Inpres 1 tahun 2010 yang kelanjutannya dilaksanakan di tahun 2014 untuk menanggulangi over kapasitas pada lapas/rutan serta rencana pemasangan jaringan komunikasi di 8 (delapan) Perwakilan RI (KBRI Kuala Lumpur, KBRI Beijing, KJRI Davao, KJRI Johor Bahru, KJRI Tawao, KJRI Kuching, KJRI Guangzhou dan KJRI Hongkong).

Percepatan Reformasi Birokrasi dilaksanakan melalui 9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi Nasional yang telah diterapkan di lingkungan Kemenkumham. Reformasi Birokrasi telah mengubah pola dan metode pelayanan organisasi/lembaga kepada masyarakat dengan menggunakan *e-government* untuk meningkatkan kualitas aparatur pemerintah dalam menjalankan peran dan fungsinya dalam pembangunan nasional. Di sisi lain masyarakat sebagai stake holder mengalami peningkatan kepercayaan kepada aparat sebagai implikasi dari pelayanan birokrat yang berkualitas.

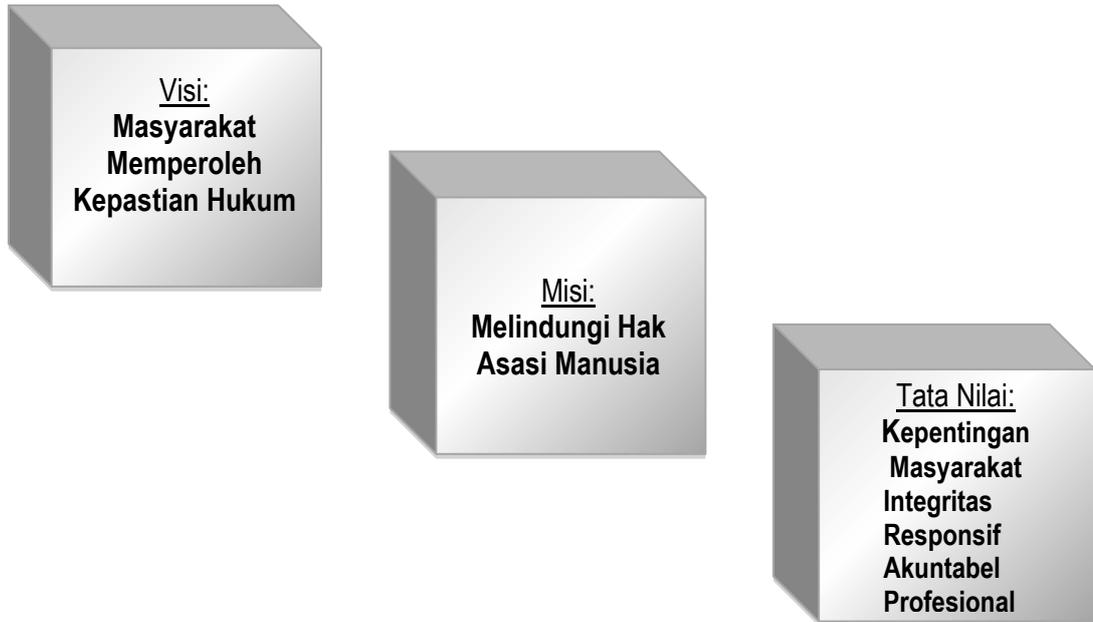
Kementerian Hukum dan HAM dengan komitmen yang tinggi dan Fokus terhadap pada pembenahan organisasi dan peningkatan kualitas profesional aparat telah menggerakkan seluruh elemen meliputi bidang sekretariat administrasi, teknis, pengawasan internal maupun pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan dan pengelolaan sumber daya manusia aparat. Hasil yang diraih berupa prestasi yang menggembirakan berhasil diperoleh Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2013 antara lain :

NO	URAIAN	CAPAIAN
1.	Penilaian LAKIP	68,79 (B)
2.	Laporan Keuangan	WTP dengan catatan paragraph
3.	Penilaian Inisiatif Anti Korupsi	6,99 (peringkat ke II instansi vertikal)
4.	Penilaian Terbaik dalam Pelaksanaan Anggaran	Masuk di posisi IV (Keempat) dari seluruh K/L
5.	Penilaian Kepatuhan Pelaporan Barang Milik Negara oleh Kemenkeu	Peringkat III (ketiga) dari seluruh K/L
6.	Peringkat Keaktifan Penggunaan IT dalam Pengadaan Barjas melalui aplikasi SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan)	Peringkat II (Kedua) dari Seluruh K/L

Keberhasilan dan prestasi yang dicapai Kementerian Hukum dan HAM diharapkan akan tetap terpelihara dan mengukir prestasi lain di berbagai sektor dan bidang sampai seluruh elemen mengalami kemajuan pemenuhan capaian target yang diharapkan melalui fungsi pengendalian, evaluasi yang terus-menerus bersama-sama dengan Instansi dan kementerian/lembaga lainnya.

A. Visi dan Misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan sistem hukum nasional adalah mewujudkan sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan kepastian hukum dan hak asasi manusia berdasarkan keadilan dan kebenaran. Berlandaskan hal tersebut maka dirumuskan visi dan misi sebagai berikut :



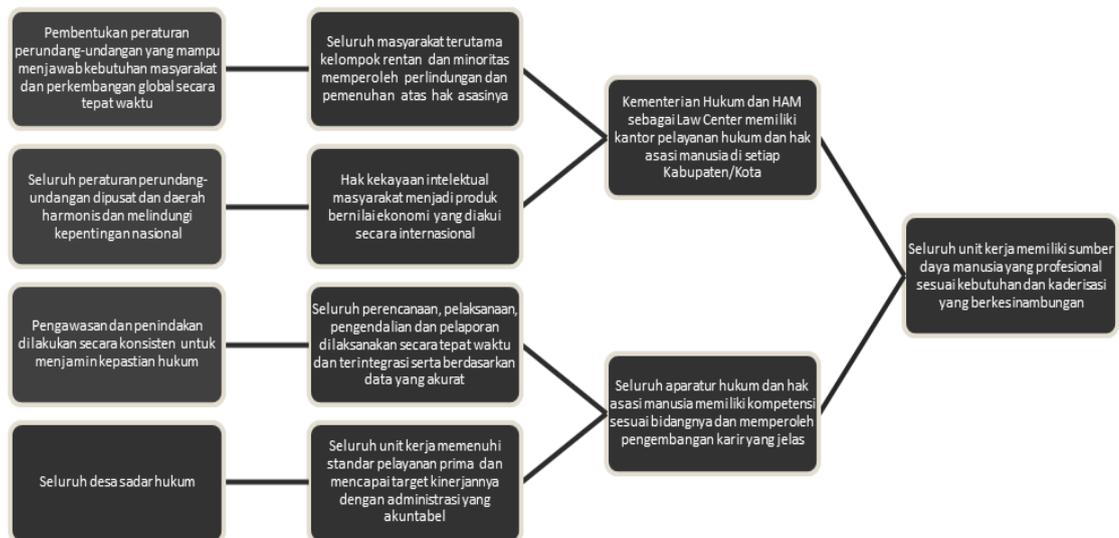
B. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari misi dan menjadi kerangka dasar serta arah pelaksanaan kebijakan dan kegiatan prioritas pembangunan. Tujuan pembangunan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2010-2014 adalah :



C. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, program dan kegiatan prioritas agar penggunaan sumber daya dapat efisien dan efektif. Sasaran pembangunan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2010-2014 adalah :



D. Arah Kebijakan

Beberapa kegiatan prioritas Nasional maupun prioritas Bidang pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan PERPRES Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014 adalah :

1. Prioritas Nasional 1 : Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, dengan kegiatan :
 - a. Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah;
 - b. Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara;
 - c. Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pelayanan Tahanan Dan Pembinaan Narapidana;
 - d. Pembinaan Kegiatan Di Bidang Bimbingan Kemasyarakatan dan Anak;
 - e. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen;
 - f. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis;
 - g. Penyelenggaraan Diklat Fungsional dan hak asasi manusia;

- h. Pendidikan Kedinasan;
 - i. Pengelolaan dan Pembinaan Kepegawaian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 - j. Pengawasan Inspektorat Khusus.
2. Prioritas Nasional 7 : Iklim Investasi dan Iklim Usaha, dengan kegiatan :
 - a. Perancangan Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - b. Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan.
 3. Prioritas Nasional Lainnya Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, dengan kegiatan :
 - a. Kerjasama hak asasi manusia;
 - b. Penguatan hak asasi manusia;
 - c. Diseminasi hak asasi manusia; dan
 - d. Informasi hak asasi manusia.
 4. Prioritas Nasional Lainnya Bidang Perekonomian, dengan kegiatan :
Pelayanan dokumen perjalanan visa dan fasilitas keimigrasian.
 5. Prioritas Bidang Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, dengan fokus prioritas :
 - a. Peningkatan efektifitas peraturan perundang-undangan;
 - b. Peningkatan kinerja lembaga di bidang hukum; dan
 - c. Peningkatan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Di samping itu arah dan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam bidang pembangunan hukum untuk lima tahun mendatang direncanakan melalui peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam rangka tercapainya konsolidasi penegakan supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia serta kelanjutan penataan sistem hukum nasional terkait dengan perbaikan substansi (materi) hukum, struktur (kelembagaan) hukum dan kultur (budaya) hukum, sebagai berikut :

1. Peningkatan Efektifitas Peraturan Perundang-Undangan, melalui kegiatan prioritas :
 - a. Peningkatan kualitas penelitian/pengkajian dan penyusunan naskah akademik peraturan perundang-undangan;
 - b. Peningkatan kualitas penyusun dan perancang peraturan perundang-undangan (*Legislative Drafters*);
 - c. Penguatan mekanisme Prolegnas dan Prolegda;

- d. Pembenahan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. Penguatan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaannya.
2. Peningkatan Kinerja Lembaga Penegak Hukum, melalui kegiatan prioritas :
 - a. Peningkatan fungsi Pemasyarakatan;
 - b. Peningkatan fungsi Keimigrasian;
 - c. Peningkatan fungsi Hak Kekayaan Intelektual; dan
 - d. Peningkatan fungsi Administrasi Hukum Umum.
 3. Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN, melalui prioritas kegiatan :
 - a. Penyusunan peraturan perundang-undangan dalam rangka implementasi KAK 2003;
 - b. Peningkatan efektifitas tindak lanjut hasil pemeriksaan/audit;
 - c. Penyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara; dan
 - d. Peningkatan kualitas informasi hasil pemeriksaan BPK.
 4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, melalui kegiatan prioritas :
 - a. Penyusunan kegiatan pelayanan publik;
 - b. Penyusunan pedoman pengaduan masyarakat;
 - c. Penyusunan kebijakan dan penyelenggaraan pelatihan pelayanan publik;
 - d. Pembinaan pelaksanaan kebijaksanaan pelayanan publik;
 - e. Penyelenggaraan kampanye peningkatan kualitas pelayanan publik; dan
 - f. Fasilitasi penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah.
 5. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas instansi pemerintah, melalui kegiatan prioritas :
 - a. Penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pembinaan penerapan e-government;
 - b. Kebijakan reward and punishment bagi kinerja instansi pemerintah;
 - c. Penerapan kontrak kinerja pada setiap jabatan;
 - d. Pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kinerja;
 - e. Pengembangan kebijakan dan penyelenggaraan diklat kepemimpinan; dan
 - f. Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian.

6. Pengawasan/Koordinasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Instansi, melalui kegiatan prioritas :
 - a. pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi; dan
 - b. Penataan pegawai dalam rangka implementasi reformasi birokrasi instansi.
7. Peningkatan Penghormatan Terhadap Hak Asasi Manusia, melalui kegiatan prioritas :
 - a. Penyusunan peraturan perundang-undangan termasuk perda yang berperspektif hak asasi manusia dan tidak diskriminatif;
 - b. Penyusunan kebijakan terkait pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia;
 - c. Tindak lanjut pokja RANHAM yang telah dibentuk di daerah; dan
 - d. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat miskin dan terpinggirkan.

E. Program dan Kegiatan

Mengacu pada sasaran dan arah kebijakan yang akan dicapai dalam pembangunan bidang hukum, selanjutnya program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2010-2014 adalah :

1. Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia :

Kegiatan-kegiatan pokok meliputi : perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dalam rangka pengeluaran jangka menengah dan berbasis kinerja, pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran, pengelolaan dan pembinaan kepegawaian, pengelolaan barang milik negara, hubungan masyarakat dan hubungan luar negeri, pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggaan, pengkajian dan pengembangan kebijakan, pengelolaan pelayanan daktiloskopi, pengembangan dan pendayagunaan telematika, pengelolaan administrasi, pelayanan dan penegakan hukum dan hak asasi manusia Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia :

Kegiatan-kegiatan pokok yang akan dilaksanakan antara lain meliputi: pembangunan, pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana Sekretariat Jenderal dan Kantor Wilayah serta kantor Satuan Kerja.

3. Program Peningkatan Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia :
Kegiatan-kegiatan pokok yang akan dilakukan adalah pengawasan kinerja inspektur wilayah, dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya.
4. Program Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
Kegiatan pokok yang akan dilakukan meliputi penelitian, evaluasi dan pengembangan hak-hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi dan sosbud, pelanggaran hak asasi manusia berat, hak-hak kelompok rentan, dukungan manajemen dan teknis lainnya
5. Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Hukum dan Hak Asasi Manusia;
Kegiatan-kegiatan pokok yang akan dilakukan meliputi penyelenggaraan diklat kepemimpinan dan manajemen, diklat teknis, diklat fungsional hak asasi manusia, dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya;
6. Program Pembentukan Hukum
Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain : perancangan peraturan perundang-undangan, harmonisasi peraturan perundang-undangan, publikasi, kerjasama dan pengundangan peraturan perundang-undangan, litigasi peraturan perundang-undangan, dan fasilitasi perancangan peraturan daerah, dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.
7. Program Administrasi Hukum Umum
Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain administrasi hukum perdata, pidana, tatanegara, internasional, badan hukum, dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya;
8. Program Pembinaan Pemasarakatan
Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain penyelenggaraan keamanan dan ketertiban, perawatan, pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara, registrasi dan informasi, bmkemas dan anak, pelayanan tahanan dan pembinaan napi, dukungan teknis dan administrasi.
9. Program Peningkatan Pelayanan dan Pengawasan Keimigrasian
Kegiatan pokok dilakukan meliputi pelayanan dokumen perjalanan, visa dan fasilitas keimigrasian, perumusan kebijakan teknis dokumen perjalanan, visa, ijin masuk, izin bertolak, dan fasilitas keimigrasian, persetujuan izin tinggal dan status keimigrasian, perumusan kebijakan teknis izin tinggal, alih status keimigrasian,

status keimigrasian dan surat keterangan keimigrasian serta izin tinggal khusus/darurat, pendeteksian pelanggaran atau kejahatan keimigrasian, perumusan rancangan kebijakan teknis intelejen keimigrasian, penyidikan dan penindakan pelaku tindak pidana keimigrasian, penyajian data jegah tangkal, perumusan kebijakan teknis penyidikan dan penindakan keimigrasian, kerjasama luar negeri keimigrasian, perumusan kebijakan teknis lintas batas dan kerjasama keimigrasian antar negara dan organisasi internasional, aplikasi on line 24 jam, perumusan kebijakan teknis sistim informnasi keimigrasian, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan.

10. Program Pembinaan/Penyelenggaraan Hak Kekayan Intelektual

Kegiatan-kegiatan pokok yang dilakukan meliputi : penyelenggaraan penyidikan HKI, penyelenggaraan sistem hak cipta, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang, penyelenggaraan sistem paten, penyelenggaraan sistem merek dan indikasi geografis, penyelenggaraan kerjasama dan pengembangan HKI, penyelenggaraan sistem teknologi informasi HKI, dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya.

11. Program Pemajuan Hak Asasi Manusia;

Kegiatan pokok yang akan dilakukan antara lain: desiminasi hak asasi manusia, penguatan hak asasi manusia, teknologi informasi hak asasi manusia, harmonisasi dan kerjasama hak asasi manusia, pelayanan komunikasi hak asasi manusia, dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya.

12. Program Pembinaan Hukum Nasional;

Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain penyelenggaraan pelayanan teknis, pengkajian, penelitian, pertemuan ilmiah dalam rangka pengembangan sistem hukum nasional, perencanaan pembangunan hukum, analisa dan evaluasi, penyusunan naskah akademis peraturan perundang-undangan, kerjasama bidang hukum, publikasi dan pengolahan data, pengembangan penyuluhan hukum, dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.

F. Penyerapan Anggaran Per Program Tahun 2013

Sesuai Surat Menteri Keuangan tanggal 18 Juni 2013 Nomor : S-407/MK.02/2013 tentang Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan Tahun 2013, anggaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2013 ditetapkan sejumlah Rp.7.772.407.000,-.

Pada dasarnya pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2013 telah berjalan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2013. Program-program yang menjadi Prioritas Nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN tahun 2010-2014 juga telah dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Realisasi anggaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sampai dengan 29 Desember 2013 sebagai berikut :

1. Realisasi Anggaran menurut Jenis Belanja :

No	Belanja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	3.405.558.964.000	3.238.831.640.000	95.10 %
2	Belanja Barang	3.293.942.196.000	2.785.349.415.000	84.56 %
3	Belanja Modal	1.072.906.681.000	904.423.340.000	84.30 %
Jumlah Total		7.772.407.841.000	6.928.604.395.000	89,14 %

2. Rincian Anggaran menurut Unit Eselon I :

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1.	Sekretariat Jenderal	6.013.875.185.000	5.473.408.495.000	91.01%
2.	Inspektorat Jenderal	29.744.554.000	26.774.080.000	90.01%
3.	Ditjen Administrasi Hukum Umum	357.388.970.000	263.800.510.000	73.81%
4.	Ditjen Pemasyarakatan	70.416.250.000	59.715.360.000	84.80%
5.	Ditjen Imigrasi	922.109.810.000	832.629.660.000	90.30%
6.	Ditjen Hak Kekayaan Intelektual	99.345.071.000	74.615.840.000	75.11%
7.	Ditjen Peraturan Perundang-Undangan	53.949.333.000	32.665.860.000	60.55%
8.	Ditjen Hak Asasi Manusia	31.949.586.000	28.641.960.000	89.65%
9.	BPHN	89.313.057.000	46.159.910.000	51.68%
10	Balitbangham	23.383.100.000	21.383.100.000	90.38%
11	BPSDM	80.656.908.000	68.809.620.000	85.31%
JUMLAH		7.772.407.841.000	6.928.604.395.000	89,14%

3. Realisasi Anggaran menurut Program :

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	5.517.118.185.000	5.035.535.815.000	91.27%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	496.757.000.000	437.872.680.000	88.15%

3	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	29.744.554.000	26.774.080.000	90.01%
4	Program Administrasi Hukum Umum	357.388.970.000	263.800.510.000	73.81%
5	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan	70.416.250.000	59.715.360.000	84.80%
6	Program Peningkatan Pelayanan dan Pengawasan Keimigrasian	922.109.810.000	832.629.660.000	90.30%
7	Program Pembinaan / Penyelenggaraan HKI	99.345.071.000	74.615.840.000	75.11%
8	Program Pembentukan Hukum	53.949.333.000	32.665.860.000	60.55%
9	Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia	31.949.586.000	28.641.960.000	89.65%
10	Program Pembinaan Hukum Nasional	89.313.057.000	46.159.910.000	51.68%
11	Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	23.659.117.000	21.383.100.000	90.38%
12	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	80.656.908.000	68.809.620.000	85.31%
Jumlah Total		7.772.407.841.000	6.928.604.395.000	89,14 %

G. Alokasi Anggaran Tahun 2014

Sesuai Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor : S-760/MK.02/2013, tanggal 28 Oktober 2013, hal Penyampaian Kebijakan Belanja dan Alokasi Anggaran Kementerian Negara/Lembaga TA 2014, anggaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2014 dialokasikan sejumlah Rp.7.534.526.527.000,-.

Anggaran dari sumber rupiah murni dialokasikan pada :

Alokasi anggaran sejumlah Rp.7.534.526.527.000,- digunakan untuk membiayai 12 (dua belas) program, pada 796 satuan kerja, dan 44.123 pegawai, dengan rincian per program, sebagai berikut :

No	Program	Belanja Pegawai	Belanja Barang		Belanja Modal		Jumlah
			Operasional	Non Operasional	Operasional	Non Operasional	
1.	Program Dukungan Manajemen Tugas Teknis Lainnya Kemenkumham.	3.246.141.422.000	1.136.477.900.000	335.291.805.000	3.417.776.000	196.559.655.000	4.917.888.558
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kemenkumham	0	0	0	0	1.000.000.000	1.000.000.000
3.	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemenkumham	12.423.895.000	1.576.514.000	7.030.191.000	15.000.000	0	21.045.600.000
4.	Program Administrasi Hukum Umum	20.518.548.000	26.095.323.000	155.130.674.000	152.727.000	136.356.066.000	338.253.338.000
5.	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan	29.162.679.000	6.209.143.000	8.818.315.000	135.000.000	492.800.000	44.817.937.000
6.	Program Peningkatan Pelayanan dan Pengawasan Keimigrasian	29.511.750.000	41.098.075.000	698.332.376.000	0	142.860.163.000	911.802.364.000



7.	Program Pembinaan/ Penyelenggaraan HKI	34.609.313.000	25.673.658.000	37.713.737.000	370.000.000	8.014.626.000	106.381.334.000
8.	Program Pembentukan Hukum	11.212.316.000	4.164.770.000	14.008.057.000	0	0	29.385.143.000
9.	Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia	11.897.539.000	3.554.608.000	5.239.052.000	0	12.000.000	20.703.199.000
10.	Program Pembinaan Hukum Nasional	18.462.576.000	4.317.055.000	58.962.035.000	0	163.447.000	81.905.113.000
11.	Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	8.570.977.000	3.116.715.000	3.454.930.000	0	0	15.142.622
12.	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	21.218.796.000	8.018.124.000	17.964.399.000	0	0	47.201.319
JUMLAH		3.443.729.811.000	1.260.310.885.000	1.341.945.571.000	4.090.503.000	1.484.458.757.000	7.534.526.527.000

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2013 telah mencapai target yang cukup menggembirakan, hal ini terlihat dari capaian kinerja masing-masing Unit Eselon I yang secara konsisten melaksanakannya hingga berakhirnya tahun anggaran 2013, berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi.

Peningkatan kualitas kinerja dapat dilakukan di jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas dasar dukungan berbagai pihak, khususnya komitmen pimpinan yang bisa dijadikan pegangan sebagai suatu bentuk pedoman bagi aparat pelaksana dilapangan. Namun demikian bukan berarti terhindar dari kendala atau persoalan yang meliputi pelaksanaan tugas. Akan tetapi hal tersebut dijadikan sebagai suatu tantangan untuk meraih peluang kearah yang lebih baik.

Berkenaan dengan itu, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terus menerus melakukan pembenahan dan perbaikan, sehingga kinerja dan pelaksanaan tugas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di tahun mendatang akan lebih baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Pencapaian sasaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selama tahun 2013 adalah sebagai berikut :

A. Bidang Kesekretariatan

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi dilingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kemudian menjalankan fungsinya sebagai berikut:

1. Koordinasi kegiatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia;
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama dan hubungan masyarakat;
5. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;

6. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor M.HH-05.Ot.01.01 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Terdiri dari :

1. Biro Perencanaan
2. Biro Keuangan
3. Biro Perlengkapan
4. Biro Kepegawaian
5. Biro Hubungan Masyarakat dan Hubungan Internasional
6. Biro Umum
7. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan

Mengembangkan fungsi fasilitatif, bidang Kesekretariatan selama tahun 2013 telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bidang Kelambagaan dan Penatalaksanaan



Salah satu area perubahan dalam Reformasi Birokrasi adalah Penataan Kelembagaan. Sekretariat Jenderal telah melakukan Penataan maupun

restrukturisasi Kelembagaan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam rangka upaya pencapaian postur organisasi yang ideal, produktif, efektif, efisien, dan akuntabel. Adapun prioritas yang telah dilakukan sebagai wujud karya nyata, yaitu penataan kelembagaan di jajaran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasarakatan dan Imigrasi sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Prioritas Nasional. Adapun daftar UPT yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM sebagai berikut:

NO	NOMOR KEPMEN	NO	NAMA UPT BARU
I	M.HH-10.OT.01.01 Tahun 2011	1	Lapas Kelas III Gunung Sugih
		2	Lapas Kelas III Warung Kiara
		3	Lapas Kelas III Tanjung
		4	Lapas Kelas III Lembata
		5	Lapas Wanita Kelas III Kupang
		6	Lapas Narkotika Kelas III Samarinda
		7	Lapas Anak Kelas III Mataram
II	M.HH-09.OT.01.01 Tahun 2011	8	Rutan Kelas IIB Banda Aceh
		9	Rutan Kelas IIB Kota Agung
		10	Rutan Kelas IIB Garut
		11	Rutan Kelas IIB Kupang
		12	Rutan Kelas IIB Pasangkayu
III	M.HH-08.OT.01.01 Tahun 2011	13	Bapas Kelas I Manokwari
IV	M.HH-07.OT.01.01 Tahun 2011	14	Rupbasan Kelas I Manokwari
V	M.HH-03.OT.01.01 TAHUN 2011	15	KANIM KELAS III KEDIRI
		16	KANIM KELAS III PAMEKASAN

Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kemenkumham Nomor SEK-01.PR.01.02 Tahun 2012 tentang Penetapan Lapas/Rutan sebagai UPT induk untuk afiliasi pada 13 unit pelaksana teknis pemsarakatan yang akan operasional, selanjutnya dibentuk kembali 23 (dua puluh tiga) UPT Baru yang dapat mendukung pelaksanaan tugas teknis di daerah seperti:

NO	NOMOR KEPMEN	NO	NAMA UPT BARU
I	M.HH-04.OT.01.01 Tahun 2012	1	Lapas Kelas III Sarolangun
		2	Lapas Kelas III Banyuasin
		3	Lapas Kelas III Kayu Agung
		4	Lapas Kelas III Gunung Sindur
		5	Lapas Kelas III Bekasi
		6	Lapas Kelas III Banjar
		7	Lapas Kelas III Cilegon
		8	Lapas Kelas III Bontang
		9	Lapas Narkotika Kelas III Langsa
		10	Lapas Narkotika Kelas III Langkat
		11	Lapas Narkotika Kelas III Muara Sabak
		12	Lapas Narkotika Kelas III Pangkal Pinang
		13	Lapas Narkotika Kelas III Kasongan
		14	Lapas Anak Kelas III Bandar Lampung
		15	Lapas Anak Kelas III Bandung
II	M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2012	16	RUTAN KELAS IIB Humbang Hasudutan
		17	RUTAN KELAS IIB Pekanbaru
		18	RUTAN KELAS IIB Gunung Sindur
		19	RUTAN KELAS IIB Tamiyang Layang
		20	RUTAN KELAS IIB Bintuni
III	M.HH-06.OT.01.01 Tahun 2012	21	RUPBASAN KELAS I Gorontalo
IV	M.HH-03.OT.01.01 Tahun 2012	22	KANIM KELAS III Takengon
		23	KANIM KELAS III Labuan Baju

Pada tahun 2013, secara khusus telah dilakukan penataan kelembagaan di beberapa UPT Imigrasi antara lain:

NO	NOMOR KEPMEN	NO	NAMA UPT BARU
I	M.HH-03.OT.01.01 TAHUN 2013	1	Kanim Kelas III Kotamubago
		2	Kanim Kelas III Wakatobi
		3	Kanim Kelas III Bau –Bau
		4	Kanim Kelas III Banggai
		5	Kanim Kelas III Putusibau

Penting untuk diketahui bahwa selama tahun anggaran 2013, Sekretariat Jenderal juga telah berupaya maksimal mengajukan rancangan dan pembentukan beberapa unit layanan lainnya, seperti:

No	Uraian	Tentang	Keterangan
1.	Terbitnya UU NO 11 tahun 2012	sistem peradilan anak perlu dibentuk LPAS	rancangan menunggu pembahasan dengan MENPAN
2.	Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-02.OT.01.01 TAHUN 2013 TGL 6 Mei 2013	Pembentukan unit layanan paspor Kanim Kelas I Khusus Jakarta Selatan	Sudah diundangkan
3.	Peraturan Menteri Hukum dan HAM NO 19 tahun 2013	perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tentang ORTA KEMENKUMHAM	Sudah diundangkan
4.	Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-04.OT.01.01 TAHUN 2013	Pembentukan Unit Layanan Paspor Kanim Klas I Khusus Jakarta Barat Dan Unit Layanan Paspor Kanim Kelas I Khusus Surabaya	Sudah diundangkan

Selanjutnya, untuk mengukur kinerja kelembagaan yang produktif, efektif, efisien dan akuntabel di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, maka sangat diperlukan audit kelembagaan yang saat ini masih menunggu hasil verifikasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Adapun hasil verifikasi aspek kelembagaan melalui audit diharapkan menggambarkan beberapa indikator:

1. Adanya sinkronisasi Uraian Jabatan Struktural dalam Rangka Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan menghasilkan Dokumen Uraian Jabatan Struktural Kementerian Hukum dan HAM sebanyak **2.396** Uraian Jabatan Struktural.
2. Penyusunan Uraian Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tersedianya Dokumen komprehensif terkait Uraian Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang terdiri dari:
 - a. **215** (dua ratus lima belas) Uraian Jabatan Fungsional Tertentu
 - b. **263** (dua ratus enam puluh tiga) Uraian Jabatan Fungsional Umum
3. Penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan unit kerja Eselon I dan Eselon II di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian



Hukum dan HAM. Hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut, yaitu tersusun dan terhimpunnya dokumen SOP Kementerian Hukum dan HAM berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Instansi Pemerintah pada 5 (lima) unit eselon I yaitu Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal

Peraturan Perundang-Undangan, Badan Pembinaan Hukum Nasional, dan Pusat Pengkajian dan Pengembangan (Pusjianbang) Kebijakan.

4. Tersusunnya Draft Buku Ketatalaksanaan Kementerian Hukum dan HAM bidang administratif dan teknis pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, selanjutnya menunggu persetujuan Menteri Hukum dan HAM.
5. Tersusunnya Buku Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. Guna meningkatkan kemanfaatan substansi buku kode etik dimaksud, Sekretariat Jenderal telah melakukan program sosialisasi dan internalisasi.
6. Tersusunnya draft Dokumen Buku Cetak Biru Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang sampai saat ini masih dalam proses finalisasi substantif.



7. Tersedianya dokumen dan terlaksananya Evaluasi analisis jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Berdasarkan dokumen dimaksud, telah menghasilkan beberapa tindak lanjut kebijakan, seperti: peningkatan 9 kelas jabatan Fungsional Umum di bidang Pemasarakatan dan 6 jabatan Fungsional Umum di bidang keimigrasian. Perkembangan terakhir terhadap kebijakan ini, menunggu hasil verifikasi

dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) sebelum ditetapkan melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM.

2. Bidang Penganggaran dan Keuangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa Penganggaran harus berbasis Kinerja yang sebelumnya didahului oleh tahapan perencanaan jangka menengah, evaluasi kinerja dan penetapan indikator yang terukur serta dapat dipertanggungjawabkan. Sekretariat Jenderal sebagai unit yang memiliki peran strategis yaitu *supporting unit*, telah melakukan fasilitasi dan pendampingan terhadap kegiatan-kegiatan yang penyusunan program, kegiatan, dan anggaran antara lain:



1. Kegiatan Penajaman Prioritas Tahunan dengan menghasilkan: *Back-up* data RKA-KL Tahun Anggaran 2013 berbasis kebutuhan Satuan Kerja, Laporan Hasil Peninjauan seluruh Satuan Kerja, Dokumen Skala Prioritas Pembangunan/Rehabilitas Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2013.
2. Kegiatan Rapat Kerja Sinkronisasi Kegiatan antara Biro Kepegawaian dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan HAM. Kegiatan ini dimaksudkan menyatukan persepsi kebijakan yang terkait dengan penguatan kapasitas dan manajemen karir SDM Hukum dan HAM sehingga mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi dimasa yang akan datang.
3. Kegiatan Bimbingan Teknis Rencana Kerja dan Anggaran. Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman bagi seluruh jabatan fungsional umum penyusun program dan anggaran dalam penyusunan RKA-

KL di lingkungan Kantor Wilayah. Sedangkan bagi jabatan fungsional umum penyusun program dan anggaran Unit Eselon I diarahkan langsung berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan RI.

4. Tersusunnya dokumen Rencana Kerja (RENJA) Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2014 yang telah disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2014. Selanjutnya, dokumen ini menjadi pedoman dalam penyusunan RKA-KL pagu anggaran tahun 2014.
5. Terlaksananya kegiatan konsultasi Teknis Alokasi Anggaran. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan penyesuaian RKA-KL Pagu Anggaran sesuai dengan Surat Edaran Menteri Keuangan tentang Pagu Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga berikut penyempurnaan Usulan Kegiatan Satuan Kerja dan Rincian Anggaran Biaya. Manfaat kegiatan ini menjadi sangat penting dalam rangka pencetakan DIPA/DRA di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
6. Terlaksananya koordinasi Penyusunan Program dan RKA di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Melalui kegiatan ini diharapkan memberikan penguatan kapasitas dan masukan bagi perencanaan dan penganggaran di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Kegiatan ini menghasilkan Nota Kesepahaman antara Sekretariat Jenderal dengan unit Eselon I dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM serta perbaikan postur penganggaran di setiap satuan kerja. Hasil ini akan digunakan sebagai pedoman penyusunan RKA-KL pagu anggaran.
7. Kegiatan Validasi Data Belanja Pegawai Kementerian Hukum dan HAM. Kegiatan ini bertujuan untuk pemenuhan dan pemetaan kebutuhan riil alokasi anggaran belanja pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Agar pengalokasian anggaran Belanja Pegawai dialokasikan optimal tanpa mengurangi pertimbangan efisiensi dan efektifitas alokasi belanja pegawai.
8. Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan Penganggaran. Kegiatan ini bertujuan melakukan pembinaan dan koordinasi antara unit perencana di

pusat dan unit perencana pada satuan kerja di daerah dengan memberikan pemahaman tentang penyusunan anggaran memberikan masukan terhadap permasalahan dalam perencanaan penganggaran.

9. Penyusunan Disbursement Plan, Procurement Plan, dan kalender kerja. Kegiatan ini bertujuan menyusun Disbursement Plan, Procurement Plan, dan kalender kerja kantor wilayah dan unit eselon I Kementerian Hukum dan HAM. Dokumen ini di gunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan dan penyerapan anggaran.
10. Penerbitan Surat Edaran Sekretaris Jenderal ke seluruh Kantor Wilayah, 11 (sebelas) unit Eselon 1 dan 18 (delapan belas) Kantor Perwakilan Keimigrasian RI sebagai upaya percepatan penyerapan anggaran Kementerian Hukum dan HAM.

Prosentase Pagu anggaran selama kurun waktu tahun 2011 sampai dengan 2013 beserta realisasinya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

TAHUN ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	Prosentase (%)
2011	7.075.646.564.000	6.536.078.023.967	92,4
2012	6.953.496.410.000	6.275.553.485.373	90,25
2013	7,791,969,718,000	6,257,861,103,990	91,57

Mekanisme pelaporan penyerapan anggaran setiap tahun menjadi data dukung bagi dokumen laporan keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. Laporan ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang pengolahannya di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. Penyusunan laporan keuangan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 yang dioperasikan melalui Peraturan Menteri keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang perubahan atas PMK Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akutansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, sehingga eksistensi laporan tersusun tersebut menjadi akuntabel, dan diharapkan menjadi salah satu cerminan bagi peningkatan kinerja

keuangan yang optimal, yang pada akhirnya akan berdampak positif terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM.

Sedangkan untuk mendukung persiapan pelaksanaan anggaran dan keberhasilan fungsi penyerapan anggaran, Sekretariat Jenderal mengeluarkan langkah kebijakan sebagai berikut:



1. Penunjukkan/ Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji/ Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) melalui penerbitan :
 - a. Surat Keputusan (SK) tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2013 untuk 725 sebanyak 33 buah Surat Keputusan (SK) dan Surat Keputusan (SK) Pengelola Keuangan untuk Unit Eselon I 14 buah SK.
 - b. Surat Keputusan (SK) tentang Pengelola Keuangan Untuk Satuan Kerja (Satker) baru di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM sebanyak 15 buah SK.
 - c. Surat Edaran (SE) tentang Penertiban Penatausahaan Administrasi Keuangan untuk seluruh SATKER di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
 - d. Surat Edaran (SE) tentang Usulan Pengangkatan Pengelola Keuangan Tahun 2013 untuk seluruh Satuan Kerja (Satker) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
 - e. Disampaikannya Surat Edaran (SE). Surat Keputusan (SK) Pengelola Keuangan, Surat Keputusan (SK) revisi/ralat ke Seluruh Satuan Kerja (Satker) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

2. Selain kegiatan perencanaan dan penyerapan anggaran, telah dilaksanakan Penyelesaian Kerugian Negara di 8 (Delapan) provinsi, yaitu:

❖ Kantor Wilayah Sulawesi Utara

Adanya kerugian negara pada LAPAS Manado senilai Rp. 11.232.000,- tidak hilang, dan yang bersangkutan telah membuat Berita Acara Penyerahan Barang No.W.14.PAS.6-DL.04.01-06 pada tanggal 17 Desember 2012 bahwa Arifin Sugeha telah menyerahkan mesin chinsaw dalam keadaan baik.

❖ Kantor Wilayah Kalimantan Barat

Adanya kerugian negara pada Kantor Imigrasi Klas II Entikong senilai Rp.20.000.000,-. Telah diangsur total sebesar Rp.8.500.000,-.

❖ Kantor Wilayah Bali

Adanya kerugian negara di LP Klas II B Singaraja sebesar Rp.6.124.000,-

❖ Kantor Wilayah Aceh

• CABRUTAN Lhoknga;

Adanya laporan dari Kepolisian atas kehilangan barang/ surat berharga No.LKB/752/XII/2012 tanggal 15 Desember 2012 berupa Arsip-arsip Perkantoran, Keuangan, Administrasi dan sebuah berangkas beserta isinya sejumlah Rp.20.543.000,-.

• RUPBASAN Banda Aceh;

Adanya laporan dari kepolisian No.LKB/5584/XII/2012/SPKT tanggal 14 Desember 2012 kehilangan barang/surat berharga berupa berkas-berkas kwitansi Bukti Pembelian TA.2004 , SPM dan SP2D TA 2004, Brankas dan SPM Nihil UYHD TA 2004 milik RUPBASAN Banda Aceh.

• BAPAS Banda Aceh;

Adanya laporan dari kepolisian No.LKB/5662/XII/2012/SPKT tanggal 18 Desember 2012 berupa Anggaran Rutin sebesar Rp.4.237.000 beserta SPM dan bukti-bukti pengeluaran Asli atas nama BAPAS Klas II banda Aceh.

Kerugian Negara diatas semua diakibatkan karena terjadinya Gempa bumi dan Gelombang Tsunami oleh karena itu dianggap tidak ada unsur kelalaian, murni force majeure serta sudah melakukan proses penghapusan.

❖ Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara

Adanya kerugian negara KANWIL Sulawesi Tenggara atas penyelewengan dana sebesar Rp.17.449.000,- atas nama Natalis Supersemar, SH, yang bersangkutan telah mengganti kerugian negara tersebut dengan cara mengangsur sampai dengan September 2012 total sebesar Rp9.500.000,-.

❖ Kantor Wilayah Maluku Utara

Adanya kerugian negara pada Kantor Imigrasi Ternate sebesar Rp.476.209.240,-, telah mengangsur sampai dengan bulan Juli 2012 total sebesar Rp.19.000.000,-.

❖ Kantor Wilayah Banten

Adanya kerugian negara pada Kanim Serang akibat selisih setor PNBK sebesar Rp.53.795.000,- milik Kanim Serang, yang bersangkutan telah mengangsur mulai Mei 2012 sampai dengan November 2012 total sebesar Rp. 3.500.000,- .

3. Terinventarisirnya kasus kerugian Negara sampai dengan 31 Desember 2012 berjumlah 24 buah kasus, yang terdiri dari :
 - a. Kasus kerugian Negara Tuntutan Perbendaharaan (TP) berjumlah 4 buah kasus dengan nilai kerugian Rp. 178.753.624,- yang telah diselesaikan sebesar Rp. 34.858.012,- atau 20 %.
 - b. Kasus Kerugian Negara Tuntutan Ganti Rugi (TGR) berjumlah 20 kasus dengan nilai kerugian Rp. 1.372.321.740,- dan telah diselesaikan Rp. 346.323.059 atau 25 % dari nilai kerugian Negara.
4. Pelaksanaan Penertiban Rekening untuk memperbaiki kualitas laporan rekening, menghindari penyalahgunaan uang publik dan perbaikan yang mengarah kepada pengelolaan keuangan yang baik dan transparan sehingga

diharapkan tidak ditemukan lagi pembukaan rekening tanpa melalui mekanisme yang telah ditentukan.

5. Sosialisasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI) bertujuan untuk Meningkatkan kemampuan dan keterampilan SDM dibidang akuntansi pelaporan dalam menunjang proses penyusunan dan pembuatan laporan



Sosialisasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI) bertujuan untuk Meningkatkan kemampuan dan keterampilan SDM dibidang akuntansi pelaporan dalam menunjang proses penyusunan dan pembuatan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan atas Laporan

Keuangan (CaLK) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

6. terselesaikannya tunggakan dan kekurangan pembayaran Bahan makanan (Bama) di Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pemasarakatan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
7. Terlaksananya kegiatan revisi/buka blokir pada 7 (tujuh) DIPA Kanwil dari total 15 (lima belas) Kanwil yang mengalami pemblokiran anggaran.
8. Terlaksananya kegiatan Konsultasi teknis pembukaan tanda blokir dengan pejabat berwenang Direktorat Jenderal Anggaran menyangkut tata cara dan pelaksanaan pembukaan blokir. Hasil yang dicapai dari kegiatan dimaksud yaitu menurunkan nilai anggaran blokir dari Rp.330.245.838.000,- menjadi Rp.30.364.630.000,.
9. Rekonsiliasi Laporan Keuangan. Kegiatan ini menjadi penting dalam rangka menyamakan hasil langkah awal dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Adapun fokus yang diharapkan yaitu tersusunnya laporan yang akurat, transparan dan akuntabel dengan tujuan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM.

10. Tercapainya target Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 2,178 Triliun yang diperoleh atas Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
11. Terbayarnya tunjangan kinerja pegawai secara tepat waktu di lingkungan Sekretariat Jenderal setiap bulan.

3. Bidang Kepegawaian

Sumber Daya Manusia yang handal dan profesional merupakan penggerak suatu organisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, dalam bidang kepegawaian mengalami perubahan yang cukup progressif menuju akuntabilitas kinerja



sehingga dapat memberikan pelayanan prima terkait bidang kepegawaian. Adapun capaian yang dimaksud antara lain :

1. Kegiatan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang Transparan, akuntabel dan dapat di pertanggung jawabkan.
yang menghasilkan :
 - a. Formasi Tahun 2013 Sebanyak 1.086 Formasi .

- b. Jumlah Pendaftar Online Sebanyak 112.129 Pelamar
 - c. Berkas Lamaran Yang Masuk Sebanyak 41.212 Berkas
 - d. Jumlah Pelamar Yang Lulus Verifikasi Dokumen Asli Sebanyak 12.043 Pelamar.
 - e. Tes Kesehatan Dan Kesamaptan Diikuti Oleh 12.043 Pelamar.
2. Pelaksanaan Promosi dan Mutasi pegawai secara transparan

JENIS	JUMLAH
Kenaikan Pangkat Reguler, Pilihan Dan Penyesuaian Ijazah April Dan Oktober	5769 SK KENAIKAN PANGKAT
Seleksi Dirjen Pemasyaratan	1 JABATAN
Seleksi Inspektur Jenderal	1 JABATAN

3. Penerapan Hukuman Disiplin

JENIS PELANGGARAN YANG TELAH DITERBITKAN SK	JUMLAH
Hukuman Disiplin berdasarkan PP Nomor 53 Tahun 2010	5 SK
Penindakan Administratif berdasarkan PP Nomor 32 Tahun 1979	128 SK
Penindakan Administratif kepada CPNS berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2002	22 SK
Pemberhentian Sementara dan Pencabutannya berdasarkan PP Nomor 4 Tahun 1966	2 SK

4. Terbangunnya Sistem Informasi Kepegawaian berbasis Web (terhubung di 33 kanwil & II Unit Utama) yang terintegrasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
5. Melaksanakan kegiatan penyempurnaan Pola Karier Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor. 35 Tahun 2011 yang berlandaskan pada 3 prinsip yaitu:
- a) Kepastian
Memberikan kepastiaan pada arah alur karier setiap PNS di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
 - b) Profesionalisme
Mendorong penempatan Pegawai sesuai dengan kompetensi (*The Best People In The Right Place*).
 - c) Transparan

Memberikan kesempatan kepada PNS yang memenuhi syarat dan kriteria untuk menduduki sebuah jabatan.



6. Kegiatan Penyusunan Peta Jabatan dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Penyusunan Peta Jabatan ini diharapkan memberikan gambaran Komprehensif dan terukur terkait kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) dikaitkan dengan kebutuhan Kompetensi pada seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

- 7. Kegiatan penyusunan buku pedoman Standar Kompetensi Jabatan di Kementerian Hukum dan HAM
- 8. Dengan terlaksananya serta tersusunnya peta jabatan, Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi dan ketersediaan buku pedoman standard kompetensi jabatan dengan Diklat dalam Pengembangan Pegawai

JENIS	JUMLAH
DIKLAT PRAJAB GOL II DAN III	594
DIKLAT KEPEMIMPINAN REFORMASI BIROKRASI	3
DIKLAT KEPEMIMPINAN TK. I, II, III DAN IV	389
PEMBERIAN PIAGAM PURNA PENGAYOMAN	835

4. Bidang Kehumasan

Pelaksanaan tugas Sekretariat Jenderal selaku koordinator dalam mengimplementasi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, telah menghasilkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tersosialisasikan dan diterbitkannya buku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2013 sebanyak 2.000 eks.
- b. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan Undang-Undang



Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di kantor wilayah melalui penyebaran kuisioner.

- c. Terbentuknya tim pengelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di 11 Unit Utama Eselon I dan 33 Kantor Wilayah.
- d. Diterbitkannya Majalah Hukum dan HAM sebanyak 12.000 eksemplar setiap tahun.
- e. Dilaksanakannya *updating* data *website* setiap hari.
- f. Pembuatan klipng koran dan majalah sebanyak 264 (dua ratus enam puluh empat) eksemplar tahun 2013.
- g. Peliputan kegiatan Menteri Hukum dan HAM selama tahun anggaran 2011-2013.
- h. Tersusunnya Draft Keputusan Menteri Hukum dan HAM terkait Satuan Tugas pelaksana Kerjasama luar Negeri.
- i. Tersusunnya Draft Keputusan Menteri Hukum dan HAM terkait Pedoman Umum pelaksana Kerjasama luar Negeri.

Selain pelaksanaan implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Jenderal juga memfasilitasi kegiatan lainnya:



1. Kerjasama Dalam Negeri
 - a. Terjalannya hubungan dengan Organisasi Masyarakat melalui kegiatan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat
 - b. Pelaksanaan kunjungan kerja dengan Komisi III sebanyak : 6 Kantor Wilayah
 - c. Pendampingan pembahasan draft Rancangan Undang-Undang.
2. Kerjasama Luar Negeri
 - a. Kerjasama Antar Negara dan Badan-Badan Internasional yaitu :
 - MoU / MLA, 11 negara;
 - Negara yang berkunjung ke Kemenkumham sebanyak 8 negara; Badan Internasional sebanyak 14 badan internasional.
 - b. Pendampingan dalam pelaksanaan ekstradisi atas nama:
 - Thomas Toman warga negara Cekoslovakia.
 - Antonino Vitale warga negara Italia.

Guna mendukung Penegakan Hukum di lingkungan ataupun yang menjadi tanggungjawab Kementerian Hukum dan HAM, Sekretariat Jenderal telah menghasilkan antara lain :

 1. Diterbitkannya buku Wilayah Bebas Korupsi sebanyak 1000 eksemplar dan telah distribusikan keseluruh satuan kerja dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM
 2. Berpartisipasi dalam penegakan hukum, dengan melaksanakan Legal Expo selama 3 tahun, bertempat di Jakarta; Yogyakarta; dan Jakarta . Kegiatan tersebut diikuti oleh Instansi terkait bidang hukum seperti Komisi Pemberantas Korupsi, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Ombudsman, Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan lain-lain.
 3. Memfasilitasi Kesekretariatan Majelis Pengawas Pusat Notaris dalam rangka penegakan Kode Etik Notaris.
 4. Penanganan banding Notaris, sebanyak 7 kasus.
 5. Rekomendasi perpanjangan masa jabatan notaris sebanyak 35 orang.
 6. Pindah wilayah kerja notaris, sebanyak 120.

7. Cuti notaris diatas 1 Tahun, sebanyak 3 orang.

5. Bidang Perlengkapan dan Umum

Salah satu tugas strategis yang diemban Sekretariat Jenderal ialah melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan perlengkapan Kementerian Hukum dan HAM. Kebijakan Strategis yang dilakukan dalam rangka mempertahankan status laporan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN), serta mewujudkan kepatuhan dan ketertiban dalam melakukan pencatatan dan pelaporan Barang Milik Negara (BMN) sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sekretariat Jenderal saat ini menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk mewujudkan proses lelang transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.
2. Kegiatan Bimbingan Teknis Pembinaan Pengelolaan Perlengkapan yaitu dalam bentuk sosialisasi/penyuluhan/pelatihan administrasi perlengkapan pada Kantor Wilayah dengan memanggil pejabat/petugas pengelola perlengkapan dari setiap unit kerja yang ada dalam jajarannya dengan jumlah peserta rata-rata 40 (lima puluh lima) orang untuk setiap Kantor Wilayah.
3. Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Perlengkapan dan Pemantauan Pemanfaatan Aset telah dilaksanakan pada 10 Kantor Wilayah;
4. Kegiatan pemetaan Barang Milik Negara (BMN) dilaksanakan di 9 (sembilan) Kantor Wilayah yaitu ; Jawa Timur, Papua, Maluku, Maluku Utara, Kepri, NTT, Bali, Sulawesi Tenggara dan Sumatera Barat.



5. Kegiatan Monitoring Percepatan Sertifikat Tanah telah dilaksanakan di 11 Kanwil, yaitu : Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Barat, Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, Maluku, Jawa Tengah, Lampung, Sumatera Utara, Kalimantan Barat dan Sulawesi Utara, dan Kegiatan Percepatan Sertifikat Tanah. Dari kegiatan ini ada peningkatan jumlah tanah yang sudah mempunyai dokumen kepemilikan berupa surat sertifikat tanah seluas 69,159,982 M² (24,38%) dari jumlah tanah seluruhnya 283,672,026 M² dan tanah yang belum bersertifikat seluas 214,512,044 M² (75,62%).
6. Kegiatan Pemutakhiran dan rekonsiliasi data Barang Milik Negara (BMN) ini diikuti oleh Unit Penatausahaan Pengguna Barang Wilayah (UPPBW) sejumlah 33 Kantor Wilayah dan Unit Penatausahaan Pengguna barang Eselon I dan Pusat sejumlah 14 Satker dan 33 Kantor Wilayah dan 14 Satker yang berada di unit pusat.



7. Kegiatan sanggahan banding dalam pelaksanaan pengadaan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI yang terdapat proses barang/jasa, ini telah diselesaikan proses sanggahan banding pada Kanwil Sulsel, Jambi dan Aceh dan telah dihasilkan 47 Berita Acara Rekonsiliasi (BAR).

8. Kegiatan Sosialisasi Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dilaksanakan di 9 (Sembilan) Kantor Wilayah sebagai berikut : Kanwil Sumsel, Kalbar, Kepri, DI Yogyakarta, Sulsel, Bengkulu, NTB, Sumbar dan Papua Barat dan pada tahun 2012 dilaksanakan 10 Kantor Wilayah yaitu; Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan Bali.

Kegiatan lainnya pun telah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan tertib pelaporan, yaitu:

1. Penyempurnaan pedoman penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) tersebut dilanjutkan dengan pencetakan buku sebanyak 1000 buah telah didistribusikan di seluruh satuan kerja Kementerian Hukum dan HAM .
2. Sosialisasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan SIMAK BMN, yang dilakukan terhadap 123 calon petugas penatausahaan BMN pada 8 (delapan) Kantor Wilayah.
3. Kegiatan penetapan status Barang Milik Negara (BMN) telah dilakukan di 5 (lima) Kantor Wilayah yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Timur, Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat.
4. Kegiatan uji kelayakan pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) telah dilakukan monitoring di 7 (tujuh) Kantor Wilayah yaitu Jawa Tengah, Jambi, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Jawa Timur, Sumatera Barat dan Nanggroe Aceh Darussalam.
5. Kegiatan Percepatan Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa ini dilaksanakan dalam rangka mempersiapkan tenaga ahli pengadaan barang dan



jasa yang profesional dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI. Peserta kegiatan ini 10 Kantor Wilayah yaitu; Kalimantan Selatan, Riau, Sumatera Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Bali dan Sulawesi Barat.

6. Bidang Data dan Teknologi Informasi

Peran Sekretariat Jenderal dalam penyampaian data, laporan dan informasi sangat strategis yaitu melakukan fungsi koordinasi dibidang manajemen data dan informasi, beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :

1. Tersusunnya Profil Kementerian Hukum dan HAM, yang didalamnya



menyajikan foto pejabat, jumlah pegawai berdasarkan gender, struktur organisasi dan tugas pokok dan fungsi masing-masing Direktorat Eselon I dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Output yang dihasilkan adalah Profil Kementerian yang telah diunggah dalam website www.kemenkumham.go.id.

2. Koordinasi Dan Penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dengan output Lakip Unit Eselon 1 lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
3. Koordinasi Forum Data Gender dalam rangka penyusunan program/kegiatan yang responsif gender, pembekalan materi serta perumusan ruang lingkup kegiatan yang difokuskan dalam bentuk sosialisasi dan pembekalan materi

bagi para pejabat eselon III dan IV dengan output data terpilah gender Unit Eselon 1.

4. Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Bidang Hukum di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang kegiatannya berupa Penyusunan Data Terpilah Gender dan Implementasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Kementerian Hukum dan HAM dengan membentuk Pokja Pengarusutamaan Gender yang beranggotakan pejabat eselon IV unit eselon I termasuk biro/pusat sebagai komponen perencana.
5. Koordinator dalam pelaporan kepada Presiden terkait Implementasi Inpres I/2013, Prioritas Nasional 13, Inpres 6/2013, dan TEPPA yang mekanismenya secara online melalui aplikasi Monitoring dan Evaluasi UKP4.



6. Kegiatan pengadaan barang/jasa dilaksanakan melalui Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (SPSE) melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (*e-procurement*).
7. Elektronisasi Dokumentasi/ Kearsipan (*E-Archive*) dalam tahapan pelaksanaan dan pengembangan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.
8. Pengelolaan dan Pendayagunaan Telematika (IT Steering Commite).

9. Pengelolaan Website Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Tersajinya content atau informasi yang lebih baik dari Biro, Unit Pusat dan Kantor Wilayah pada jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - b. Meningkatnya tanggung jawab para *Approver* dan *Operator Content Management System* dalam pengelolaan informasi;
 - c. Ragam informasi yang ditampilkan dari Biro, Unit Pusat dan Kantor Wilayah di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 - d. Adanya kesadaran pentingnya informasi oleh para *Approver* dan *Operator Content Management System* di Biro, Unit Pusat maupun Kantor Wilayah.
10. Kegiatan Penetrasi Keamanan Jaringan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
11. Implementasi Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE).



12. Penguatan Database Pegawai melalui Sistem Pegawai (SIMPEG).
13. Penggunaan aplikasi Simak Barang Milik Negara (BMN) dalam melakukan penatausahaan BMN.

7. Bidang Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan

Bidang Pengkajian dan Pengembangan mempunyai tugas



melaksanakan penelitian, pengkajian, analisa dan pengembangan kebijakan, perumusan rekomendasi kebijakan serta pengelolaan urusan perpustakaan, dokumentasi dan informasi. Capaian yang telah dihasilkan antara lain :

1. Menyiapkan judul permasalahan penelitian yang dituangkan dalam bentuk proposal. Adapun jumlah judul penelitian tahun 2013 yang diteliti dan dianalisa adalah sebagai berikut :
 - a. Bidang Pemasyarakatan = 1 judul
 - b. Bidang Administrasi = 4 judul
 - c. Bidang Keimigrasian = - judul
 - d. Bidang Pelayanan Hukum = 1 judul
 - e. Bidang HKI = - judul
2. Menyiapkan judul permasalahan pengkajian yang dituangkan dalam bentuk proposal. Adapun jumlah judul pengkajian tahun 2013 yang dikaji dan dianalisa adalah sebagai berikut :
 - a. Bidang Pemasyarakatan = - judul

- b. Bidang Administrasi = - judul
- c. Bidang Keimigrasian = 2 judul
- d. Bidang Pelayanan Hukum = 2 judul
- e. Bidang HKI = 1 judul

Termasuk 1 kajian luar negeri bidang imigrasi.

3. Menyiapkan Proposal sebagai bahan penyelenggaraan seminar.
4. Melakukan Perumusan Masalah yang meliputi :
 - a. Bidang Pemasyarakatan
 - b. Bidang Administrasi
 - c. Bidang Keimigrasian
 - d. Bidang Pelayanan Hukum
 - e. Bidang HKI
5. Melakukan penyiapan bahan pengembangan melalui kegiatan diskusi, diseminasi, seminar dan sosialisasi hasil penelitian dan pengkajian kebijakan serta perumusan atas hasil pengembangan kebijakan guna dijadikan rekomendasi kepada Pimpinan Kementerian. Pelaksanaan tugas subbidang pengembangan dan rekomendasi kebijakan antara lain:
 - a. Menyiapkan bahan pengembangan melalui kegiatan diskusi dan seminar atas hasil pengkajian kebijakan serta perumusan atas hasil pengembangan kebijakan guna dijadikan rekomendasi kepada pimpinan Kementerian. Adapun judul yang diangkat dalam kegiatan seminar tahun 2013 adalah :” **Peran Balai Pemasyarakatan Dalam Penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum pasca berlakunya UU Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak**”.
 - b. Menyiapkan bahan Sosialisasi baik dari hasil sementara penelitian maupun dari hasil pengkajian melalui seminar terhadap judul-judul penelitian yang telah dilakukan. Adapun judul yang di sosialisasikan pada tahun 2013 adalah : “Evaluasi

Kualitas Pelayanan Publik pada Unit Pelayananan Kementerian Hukum dan HAM RI, yang diselenggarakan pada:

- 1) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali;
- 2) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat;
- 3) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara;
- 4) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat.

6. Melakukan pengumpulan atas hasil pengkajian dan pengembangan kebijakan serta pengelolaan dokumentasi dan perpustakaan guna mendukung kegiatan pengkajian dan pengembangan. Kegiatan



Subbidang Dokumentasi dan Perpustakaan meliputi :

- a. Menghimpun laporan hasil penelitian dan pengkajian tahun 2012 dan mendistribusikan kepada instansi terkait dengan topik penelitian di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
- b. Mencatat laporan hasil penelitian, pengkajian dan pengembangan tahun 2012 ke dalam daftar kepustakaan, memberi kode dan menyimpan sebagai dokumen;

- c. Mencatat, memberi kode dan menyimpan buku-buku dan majalah yang dikirim dari Unit Eselon I Kementerian Hukum dan HAM;
 - d. Membeli buku-buku ilmiah untuk perpustakaan PUSJIANBANG. Sebanyak 57 buku ditambah hadiah 293 buku dari unit-unit Kementerian Hukum dan HAM RI, sehingga total Pembelian dan Hadiah buku-buku tahun 2013 sebanyak 350 buku.
7. Kelompok Jabatan Fungsional Peneliti mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jabatan yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinir oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugasnya kelompok jabatan fungsional bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan.

Pejabat Fungsional Peneliti yang bersertifikasi di PUSJIANBANG Kebijakan saat ini berjumlah 9 orang dan 2 orang calon peneliti yang masih dalam proses penetapan kepegawaian, namun pembagian kelompok dan penunjukkan koordinator belum berjalan, dan untuk sementara masing dibawah kendali Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan. Adapun tugas Pejabat Fungsional Peneliti adalah :

- a. Melakukan penelitian sesuai dengan program yang telah ditetapkan serta menyusun laporan akhir penelitian dan pengembangan sesuai dengan topik yang diteliti;
- b. Mengikuti seminar-seminar hukum baik yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM maupun Instansi di luar Kementerian Hukum dan HAM;

- c. Menerbitkan Jurnal PUSJIANBANG.

Konsinyering Bidang Pelayanan Hukum



Konsinyering Bidang Administrasi Fasilitatif



Konsinyering Bidang Pemasyarakatan



8. Penilaian dan Penghargaan

Sebagai *unit supporting*, Sekretariat Jenderal senantiasa memegang teguh amanah Peraturan Menteri Hukum dan HAM. Selalu berkomitmen untuk mendukung sepenuhnya keberhasilan kinerja Kementerian Hukum dan HAM secara menyeluruh.

Adanya komitmen yang kuat dan disertai dengan usaha kerja keras yang cerdas, maka beberapa penilaian dan penghargaan atas pekerjaan-pekerjaan yang dikoordinasikan dan difasilitasi oleh Sekretariat Jenderal dapat diapresiasi oleh pihak eksternal.

Penilaian dan penghargaan tersebut antara lain :

NO	URAIAN	CAPAIAN		
		Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013
1.	Penilaian LAKIP	65,02 (B)	66,03 (B)	68,79 (B)
2.	Laporan Keuangan	WTP	WTP	WDP
3.	Pelaksanaan Anggaran	Reward sejumlah Rp.3.973.719.000,-	Reward sejumlah Rp.	. Belum diumumkan
4.	Penilaian Inisiatif Anti Korupsi	5,70	6,59	
5.	Indeks Integritas Penilaian KPK terhadap Pelayanan Publik Instansi Vertikal	-	Peringkat 1 dengan nilai 6,57	
6.	Perencanaan & Penganggaran Responsif Gender / PUG	Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya tingkat Pratama dari Presiden	Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya tingkat Madya dari Presiden	-
7.	Pengelolaan BMN	-	Peringkat ke III Kepatuhan Pelaporan Barang Milik Negara	
8.	Rekonsiliasi HIBAH	-	Peringkat I Penyampaian Rekonsiliasi HIBAH	
9.	Penilaian Terbaik dalam Penggunaan Anggaran	-	-	Masuk di posisi Keempat dari seluruh K/L
10.	Kepatuhan Pelaporan Barang Milik Negara	-	-	Peringkat Ketiga
11.	Open Government Indonesia	-	Nominasi 20 Besar dari Seluruh K/L "Implementasi SPSE"	-
12.	Penilaian PNPRB Online Sekretariat Jenderal	-	-	Mendapatkan nilai 8 (baik)

B. Bidang Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah mengamanatkan bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup

tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan mengemban amanah Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 mulai dari penyusunan, pembahasan, dan pengundangan.

Dari aktivitas penyusunan, telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan dengan hasil :

1. Menyelesaikan penyusunan 5 (lima) RUU yang menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan HAM adapun RUU tersebut adalah :

NO	JUDUL	KETERANGAN
1.	Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha di Luar Perseroan Terbatas dan Koperasi	Telah disusun dengan catatan perlu disempurnakan dari segi tehnik penyusunan peraturan perundang-undangan
2.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi	Telah disusun dengan catatan menunggu keputusan mengenai otoritas pusat pada tingkat Menteri
3.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana	Selesai disusun dengan catatan menunggu keputusan mengenai otoritas pusat yang akan diputuskan rapat tingkat Menteri
4.	Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata	Telah disusun dengan catatan perlu disempurnakan dari segi substansi dan tehnik penyusunan peraturan perundang-undangan
5.	Rancangan Undang-Undang tentang Balai Harta Peninggalan	Selesai disusun

Dalam rangka penyelesaian penyusunan 5 (lima) RUU tersebut terdapat kegiatan yang dilakukan Subdit Perencanaan dan Perancangan Rancangan Undang-Undang, yaitu:

- a) Menentukan 5 (lima) Judul RUU yang akan disusun pada Tahun 2013 berdasarkan Prolegnas RUU Jangka Menengah Tahun 2010-2014;
- b) Menyusun 5 (lima) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pembentukan Panitia Antarkementerian Penyusunan Rancangan Undang-Undang;
- c) Menyiapkan dan menelaah 5 (lima) rancangan undang-undang yang akan disusun Panitia Antarkementerian Penyusunan RUU; dan
- d) Melaksanakan Rapat Penyusunan 5 (lima) Rancangan Undang-Undang.

2. Menyempurnakan 2 (dua) RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2013 yang menjadi Prakarsa Kementerian Hukum dan HAM beserta Naskah Akademik dan menyampaikan 2 (dua) RUU tersebut kepada Presiden.

NO	JUDUL	KETERANGAN
1.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	<ul style="list-style-type: none"> - telah disampaikan dari Menteri Hukum dan HAM kepada Presiden dengan surat Nomor M.HH.PP.02.03-19 tanggal 17 Mei 2013 perihal Penyampaian RUU tentang Perubahan UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan disampaikan kembali dengan surat Nomor M.HH.PP.02.03-35 tanggal 10 September 2013 perihal Penyampaian Kembali RUU tentang Perubahan UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. - Perkembangan terakhir paraf Kementerian terkait.
2.	Rancangan Undang-Undang tentang Hak Cipta	<ul style="list-style-type: none"> - telah disampaikan dari Menteri Hukum dan HAM kepada Presiden dengan surat Nomor M.HH.PP.02.03-38 tanggal 19 September 2013 perihal Penyampaian RUU tentang Hak Cipta.

3. Menyampaikan 3 (tiga) RUU Pengesahan beserta Naskah Akademik dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada Menteri Luar Negeri:

NO	JUDUL	KETERANGAN
1.	RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik India tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (<i>Treaty between the Republic of Indonesia and the Republic of India on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - telah disampaikan dari Menteri Hukum dan HAM kepada Menteri Luar Negeri surat Nomor M.HH.PP.02.03-19 tanggal 17 Mei 2013 perihal Penyampaian RUU tentang Perubahan UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan disampaikan kembali dengan surat Nomor M.HH.PP.02.03-24 tanggal 25 Juni 2013
2.	RUU tentang Pengesahan Perjanjian Ektradisi antara Republik Indonesia dan Republik India (<i>Extradition Treaty between the Republic of Indonesia and the Republic of India</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - telah disampaikan dari Menteri Hukum dan HAM kepada Menteri Luar Negeri surat Nomor M.HH.PP.02.03-19 tanggal 17 Mei 2013 perihal Penyampaian RUU tentang Perubahan UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan disampaikan kembali dengan surat Nomor M.HH.PP.02.03-24 tanggal 25 Juni 2013
3.	RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Korea tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (<i>Treaty between the Republic of Indonesia and the Republic of Korea on</i>	<ul style="list-style-type: none"> - telah disampaikan dari Menteri Hukum dan HAM kepada Menteri Luar Negeri surat Nomor M.HH.PP.02.03-19 tanggal 17 Mei 2013 perihal Penyampaian RUU tentang Perubahan UU Nomor 13

	<i>Mutual Legal Assistance in Criminal Matters)</i>	Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan disampaikan kembali dengan surat Nomor M.HH.PP.02.03-24 tanggal 25 Juni 2013
--	---	---

4. Melakukan Penyusunan RPP, RPerpres, dan Rpermen
- a) Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah
 - b) Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Permohonan Paten
 - c) Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Proses Diversi dan Koordinasi Pelaksanaan Diversi
 - d) Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Register Perkara Anak
 - e) Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana Bagi Anak serta Tindakan yang Dapat Dikenakan kepada Anak
 - f) Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rancangan Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan Tugas Otoritas Pusat Republik Indonesia dalam Kerjasama Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana
 - g) Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Jabatan Struktural yang Dapat Dirangkap oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan
 - h) Data yang disampaikan dalam Laporan Akhir kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, melakukan kegiatan Penyusunan dan Penyelarasan Rancangan Peraturan Menteri di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai berikut:
 - Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM;
 - Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pendelegasian Penandatanganan Sertifikat Jaminan Fidusia ;

- Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pemberlakuan Sistem Jaminan Fidusia Online pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik;
- Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping di Lembaga Masyarakat;
- Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Tertib Lembaga Masyarakat /Rumah Tahanan Negara dan penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Narapidana/Tahanan;
- Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penyerahan dan Pengelolaan Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja kepada Balai Harta Peninggalan;
- Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Program Aksi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2013;
- Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Assesment Risiko dan Assesment Kebutuhan bagi Narapidana dan Klien Masyarakat;
- Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01-HT.05.10 Tahun 2005 tentang Pendaftaran Kurator dan Pengurus;
- Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang keimigrasian
- Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.KP.7.05 Tahun 2009 tentang Perubahan Pemberian Penghargaan;
- Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Penangkatan Anggota, Pemberhentian

Anggota, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Majelis Pengawas Notaris;

- Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Spesifikasi Teknis Pengaman Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;
- Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Keimigrasian;
- Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Kelola Kehumasan;
- Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Klasifikasi Informasi Publik di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan;
- Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang PLT dan PLH;
- Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Komunikasi Masyarakat Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2011-2014;
- Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif dan Substantif, dan Prosedur Penyusutan Arsip di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02-HT.05.10 Tahun 2005 tentang Permohonan Ijin Pelaksanaan Penjualan Harta Kekayaan yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak Hadir dan Harta Peninggalan

Yang Tidak Terurus Yang Berada Dalam Pengurusan dan Pengawasan Balai Harta Peninggalan;

- Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin dan penindakan administratif di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang mengatur substansi mengenai:
 - Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Badan Pertimbangan Hukuman Disiplin; dan
 - Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pejabat yang berwenang Membentuk Tim Pemeriksa dan Menetapkan Penjatuhan Hukuman Disiplin di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Standar Bantuan Hukum;
- Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Managemen Penanggulangan Kebakaran;
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM;
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan;
- Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penunjukan PLT PLH di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
- Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, pembatalan Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap;
- Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pedoman Sertifikasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-

- undangan dan Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan;
- Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Alih Status Keimigrasian;
 - Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Anggaran Responsive Gender;
 - Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2013 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 31 Tahun 2013 tentang Cap Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 - Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Rupbasan;
 - Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;
 - Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Pengelolaan Data Elektronik di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
 - Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Juknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer;
 - Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang tata Kelola dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 - Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Pengendalian Gratifikasi di Kementerian Hukum dan HAM;
- i) Penyelarasan dan tanggapan terhadap Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*)

- Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan PT. BNI (Persero) Tbk. tentang Penyediaan Jasa Layanan Perbankan.
 - Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Ombudsman Republik Indonesia tentang Kerja Sama Pengawasan dan Peningkatan Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- j) Pembahasan RUU
- Melakukan pembahasan RUU sebagai berikut :
- Rancangan Undang-Undang tentang Kepalaangmerahan
 - Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana
 - RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
 - RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - RUU tentang Mahkamah Agung;
 - RUU tentang Pertanahan
- k) Outomasi perpustakaan melalui aplikasi *Senayan Library Management System*
- Untuk terlaksananya aplikasi baru dimaksud telah dikonversi data sebanyak 3.803 (tiga ribu delapan ratus tiga) buah yang telah dapat dilihat pada bagian daftar koleksi aplikasi.

Untuk mempertahankan bahkan untuk meningkatkan hasil yang lebih signifikan penyelesaian harmonisasi RPUU yang cepat dan berkualitas agar tidak terjadi lagi penumpukan RPUU di Kementerian Hukum dan HAM, diperlukan langkah strategis berupa pemecahan masalah yang bersifat

mendasar atau *Fundamental Solution*. Pelaksanaan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RPUU yang diajukan oleh kementerian/lembaga, lembaga lainnya, dan termasuk dari internal Kementerian Hukum dan HAM sendiri adalah sebagai tahap akhir sebelum RUU inisiatif Pemerintah disetujui oleh Presiden untuk disampaikan kepada DPR atau sebelum RPP dan Raperpres ditetapkan oleh Presiden menjadi PP dan Perpres.

Oleh karena itu, posisi atau tahap pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RPUU merupakan tahap paling strategis dan mendapatkan perhatian yang serius dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Banyaknya RPUU yang harus diharmonisasi setiap tahun dan untuk mengantisipasi pelaksanaan program penyusunan RPP dan Raperpres.

Selain perancangan dan pengharmonisasian, tugas untuk pengundangan, publikasi, dan kerja sama peraturan perundang-undangan juga diemban oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Beberapa aktivitas yang dilakukan sepanjang tahun 2013 sebagai berikut :

a. Pengundangan dan Pendokumentasian peraturan perundang-undangan

Selama periode 2 Januari sampai dengan 31 Desember 2013, hasil rekapitulasi pengundangan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

	Lembaran Negara	Tambahan Lembaran Negara	Berita Negara	Tambahan Berita Negara
Triwulan I	54	21	475	-
Triwulan II	56	21	404	1
Triwulan III	44	20	295	2
Triwulan IV	105	41	477	-
JUMLAH	259	103	1.651	3

b. Klasifikasi Peraturan Perundang-undangan

Menginfentarisir dan menyusun perkembangan peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara dan Berita Negara tahun 2013 dengan rincian sebagai berikut:

LEMBARAN NEGARA		
No.	Jenis Peraturan	Jumlah
1	Undang-Undang	24
2	PERPU	
3	Peraturan Pemerintah	79
4	Peraturan Presiden	36
5	Peraturan Bank Indonesia	27
6	Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan	3
	JUMLAH	169

BERITA NEGARA

A. PERATURAN KEMENTERIAN

No.	Jenis Peraturan	Jumlah
1	Peraturan Menteri Pertahanan	31
2	Peraturan Menteri Perindustrian	30
3	Peraturan Menteri Agama	22
4	Peraturan Menteri Kehutanan	68
5	Peraturan Menteri Hukum dan HAM	29
6	Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat	24
7	Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	11
8	Peraturan Menteri ESDM	20
9	Peraturan Menteri Pertanian	26
10	Peraturan Menteri Keuangan	253
11	Peraturan Menteri Sosial	15
12	Peraturan Menteri Dalam Negeri	64
13	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan	20
14	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup	15
15	Peraturan Menteri Luar Negeri	8
16	Peraturan Menteri Perdagangan	23
17	Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi	20
18	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan	26
19	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum	19
20	Peraturan Menteri Perhubungan	21
21	Peraturan Menteri Riset & Teknologi	4
22	Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	7
23	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika	10
24	Peraturan Menteri Kesehatan	54
25	Peraturan Sekretariat Negara	1
26	Peraturan Menteri Negara Perencanaan Dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas	3
	JUMLAH	824

B. PERATURAN LEMBAGA/NON KEMENTERIAN

No.	Jenis Peraturan	Jumlah
1	Peraturan KAPOLRI	27
2	Peraturan Kepala Sandi Negara	4
3	Peraturan Kepala LPSK	3

4	Peraturan Kepala PPAK	4
5	Peraturan Kepala BKPM	11
6	Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional	6
7	Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional	3
8	Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan RI	5
11	Peraturan Ombudsman Republik Indonesia	2
13	Peraturan Komisi Nasional HAM	1
14	Peraturan Kepala BMKG	9
15	Peraturan Komisi Pemilihan Umum	6
16	Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan	16
17	Peraturan Badan Tenaga Nuklir Nasional	2
18	Peraturan Lembaga Administrasi Negara	10
19	Peraturan Lembaga Penjaminan Simpanan	2
20	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum	4
21	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	10
22	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	4
	JUMLAH	129

C. PERATURAN BERSAMA

1	Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan	1
2	Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri ESDM	1
3	Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama	1
4	Peraturan Bersama Mendikbud, Menegpan, & RB, Mendagri, Menkeu, Dan Menag	1
5	Peraturan Bersama Bareskrim, Kejaksaan, Mahkamah Agung, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia	1
6	Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Badan Narkotika Nasional	1
	JUMLAH	6

- c. Membuat daftar singkatan dan akronim Lembaga Tinggi Negara, Kementerian dan Lembaga/Komisi yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 sebagai berikut:

DAFTAR SINGKATAN/AKRONIM KEMENTERIAN/LEMBAGA		
KEMENTERIAN		
1	Kementerian Pertahanan	KEMENHAN
2	Kementerian Perindustrian	KEMENPERIN
3	Kementerian Agama	KEMENAG
4	Kementerian Kehutanan	KEMENHUT
5	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	KEMENKUMHAM
6	Kementerian Negara Perumahan Rakyat	KEMENPERA
7	Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	KEMEN PP-PA
8	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	KEMEN ESDM
9	Kementerian Pertanian	KEMENTAN

10	Kementerian Keuangan	KEMENKEU
11	Kementerian Sosial	KEMENSOS
12	Kementerian Dalam Negeri	KEMENDAGRI
13	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	KEMENDIKBUD
14	Kementerian Lingkungan Hidup	KEMEN LH
15	Kementerian Luar Negeri	KEMENLU
16	Kementerian Perdagangan	KEMENDAG
17	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	KEMENAKERTRANS
18	Kementerian Kelautan dan Perikanan	KEMEN KP
19	Kementerian Pekerjaan Umum	KEMEN PU
20	Kementerian Perhubungan	KEMENHUB
21	Kementerian Riset dan Teknologi	KEMENRISTEK
22	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	KEMEN KUKM
23	Kementerian Komunikasi dan Informatika	KEMENKOMINFO
24	Kementerian Kesehatan	KEMENKES
25	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	KEMENPAN RB
26	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	KEMENPAREKRAF
27	Sekretariat Negara	KEMENSETNEG
28	Sekretariat Kabinet	SETKAB
29	Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat	KEMENKO KESRA
30	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	KEMEN BUMN
31	Kementerian Pemuda dan Olah Raga	KEMENPORA
32	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	KEMEN PDT
33	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	KEMEN BUMN
34	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	KEMENKO PEREKONOMIAN
35	Kementerian Negara Perencanaan Dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	BAPPENAS
LEMBAGA		
1	Dewan Perwakilan Rakyat	DPR
2	Mahkamah Agung	MA
3	Badan Pemeriksa Keuangan	BPK
4	Otoritas Jasa Keuangan	OJK
5	Bank Indonesia	BI
6	Kepolisian Republik Indonesia	POLRI
7	Jaksa Agung Republik Indonesia	KEJAGUNG RI
8	Konsil Kedokteran Indonesia	KKI
9	Lembaga Sandi Negara	LEMSANEG
10	Arsip Nasional Republik Indonesia	ANRI
11	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	LPSK
12	Pusat Pelaporan Dana Analisa Transaksi Keuangan	PPATK
13	Badan Koordinasi Penanaman Modal	BKPM
14	Badan Narkotika Nasional	BNN
15	Badan Pertahanan Nasional	BPN

16	Badan Standardisasi Nasional	BSN
17	Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan RI	BNPP
18	Badan Pusat Statistik	BPS
19	Badan Kepegawaian Negara RI	BKN
20	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	BNPB
21	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	BNPT
22	Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu	DKPP
23	Badan Wakaf Indonesia	BWI
24	Ombudsman Republik Indonesia	ORI
25	Komisi Informasi	KOMISI INFORMASI
26	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	KOMNASHAM
27	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	BMKG
28	Komisi Pemilihan Umum	KPU
29	Komisi Yudisial	KY
30	Komisi Pemberantasan Korupsi	KPK
31	Badan Pengawas Obat dan Makanan	BPOM
32	Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan	BPKP
33	Badan Pengawas Hilir Minyak dan Gas Bumi	BPH MIGAS
35	Badan Tenaga Nuklir Nasional	BATAN
36	Lembaga Administrasi Negara	LAN
37	Lembaga Penjaminan Simpanan	LPS
38	Badan Pengawas Pemilihan Umum	BAWASLU
39	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	BAPETEN
40	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	LKPP
41	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	LIPI

d. Penerbitan Jurnal Legislasi Indonesia

- 1) Volume 10 Nomor 1 Tahun 2013
- 2) Volume 10 Nomor 2 Tahun 2013
- 3) Volume 10 Nomor 3 Tahun 2013
- 4) Volume 10 Nomor 4 Tahun 2013

e. Kerja Sama Luar Negeri

- 1) Tanggal 3 Januari 2013, Rapat tim RUU tentang Pengendalian Perdagangan Strategis dengan US Departement of Justice;
- 2) Tanggal 22 Januari 2013, *Meeting Request-Visit of Representatives of The Netherlands Ministries of Foreign Affairs and Security and Justice from 28 January - 1 February 2013* dengan King of The Netherlands;
- 3) Tanggal 4 Februari 2013, Undangan pertemuan dengan US Departement of Justice;
- 4) Tanggal 8 Februari 2013, Meeting request dengan Embassy of the USA;
- 5) Tanggal 4 Maret 2013, Penjajakan Penyelenggaraan Forum Kerja Sama Internasional *Donors Meeting* di Kedutaan Belanda;

- 6) Tanggal 6 Maret 2013, Penjajakan Penyelenggaraan Forum Kerja Sama Internasional *Donors Meeting* di *Hanns Seidel Foundation* (HSF);
- 7) Tanggal 14 Maret 2013, Penjajakan Penyelenggaraan Forum Kerja Sama Internasional *Donors Meeting* di *United Nation Development Programme* (UNDP);
- 8) Tanggal 19 Maret 2013, Penjajakan Penyelenggaraan Forum Kerja Sama Internasional *Donors Meeting* di Kedutaan Swedia;
- 9) Tanggal 20 Maret 2013, Penjajakan Penyelenggaraan Forum Kerja Sama Internasional *Donors Meeting* di Kedutaan Norwegia;
- 10) Tanggal 21 Maret 2013, Konferensi mengenai Pengendalian Perdagangan Strategis dengan US Departement of Justice OPDAT.
- 11) Tanggal 25 Maret 2013, Penjajakan Penyelenggaraan Forum Kerja Sama Internasional *Donors Meeting* di Kedutaan Australia;
- 12) Tanggal 25 Maret 2013, Penjajakan Penyelenggaraan Forum Kerja Sama Internasional *Donors Meeting* di JICA;
- 13) Tanggal 25 Maret 2013, Penjajakan Penyelenggaraan Forum Kerja Sama Internasional *Donors Meeting* di Kedutaan Korea;
- 14) Tanggal 25 Maret 2013, Penjajakan Penyelenggaraan Forum Kerja Sama Internasional *Donors Meeting* di Ausaid; dan
- 15) Tanggal 27 Maret 2013, Kegiatan Forum Kerja Sama Internasional *Donors Meeting* di Hotel Puri Denpasar - Jakarta.
- 16) Tanggal 30 April 2013, Undangan pertemuan dengan Mrs. Caroline de Zwaan - *The Ambassador of the Kingdom of the Netherland Embassy of the USA*;
- 17) Tanggal 4 Juni 2013, Undangan pertemuan dengan US Departement of Justice di Wisma Metropolitan 2 - Jakarta, mengenai Tindak Lanjut Pertemuan Konferensi Pengendalian Perdagangan Strategis di Bogor;
- 18) Tanggal 10 Juni 2013, kunjungan Mr. Thomas Countryman, Asisten Sekretaris Keamanan Internasional dan Nonpoliferasi, Departemen Amerika Serikat kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan dalam rangka pembahasan dan pertukaran pengetahuan tentang Kontrol Eksport dan Undang-Undang tentang Perdagangan Strategis di Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan;

- 19) Tanggal 19 Juni 2013, pertemuan dengan Kedutaan Besar Jepang dengan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan;
- 20) Tanggal 20 Juni 2013, pertemuan dengan *Korea International Cooperation Agency* (KOICA) dan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan; dan
- 21) Tanggal 21 Juni 2013, Tindak Lanjut Pembahasan MoU antara Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dan *Hanns Seidel Foundation* (HSF) di Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.
- 22) Tanggal 24 Juli 2013, menghadiri undangan Duta Besar Amerika Serikat untuk buka puasa bersama di Rumah Dinas Duta Besar Amerika Serikat;
- 23) Tanggal 31 Juli 2013, *Courtesy Call* dengan Mr. Je Jeong-Boo *The Minister of Government Legislation Office of The Republic Korea*;
- 24) Tanggal 20 Agustus 2013, menghadiri pembahasan Prodoc progress Kerja sama RI-UNICEF, di Hotel Morisey, Jakarta;
- 25) Tanggal 27 Agustus 2013, Penyampaian hasil Pertemuan Forum Konsultasi RPJMH 2010- 2014 di Komnas Perempuan;
- 26) 18-20 September 2013 Rapat Koordinasi Inter Kementerian Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dalam menyambut ASEAN Community 2015 di Hotel Grand Serela Bandung.

f. Sosialisasi Rancangan Undang-Undang

1) Pusat

- a) Tanggal 1 Juli 2013, Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata dengan topik: Pemeriksaan Perkara Dengan Acara Singkat Dan Dengan Acara Cepat Dalam Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata;
- b) Tanggal 5 September 2013, Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi dalam bentuk *Focus Group Discussion* (FGD) dengan topik: *Central Authority* (CA) dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi;

- c) Tanggal 10 Oktober 2013, Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha Di Luar Perseroan Terbatas dan Koperasi dalam bentuk *Forum Group Discussion* (FGD) dengan topik: “Tanggung Jawab Intern Antar Sekutu Dan Dengan Pihak Ketiga Pada Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer; dan
- d) Tanggal 28 Oktober 2013, Rancangan Undang-Undang tentang Ekstradisi dalam bentuk *Focus Group Discussion* (FGD) dengan topik: “Tata Cara Permintaan dan Daftar Kejahatan Dalam Rancangan Undang-Undang tentang Ekstradisi.

2) Daerah

Tanggal 27 Agustus 2013, Rancangan Undang-Undang tentang Balai Harta Peninggalan di Surabaya.

g. Manajemen Konten Website WWW.DJPP.KEMENKUMHAM.GO.ID selama T.A.2013 sebagai berikut:

NO	JENIS BERITA	JUDUL BERITA
1	BERITA INTERNAL	Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan
2		Pelantikan Pejabat Eselon III dan IV Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan
3		Rapat Koordinasi Peraturan Perundang-undangan Tahun 2013
4		Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda Tentang Pembayaran Tunjangan Asuransi Sosial Belanda di Indonesia
5	BERITA INTERNAL	Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penunjukan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
6		Jurnal Legislasi Indonesia Volume 10 Nomor 3 Tahun 2013
7		Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
8		Rancangan Peraturan Presiden tentang Batas Sempadan Pantai
9		Konsultasi Tiga Raperda DPRD Kota Mataram
10		Sosialisasi Draft Cetak Biru Kementerian Hukum dan HAM RI
11		Konsultasi DPRD Kabupaten Sleman
12		Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Protocol to Implement The Eight Package of Commitments Under The Asean Framework Agreement on Services (AFAS)
13		Kunjungan Konsultasi DPR Provinsi Jawa Tengah

14		Kunjungan Konsultasi DPRD Provinsi Banten
15		Rapat Internal Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia
16		Jurnal Legislasi Indonesia Volume 10 Nomor 2 Tahun 2013
17		Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Lembaga Sensor Film
18		Upacara HUT Kemerdekaan RI ke-68 : "Mari Kita Jaga Stabilitas Politik Dan Pertumbuhan Ekonomi Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat"
19		Kunjungan Peserta Pendidikan dan Pelatihan Lemhanas Angkatan XLIX
20		Kunjungan Konsultasi DPRD Kabupaten Lamongan
21		Halal bihalal Kementerian Hukum dan HAM RI
22		Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Agreement On The Establishment Of The Center For Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle Sub Regional Cooperation
23		mengenai Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bandar Udara Hang Nadim Batam oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Batam
24		Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan
25		Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI tentang Cap Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
26		Rancangan Undang-Undang tentang Pertanahan
27		Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 Atas Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
28		Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI tentang Logo Indikasi Geografis dan Kode Asal Produk Indikasi Geografis Indonesia
29	BERITA INTERNAL	Rancangan Undang-Undang tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
30		Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Sebagai Modal Awal Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
31		Rancangan Peraturan Presiden tentang Gaji Asisten Ombudsman Republik Indonesia
32		Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Paten
33		Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Pelayanan Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Pertahanan
34		Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Statuta Perguruan Tinggi Negeri
35		Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Riset Dan Teknologi
36		Pelantikan Pejabat Eselon IV Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan
37		Rancangan Peraturan Presiden tentang Jabatan Struktural yang dapat dirangkap oleh Perancang Peraturan Perundang-

		undangan
38		Sosialisasi RUU tentang Hukum Acara Perdata dengan Topik Pemeriksaan Perkara Dengan Acara Singkat dan Dengan Acara Cepat Dalam RUU tentang Hukum Acara Perdata
39		Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi
40		Kunjungan Delegasi Korea International Cooperation Agency (KOICA)
41		Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata
42		Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi
43		Pembahasan dan Pertukaran Pengetahuan tentang Pengendalian Perdagangan Strategis antara Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dengan Perwakilan Delegasi Amerika Serikat
44		Rancangan Peraturan Presiden Tentang Koordinasi Intelijen Negara
45		Rancangan Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Pelayanan Kesehatan Tertentu Berkaitan dengan Kegiatan Operasional Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
46		Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2013 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan
47		Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
48	BERITA INTERNAL	Rancangan Peraturan tentang Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden Beserta Keluarganya serta Tamu Negara Setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan
49		Rancangan Undang-Undang tentang Pertanahan
50		Rancangan Undang-Undang tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat
51		Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASDP Indonesia Ferry
52		Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
53		Penghargaan Untuk Jurnal Legislasi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan
54		Rancangan Naskah Akademik Pengesahan Protokol Opsional Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan martabat manusia
55		Pelantikan Pejabat Eselon III dan IV Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan
56		Konferensi Pengendalian Perdagangan Strategis Kerja Sama Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dengan Departemen Kehakiman - Kedutaan Besar Amerika Serikat
57		Rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Pertanahan Nasional
58		Rancangan Undang-Undang tentang Desain Industri
59		Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik India tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana

60		Rancangan Undang-Undang Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Korea tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana
61		Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia dan Republik India
62		Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Bahan Bakar Minyak Untuk Kapal Tujuan Internasional
63		Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
64		Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perjanjian Lisensi Paten dan Lisensi Wajib Paten
65		Rancangan Peraturan Menteri tentang Pedoman Pelayanan Komunikasi Masyarakat Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia
66		Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Maluku Utara dan Papua Barat
67		Jurnal Legislasi Indonesia Vol 10 No. 1 Tahun 2013
68		Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan

NO	JENIS BERITA	JUDUL BERITA
69	BERITA INTERNAL	Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Jenis dan tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku Pada Kementerian Dalam Negeri
70		Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi
71		Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Pedoman Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Penindakan Administratif bagi PNS di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
72		Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
73		Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pemeriksa Keuangan
74		RPP tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perhubungan
75		Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum
76		Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum
77		RPP tentang Tata Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Pegawai Negeri yang akan Menjadi Bakal Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan Pelaksanaan Cuti Pejabat Negara dalam Kampanye Pemilu
78		Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

79		Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Anggota, dan Tata Kerja Majelis Pengawas Notaris
80		Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Pedoman Manajemen Penanggulangan Kebakaran
81		Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi
82		Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada Asean Infrastructure Fund
83		Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada Asian Development Bank
84		Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada International Bank For Reconstruction And Development
85		Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada Islamic Corporation For The Development Of The Private Sector
86		Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada International Fund for Agricultural Development
87		Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada International Finance Corporation
88		Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Gasetir Wilayah Administrasi
89		Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
90		Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Hak Protokoler, Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
91		Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka
92		Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi
93	BERITA INTERNAL	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial
94		Rapat Kerja Antara Menteri Hukum dan HAM Bersama DPR RI : RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
95		Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pedoman Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Penindakan Administratif di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
96		Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Fasilitas dan Insentif Usaha Hortikultura
97		Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Syarat dan Ketentuan Minimum Jasa Layanan di Bidang Angkutan Multimoda
98		Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2012 Tentang Kepanitraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
99		Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada

		Kejaksaan Republik Indonesia
100		Cortessy Call Kedutaan Belanda ke Kementerian Hukum dan HAM RI
101		Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara
102		Jurnal Legislasi Indonesia Volume 9 Nomor 4 Tahun 2012
103		Jurnal Legislasi Indonesia Volume 9 Nomor 3 Tahun 2012
104		Rancangan Peraturan Presiden tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional
105		Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Fasilitas dan Insentif Usaha Hortikultura
106		Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
107		Pelatihan Tenaga Litigator Pengujian Peraturan Perundang-Undangan
108		Forum Kerja Sama Internasional (Donors Meeting)
109	BERITA INTERNAL	Bimbingan Teknis Pedoman Penulisan Jurnal Ilmiah Bidang Peraturan Perundang-undangan
110		Pelaku 'SMS Mama' Pun Terancam Perampasan Aset
111		PPATK: Perma Perampasan Aset Akan Selesaikan 'Rekening Gantung'
112		DPR Sahkan 8 Hakim Agung Baru
113		RUU Kelautan Masuk Prolegnas 2013
114		Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II.
1	KILAS BERITA HUKUM	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Geo Dipa Energi
2		Kalangan DPR anggap Keppres dibatalkan karena langgar UU
3		DPR setuju Perppu MK menjadi UU
4		UU Aparatur Sipil Negara akan hindari politisasi pejabat
5		DPR setuju pengesahan RUU Perindustrian
6		Mendag ingin percepatan revisi UU Peternakan
7		UU Desa, Miliaran Rupiah Tiap Tahun untuk Desa
8		Dinilai menghambat, UU No.32 tahun 2004 akan direvisi
9		KPAI ingin larangan iklan rokok diatur di RUU Penyiaran
10		Kemendag harap percepatan perubahan UU Peternakan
11		LPSK Minta Revisi UU Perlindungan Saksi Masuk Prolegnas 2014
12		DPR Didesak Sahkan RUU Miras
13		MK tolak pengujian UU Tata Cara Perpajakan
14		DPR RI selesaikan 33 RUU
15		Keppres Miras Dihapus, Daerah Diminta Buat Perda
16		Mendagri: RUU Adminduk segera disahkan
17		Pemerintah - DPR sepakati 308 DIM RUU perasuransian
18		Ini pasal yang masih menjadi perdebatan di UU Pilpres
19		Baleg Kembali akan Putuskan Revisi UU Pilpres

20		Delapan Pokok Perubahan UU Ormas
21		RUU Desa tak selesai masa sidang IV 2012-2013
22		DPR bentuk Pansus RUU Redenominasi rupiah
23		Pemerintah bersedia terima masukan terkait RUU Ormas
24		UU APBNP 2013 Disahkan
25		Menpera inginkan RUU Tapera dapat segera diselesaikan
26		Pembahasan RUU Pilres deadlock
NO	JENIS BERITA	JUDUL BERITA
27	KILAS BERITA HUKUM	"Judicial review" UU Pendidikan Tinggi hak masyarakat
28		RUU Ormas Batal Disahkan Besok
29		Rapat paripurna DPR agendakan 4 pembahasan
30		Menhan Minta DPR Bahas UU Disiplin Militer
31		Komisi A DPR Aceh tolak PP 77/2007
32		RUU Pilpres ditunda pembahasannya
33		Baleg Putuskan RUU Pilpres, Hari Ini
34		Imparsial: RUU Kamnas untuk Kepentingan Pilpres 2014
35		Komisi III Bertekad selesaikan 4 RUU
36		Dua fraksi janjikan LPSK masuk RUU KUHAP
37		DPR : RUU PPILN upaya lindungi pekerja indonesia
38		Legislator: upaya Jokowi sejalan RUU Kesehatan Jiwa
39		BI : RUU perbankan masih banyak kelemahan
40		Komisi II: UU Pertanahan solusi masalah tanah
41		DPR selesaikan RUU Pemda lebih dahulu
42		RUU Kesehatan Jiwa libatkan partisipasi masyarakat
43		RUU Asuransi ditargetkan selesai masa Sidang IV DPR
44		DPR targetkan revisi MD3 selesai sebelum pemilu
45		UU Pendanaan Terorisme Disahkan
46		MK: 2012 Prosentase Pembatalan UU Meningkatkan
47		DPR Didesak Buat UU Migas Baru
48		DPR janji prioritaskan RUU Ormas di tahun 2013
49		Bupati Blokir Bandara

h. Pengelolaan Basisdata T.A.2013 (s/d tanggal 31 Desember 2013):

MATRIKS/TABEL *UPLOAD*
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN T.A. 2013

NO.	JENIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Sudah Upload*			
		Lembaran Negara (Pdf)	Tambahan Lembaran Negara (Pdf)	Lembaran Negara (Html)	Tambahan Lembaran Negara (Html)
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN					

1	Undang-Undang	42	29	32	19
2	PERPU	5	2	1	
3	Peraturan Pemerintah	149	31	52	43
4	Peraturan Presiden	26		72	
5	Peraturan Bank Indonesia	11	13	18	1
6	Peraturan BPK	1			
NO.	JENIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Sudah Upload*			
		Lembaran Negara (Pdf)	Tambahan Lembaran Negara (Pdf)	Lembaran Negara (Html)	Tambahan Lembaran Negara (Html)
7	Peraturan OJK	2	2		
JUMLAH		236	77	175	63

MATRIKS/TABEL UPLOAD PERATURAN KEMENTERIAN T.A.2013

NO.	JENIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Sudah Upload*			
		Berita Negara (Pdf)	Tambahan Berita Negara (Pdf)	Berita Negara (Html)	Tambahan Berita Negara (Html)
KEMENTERIAN					
1	Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Perhubungan			1	
2	Peraturan Bersama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dan Menteri Dalam Negeri	1			
3	Peraturan Bersama Menteri Kelautan Dan Perikanan Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara	2			
4	Peraturan Bersama Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral RI, Menteri Keuangan RI Dan Menteri Badan Usaha Milik Negara RI	1		1	
5	Peraturan Bersama Kepala Arsip Nasional RI Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara RI	1		1	
6	Peraturan Bersama Menteri Kehutanan RI Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara RI	1			
7	Peraturan Bersama Menteri Kelautan Dan Perikanan RI Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara RI			2	

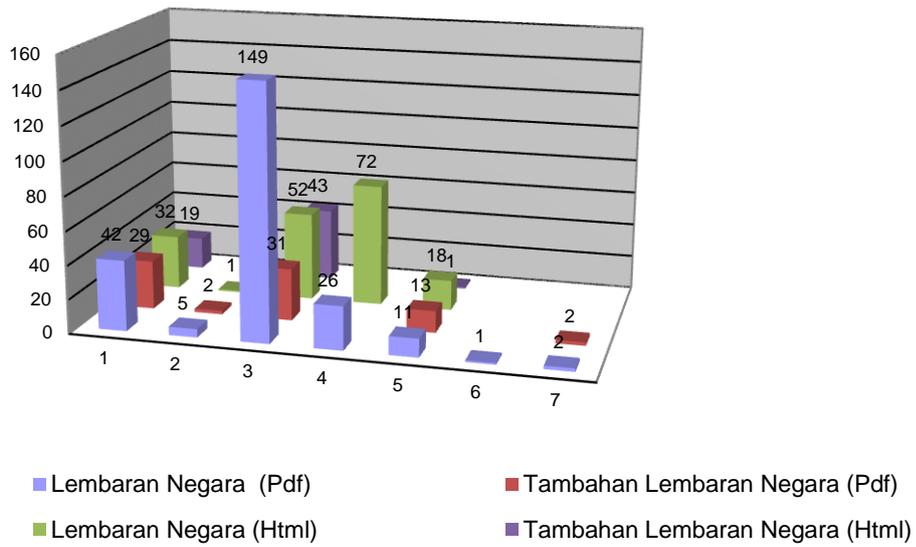
8	Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Dan Menteri Kesehatan RI	1			
9	Peraturan Bersama LKPP Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara RI	1		1	
10	Peraturan Bersama Menteri Kehutanan RI Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara RI			1	
11	Peraturan Bersama Menteri Keuangan RI Dan Menteri Pertahanan RI			1	
12	Peraturan Bersama Kepala Sandi Negara RI Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara RI	1			
13	Peraturan Bersama Menteri Pertanian RI Dan Kepala BKN	2		2	
14	Peraturan Menteri Pertahanan	33		35	
15	Peraturan Menteri Perindustrian	32		60	
16	Peraturan Menteri Agama	56		62	
17	Peraturan Menteri Kehutanan	35		37	
18	Peraturan Menteri Luar Negeri	1			
19	Peraturan Menteri Hukum dan HAM	32		31	
20	Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat	3		14	
21	Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan & PA	3		12	
22	Peraturan Menteri Negara PAN dan RB	22		34	
23	Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional	2		5	
24	Peraturan Menteri ESDM	18		31	
25	Peraturan Menteri Pertanian	35		26	
26	Peraturan Menteri Keuangan	144		227	
27	Peraturan Menteri Sosial	9		29	
28	Peraturan Menteri Dalam Negeri	50		69	
29	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan	66		92	
30	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup	8		19	
31	Peraturan Menteri Perdagangan	24		43	
32	Peraturan Menteri Perhubungan	36		46	
33	Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal	3		3	
34	Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	8		7	
35	Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6		21	
36	Peraturan Menteri Kelautan dan	23		25	

	Perikanan				
37	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum	4		5	
38	Peraturan Menteri Riset & Teknologi	4		7	
39	Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	5		6	
40	Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat	6		4	
41	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika	22		37	
42	Peraturan Menteri Kesehatan	39		58	
43	Peraturan Menteri Sekretaris Negara	3		4	
JUMLAH		743	0	1059	

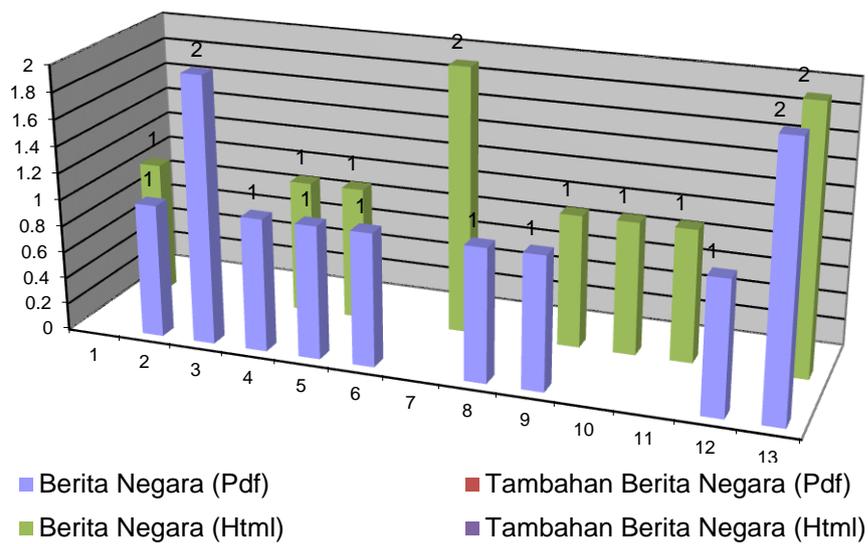
MATRIKS/TABEL UPLOAD NON KEMENTERIAN/LPNK T.A.2013

NO.	JENIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Sudah Upload*			
		Berita Negara (Pdf)	Tambahan Berita Negara (Pdf)	Berita Negara (Html)	Tambahan Berita Negara (Html)
NON KEMENTERIAN/LPNK					
1	Peraturan KAPOLRI	8		10	
2	Peraturan Kepala Sandi Negara	5		10	
3	Peraturan Kepala LPSK	2		2	
4	Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	3		2	
5	Peraturan Kepala Lembaga Penjamin Simpanan			1	
6	Peraturan Kepala PPATK	2		8	
7	Peraturan Kepala BKPM	11		12	
8	Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara	12		15	
9	Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional	11		9	
10	Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional	5		5	
11	Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan RI	5		4	
12	Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik	14		13	
13	Peraturan Jaksa Agung	2		3	
14	Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat			1	
15	Peraturan Badan Wakaf Indonesia			1	
16	Peraturan Ombudsman	3		3	

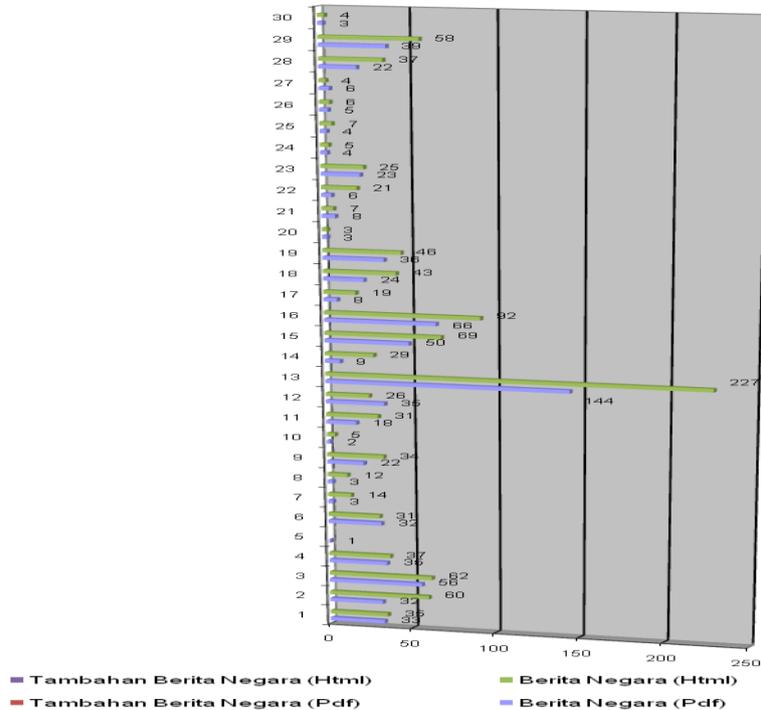
	Republik Indonesia				
17	Peraturan Komisi Informasi	1		1	
18	Peraturan Komisi Nasional HAM				
19	Peraturan Kepala BMKG	8		10	
20	Peraturan Komisi Pemilihan Umum	9		20	
21	Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia	4		3	
22	Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan	40		26	
23	Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir	6		7	
24	Peraturan Badan Tenaga Nuklir Nasional	4		4	
25	Peraturan LAN	5		4	
26	Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum				
27	Peraturan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi RI	3			
28	Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi RI	1			
29	Peraturan Kepala Arsip Nasional RI	28		19	
30	Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI	1			
31	Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan RI	3		1	
32	Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI	1			
33	Peraturan Komisi Yudisial RI	3		1	
34	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum	13		16	
JUMLAH		213	0	211	
JUMLAH KESELURUHAN (KEMENTERIAN + NON KEMENTERIAN)		956	0	1270	



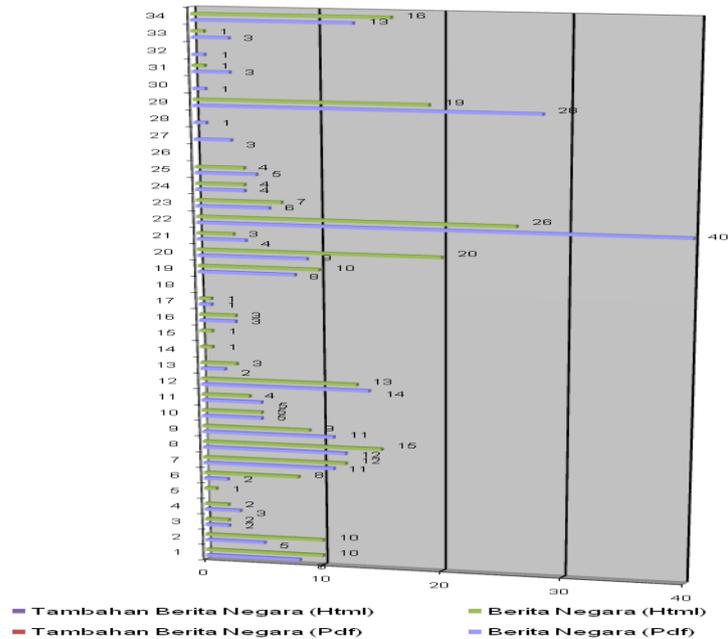
Gambar 1
Peraturan perundang-undangan yang telah diunggah
(*lihat matriks/tabel Peraturan Perundang-undangan)



Gambar 2
Peraturan Bersama yang telah diunggah
(*lihat matriks/tabel Kementerian)



Gambar 3
Peraturan Kementerian yang telah diunggah
(*lihat matriks/tabel Kementerian)



Gambar 4

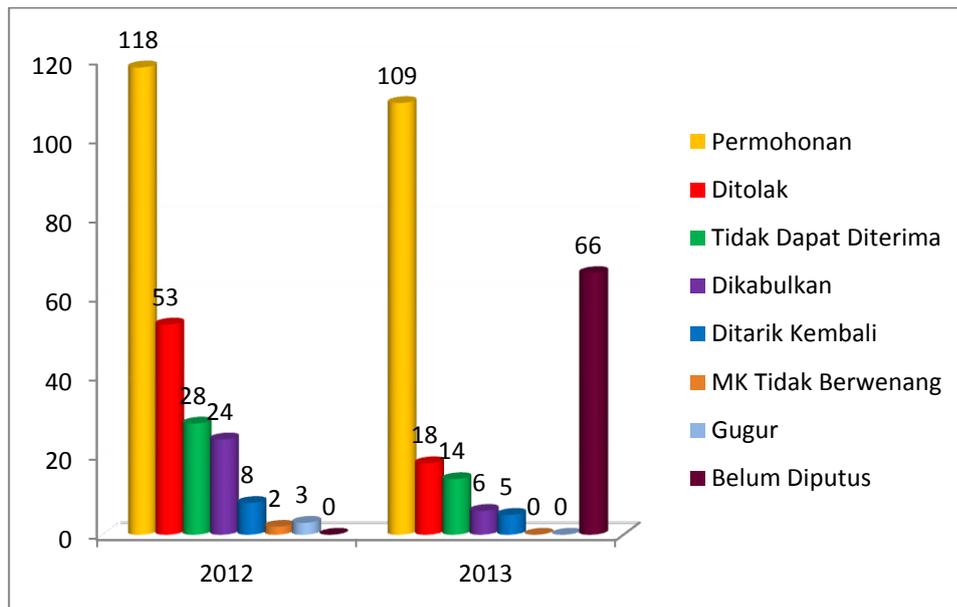
Peraturan Non Kementerian/LPNK yang telah diunggah
(*lihat matriks/tabel Non Kementerian/LPNK)

Hal lain yang ditangani oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan melalui direktorat litigasi peraturan perundang-undangan adalah penanganan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sejak terbentuknya Mahkamah Konstitusi bulan Agustus 2003 sampai dengan bulan Desember 2013, permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi sebanyak : 609 (enam ratus sembilan) perkara, terdiri atas permohonan tahun 2003 sebanyak 24 perkara, permohonan tahun 2004 sebanyak 27 perkara, permohonan tahun 2005 sebanyak 26 perkara, permohonan tahun 2006 sebanyak 31 perkara, permohonan tahun 2007 sebanyak 32 perkara, permohonan tahun 2008 sebanyak 39 perkara, permohonan tahun 2009 sebanyak 78 perkara, permohonan tahun 2010 sebanyak 81 perkara, permohonan tahun 2011 sebanyak 86 perkara, permohonan tahun 2012 sebanyak 118 perkara, permohonan tahun 2013 sebanyak 109 perkara, Perkembangan Penanganan Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam periode 1 (satu) tahun anggaran 2013, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Permohonan yang diterima pada Tahun 2012 yang ditangani pada tahun 2013 sebanyak 24 (dua puluh empat) permohonan, dan telah diputus seluruhnya.
- b. Permohonan yang diterima pada periode Januari – Desember Tahun 2013 sebanyak 109 (seratus sembilan) permohonan (1/PUU-XI/2013 s.d. 109/PUU-XI/2013), dan telah diputus sebanyak 43 (empat puluh tiga) permohonan, yang terdiri dari :
 - 1) 18 (delapan belas) permohonan **Ditolak**;
 - 2) 14 (empat belas) permohonan **Tidak Dapat Diterima**;
 - 3) 6 enam) permohonan **Dikabulkan**;
 - 4) 5 (lima) permohonan **Ditarik Kembali**.

Sehingga jumlah permohonan yang diterima pada tahun 2013 dan belum diputus adalah sebanyak 66 (enam puluh enam) permohonan, dengan tahap *Perbaikan Permohonan* dan *Pemeriksaan Pendahuluan*. Dibawah ini kami lampirkan grafik Perkembangan Penanganan Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam periode Tahun 2013 (Januari - Desember), sebagai berikut:

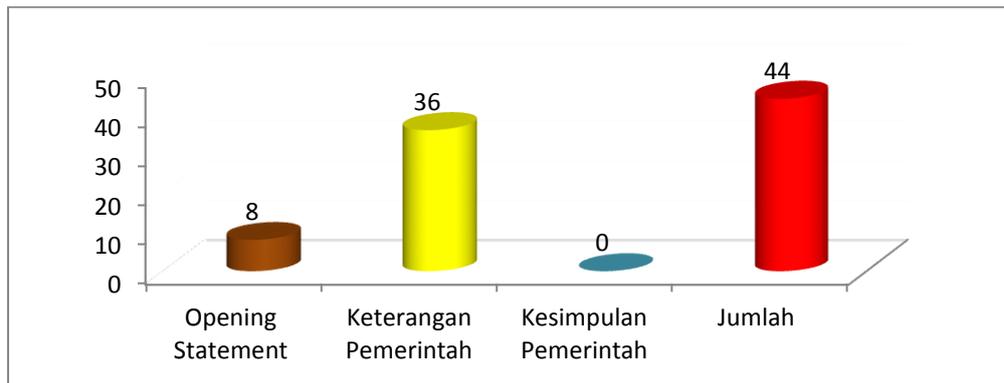
REKAPITULASI PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2013 (Januari - Desember 2013)



c. Menyusun Keterangan Pemerintah

Penyusunan keterangan pemerintah dilakukan terhadap permohonan pengujian undang-undang yang ditangani pada periode Januari - Desember 2013 yaitu sebanyak 44 (empat puluh empat) permohonan.

Berikut kami lampirkan grafik penyusunan *Opening Statement* dan Keterangan Pemerintah untuk 1 (satu) tahun anggaran 2013, adalah sebagai berikut :



d. Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang serta penanganan gugatan perdata dan TUN pada periode (Januari - Desember 2013),

e. Penyiapan dan pengolahan bahan/data

Kegiatan penyiapan dan pengolahan bahan/data dilakukan sebagai bahan pendukung penyusunan keterangan pemerintah. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Menyusun ringkasan dan perbaikan permohonan pengujian undang-undang yang diterima pada bulan Januari - Desember 2013, yaitu terdiri dari 82 (delapan puluh dua) ringkasan permohonan dan 35 (tiga puluh lima) perbaikan permohonan.
- 2) Menyusun naskah keterangan pemerintah terhadap permohonan pengujian undang-undang yang ditangani pada Tahun Anggaran 2013, sebanyak:
 - Permohonan Januari sampai dengan Desember tahun 2013 sebanyak 44 (empat puluh empat) perkara.

f. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan

Penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan dilakukan terhadap kegiatan Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-undangan yang terdiri atas:

- 1) Laporan putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian undang-undang yang diputus pada periode Januari - Desember 2013, sebanyak 108 (seratus delapan) putusan.
- 2) Selama periode Triwulan IV telah dilakukan kegiatan analisa putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara yang sudah diputus pada

periode Januari - Desember 2013 sebanyak 20 (dua puluh) analisa, yaitu:

- g. Menyusun 24 (dua puluh empat) telaahan terhadap berbagai permasalahan hukum yang ditugaskan pimpinan.

V. DIREKTORAT FASILITASI PERANCANGAN PERATURAN DAERAH

a) Pemetaan Peraturan Daerah

Panitia Pemetaan Peraturan Daerah telah melakukan Pemetaan terhadap **5 (lima) Provinsi** yang dilaksanakan di Biro Hukum Pemerintah Provinsi/Divisi Pelayanan Hukum Kementerian Hukum dan HAM, yaitu **Aceh, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Barat, dan Sulawesi Tenggara.**

b) Mediasi dan konsultasi

1) Mediasi

No.	PERMOHONAN DARI	TANGGAL	MATERI	KETERANGAN
1.	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Gorontalo	25-27 Februari 2013	Pembahasan Program Legislasi Daerah	Pejabat yang berangkat adalah: 1. Erwin Fauzi, SH, MH. 2. Mulyanto, SH, MH.
2.	Pemda Kabupaten Gianyar, Bali	25-27 April 2013	Pembahasan: 1. Raperda tentang Kepariwisata Budaya Kabupaten Gianyar 2. Raperda tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum 3. Raperda tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis	Pejabat yang berangkat adalah: 1. Erwin Fauzi, SH, MH. 2. David Christian, SH.

			Rumah Tangga	
3.	Pemda Kabupaten Jombang, Jawa Timur	13-15 Juni 2013	Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Kegiatan <i>Legal Drafting</i> bagi anggota BPD	Pejabat yang berangkat adalah: 1. Virnasari, SH.,MH. 2. Sopiani, SHI.
4.	DPRD Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara	17-19 Juni 2013	Pembahasan Strategi Implementasi Perda Otonomi Daerah Kepulauan di Kabupaten Wakatobi Sulawesi Tenggara	Pejabat yang berangkat adalah: 1. Erwin Fauzi, SH, MH. 2. David Christian, SH.
5.	Kanwil Kep.Riau Tanjung Pinang	18-20 Juni 2013	Pembahasan Peningkatan Pemahaman Tenaga Fungsional	Pejabat yang berangkat adalah: 1. Andriana Krisnawati, SH.,MH. 2. Sopiani, SHI
6.	Kanwil Jambi	24-26 Juni 2013	Pembahasa: 1. Peraturan Daerah Provinsi Jambi tentang Pengaturan Pengangkutan Batubara Dalam Provinsi Jambi; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Larangan Minuman Keras/Alkohol; 3. Raperda Provinsi Jambi tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah; 4. Raperda Kabupaten tanjung Jabung Timur tentang Pembtukan Perseroan Terbatas Sabak Holding	Pejabat yang berangkat adalah: 1. Andriana Krisnawati, SH.,MH. 2. Virnasari, SH.,MH.



			<p>Company;</p> <p>5. Raperda Kabupaten Tebo tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan;</p> <p>6. Raperda Kabupaten Merangin tentang Pengaturan Operasional Tempat Hiburan</p>	
7.	DPRD kabupaten Gianyar	24-26 Juli 2013	<p>Pembahasan:</p> <p>1. Raperda tentang Pembentukan Dana Cadangan Daerah; dan</p> <p>2. Raperda tentang Retribusi Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.</p>	<p>Pejabat yang berangkat adalah:</p> <p>1. Suwandi, SH.,MH.</p> <p>2. Erwin Fauzi, SH.,MH</p>
8.	Pemerintah Kota Sabang	4-6 September 2013	<p>1. Rancangan Qanun tentang Izin Mendirikan Bangunan;</p> <p>2. Rancangan Qanun tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;</p> <p>3. Rancangan Qanun tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan</p> <p>4. Rancangan Qanun tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.</p>	<p>Pejabat yang berangkat adalah:</p> <p>1. Andriana Krisnawati, SH.,MH.</p> <p>2. Siti Opih Muhapilah, SH.</p>
	DPRD Kabupaten Magetan	6-8 November 2013	<p>Pembahasan:</p> <p>1. Raperda</p>	<p>Pejabat yang berangkat adalah:</p> <p>1. Andriana</p>



			<p>tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;</p> <p>2. Raperda tentang Pedoman dan Tatacara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;</p> <p>3. Raperda tentang Pembatasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;</p> <p>4. Raperda tentang Rekapitulasi Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta Sampai Dengan Tahun 2013;</p> <p>5. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; dan</p> <p>6. Raperda tentang Prubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.</p>	<p>Krisnawati, SH.,MH.</p> <p>2. Sopiani, SHI</p>
--	--	--	--	---

2) Konsultasi

Kegiatan konsultasi dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu konsultasi langsung dan konsultasi tertulis. Konsultasi langsung dilakukan sebanyak 66 dan konsultasi tertulis sebanyak 10.

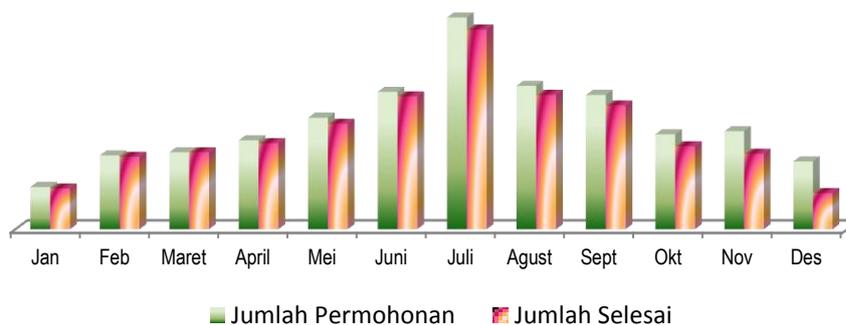
C. Bidang Administrasi Hukum Umum

1. Permohonan Pengesahan Badan Hukum :
 - a. Pengesahan Perseroan, Penyesuaian dan Perubahannya
 - 1) Penyelesaian Pelayanan Administrasi PT Terbuka (Dian 1, Dian 2 dan Dian 3) = 773

PERMOHONAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERSEROAN TERBATAS TERBUKA (DIAN 1; DIAN2; DIAN3) Bulan Januari-Desember 2013

No	Bulan	Jumlah Permohonan	Jumlah Selesai
1	Jan	28	27
2	Feb	49	48
3	Maret	51	51
4	April	59	57
5	Mei	74	70
6	Juni	91	88
7	Juli	140	132
8	Agust	95	89
9	Sept	89	82
10	Okt	63	55
11	Nov	65	50
12	Des	45	24
Total		849	773

**Grafik Permohonan Pelayanan Administrasi
Perseroan Terbatas Terbuka (Dian 1; Dian 2; Dian 3)
Bulan Januari-Desember 2013**



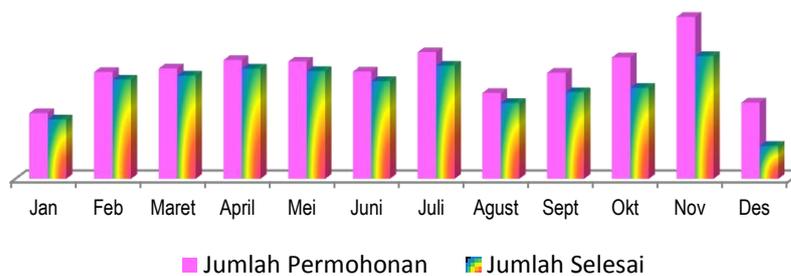
- 2) Penyelesaian Pelayanan Administrasi PT Tertutup (Dian 1, Dian2 dan Dian3) = 112.806

PERMOHONAN PELAYANAN ADMINISTRASI

PERSEROAN TERBATAS TERTUTUP (DIAN 1; DIAN2; DIAN3) Bulan Januari-Desember 2013

No	Bulan	Jumlah Permohonan	Jumlah Selesai
1	Jan	6744	6083
2	Feb	10953	10176
3	Maret	11332	10588
4	April	12184	11308
5	Mei	12027	11045
6	Juni	11001	10026
7	Juli	12990	11602
8	Agust	8817	7782
9	Sept	10870	8894
10	Okt	12453	9335
11	Nov	16610	12593
12	Des	7818	3374
Total		133.799	112.806

**Grafik Permohonan Pelayanan Administrasi
Perseroan Terbatas Tertutup (Dian 1; Dian 2; Dian 3)
Bulan Januari-Desember 2013**



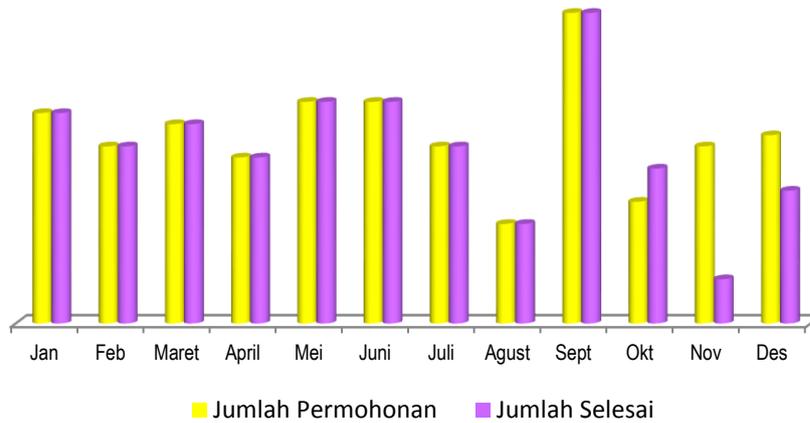
3) Permohonan Pelayanan Administrasi Duplikat SK

PERMOHONAN PELAYANAN ADMINISTRASI DUPLIKAT SK

Bulan Januari-Desember 2013

No	Bulan	Jumlah Permohonan	Jumlah Selesai
1	Jan	19	19
2	Feb	16	16
3	Maret	18	18
4	April	15	15
5	Mei	20	20
6	Juni	20	20
7	Juli	16	16
8	Agust	9	9
9	Sept	28	28
10	Okt	11	14
11	Nov	16	4
12	Des	17	12
Total		205	191

Grafik Permohonan Pelayanan Administrasi Duplikat SK Bulan Januari-Desember 2013

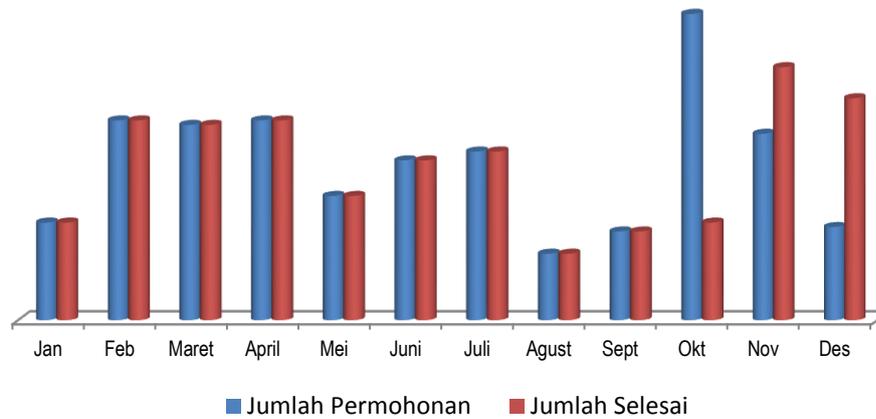


4) Permohonan Pelayanan Administrasi Company Profile

PERMOHONAN PELAYANAN ADMINISTRASI COMPANY PROFILE Bulan Januari-Desember 2013

No	Bulan	Jumlah Permohonan	Jumlah Selesai
1	Jan	22	22
2	Feb	45	45
3	Maret	44	44
4	April	45	45
5	Mei	28	28
6	Juni	36	36
7	Juli	38	38
8	Agust	15	15
9	Sept	20	20
10	Okt	69	22
11	Nov	42	57
12	Des	21	50
Total		425	422

Grafik Permohonan Pelayanan Administrasi Company Profile Bulan Januari-Desember 2013

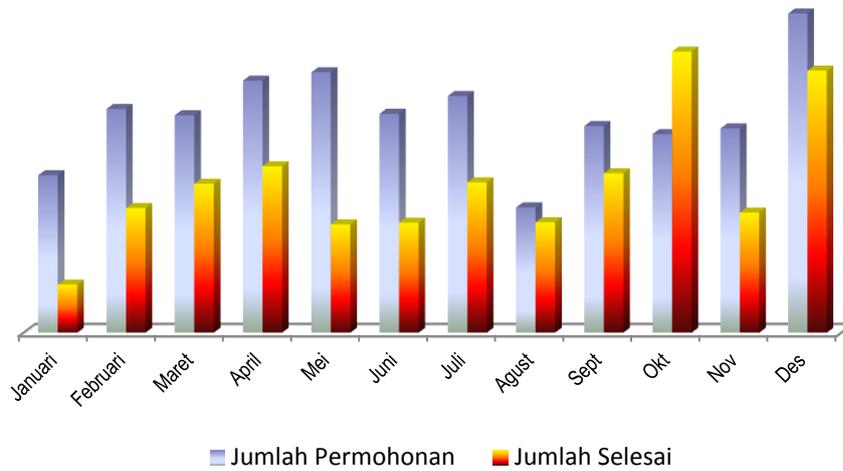


5) Permohonan Yayasan

PERMOHONAN YAYASAN Bulan Januari-Desember 2013

NO	BULAN	Jumlah Permohonan	Jumlah Selesai
1	Januari	949	289
2	Februari	1347	751
3	Maret	1309	897
4	April	1517	1003
5	Mei	1567	653
6	Juni	1318	663
7	Juli	1425	906
8	Agust	755	665
9	Sept	1245	960
10	Okt	1196	1692
11	Nov	1230	724
12	Des	1920	1577
Total		15.778	10.780

**Grafik Permohonan Yayasan
Bulan Januari-Desember 2013**

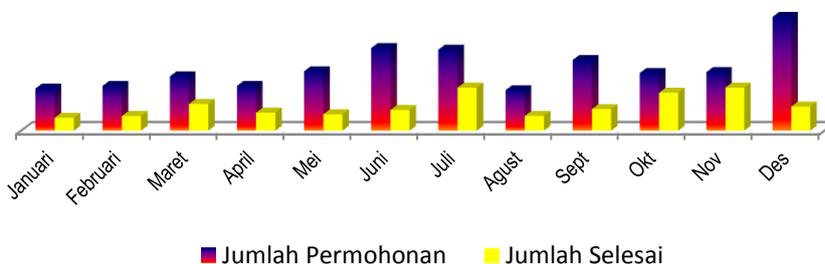


6) Permohonan Perkumpulan

**PERMOHONAN PERKUMPULAN
Bulan Januari-Desember 2013**

NO	BULAN	Jumlah Permohonan	Jumlah Selesai
1	Januari	49	15
2	Februari	52	17
3	Maret	63	31
4	April	52	21
5	Mei	69	19
6	Juni	96	24
7	Juli	94	50
8	Agust	47	17
9	Sept	82	25
10	Okt	67	44
11	Nov	68	50
12	Des	132	28
Total		871	341

Grafik Permohonan Perkumpulan Bulan Januari-Desember 2013

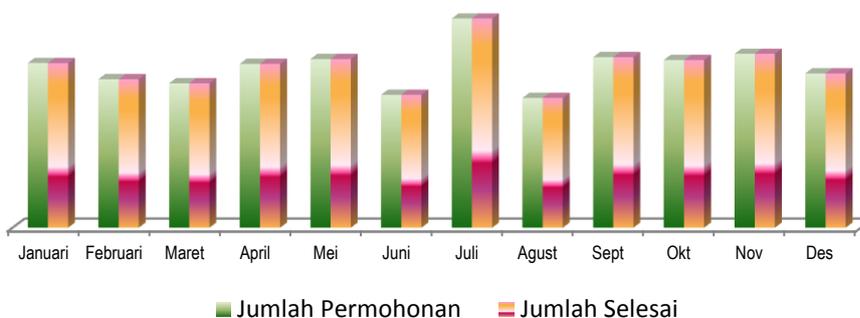


2. Pelayanan Pemberian Legalisasi Terhadap Dokumen Yang Akan Digunakan Dari dan Keluar Negeri

PELAYANAN PEMBERIAN LEGALISASI TERHADAP DOKUMEN YANG AKAN DIGUNAKAN DARI DAN KELUAR NEGERI Bulan Januari-Desember 2013

NO	BULAN	Jumlah Permohonan	Jumlah Selesai
1	Januari	5010	5006
2	Februari	4521	4521
3	Maret	4397	4397
4	April	4985	4985
5	Mei	5130	5130
6	Juni	4046	4046
7	Juli	6357	6357
8	Agust	3949	3949
9	Sept	5187	5187
10	Okt	5100	5100
11	Nov	5286	5286
12	Des	4693	4693
Total		58.661	58.657

Grafik Pelayanan Pemberian Legalisasi Terhadap Dokumen Yang Akan Digunakan Dari dan Keluar Negeri Bulan Januari-Desember 2013



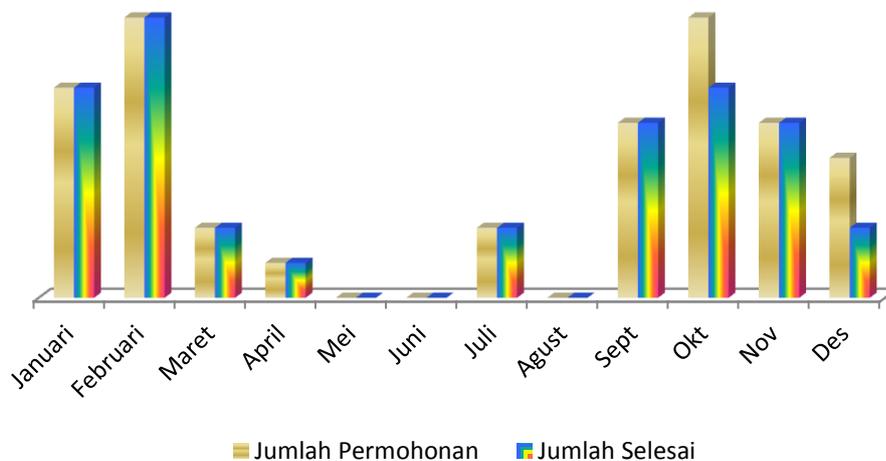
3. Pelayanan Pemberian Persetujuan Mempekerjakan dan Memperpanjang Ijin Kerja Advokat Asing

PELAYANAN PEMBERIAN PERSETUJUAN MEMPEKERJAKAN DAN MEMPERPANJANG IJIN KERJA ADVOKAT ASING

Bulan Januari-Desember 2013

NO	BULAN	Jumlah Permohonan	Jumlah Selesai
1	Januari	6	6
2	Februari	8	8
3	Maret	2	2
4	April	1	1
5	Mei	0	0
6	Juni	0	0
7	Juli	2	2
8	Agust	0	0
9	Sept	5	5
10	Okt	8	6
11	Nov	5	5
12	Des	4	2
Total		41	37

Grafik Pelayanan Pemberian Persetujuan Mempekerjakan dan Memperpanjang Ijin Kerja Advokat Asing



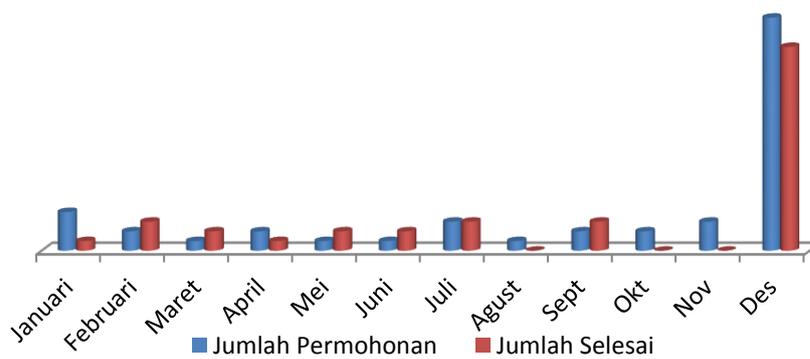
4. Penerbitan Legal Opinion.

Legal Opinion adalah pertimbangan hukum yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan permintaan Departemen Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutang, sehubungan dengan salah satu persyaratan efektifnya perjanjian pinjaman atau hibah luar negeri, guna pencairan pinjaman atau hibah tersebut. Permohonan Legal Opinion, diselesaikan sebanyak 38 permohonan.

PELAYANAN PEMBERIAN LEGAL OPINION Bulan Januari-Desember 2013

NO	BULAN	Jumlah Permohonan	Jumlah Selesai
1	Januari	4	1
2	Februari	2	3
3	Maret	1	2
4	April	2	1
5	Mei	1	2
6	Juni	1	2
7	Juli	3	3
8	Agust	1	0
9	Sept	2	3
10	Okt	2	0
11	Nov	3	0
12	Des	24	21
Total		46	38

Grafik Pelayanan Pemberian Legal Opinion Bulan Januari-Desember 2013

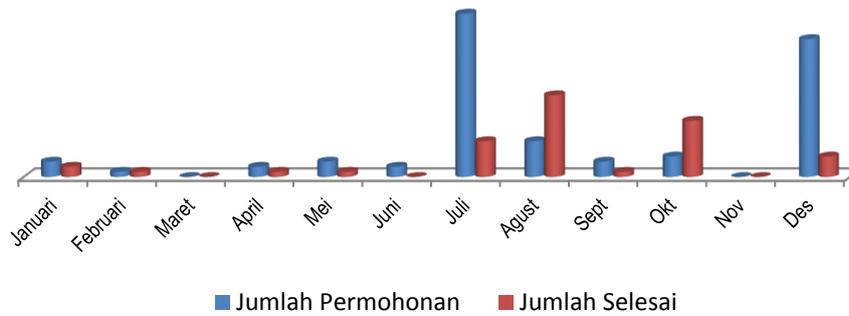


5. Pelayanan Pemberian Pendapat Hukum

PELAYANAN PEMBERIAN PENDAPAT HUKUM Bulan Januari-Desember 2013

NO	BULAN	Jumlah Permohonan	Jumlah Selesai
1	Januari	3	2
2	Februari	1	1
3	Maret	0	0
4	April	2	1
5	Mei	3	1
6	Juni	2	0
7	Juli	32	7
8	Agust	7	16
9	Sept	3	1
10	Okt	4	11
11	Nov	0	0
12	Des	27	4
Total		84	44

Grafik Pemberian Pendapat Hukum Bulan Januari-Desember 2013

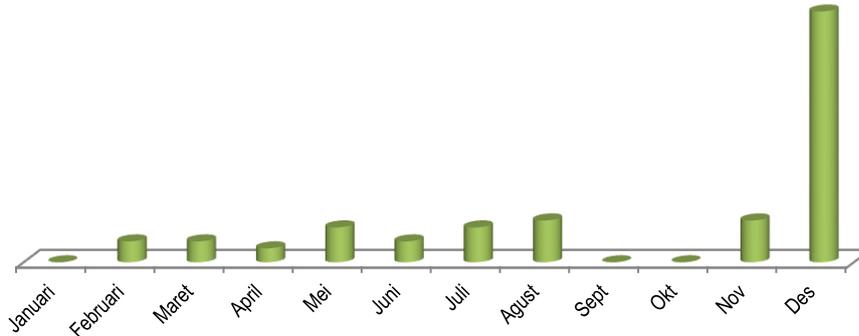


6. Pelayanan Proses Beracara Untuk Advokasi Keperdataan

7. Pelayanan Proses Beracara Untuk Advokasi Keperdataan
Bulan Januari-Desember 2013

NO	BULAN	Jumlah Selesai
1	Januari	0
2	Februari	3
3	Maret	3
4	April	2
5	Mei	5
6	Juni	3
7	Juli	5
8	Agust	6
9	Sept	0
10	Okt	0
11	Nov	6
12	Des	36
Total		69

Grafik Pelayanan Proses Beracara Untuk Advokasi Keperdataan Bulan Januari-Desember 2013

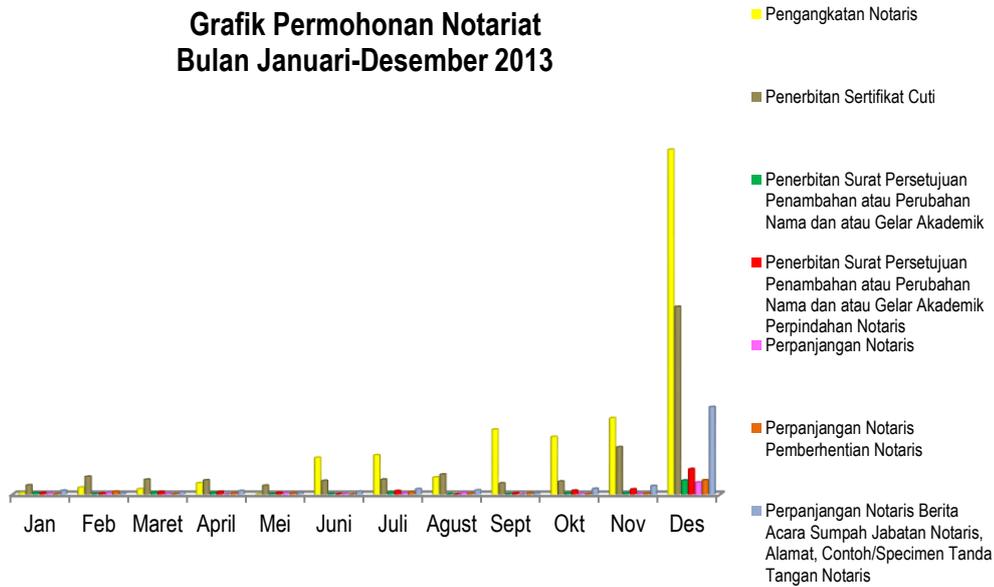


8. Pelayanan kenotariatan
- a. Pengangkatan Notaris = 2093
 - b. Penerbitan Sertifikat Cuti = 1176
 - c. Penambahan/Perubahan Nama dan/Gelar Akademik = 82
 - d. Perpindahan Notaris = 153
 - e. Perpanjangan Notaris = 73
 - f. Pemberhentian Notaris = 82
 - g. Berita Acara Sumpah Jabatan Notaris, Alamat, Contoh/Specimen Tanda Tangan Notaris = 0
- Jumlah = 3659

PERMOHONAN NOTARIAT Bulan Januari-Desember 2013

No	Bulan	Pengangkatan Notaris	Penerbitan Sertifikat Cuti	Penerbitan Surat Persetujuan Penambahan atau Perubahan Nama dan atau Gelar Akademik	Perpindahan Notaris	Perpanjangan Notaris	Pemberhentian Notaris	Berita Acara Sumpah Jabatan Notaris, Alamat, Contoh/Specimen Tanda Tangan Notaris
1	Jan	5	29	5	5	4	1	12
2	Feb	22	56	2	3	5	9	4
3	Maret	17	47	6	8	3	1	7
4	April	36	45	5	8	0	4	11
5	Mei	0	28	2	5	5	4	5
6	Juni	116	43	2	1	2	0	9
7	Juli	124	47	6	11	4	7	17
8	Agust	54	63	1	0	6	3	13
9	Sept	205	35	1	4	0	4	4
10	Okt	182	41	4	12	3	1	18
11	Nov	241	149	4	16	3	3	27
12	Des	1091	593	44	80	38	45	276
Total		2.093	1.176	82	153	73	82	403

Grafik Permohonan Notariat Bulan Januari-Desember 2013

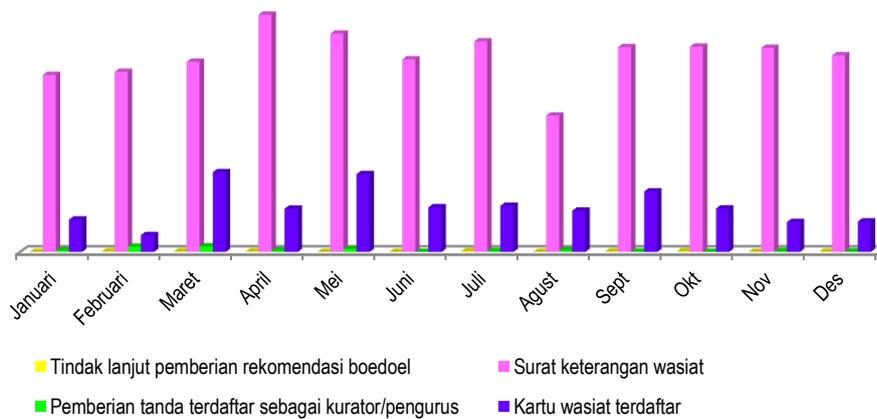


9. Terkait pengurusan Harta Peninggalan sebagai berikut:
 - a. Tindak lanjut pemberian rekomendasi boedoel sebanyak 15
 - b. Surat keterangan wasiat sebanyak 9.860
 - c. Pemberian tanda terdaftar sebagai kurator/pengurus sebanyak 90
 - d. Kartu wasiat terdaftar sebanyak 2.298

PERMOHONAN PELAYANAN Bulan Januari-Desember 2013

NO	BULAN	Tindak lanjut pemberian rekomendasi boedoel	Surat Keterangan Wasiat	Pemberian tanda terdaftar sebagai kurator/pengurus	Kartu Wasiat Terdaftar
1	Januari	0	742	7	136
2	Februari	2	755	23	71
3	Maret	2	797	24	335
4	April	2	994	6	182
5	Mei	0	914	13	327
6	Juni	0	807	0	188
7	Juli	3	882	4	194
8	Agust	0	572	7	174
9	Sept	2	858	1	254
10	Okt	3	860	0	183
11	Nov	0	855	3	126
12	Des	1	824	2	128
Total		15	9.860	90	2.298

Grafik Pelayanan Sub Direktorat Balai Harta Peninggalan Bulan Januari-Desember 2013

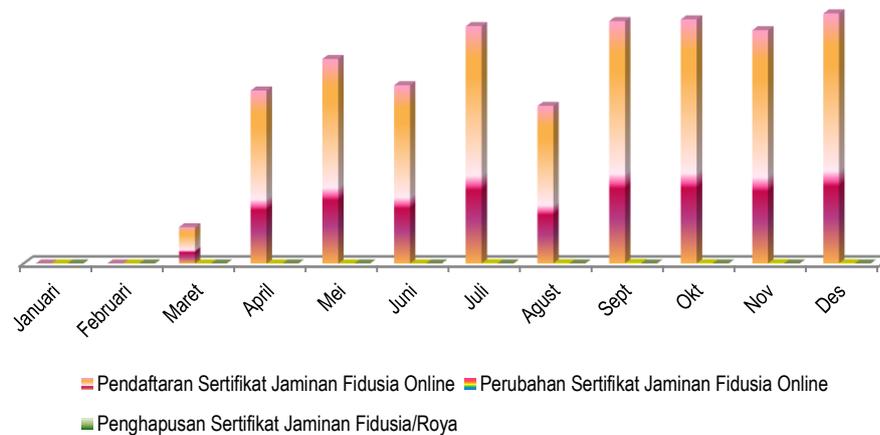


10. Kegiatan Pendaftaran dan Pemrosesan Fidusia sebagai berikut:
- Pendaftaran Sertifikat Jaminan Fidusia Online = 5.862.747 Pendaftaran
 - Perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia Online = 5.732 berkas
 - Penghapusan Sertifikat Jaminan Fidusia/Roya = 281 berkas

PERMOHONAN SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA Bulan Januari-Desember 2013

NO	BULAN	Pendaftaran Sertifikat Jaminan Fidusia Online	Perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia Online	Penghapusan Sertifikat Jaminan Fidusia/Roya
1	Januari	0	0	0
2	Februari	0	0	2
3	Maret	108955	0	10
4	April	518266	0	2
5	Mei	612854	27	3
6	Juni	534028	31	0
7	Juli	711008	880	9
8	Agust	471983	638	6
9	Sept	726401	1302	24
10	Okt	731362	911	57
11	Nov	698821	817	47
12	Des	749069	1126	121
Total		5.862.747	5.732	281

**Grafik Permohonan Sertifikat Jaminan Fidusia
Bulan Januari-Desember 2013**



11. Pelayanan Fidusia secara elektronik

Bulan Maret 2013 dilaksanakan pelayanan Fidusia berbasis IT dan hanya membutuhkan waktu 15 menit dengan menghilangkan banyak prosedur yang tidak perlu dan tidak diamanahkan UU serta mengoptimalkan fungsi *web service* bekerjasama dengan bank persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Dengan sistem pendaftaran *online* yang akan dicapai adalah pelayanan yang transparan, cepat dan akuntabel, sehingga dapat memperbaiki sistem pelaporan keuangan negara menjadi lebih baik dan sistem pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan menjadi sangat memadai.

Perubahan lainnya yang telah dilakukan adalah memotong prosedur yang tidak perlu untuk menghindari lingkaran pengurusan yang tak berujung. Perubahan tersebut pada dasarnya sudah memberikan dampak yang signifikan kepada dunia usaha dengan indeks peringkat kemudahan berusaha dari World Bank IFC yang meningkat. Namun hal tersebut masih perlu diperbaiki terus karena negara lain terus memperbaiki sistem pendaftaran usahanya sehingga posisi Indonesia setiap tahun menjadi turun peringkat.



Untuk mendukung pelaksanaan reformasi kemudahan berusaha dan penyempurnaan pelayanan fidusia online diselenggarakan penandatanganan kerjasama antara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan International Finance Cooperation (IFC), dimana tindak lanjut dari penandatanganan kerjasama tersebut adalah pelaksanaan study best practice ke beberapa Negara, diantaranya ke Canada dan Australia.



12. Pelatihan Pemahaman Materi dan Teknis Pelaksanaan Operasional Sistem Administrasi Badan Hukum dan materi E-Notaris lainnya pada 11 Kota di Indonesia

Dalam rangka peningkatan pelayanan jasa hukum kepada masyarakat (khususnya calon notaris) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Tahun Anggaran 2013 diselenggarakan pelatihan SABH tanpa dipungut biaya untuk calon notaris, agar calon notaris tersebut dapat memahami SABH.

Sampai dengan Tahun 2011 setiap Notaris yang akan diangkat wajib mengikuti pelatihan SABH yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum bekerjasama dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI) dengan pembebanan biaya pelatihan yang dikenakan oleh INI. Akibat adanya permasalahan internal dalam kepengurusan Ikatan Notaris Indonesia maka pelatihan notaris pada tahun 2012 tidak dapat dilaksanakan. Untuk menunjang kinerja pelayanan publik kepada masyarakat maka Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melaksanakan sendiri pelatihan SABH tersebut tanpa dipungut biaya, dengan anggaran yang dibebankan pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Pelatihan diawali dengan *Training of Trainner* yang diselenggarakan di Jakarta, dengan peserta Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah, Ikatan Notaris Indonesia, Program Studi Kenotariatan, dalam rangka memberikan bekal untuk membantu pelaksanaan pelatihan pada 11 wilayah di Indonesia.



Pelatihan Pemahaman Materi dan Teknik Pelaksanaan Operasional Sistem Administrasi Badan Hukum dan materi E-Notaris lainnya pada 11 Kota di Indonesia

13. Pengangkatan Notaris secara online

Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang kenotariatan, dilakukan terobosan dengan adanya aplikasi notariat online, dimana pemohon pengangkatan notaris dapat melihat peta wilayah notaris yang masih dapat dilakukan pengangkatan notaris baru serta perpindahan notaris, dan pelayanan yang dilakukan secara FIFO (First In First Out). Dengan pelayanan kenotariatan yang transparan dan akuntabel dalam upaya menuju pelayanan prima.



14. Rapat Kerja Terbatas Balai Harta Peninggalan

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang merupakan pembina teknis Balai Harta Peninggalan yang dilaksanakan oleh Direktorat Perdata melakukan rapat kerja terbatas dalam rangka melakukan persamaan persepsi di seluruh Balai Harta Peninggalan dan kebijakan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum serta dalam upaya untuk melakukan peningkatan pelayanan dan melakukan pembahasan terhadap permasalahan yang ada untuk dapat memberikan solusi dan rekomendasi pelaksanaan pelayanan Balai Harta Peninggalan ke depan.

Rapat Kerja Balai Harta Peninggalan



15. Memberikan Pendapat Hukum Umum

Pelaksanaan tugas memberikan pendapat hukum yang dilaksanakan selama Tahun 2013 adalah:

- a. Memberikan pendapat hukum melalui surat Nomor: M.HH.AH.03.04-12 tanggal 11 Februari 2013 sehubungan dengan surat Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor: R-402/M.Sesneg/D-4/PU.07/12/2012 tanggal 19 Desember 2012 tentang permohonan pendapat hukum atas permohonan rehabilitasi;
- b. Memberikan pendapat hukum melalui surat Nomor: AHU.3.HM.05.02-16 tanggal 21 November 2013 sehubungan dengan surat Nomor: R0029/London/130910 tentang pengenaan hukuman mati kepada Gareth Cashmore;
- c. Memberikan pendapat hukum melalui surat Nomor: AHU.3.HM.05.02-17 tanggal 21 November 2013 sehubungan dengan surat Nomor: R00316/London/130920 tentang pengenaan hukuman mati kepada warga negara Inggris an. Lindsay June Sandiford.

2. Memberikan Pendapat Hukum terkait Grasi

Pelaksanaan tugas memberikan pendapat hukum yang dilaksanakan selama Tahun 2013 adalah :

- a. Memberikan Pendapat Hukum terkait grasi kepada Menteri Sekretaris Negara atas permohonan grasi: Eddi Alharison, Asim alias Unyil, Rudi Siswanto alias Lodek bin Suwandi, Yadi Mulyadi alias Bule bin Danang, Yulianto bin Wiro sentono, Marco Archer Cardoso Moreira, Rani Andriani alias Melisa Aprilia, Raheem Agbaje Salami, Tran Thi Bich Hanh, Namaona Denis, Mary Jane Fiesta Veloso dan Rodrigo Gularto.
- b. Mengirimkan Permohonan Pendapat Hukum Grasi atas kepada Menteri Sekertaris Negara atas permohonan grasi atas nama : Granfield Philip Robert alias Philip, Jonoarius Jamang alias Yan, Lapagete bin Lanuhu, dan Andrew Chan.
- c. Memberikan tanggapan/pendapat hukum terkait grasi terpidana mati atas nama Samsul Bahri als Edi Bin Askarik.
- d. Memberikan tanggapan/pendapat hukum terkait grasi terpidana atas nama Moch Yusuf bin Burhanuddin.
- e. Memberikan tanggapan/pendapat hukum terkait grasi terpidana atas nama Supriadi als Supri bin H. Damin
- f. Memberikan pendapat hukum atas permohonan grasi terpidana mati atas nama Ir. Trisno Rahardjo melalui Surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH.Pk.01.02.02-15 tanggal 2013.
- g. Memberikan tanggapan/pendapat hukum terkait grasi terpidana atas nama Myuran Sukumaran Alias Mark (warga negara) Australia melalui surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.H.H.PK.01.02.0-16 tanggal 30 September 2013.

- h. Memberikan tanggapan/pendapat hukum terkait grasi terpidana atas nama Sylvester Obiekwe Nwolise warga negara Nigeria melalui surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.H.H.PK.01.02.0-17 tanggal 30 September 2013.
 - i. Memberikan tanggapan/pendapat hukum terkait grasi terpidana atas nama I Putu Suaka alias Keteg warga negara Indonesia melalui surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.H.H.PK.01.02.0-18 tanggal 30 September 2013.
 - j. Memberikan tanggapan/pendapat hukum terkait grasi terpidana mati atas nama Edi Maulana Sampak warga negara Indonesia melalui surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.H.H.PK.01.02.0-19 tanggal 16 Oktober 2013.
 - k. Memberikan tanggapan/pendapat hukum terkait hukuman mati atas nama Gareth Cashmore.
 - l. Memberikan tanggapan/pendapat hukum terkait hukuman mati atas nama Lindsay June Sandiford.
3. Memberikan keterangan sebagai saksi ahli periode bulan Januari s/d Desember 2013 permintaan dari kepolisian dengan rincian sebagai berikut:

No	Peminta	Jumlah	Keterangan
1.	Polda Metrojaya	5	Tindak Pidana Penganiayaan, Perbuatan tidak menyenangkan, penggelapan dalam jabatan, Hak Cipta, Rahasia Dagang, Perlindungan konsumen.
2	Polres Jakarta Timur	1	Pengrusakan dan Penggelapan
3	Polres Jakarta Pusat	2	Penggelapan, Penipuan, Merek Pencurian dengan pemberatan.
4	Polres Jakarta Selatan	3	Memasuki pekarangan tanpa ijin, Penipuan, Penggelapan.
5	Bareskrim Polri	1	Memberikan keterangan Palsu ke dalam Akta Autentik dan menggunakannya.
6	Polda Metrojaya Politan	3	Pencurian data melalui Internet, Penipuan dan Penggelapan.
7	Polres Jakarta Timur	1	Penipuan dan atau Penggelapan
8	Polres Jakarta Pusat	1	Penggelapan.
9	Kabareskrim Polri	1	Penggunaan Merek secara tanpa hak.
10	Kapolres Metro	4	Penipuan, Perbuatan tidak menyenangkan dan atau Pencemaran nama baik atau Fitnah, Penggelapan.
11	Polres Jakarta Pusat	2	Penipuan dan atau Penggelapan, Pencurian dan atau tindak pidana tidak menyenangkan.
12	Polda Metrojaya	3	Tindak pidana badan hukum dengan sengaja tidak menyediakan, memberikan informasi publik atas dasar permintaan, Psl 52 UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Tindak pidana menerobos sistem elektronik dan/atau penggelapan dalam jabatan. Tindak pidana pencemaran nama baik dan/atau fitnah dan/atau perbuatan tidak menyenangkan.
13	Polres Pelabuhan Tanjung Priuk	1	Tindak Pidana Pencurian Minyak CPO
14	Polda Kepulauan Bangka Belitung	1	Tindak Pidana Korupsi Keramba Jaring Apung (KJA).
15	Polda Metrojaya	6	Tindak Pidana Penipuan dan pemalsuan.
16	Polres Jakarta Pusat	2	Tindak Pidana Penipuan dan perbuatan tidak menyenangkan.
17	Polres Jakarta Selatan	2	Tindak Pidana Pemalsuan dan pencurian dan perlindungan terhadap konsumen.

18	Polres Jakarta Utara	2	Tindak Pidana Pembunuhan berencana dan perbuatan tidak Menyenangkan
19	Polres Jakarta Timur	1	Tindak pidana penghinaan
20	Polda Metrojaya	1	Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan
21	Polres Jakarta Pusat	1	Tindak Pidana Memberikan Keterangan Palsu
22	Polres Ajakarta Selatan	2	Tindak Pidana Penipuan dan Perbuatan Tidak Menyenangkan
23	Polres Jakarta Timur	2	Tindak Pidana Penghinaan dan Penggunaan Surat Palsu
24	Polda Metro Jaya	2	Tindak Pidana Pencurian dan pemalsuan surat tentang merek.
25	Polres Jakarta Pusat	1	Tindak Pidana pengrusakan terhadap barang.
26	Polres Jakarta Selatan	3	Tindak Pidana Pencurian, perbuatan tidak menyenangkan dan tidak menyerahkan dokumen status kepemilikan tanah.
27	Polres Tangerang	1	Tindak Pidana Penipuan dan penggelapan.
28	Polda Jakarta Timur	5	Tindak Pidana Korupsi, Penggelapan, penipuan dan pencemaran nama baik.
29	Polda Metrojaya	2	Tindak Pidana pencucian uang dan penipuan melalui internet.
30	Polres Jakarta Pusat	5	Tindak Pidana Penipuan dan penggelapan, pengrusakan barang serta memasuki pekarangan orang lain tanpa hak.
31	Polres Jakarta Utara	1	Tindak Pidana Perbuatan tidak menyenangkan dan pengrusakan.
32	Polres Jakarta Timur	2	Tindak Pidana Pembunuhan berencana dan perbuatan tidak menyenangkan
33	Polres Jakarta Utara	1	Tindak pidana tidak menyenangkan dan atau pengrusakan.
34	Polres Tangerang Kota	1	Tindak pidana penipuan dan penggelapan.
35	Polda Maluku	1	Tindak pidana penipuan dan penggelapan
36	Polres Jakarta Selatan	8	Tindak pidana penipuan dan penggelapan. Tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan. Tindak pidana penipuan dan penggelapan. Tindak pidana pengrusakan. Tindak pidana fitnah. Tindak pidana penganiayaan dan perbuatan tidak menyenangkan. Tindak pidana penipuan dan penggelapan.
37	Polres Jakarta Pusat	2	Tindak Pidana Melawan hak masuk kedalam rumah atau pekarangan orang lain. Tindak pidana menempatkan keterangan palsu kedalam AKTA Autentik dan/atau pemalsuan surat.
38	Polres Jakarta Timur	1	Tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan dan pencemaran nama baik.
39	Polres Jakarta Utara	1	Tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan dan/atau pengrusakan.
Jumlah		85 Berkas	

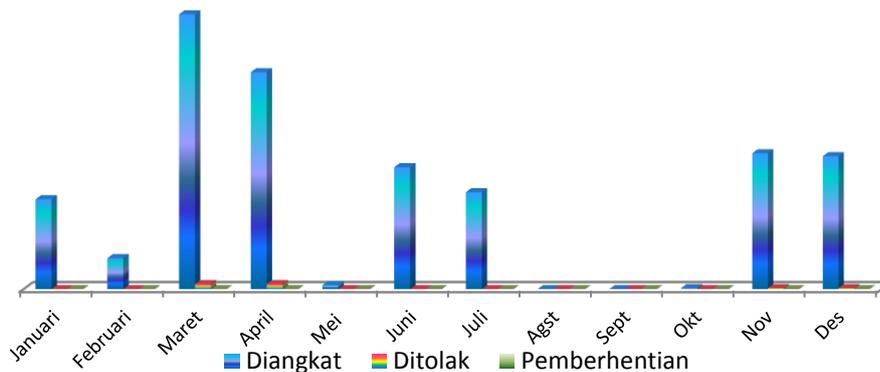
4. Permohonan PPNS meliputi Pengangkatan, Mutasi, KTP, Pemberhentian maupun Seleksi Administrasi dalam Periode Januari-Desember 2013 meliputi sebagai berikut:

**PERMOHONAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS)
Bulan Januari-Desember 2013**

No	Bulan	Permohonan Yang Diselesaikan		
		Pengangkatan		Pemberhentian
		Diangkat	Ditolak	
1	Januari	90	0	0

2	Februari	31	0	0
3	Maret	275	5	0
4	April	217	5	0
5	Mei	4	0	0
6	Juni	122	0	0
7	Juli	97	0	0
8	Agst	0	0	0
9	Sept	0	0	0
10	Okt	1	0	0
11	Nov	136	1	0
12	Des	133	1	0
Total		1106	12	0

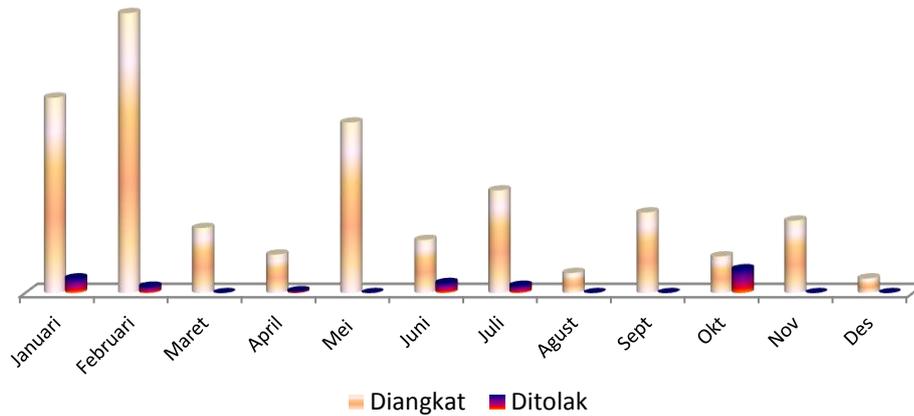
Grafik Pelayanan Penyelesaian Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Januari-Desember 2013



PERMOHONAN MUTASI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) Bulan Januari-Desember 2013

No	Bulan	Permohonan Yang Diselesaikan	
		Diangkat	Ditolak
1	Januari	213	16
2	Februari	305	7
3	Maret	71	0
4	April	42	2
5	Mei	186	0
6	Juni	58	11
7	Juli	112	8
8	Agust	22	0
9	Sept	88	0
10	Okt	40	26
11	Nov	79	0
12	Des	16	0
Total		1232	70

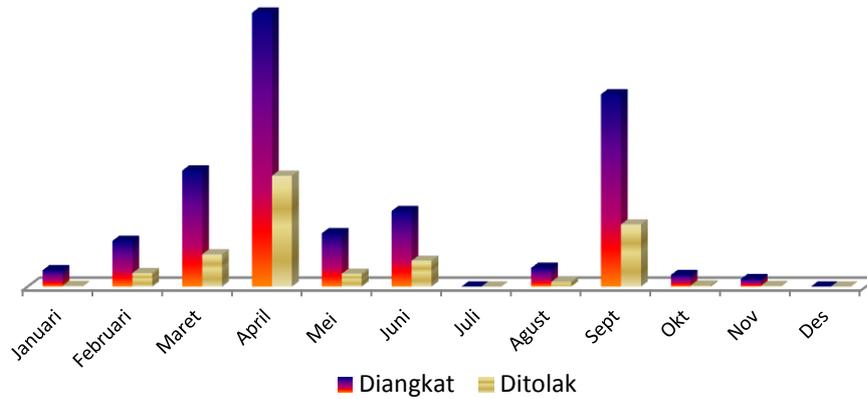
**Grafik Pelayanan Mutasi
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
Bulan Januari-Desember 2013**



**PERMOHONAN SELEKSI ADMINISTRASI
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS)
Bulan Januari-Desember 2013**

No	Bulan	Permohonan Yang Diselesaikan	
		Diangkat	Ditolak
1	Januari	28	1
2	Februari	78	23
3	Maret	198	55
4	April	467	189
5	Mei	91	22
6	Juni	129	44
7	Juli	0	0
8	Agust	32	8
9	Sept	328	106
10	Okt	20	2
11	Nov	13	1
12	Des	0	0
Total		1384	451

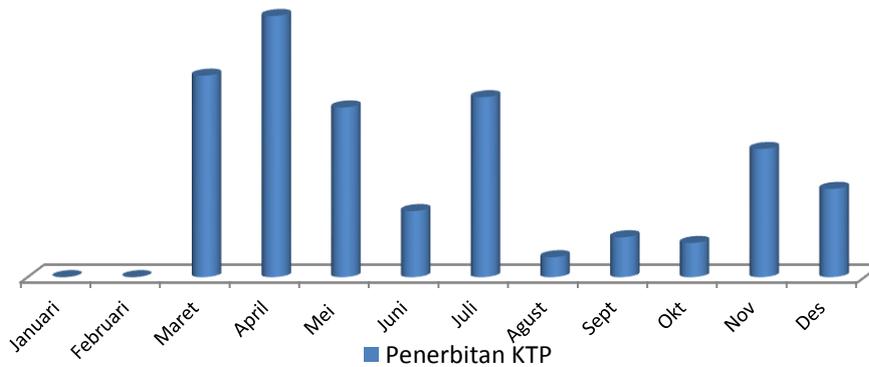
Grafik Pelayanan Seleksi Administrasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bulan Januari-Desember 2013



PERMOHONAN PELAYANAN PENERBITAN KTP PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) Bulan Januari-Desember 2013

No	Bulan	Penerbitan KTP
1	Januari	0
2	Februari	0
3	Maret	354
4	April	459
5	Mei	298
6	Juni	116
7	Juli	316
8	Agust	35
9	Sept	70
10	Okt	60
11	Nov	225
12	Des	155
Total		2088

**Grafik Penyelesaian Pelayanan Penerbitan KTP
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
Bulan Januari-Desember 2013**

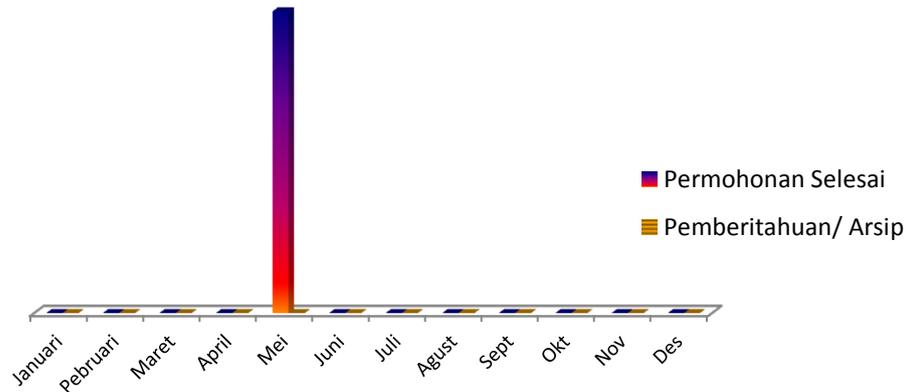


5. Permohonan surat penegasan status kewarganegaraan orang-orang keturunan asing yang tidak memiliki dokumen kewarganegaraan dan kependudukan, dari bulan Januari sampai dengan Desember 2013 telah diselesaikan dan mendapat Keputusan Menteri, sebanyak 1 orang/permohonan.

**PERMOHONAN PENEGASAN STATUS KEWARGANEGARAAN ORANG-ORANG KETURUNAN ASING YANG TIDAK MEMILIKI DOKUMEN KEWARGANEGARAAN DAN KEPENDUDUKAN
Bulan Januari-Desember 2013**

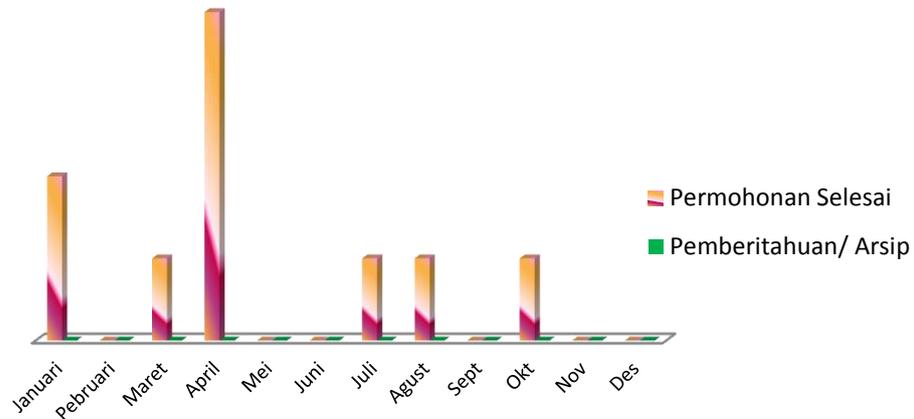
Bulan	Permohonan Selesai	Pemberitahuan/ Arsip
Januari	0	0
Pebruari	0	0
Maret	0	0
April	0	0
Mei	1	0
Juni	0	0
Juli	0	0
Agustus	0	0
September	0	0
Oktober	0	0
November	0	0
Desember	0	0
Total	1	0

Grafik Penyelesaian Penegasan Status Kewarganegaraan Orang-orang Keturunan Asing Yang Tidak Memiliki Dokumen Kewarganegaraan dan kependudukan Bulan Bulan Januari-Desember 2013



6. Permohonan Pendaftaran Partai Politik, dari bulan Januari-Desember 2013 Sebagai Badan Hukum nihil.
7. Permohonan Pendaftaran Perubahan AD & ART dan Perubahan Kepengurusan Partai Politik, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. telah diselesaikan dan mendapat keputusan Menteri, sebanyak 10 permohonan.
 - b. bersifat pemberitahuan/arsip, sebanyak 0 permohonan.

**Grafik Pendaftaran Perubahan AD/ ART dan
Kepengurusan Partai Politik
Bulan Januari-Desember 2013**

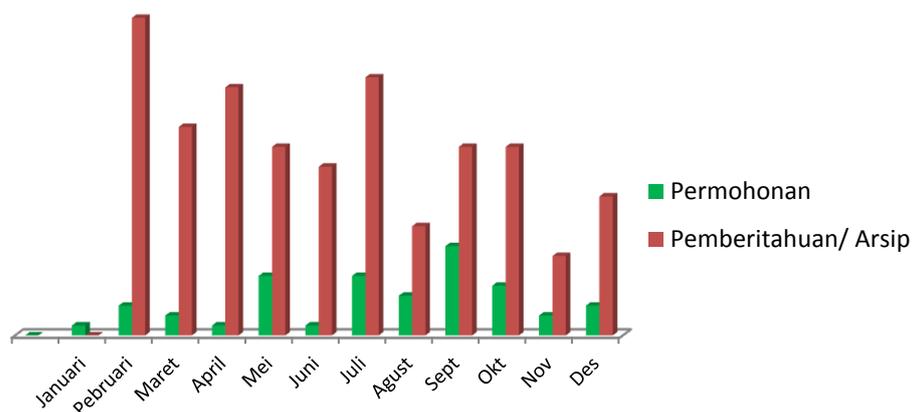


8. Surat-surat Masuk Lain Berkaitan dengan Partai Politik.

Penyelesaian Surat-surat masuk sebanyak 253 surat, dengan rincian :

- a. Telah ditelaah dan dijawab, sebanyak 43 surat,
- b. Bersifat pemberitahuan, sebanyak 211 surat,
- c. Sisanya sebanyak 26 surat masih dalam proses penyelesaian.

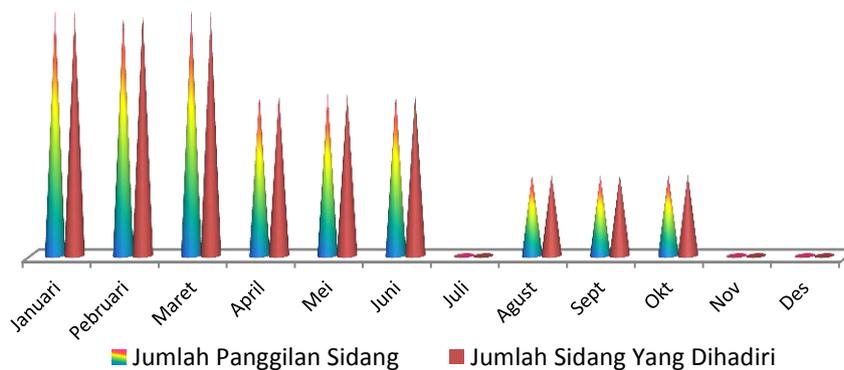
**Grafik Penyelesaian
Surat-Surat Masuk Lain Berkaitan dengan Partai Politik Bulan
Januari-Desember 2013**



9. Permohonan salinan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum partai politik yang hilang atau rusak dari bulan Januari-Desember 2013: nihil.

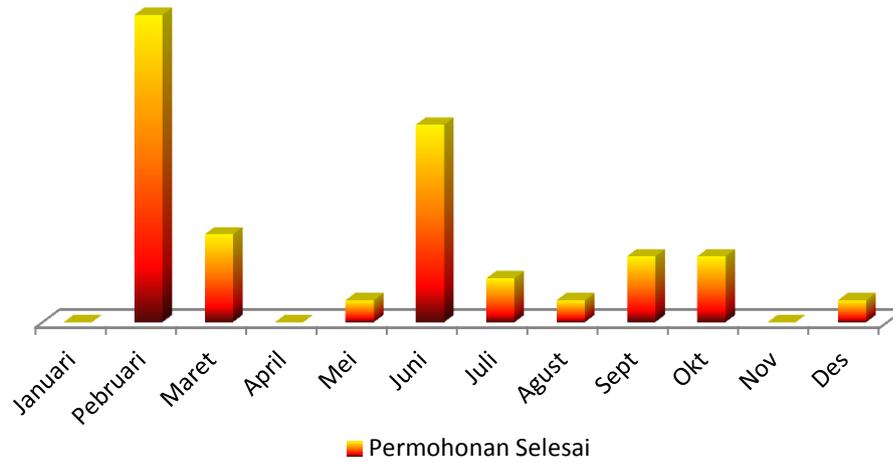
10. Permohonan salinan Keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan AD & ART Badan Hukum Partai Politik yang hilang atau rusak dari bulan Januari-Desember 2013: nihil.
11. Surat panggilan sidang mewakili Menteri Hukum dan HAM dalam menyelesaikan gugatan dari partai politik di PTUN dan PN sebanyak 18 surat dan telah dihadiri oleh pegawai pada Seksi Pendaftaran Partai Politik.

**Grafik Panggilan Sidang Dalam Menyelesaikan Gugatan
Partai Politik Pada Pengadilan Tata Usaha dan
Pengadilan Negeri
Bulan Januari-Desember 2013**



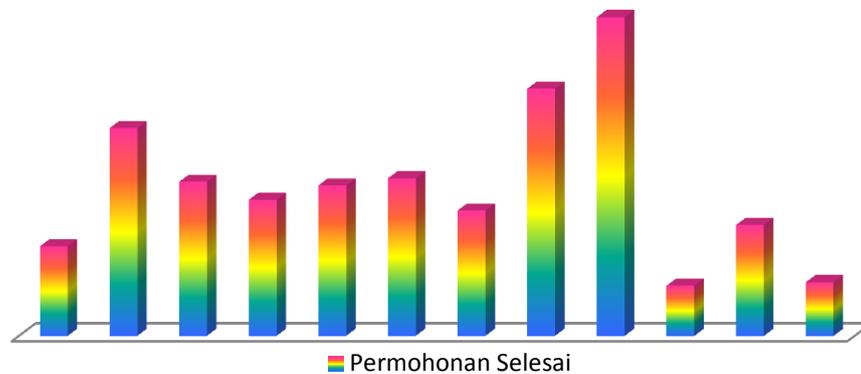
12. Permohonan pernyataan memilih kewarganegaraan Republik Indonesia Republik Indonesia berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan yaitu permohonan bagi anak yang berkewarganegaraan ganda terbatas harus mengajukan permohonan pernyataan memilih kewarganegaraan RI paling lambat 3 (tiga) tahun setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin. Permohonan pernyataan memilih kewarganegaraan RI tersebut pada Januari-Desember 2013 sebanyak 38 berkas permohonan yang sudah selesai diproses.

**Grafik Permohonan Pendaftaran Pernyataan Memilih
Kewarganegaraan Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2006
Bulan Januari-Desember 2013**



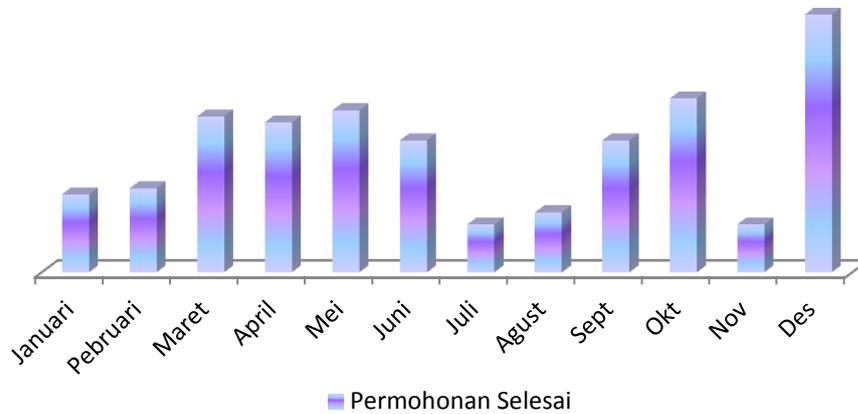
13. Permohonan Surat Keterangan tentang Kehilangan Kewarganegaraan R.I berdasarkan Pasal 23 dan Pasal 26 adalah sebanyak 488 berkas dan telah diselesaikan semua.

**Grafik Permohonan Surat Keterangan Kehilangan
Kewarganegaraan Indonesia
Januari-Desember 2013**



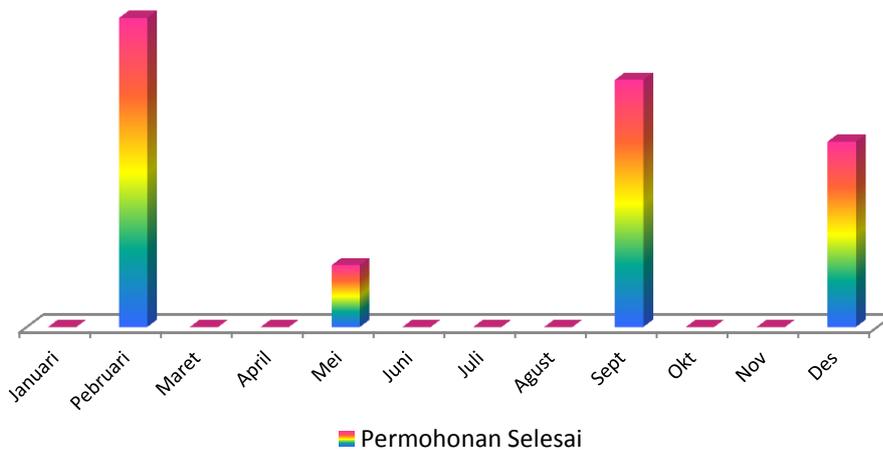
14. Permohonan Surat Keterangan Status Kewarganegaraan RI sebanyak 247 berkas.

**Grafik Permohonan
Keterangan Status Kewarganegaraan Republik Indonesia
Bulan Januari-Desember 2013**



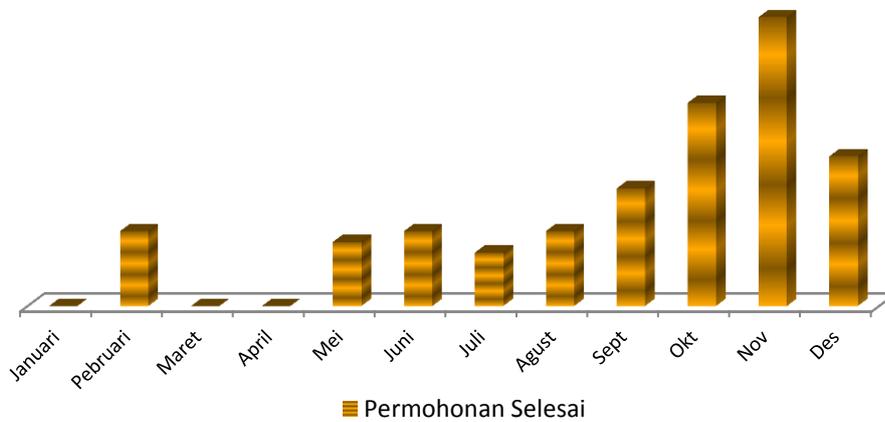
15. Penyelesaian Permohonan Pasal 8 undang-undang Nomor 12 tahun 2006 jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2007 sebanyak 13 permohonan.

**Grafik Permohonan
Pasal 8 Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2006
Bulan Januari-Desember 2013**



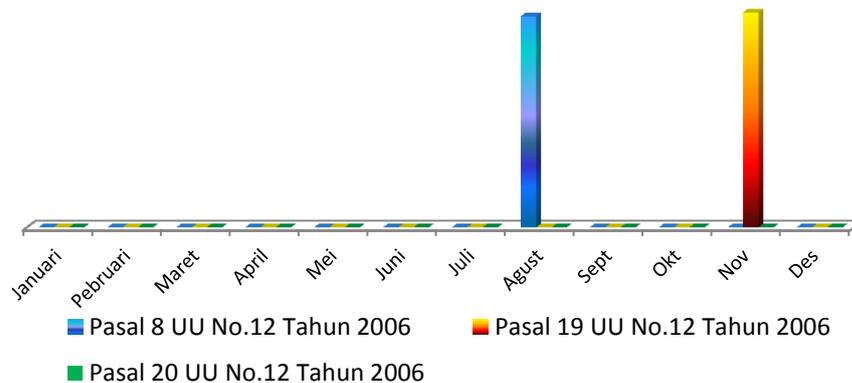
16. Penyelesaian Permohonan Pasal 19 Undang-undang Nomor 12 tahun 2006 jo Peraturan Pemerintah Nomor M.02-HL.05.06 Tahun 2006 Tanggal 26 September 2006, sebanyak 103 Permohonan.

**Grafik Permohonan
Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006
Bulan Januari-Desember 2013**



17. Penyelesaian permohonan Pengumuman nama yang memperoleh Kewarganegaraan Pada Pasal 8, Pasal 19 dan Pasal 20 UU Nomor 12 Tahun 2006 dalam Berita Negara pada bulan Januari-Desember 2013.

**Grafik Pengumuman
Nama Yang Memperoleh Kewarganegaraan
Dalam Berita Negara
Bulan Januari-Desember 2013**



18. Informasi penting lainnya, adanya beberapa program kegiatan pada Direktorat Tata Negara di Januari-Desember 2013 antara lain:
- a. Kegiatan pemantauan Pelaksanaan Pewarganegaraan ke-6 Provinsi yakni: Sumatera Utara, Jawa Timur, Banten, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur.

- b. Melaksanakan kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Tim Pemeriksaan dan Penelitian Penyelesaian Pewarganegaraan yang dilaksanakan pada tanggal 17-19 Mei 2013 di Hotel Aston Braga Bandung dan pada tanggal 11 s.d. 13 November 2013 bertempat di Hotel GH Universal, Bandung. Berita Negara untuk nama-nama yang telah menjadi WNI telah dilaksanakan pada tahun 2013 sebanyak 1033 nama yang akan di terbitkan dalam Berita Negara.
- c. Pemberian legalisasi status kewarganegaraan Republik Indonesia kepada 87.584 Warga Negara Indonesia di wilayah Kerajaan Saudi Arabia dengan dipusatkan di kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia di kota Jeddah.
- d. Melaksanakan kegiatan Evaluasi 6 (enam) Tahun Pelaksanaan Legalisasi Status Kewarganegaraan Republik Indonesia di Malaysia, kegiatan yang dilaksanakan pada 17-19 Mei 2013 bertempat di Hotel Aston Braga, Bandung. Dalam kegiatan tersebut Sub Direktorat Kewarganegaraan Direktorat Tata Negara mengundang para konsul dari beberapa kantor perwakilan Republik Indonesia di Malaysia, seperti dari perwakilan Tawau, Johor Bahru, Kuala Lumpur, Penang, dll. Tujuan dilaksanakan kegiatan tersebut sebagai sarana komunikasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan Direktorat Tata Negara di Malaysia selama 6 (enam) tahun sejak tahun 2006 hingga tahun 2012.
- e. Membangun Forum Koordinasi Permasalahan-Permasalahan Kewarganegaraan, tim ini bertugas menginventarisir daftar masalah di bidang kewarganegaraan khususnya implementasi pelayanan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan R.I serta membahas perkembangan di masyarakat maupun isu-isu yang berkembang guna mendapatkan masukan kepada pimpinan maupun kepada instansi pemangku kebijakan dan lembaga legislatif. Forum ini terdiri dari Ditjen Administrasi Hukum khususnya Direktorat Tata Negara, Direktorat Status Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal PBHI dan WNI Kementerian Luar Negeri, Direktorat Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

19. Pelaksanaan Tugas Daktiloskopi

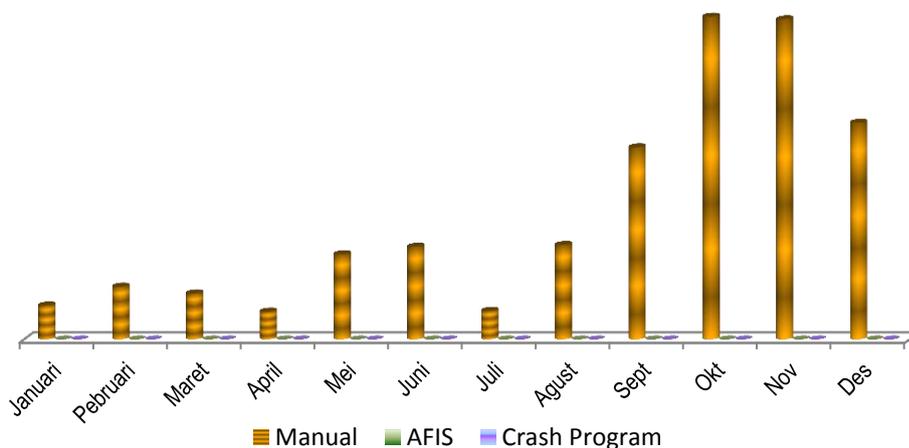
a. Melakukan penataan slip sidik jari untuk dirumus

Untuk memudahkan dalam melakukan perumusan telah dilakukan pengelompokan slip berdasarkan instansi yang mengirim serta bulan dan tanggal pengambilan slip sekaligus pemeriksaan, apakah slip tersebut layak atau tidak untuk dirumus. Terhadap slip yang layak untuk dirumus diberi nomor urut dan nomor agenda, sedangkan bagi slip yang tidak layak untuk di rumus disimpan tersendiri.

b. Meningkatkan hasil perumusan sidik jari

Hasil pelaksanaan perumusan sidik jari secara rutin dari Januari-Desember 2013 sebanyak 52.923 slip sidik jari.

**Grafik Penyelesaian Perumusan Sidik Jari
Bulan Januari-Desember 2013**



c. Kegiatan Pengambilan data sidik jari pegawai Kementerian Hukum dan HAM RI di daerah berdasarkan Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-01.KP.07.02 Tahun 2011 tanggal 7 Juli 2011.

Direktorat Daktiloskopi telah melaksanakan Pengambilan data sidik jari pegawai dari bulan Januari sampai dengan bulan Nopember 2013 dilakukan pada 33 (tiga puluh tiga) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Khususnya pada UPT Pemasarakatan yaitu:

**Rekapitulasi Pengambilan Data Sidik Jari Pegawai
Kementerian Hukum dan Ham RI
Tahun 2013**

No	Nama Kanwil/UPT	Jumlah yang diambil
1.	Aceh	238 orang
2.	Bali	251 orang
3.	Bangka Belitung	158 orang
4.	Banten	198 orang
5.	Bengkulu	261 orang
6.	DI Yogyakarta	235 orang
7.	DKI Jakarta	198 orang*
8.	Gorontalo	170 orang
9.	Jambi	305 orang
10.	Jawa Barat	454 orang
11.	Jawa Tengah	235 orang
12.	Jawa Timur	194 orang
13.	Kalimantan Barat	159 orang*
14.	Kalimantan Selatan	149 Orang
15.	Kalimantan Tengah	194 orang
16.	Kalimantan Timur	217 Orang
17.	Kepulauan Riau	100 orang
18.	Lampung	403 orang
19.	Maluku (Kanwil)	108 orang
20.	Maluku Utara (Kanwil)	78 orang
21.	NTB	152 Orang
22.	NTT (Kanwil)	105 orang
23.	Riau	258 orang
24.	Sulawesi Barat	63 orang
25.	Sulawesi Selatan	294 orang
26.	Sulawesi Tengah	213 orang
27.	Sulawesi Tenggara	240 orang
28.	Sulawesi Utara	217 orang
29.	Sumatera Barat	203 orang
30.	Sumatera Selatan	244 orang
31.	Sumatera Utara	263 orang
32.	Papua (Kanwil)	90 orang
33.	Papua Barat (Kanwil)	142 orang
Total		6.488 orang

- d. Direktorat Daktiloskopi telah melaksanakan Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pengelolaan Dokumen dan Arsip Sidik Jari pada Lembaga Masyarakat/Rutan/Bapas di Daerah yaitu melaksanakan kunjungan kerja ke 4 (empat) daerah yaitu : Propinsi Kalimantan Barat, Propinsi Bangka Belitung, Propinsi Nusa Tenggara Barat dan Propinsi Jawa Tengah
- e. Direktorat Daktiloskopi juga mengadakan Kegiatan Bimbingan Teknis Materi Daktiloskopi yaitu : Propinsi Gorontalo, Propinsi Jawa Timur, Propinsi Aceh dan Propinsi Lampung.
- f. Direktorat Daktiloskopi mengadakan Penataan kembali Arsip Slip Sidik Jari di Gedung Arsip Keramat Raya, yang telah berantakan dikarenakan roof opeck tempat penyimpanan arsip dibongkar dan belum dikembalikan.

g. Direktorat Daktiloskopi mengadakan Konsinyering untuk Otomasi Arsip Sidik Jari yang direncanakan diadakan pada Tahun Anggaran 2014.

20. Penyelesaian Permintaan MLA dan Ekstradisi

Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai Otoritas Pusat penanganan MLA telah menerima 24 (dua puluh empat) permintaan MLA dari negara lain pada tahun 2013. Sebanyak 19 (Sembilan belas) permintaan telah dianalisa dan ditindaklanjuti kepada institusi yang berwenang yaitu: Kepolisian, Kejaksaan dan KPK. Sementara 5 permintaan masih dalam proses analisa. Sebagai catatan disampaikan bahwa 5 permintaan merupakan tindak lanjut dari permintaan yang disampaikan sebelum tahun 2013. Jumlah permintaan MLA yang dikirimkan kepada negara lain sebanyak 4 terkait tindak pidana korupsi, penggelapan, dan penipuan yang disampaikan oleh KPK. Permintaan MLA kepada pemerintah Singapura telah dinyatakan memenuhi persyaratan oleh *Central Authority*, sehingga *production order* untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh penyidik KPK telah diterbitkan.

Pada bidang ekstradisi pada tahun 2013 telah dilaksanakan 2 (dua) penyerahan termohon ekstradisi kepada negara peminta yaitu Italia (tanggal 9 desember 2013 di Bali) dan Republik Ceko (tanggal 15 Maret 2013 di Jakarta), serta 1 (satu) penyerahan pelaku kejahatan ke Usbekistan (tanggal 5 Desember 2013 di Jakarta) melalui proses deportasi. Terkait dengan permintaan ekstradisi dari Pemri kepada negara lain dapat dilaporkan bahwa permohonan ekstradisi Pemri kepada Pemerintah Australia atas nama "AKA" telah dikabulkan dan akan diserahkan selambat-lambatnya tanggal 19 Februari 2014.

1. Tim Antardep Gugus Tugas Otoritas Pusat

a. Rapat Konsinyer Tim Gugus Tugas Antardep Pembahasan Perkembangan Permintaan Ekstradisi Imran Firasat Sulaiman,

Bank Secrecy, dan Hambatan-hambatan dalam Proses Pelaksanaan MLA (Royal Hotel, Bogor, 12-14 April 2013);

1) Rapat konsinyering telah berhasil menyusun draft permintaan ekstradisi yang baru sesuai dengan arahan yang disampaikan oleh Pemerintah Spanyol. Sebagai catatan draft tersebut telah disampaikan secara langsung oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada Otoritas Pusat di Spanyol.

2) Selain itu rapat konsinyering tersebut di atas juga telah berhasil mengidentifikasi beberapa kemungkinan solusi dari kendala-kendala terkait *Bank Secrecy*. Hal ini merupakan masukan dari ahli dan pengamat perbankan yang turut serta dalam rapat konsinyering tersebut. Beberapa hal diantaranya agar Kemenkumham sebagai *Central Authority* akan membuat SOP khusus dalam penanganan MLA yang terkait dengan kerahasiaan bank.

b. Rapat Konsinyer Pembahasan Terjemahan Perjanjian Ekstradisi antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Negara Berdaulat Papua Nugini (Salak Herritage Hotel, Bogor, 15-17 Mei 2013).

c. Rapat konsinyering telah menghasilkan terjemahan dari Perjanjian Ekstradisi RI-PNG yang telah disetujui oleh seluruh instansi terkait dan draft ini telah dipergunakan pada Penandatanganan pada saat kunjungan Perdana Menteri Negara Berdaulat Papua Nugini beserta beberapa Menteri dan pejabat setingkat Menteri ke Indonesia pada tanggal 16-18 Juni 2013.

2. Kerjasama Antar Lembaga di dalam dan di luar Negeri

a. *Focus Group Discussion* (FGD) “Perspektif nasional pelaksanaan kerjasama internasional *Transfer of Sentenced Person*, Bandung 8-10 Maret 2013

- b. *Workshop International Humanitarian Law In East & Southeast In Asia: Action Towards Its Promotion & Implementation*, Beijing, 27-28 Juni 2013
 - c. *Basic Course* Hukum Humaniter Internasional Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 26-30 Agustus 2013;
 - d. Pelatihan Bersama I di Kementerian Hukum dan HAM
 - e. Pelatihan Bersama II di Gedung UNODC Jakarta
 - f. Senior Level Workshop on Extradition and MLA in East Asia and The Pacific di Korea Selatan, tanggal 11-12 Juli 2013.
3. Partisipasi Central Authority Dalam Forum Internasional
- a. *The 7th Meeting of the Open Ended Intergovernmental Working Group on Asset Recovery*
 - 1) Agenda pokok pada Pertemuan ke-tujuh Kelompok Kerja Asset Recovery adalah.
 - b. Kesimpulan yang diperoleh adalah terkait peran FIU dalam *success story* yang disampaikan oleh negara-negara Pokja. *The 5TH Convention of State Parties to the United Nations Convention against Corruption / the 5th CoSP UNCAC*
 - 1) Konferensi ke-lima negara pihak dari Konvensi PBB menentang Korupsi (*the 5TH Convention of State Parties to the United Nations Convention against Corruption / the 5th CoSP UNCAC*) dilaksanakan di Panama City, Panama pada tanggal 25 November – 02 Desember 2013.
 - 2) Pada Pertemuan ke-5 Konferensi Negara-negara Pihak UNCAC kali ini terdapat 4 (empat) agenda pokok, yaitu:
 - a) Agenda Pokok yang terdiri dari mata agenda *general discussion, prevention, asset recovery dan international cooperation*, review implementasi, dan *technical assistance*;
 - b) Konsultasi informal Rancangan Resolusi dan Keputusan-keputusan pada Konferensi Negara-Negara Pihak pada UNCAC ke-5;

- c) 4th Resumed Session of the Implementation Review Group (IRG) of the UNCAC;
 - d) Bilateral Meeting dengan counterpart *Central Authority* dari Kanada, Swiss, dan Arab Saudi.
- 3) Kementerian Hukum dan HAM diberi tugas dan tanggung jawab terkait agenda Asset Recovery dan International Cooperation, mengikuti Konsultasi informal Rancangan Resolusi dan Keputusan-keputusan pada Konferensi Negara-Negara Pihak pada UNCAC ke-5, serta persiapan materi terkait pertemuan bilateral dengan Kanada, Swiss dan Arab Saudi;
- 4) Kesimpulan yang diperoleh adalah dengan diadopsinya rancangan resolusi gabungan antara Amerika Serikat dan Nigeria terkait *asset recovery*, dimana delegasi RI juga berpartisipasi dalam pembahasannya dan bahkan turut menyumbang satu paragraf operasional dalam rancangan resolusi tersebut, maka perlu diperhatikan hal-hal yang terdapat dalam resolusi tersebut terutama yang terkait dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM RI, selaku otoritas pusat dalam hal pengajuan, penanganan dan penyelesaian proses *mutual legal assistance* (MLA) dan ekstradisi yang didasarkan pada UNCAC.
4. Disamping itu, Delri memanfaatkan waktu disela-sela penyelenggaraan konferensi untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Delegasi Kanada, Swiss dan Arab Saudi. Operasional Panitia Tetap Sekretariat Hukum Humaniter
- a. Rapat Konsinyering Pembahasan dan Penelahan Tanggapan Rancangan Undang – Undang (RUU) Kepalangmerahan Hotel Grand Ussu – Cisarua Bogor, 26-30 Agustus 2013
 - b. Pemantauan dan penerapan hukum humaniter pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nanggroe

Aceh Darussalam dan pusat kajian hukum humaniter dan Hak Asasi Manusia Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 23 Nopember 2013;

- c. Pemantauan dan penerapan hukum humaniter pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jawa Tengah dan Pusat Kajian Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 23 Nopember 2013;
- d. Pemantauan dan penerapan hukum humaniter pada kantor wilayah kementerian hukum dan hak asasi manusia Nusa Tenggara Barat dan pusat kajian hukum dan hak asasi manusia Fakultas Hukum Universitas Mataram, 28-30 November 2013.

5. Pengembangan Perjanjian Internasional di Bidang Otoritas Pusat

- a. Pembentukan Perjanjian Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam.
- b. Pembentukan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Papua Nugini.
- c. Perjanjian Kerjasama MLA-Ekstradisi Bilateral RI-Brazilia
Perundingan belum terlaksana, direncanakan akan dijadwalkan pada Tahun 2014.
- d. Perjanjian Kerjasama MLA-Ekstradisi Bilateral RI-Perancis
Perundingan belum terlaksana.

6. Apostille Convention

Pada tanggal 31 Oktober 2013 – 4 November 2013 telah dilakukan pertemuan konsultasi dan koordinasi dengan *Hongkong Apostille Service* dan *the Hague Conference on Private International Law Asia Pasific Regional Office* HongKong. Pemilihan HongKong berdasarkan pertimbangan bahwa HongKong merupakan tempat kedudukan *Regional Office* HCCH dan Pemerintah HongKong mempunyai pengalaman yang baik dalam menerapkan *Apostille*

Convention. Pada kunjungan ini, *Deputy Registrar High Court HongKong* menyampaikan 2 (dua) esensi utama dari *Apostille Convention*, yaitu bahwa 1) Negara Pihak bebas untuk menentukan jenis dokumen yang dapat di *apostille*-kan; 2) *competent authority* hanya bertanggungjawab atas keabsahan institusi penerbit dokumen, nama pejabat, dan lambang institusi yang menerbitkan dokumen tersebut. Dalam pertemuan dengan *HCCH Regional Office* Pemerintah Republik Indonesia ditawarkan bantuan aplikasi *e-apostille* dan bantuan lain yang diperlukan jika Pemerintah Republik Indonesia melakukan akses terhadap konvensi tersebut.

7. Uncitral

Salah satu isu yang berada di bawah naungan UNCITRAL dan telah dilakukan beberapa kali pembahasan adalah terkait dengan *Cross Border Insolvency Model Law*. Sebagaimana diketahui, dengan perkembangan perdagangan lintas Negara maka semakin banyak berkembang perusahaan multinasional (*Multi National Company*) yang beroperasi dan melakukan kegiatan bisnisnya di berbagai belahan dunia.

8. AALCO

AALCO merupakan suatu lembaga internasional yang dibentuk oleh negara-negara di Asia dan Africa dimana tujuan didirikannya organisasi ini adalah sebagai badan penasehat (*Advisory Body*) pemerintah negara-negara anggota di bidang hukum Internasional.

9. ASLOM

ASLOM merupakan salah satu kerjasama ASEAN di bidang hukum untuk pertemuan pejabat tingkat eselon I dan di adakan berkala. Pertemuan ASLOM diadakan di Vientianne, Laos pada tanggal 4 – 5 Desember 2013.

Dalam kerangka kerjasama ASLOM, terdapat kelompok kerja pembentukan model perjanjian ekstradisi ASEAN (*ASEAN Working Group on the Model ASEAN Extradition Treaty*). Pertemuan terakhir

dilaksanakan di Bangkok, Thailand pada 12-14 Maret 2012 dan dihadiri pejabat/staf Direktorat Hukum Internasional dan Otoritas Pusat. Pertemuan ASLOM kali ini menghasilkan:

- a. *New Proposal* antara lain: *the regional workshop on comparative studies for law makers on the promulgation of laws and regulation in ASEAN* (usul Indonesia);
- b. *ASEAN international transfer of prisoners* (usul Malaysia) dan *ASEAN Convention on Transfer of Sentenced Persons* (usul Filipina);
- c. *A Working Group to Draft a Model Law for ASEAN Member States to Give Effect to the 2002 ASEAN Agreement on Trans Boundary Haze Pollution* (usulan Singapura);
- d. *Wacana Peningkatan Status Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters among like minded ASEAN member countries menjadi dokumen ASEAN*;
- e. *Development of Regional/Sub-Regional Treaties on Cooperation in Criminal Justice*;
- f. *Development of Model Law on Maritime Security*.
- g. Pernyataan kesediaan RI sebagai tuan rumah penyelenggaraan *working group*, ASLOM ke-16 dan ALAWMM ke-9.

Indonesia melaksanakan komitmen negara sebagai anggota dunia untuk berperan aktif dalam setiap kegiatan dan pengembangan hukum yang selama ini dikoordinir oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM. Selanjutnya telah terjadi komunikasi antara Kepala BPHN dengan Dirjen AHU bahwa BPHN tidak mempunyai cukup anggaran menyelenggarakan sidang ASLOM dan ALAWMM sebagai tuan rumah. Kepala BPHN telah menyurati Dirjen AHU untuk bersedia menjadi *focal point* penyelenggaraan Indonesia sebagai tuan rumah sidang ASLOM ke-16, ALAWMM ke-9.

10. Choice Of Court Convention

Dari kegiatan yang dilaksanakan dapat dipelajari bahwa *Choice of Court Convention* memiliki fitur-fitur penting yang berguna untuk diatur dalam pembuatan kontrak terutama dalam klausul penyelesaian sengketa. Konvensi ini bertujuan untuk menyediakan pilihan forum hukum yaitu pengadilan yang sederhana dan efektif disamping pilihan hukum penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Hal ini ditempuh dengan pengaturan perjanjian eksklusif penetapan pengadilan dari salah satu pihak yang berkontrak (*exclusive choice of court*) dalam pembuatan suatu kontrak. Konvensi ini masih belum dapat diaksesi oleh Indonesia mengingat hukum acara perdata Indonesia masih tidak mengenal pengakuan dan pelaksanaan (eksekusi) putusan pengadilan asing yang merupakan fitur penting dari konvensi ini. Delegasi Indonesia mendapatkan materi-materi terkait *the enforcement of foreign judgement* dari kegiatan ini yang dianggap berguna bagi upaya pembaharuan hukum perdata dan hukum acara perdata Indonesia.

11. Casework Meeting / Fgd Dan Koordinasi Antar Instansi Materi Hukum Laut, Udara Dan Lingkungan

Sepanjang tahun 2013 telah dilaksanakan sebanyak 5 kali *casework*/FGD Antara lain:

- a. FGD Perumusan Definisi Dan Delimitasi Antariksa Dalam Hukum Keantariksaan Nasional (tanggal 20 Agustus 2013 di Ditjen AHU Ruang 609)

Sekretariat UNCOPOUS sudah mengirim Questioner mengenai pandangan Negara anggota tentang batas ketinggian angkasa yang diinginkan. Sampai sekarang Indonesia belum menjawab Questioner tersebut. Dalam FGD merekomendasikan mendesak anggota delegasi RI untuk segera menjawab Questioner tersebut , karena delimitasi terkait dengan batas kedaulatan negara.

- b. FGD Rencana Ratifikasi Konvensi Tentang Unifikasi Beberapa Ketentuan Pengangkutan Udara Internasional Tahun 1999 (Konvensi Montreal 1999) dilaksanakan tanggal 21 Agustus 2013 di R. 609 Ditjen AHU.

Hasil dari FGD merekomendasikan; untuk segera meratifikasi Konvensi Montreal 1999.

Bahwa dengan meratifikasi konvensi Montreal 1999, akan memberi perlindungan kepada penumpang pesawat terutama jemaah haji Indonesia yang menggunakan pesawat udara negara yang sudah meratifikasi konvensi Montreal 1999. Jika terjadi kecelakaan pesawat udara asing (saudi Air) jemaah haji akan mendapat santunan yang lebih besar.

- c. FGD Persiapan Materi AALCO Hukum Laut hasil rekomendasi sebagai pedoman DELRI di AALCO dilaksanakan tanggal 15 Agustus 2013 di R. 609 Ditjen AHU.

FGD membahas mengenai usulan materi terkait hukum laut yang akan dibawa pada Sidang Tahunan AALCO ke-52 di New Delhi tanggal 8-12 September 2013. Hasil rekomendasi FGD ialah; meminta bahan masukan dari instansi terkait seperti Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Luar Negeri.

12. Konvensi Cape Town (Terkait Pembebanan Jaminan Atas Pesawat Udara)

- a. Rapat pembahasan dan penelaahan konvensi cape town disepakati bahwa pembebanan jaminan atas pesawat udara untuk transaksi internasional sebagaimana diatur dalam konvensi Cape Town 2001, tidak ada masalah dan cukup memadai, tetapi yang menjadi masalah justru jaminan pesawat udara untuk transaksi dalam negeri (nasional), karena itu perlu mengangkat masalah jaminan pesawat udara untuk transaksi dalam negeri, apalagi ada perusahaan yang bermaksud untuk menjaminkan pesawat udara

miliknya kepada bank karena mereka memerlukan dana, sementara itu mereka mempunyai aset pesawat udara, karena itu direkomendasikan agar dibuat Undang tentang Hipotik pesawat udara atau dimasukkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 (dengan amandemen). Jaminan dalam bentuk hipotik sangat relevan karena untuk benda bergerak seperti kapal laut di gunakan Hipotik kapal laut.

- b. Pesawat udara sebagai salah satu aset yang bernilai tinggi tentunya menjadi salah satu pilihan untuk dijadikan objek jaminan utang dalam rangka mendapatkan kredit dari pihak kreditur. UU Penerbangan tidak menyebutkan secara spesifik hak jaminan kebendaan apa yang dapat dibebankan bagi pesawat udara, hanya disebutkan hak jaminan kebendaan, yang mana dalam hukum Indonesia dikenal berbagai macam lembaga jaminan kebendaan, seperti gadai, fidusia, hipotik dan hak tanggungan. Hasil dari seminar adalah untuk membuat kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi kreditor nasional perlu dibuat undang-undang tentang Pesawat Udara sebagai Jaminan Hutang. (Output : Konsep Pembentukan RUU tentang Jaminan Pesawat Udara)

13. Tanggung Jawab Perdata Terhadap Pencemaran Laut

Rekomendasi dari Pembahasan dan Penelaahaan : Keputusan untuk menuntut PTTEP di Pengadilan Jakarta Pusat tidak akan mengikat PTTEP sehingga keinginan untuk mendapatkan ganti rugi untuk masyarakat NTT tidak dapat terealisasikan oleh karena itu Pemerintah Indonesia harus tetap mendesak PTTEP untuk segera membayarkan ganti rugi kepada masyarakat NTT.

14. Konvensi Hukum Lingkungan Hidup Internasional Di Bidang Perubahan Iklim

- a. Rekomendasi FGD : Delegasi Pemerintah Republik Indonesia (DELRI) dalam mengikuti konferensi perubahan iklim (UNFCCC)

adalah untuk memperjuangkan kepentingan nasional untuk menuntut negara- negara industri maju untuk bertanggung jawab atas perubahan iklim dan berkomitmen mengurangi emisi pada periode komitmen kedua Protokol Kyoto. Karena protokol ini merupakan satu-satunya instrumen hukum internasional yang diadopsi untuk mengendalikan peningkatan karbondioksida dan gas rumah kaca lainnya yang menimbulkan efek pemanasan global dan perubahan iklim.

- b. Rekomendasi seminar: diperlukan pembentukan undang-undang perubahan iklim. Undang-Undang mengenai adanya Perubahan Iklim akan memperkuat agenda penanganan perubahan iklim di Indonesia. Saat ini produk hukum yang mengatur agenda perubahan iklim di Indonesia masih bersifat lemah dan tidak mengikat secara hukum.

D. Bidang Pemasarakatan

Berdasarkan hasil pelaksanaan tugas selama Tahun 2013 telah berhasil diidentifikasi jumlah Rutan dan Lapas yang memenuhi standar hunian dan keamanan mencapai 15,16%. Adapun perhitungan tersebut didasarkan atas :

1. Dari jumlah Rutan dan Lapas diseluruh Indonesia sebanyak 455 unit, pada tahun 2012 telah dilakukan identifikasi dan hasilnya sebanyak 49 Rutan/ Lapas yang telah memenuhi standar hunian dan keamanan.
2. Pada Tahun 2013, dari hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan, menunjukkan sebanyak 20 Rutan/ Lapas yang telah memenuhi standar hunian dan keamanan;
3. Dari sebanyak 69 unit Rutan/ Lapas yang telah memenuhi standar hunian dan keamanan, dibandingkan dengan jumlah keseluruhan Rutan dan Lapas yang mencapai 455 unit, maka dapat dinyatakan bahwa RUTAN DAN LAPAS YANG MEMENUHI STANDAR HUNIAN DAN KEAMANAN untuk tahun 2013 mencapai 15,16%.
4. Prosentase pelanggaran HAM, kasus penyebaran NAPZA, kejahatan terorganisir dan pelanggaran kode etik petugas pemasarakatan di UPT Pemasarakatan untuk tahun 2013 ditargetkan 10%

Data Gangguan Keamanan dan Ketertiban 2013

JenisGangguanKamtib	JumlahKasus	Jumlah yang Terlibat
Pelarian	87	Narapidana = 105 Tahanan = 46
Penyelundupan Narkoba	68	Narapidana = 62 Tahanan = 11 Petugas = 8 Pengunjung = 24 TanpaPemilik = 10
Perkelahian	5	16
Penganiayaan / Kekerasan	6	34
Kerusuhan	9	51
Pemberontakan	2	-
Lain-Lain	15	1005
Jumlah	192	1372

Pelaksanaan tugas pelayanan pengaduan selama tahun 2013 adalah:

5. Selama Januari sampai dengan Bulan Desember tahun 2013 jumlah pengaduan mencapai 88 (delapan puluh delapan) pengaduan;
 - a) Pengaduan melalui surat sebanyak 52 (lima puluh dua) pengaduan;
 - b) Pengaduan melalui SMS/ Telp sebanyak 25 (dua puluh lima) pengaduan;
 - c) Pengaduan melalui datang langsung sebanyak 4 (empat) pengaduan;
 - d) Pengaduan melalui website/ media sebanyak 7 (tujuh) pengaduan.

Dari jumlah pengaduan tersebut telah ditindaklanjuti melalui:

- a) Permintaan klarifikasi dari Ditjen Pas ke Kanwil/ UPT Pemasarakatan sebanyak 88 (delapan puluh delapan) kasus;
- b) Investigasi langsung sebanyak 26 (dua puluh enam) (data khusus dari perintah Dirjen/ Direktur langsung);
- c) Tindak lanjut dari Kanwil/ UPT Pemasarakatan 41 (empat puluh satu) kasus.

Laporan yang belum dijawab instansi/ UPT terlapor, dikarenakan:

- a) Sesuai disposisi Direktur/ Dirjen Pas untuk diketahui dan tidak ditindaklanjuti;

- b) Sudah dimintakan klarifikasi namun belum ada klarifikasi.
6. Prosentase tindak lanjut pelanggaran HAM, kasus penyebaran NAPZA, kejahatan terorganisir dan pelanggaran kode etik petugas pemasyarakatan di UPT Pemasyarakatan ditargetkan 70% , realisasi sebanyak 86 petugas pemasyarakatan seluruh Indonesia yang terkena Hukuman Disiplin. Kategori penindaklanjutan Hukuman disiplin dari 86 petugas pemasyarakatan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Hukuman ringan : 32 orang
 - b. Hukuman sedang : 22 orang
 - c. Hukuman berat : 32 orang
 7. Laporan Pelaksanaan Sosialisasi Sarana Hunian dan Keamanan Lapas dan Rutan
 - a. Sosialisasi Sarana Hunian dan Keamanan Lapas dan Rutan Wilayah Kalimantan Selatan;
 - b. Sosialisasi Sarana Hunian dan Keamanan Lapas dan Rutan Wilayah Jawa Tengah;
 - c. Sosialisasi Sarana Hunian dan Keamanan Lapas dan Rutan Wilayah Sumatera Selatan;
 - d. Sosialisasi Sarana Hunian dan Keamanan Lapas dan Rutan Wilayah Jawa Timur;
 - e. Sosialisasi Sarana Hunian dan Keamanan Lapas dan Rutan Wilayah Sulawesi Tengah.
 8. Penyempurnaan Buku Pedoman Standarisasi Sarana Hunian dan Keamanan di Lapas dan Rutan;
 9. Kegiatan Satgas Pencegahan dan Penanggulangan Gangguan Kamtib di Wilayah Cirebon dan Yogyakarta, Kepulauan Riau, Sulawesi Tenggara, Rutan Salemba Jakarta, Rutan Klas I Cipinang Jakarta, Rutan Klas I Cipinang Jakarta, Aceh, Rutan Salemba Jakarta dan Sulawesi Selatan.
 10. Bimbingan Teknis Dasar-Dasar Intelejen bagi Petugas Lapas/ Rutan. Telah dilaksanakan pada tanggal 20-23 November 2013 di Hotel Marbella Anyer.
 11. Penyusunan Buku Pedoman Dasar-dasar Intelejen Pemasyarakatan di Lapas/ Rutan.
 12. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Pelayanan Pengaduan bagi petugas di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan tanggal 6-8 Mei 2013 di Hotel Topaz Galeria, Bandung;

13. Pelaksanaan tugas pelayanan pengaduan sampai dengan bulan Desember 2013 adalah:
 - a. Jumlah pengaduan mencapai 88 (delapan puluh delapan) pengaduan;
 - b. Pengaduan melalui surat sebanyak 52 (lima puluh dua) pengaduan;
 - c. Pengaduan melalui SMS/ Telp sebanyak 25 (dua puluh lima) pengaduan;
 - d. Pengaduan melalui datang langsung sebanyak 4 (empat) pengaduan;
 - e. Pengaduan melalui website/ media sebanyak 7 (tujuh) pengaduan.

Pengaduan tersebut telah ditindaklanjuti melalui :

- a. Investigasi langsung sebanyak 26 (dua puluh enam) (data khusus dari perintah Dirjen/ Direktur langsung);
 - b. Permintaan klarifikasi dari Ditjen Pas ke Kanwil/ UPT Pemasarakatan sebanyak 88 (delapan puluh delapan) kasus;
14. Tindak lanjut dari Kanwil/ UPT Pemasarakatan 41 (empat puluh satu) kasus.
 15. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengawasan Internal Bagi Petugas Pemasarakatan tanggal 16-18 Februari 2013 dilaksanakan di Wisma Industri, Cisarua, Bogor. Dan pada tanggal 3-5 Juli 2013 dilaksanakan di 89 Hotel Batam, Kepulauan Riau;
 16. Optimalisasi Pelaksanaan Penegakkan Disiplin dan Kode Etik Petugas Pemasarakatan di Wilayah Sumatera Utara, di Wilayah Jawa Timur, DKI Jakarta, Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Papua, D.I Yogyakarta, Banten dan Bali.
 17. Penyusunan Modul Peningkatan Kapasitas Petugas di Bidang Keamanan dan Ketertiban;
 18. Pelaksanaan Tes Narkoba di di Lapas Salemba, di Rutan Salemba, Lapas Klas I Cipinang dan di Rutan Pondok Bambu .
 19. Melaksanakan perawatan dan pelayanan kesehatan untuk narapidana dan tahanan melalui kegiatan sebagai berikut : Standarisasi kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan, pelayanan kesehatan dan keadaan sanitasi dan kesehatan lingkungan.

20. Melaksanakan kegiatan penyuluhan kesehatan (Preventif/KIE) kepada 40.366 orang napi/tahanan.
21. Melaksanakan pengobatan (Kuratif) kepada 92.138 orang napi/tahanan.

Keadaan Kesehatan Narapidana Dan Tahanan (Per 31 Oktober 2013)

HIV/AIDS	TBC	Hepatitis	IMS	Penyakit Pencernaan	Peny. Jantung & Pembuluh Darah	Kanker	Peny. Lain	Jumlah
1073	527	137	317	11917	1106	23	77038	92.138

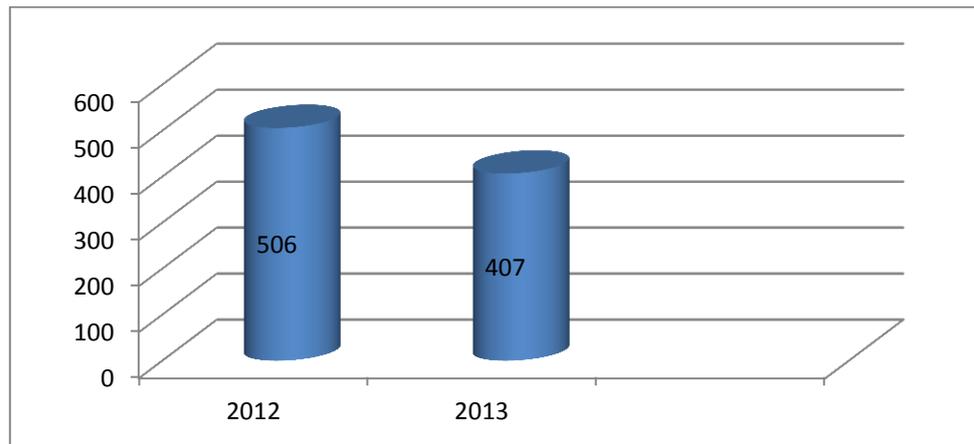
22. Melaksanakan perlindungan terhadap kelompok rentan dan kelompok resiko tinggi :
 - a. Melaksanakan perlindungan terhadap 2.035 kelompok rentan (lansia, anak, bayi, ibu hamil, ibu menyusui, dan sakit permanen)
 - b. Melaksanakan perlindungan kepada 1.746 orang tahanan/narapidana resiko tinggi (HIV, TB , Hepatitis, IMS, jantung dan kanker)
23. Melaksanakan kegiatan rawat inap kepada 46.844 tahanan/narapidana dengan perincian sebagai berikut :

No	WBP	Rawat Inap	
		Dalam Lapas	Luar Lapas
1.	Narapidana	35.036 orang	1.483 orang
2.	Tahanan	10.056 orang	269 orang
	Jumlah	45.092 orang	1.752 orang

Data Kematian Tahun 2013

STATUS	JUMLAH KEMATIAN
Narapidana	301 orang
Tahanan	106 orang
Jumlah	407 orang

Sandingan Jumlah Kematian Tahun 2012 dan 2013



- a. Bimtek Buku Pedoman Pelayanan Kesehatan bagi WBP dan Tahanan di Lapas/Rutan
 - b. Bimtek Buku Pedoman Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan di Lapas/Rutan
 - c. Penyusunan Standarisasi Kesehatan di Lapas/Rutan
 - d. Penyusunan SOP Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan di Lapas/Rutan
 - e. Bimtek Buku Pedoman Penyelenggaraan Makanan di Lapas/Rutan
 - f. Penyusunan SOP Penyelenggaraan Makanan bagi petugas Lapas/Rutan
 - g. Penyusunan Standar Penghitungan dan Penyelenggaraan Bahan Makanan pada Lapas/Rutan
 - h. Bimtek Perawatan Kesehatan bagi WBP/Tahanan dengan Kondisi Sakit Permanen di Lapas/Rutan
 - i. Review Modul Advokasi Perencanaan dan Penganggaran Program Perlindungan Kelompok Resiko Tinggi di Lapas/Rutan
 - j. Penyusunan Instrumen dan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kesehatan dan Perawatan
 - k. Bimtek Penanganan Penyakit Menular bagi Petugas di Lapas/Rutan
 - l. Penyusunan Modul Therapeutic Community (TC) bagi Petugas di Lapas/Rutan
 - m. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Petugas Konselor di Lapas/Rutan
24. Technical Meeting dan Bimtek Keuangan ke 25 Propinsi di 39 Lapas/Rutan GTZ Dukungan GF
 25. Bimtek Pelaksanaan Pencapaian Program ke 22 Propinsi di 105 Lapas, Rutan, Bapas dukungan GF SSF ;

26. Sosialisasi Sistem Pencatatan Pelaporan untuk 47 Lapas, Rutan, Bapas, Kanwil Khusus Petugas Monev Baru Dukungan GF SSF
27. Program Pengambilan Darah Secara Sukarela ;
28. Sosialisasi Program TB ;
29. Pelatihan TB DOTS ;
30. Pelatihan Lab TB ;
31. Penguatan Jejaring dan Supervisi Money ;
32. Penyusunan (Revisi) Tools (Alat Ukur) Bimbingan teknis dan Monitoring Layanan HIV AIDS di UPT Pemasarakatan ;
33. Penguatan Fasilitator Program Wilayah di 11 Propinsi ;
34. Pertemuan Nasional (Mainstreaming) Program penguatan Sistem Layanan HIV AIDS di Lapas, Rutan dan Bapas ;
35. Uji Coba Bimbingan Teknis dan Monitoring Layanan HIV AIDS di UPT Pemasarakatan ;
36. Bimtek dan Monitoring Program Penguatan Sistem dan Layanan HIV AIDS di Lapas Model ;
37. Pelatihan Assesment dan Rencana Terapi Gangguan Penggunaan Narkotika bagi Petugas Kesehatan di Lapas/Rutan ;
38. Produksi Film sebagai Alat Komunikasi, Informasi, dan Edukasi penguatan Kualitas Layanan HIV AIDS di Lingkungan Pemasarakatan ;
39. Penguatan Kapasitas Petugas Bapas Forum Lapas Model;
40. Dukungan Teknis kepada Sub Direktorat TB dan Ditjenpas di dalam Penyusunan Pedoman Kebijakan serta Perangkat Monev ;
41. Skrining WBP, Diagnosis dan Terapi TB ;
42. Deteksi Kasus MDR dan Terapi ;
43. Program Pencegahan dan Pengendalian Infeksi TB
44. Rapat koordinasi kegiatan sosialisasi dan pelatihan air limbah dan persampahan untuk Lapas/Rutan
45. Assesment dan sosialisasi pembangunan instalasi pengelolaan sampah di Lapas Cipinang
46. Assesment dan sosialisasi pembangunan instalasi pengelolaan air limbah di Lapas Karawang
47. Rapat koordinasi perencanaan SIKIPAS (Sistem Komunal Instalasi Pengolahan Anaerobik sampah) Lapas Cipinang

48. Pembangunan instalasi pengolahan sampah di Lapas Cipinang
49. Pembangunan instalasi pengolahan air limbah di Lapas Karawang
50. Pelatihan pengelolaan sampah dan air limbah

51. Pemetaan Kebutuhan pegawai Direktorat Bina Pengelolaan Basan dan Baran.

Jumlah pegawai Direktorat Bina Pengelolaan Basan dan Baran saat ini adalah 26 orang. Secara kuantitas jumlah tersebut masih mengalami kekurangan. Untuk mencapai kondisi ideal jumlah pegawai Direktorat Bina Pengelolaan Basan dan Baran, maka dibutuhkan sebanyak **10** orang dengan kualifikasi sebagai berikut :

No	Standar Kompetensi Akademik	Jumlah
1.	S1 Hukum	3
2.	S1 Sastra Inggris	1
3.	S1 Komputer	3
4.	D3 Komputer	3
	Jumlah	10

a. Pengklasifikasian Basan dan Baran seluruh Indonesia :

No	Jenis	Tingkat Pemeriksaan					JML
		Kepolisian	Kejaksaan	PN	PT	MA	
1	Benda Sitaan	65.190	596.561	1.449	6	138.401	801.587
2	Barang Rampasan	-	-	1.583	34	49	1.626
3	BTB	-	-	-	-	-	478
JUMLAH		65.190	596.561	3.032	40	187.401	803.691

Ket :

Benda Sitaan (Proses Sidang)

Barang Rampasan (Sudah Inkrah)

BTB : Barang Tidak Bertuan

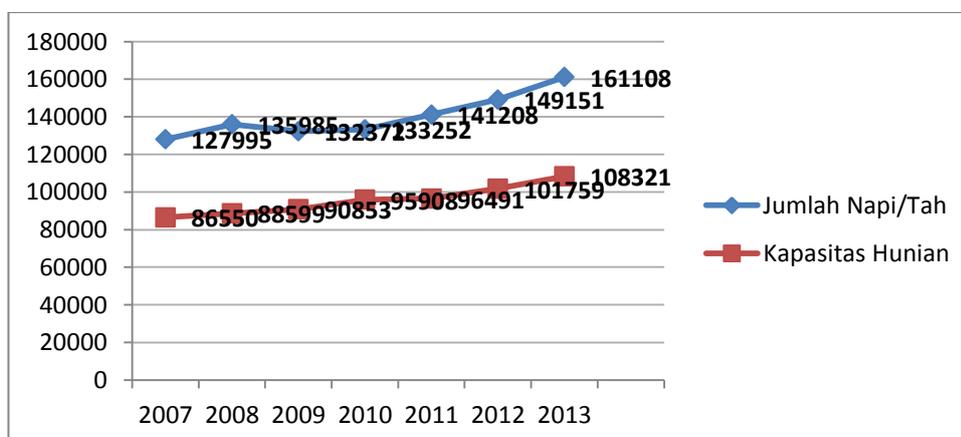
- b. Penyusunan buku pedoman tata cara dan teknik identifikasi terhadap basan baran.
- c. Penyusunan buku pedoman penerimaan dan penilaian basan baran
- d. Pemetaan bidang penerimaan dan penilaian basan baran
- e. Monitoring dan evaluasi pengelolaan basan baran di Rupbasan.
- f. Bimbingan teknis pengamanan dan Pemeliharaan basan baran

- g. Penyusunan dokumen SOP pengamanan basan baran.
 - h. Penyusunan buku pedoman pengamanan basan baran.
 - i. Penyusunan standarisasi biaya pemeliharaan basan baran.
 - j. Penyusunan modul peningkatan teknis pengawasan basan baran
 - k. Penyusunan SOP pengawasan basan baran di Rupbasan.
52. Melaksanakan registrasi dan klasifikasi terhadap narapidana dan tahanan seluruh Indonesia.

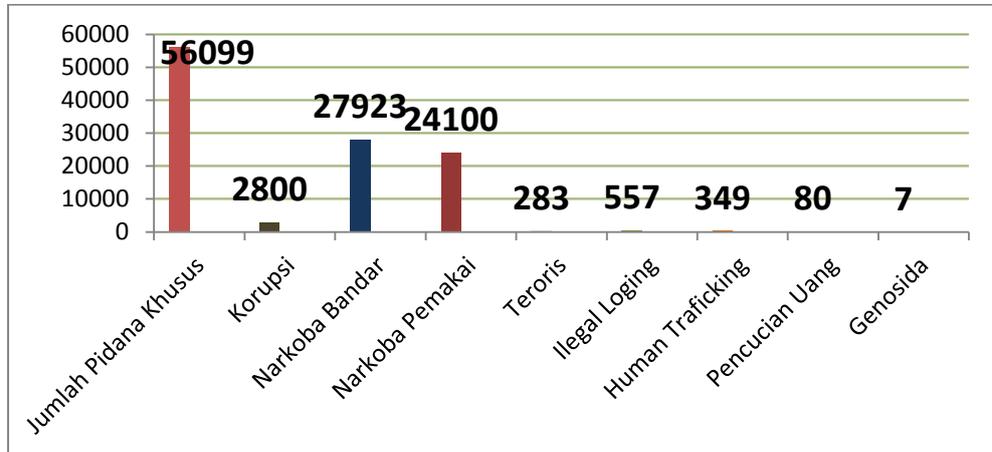
Data Penghuni dan Kapasitas Hunian Tahun 2007-2013

URAIAN	Tahun						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013 (12-12-2013)
Penghuni :							
Tahanan Dewasa dan Pemuda	51.949	54.628	56.083	47.617	48,785	47.538	49.398
Tahanan Anak	2.360	2.966	2.188	1.932	2,201	1.862	2.049
Narapidana Dewasa	71.507	75.447	79.023	79.953	86,905	96.568	106.531
Anak Didik	2.179	2.944	3.540	3.750	3,317	3.183	3.130
Jumlah	127.995	135.985	132.372	133.252	141,208	149.151	161.108
Selish Penambahan Penghuni	15.251	7.990	(3.613)	880	7.956	7.943	11.957
Kapasitas	86.550	88.599	90.853	95.908	96,491	101.759	108.321
Selish Penambahan Kapasitas	10.000	2.049	2.254	5.055	583	5.268	6.562
Over Kapasitas	41.445	47.386	41.519	37.344	44,717	47.392	52.787

Grafik Perkembangan Tingkat Huniandan Kapasitas Lapas / Rutan



DATA NARAPIDANA TINDAK PIDANA KHUSUS

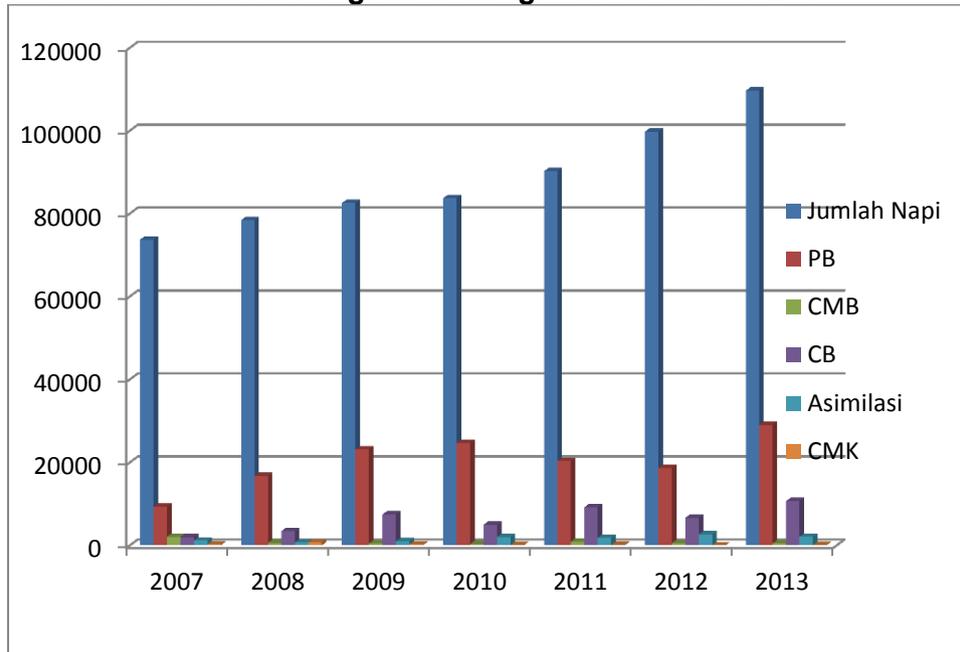


53. Melaksanakan program reintegrasi kepada narapidana berupa Pembebasan bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat, Asimilasi, dan Cuti Mengunjungi Keluarga.

DATA PB, CMB, CB, ASSIMILASI DAN CMK Tahun 2007-2013 (Per Nopember 2013)

NO.	URAIAN	TAHUN						
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Pembebasan Bersyarat	9.308	16.728	23.134	24.676	20.347	18.669	29.039
2.	Cuti Menjelang Bebas	2.044	597	446	310	891	497	489
3.	Cuti Bersyarat	1.962	3.447	7.460	4971	9202	6.647	10.701
4.	Assimilasi	1.168	705	999	2.011	1819	2.635	2.090
5.	Cuti Mengunjungi keluarga	254	705	223	68	100	8	70
Jumlah		13.568	21.477	31.263	30.025	31.056	28.456	42.389

Grafik Pelaksanaan Program Reintegrasi Tahun 2007-2013



54. Melaksanakan pemberian remisi umum dan khusus kepada narapidana.

**DATA REMISI UMUM I DAN REMISI KHUSUS I
Tahun 2007-2013
(Per Nopember 2013)**

NO	URAIAN	TAHUN						
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Remisi Umum I	57.251	55.687	54.640	53.612	51.660	56.349	65.152
2.	Remisi Khusus I Hari Raya Idul Fitri	49.944	51.442	47.822	41.408	43.423	48.988	53.555
3.	Remisi Khusus I Hari Raya Natal	7.516	6.803	7.681	7.132	6.110	-	Belumd ilaksa-nakan
4.	Remisi Khusus I Hari Raya Nyepi	355	343	359	333	374	328	538
5.	Remisi Khusus I Hari Raya Waisak	830	756	749	716	521	736	377
6.	Remisi Khusus I Hari Raya Imlek	0	7	11	7	11	11	5
JUMLAH		115.038	111.262	103.208	101.762	106.412	115.038	119.627

DATA REMISI UMUM II DAN REMISI KHUSUS II (REMISI BEBAS) (Per Nopember 2013)

NO	URAIAN	TAHUN						
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Remisi Umum II	6.641	5.797	5.232	4.788	3.584	2.246	2.197
2.	Remisi Khusus II (Hari Raya Idul Fitri)	2.373	1.880	1.793	1.415	1.229	793	841
3.	Remisi Khusus II (Hari Raya Natal)	312	221	247	192	170	-	Belumd ilaksa- nakan
4.	Remisi Khusus II (Hari Raya Nyepi)	16	5	12	11	15	5	8
5.	Remisi Khusus II (Hari Raya Waisak)	32	8	17	11	18	3	6
6.	Remisi Khusus II (Hari Raya Imlek)	0	7	0	0	0	0	1
JUMLAH		9.374	7.918	7.301	4.799	37.947	3.047	3.053

55. Melaksanakan pembinaan kemandirian di Lapas/Rutan.

- a. Narapidana yang terserap dalam kegiatan bimbingan latihan keterampilan dan bimbingan kerja lingkungan adalah 10.930 orang, dengan perincian sebagai berikut:

NO	KANWIL	UPT	WBP
1	NAD	22	499
2	SUMATERA UTARA	37	606
3	SUMATERA BARAT	19	58
4	RIAU	13	245
5	KEP. RIAU	7	215
6	JAMBI	10	534
7	SUMATERA SELATAN	19	209
8	BANGKA BELITUNG	5	94
9	LAMPUNG	16	104
10	BENGKULU	4	146
11	BANTEN	11	674
12	DKI JAKARTA	7	394
13	JAWA BARAT	29	757
14	YOGYAKARTA	7	215
15	JAWATENGAH	44	2.846
16	JAWA TIMUR	36	879
17	KALIMANTAN BARAT	12	80
18	KALIMANTAN TENGAH	9	130
19	KALIMANTAN SELATAN	12	68
20	KALIMANTAN TIMUR	11	147

21	SULAWESI UTARA	13	119
22	GORONTALO	2	0
23	SULAWESI TENGAH	10	75
24	SULAWESI SELATAN	24	408
25	SULAWESI BARAT	5	30
26	SELAWESI TENGGARA	6	86
27	BALI	9	364
28	NTB	8	148
29	NTT	18	555
30	MALUKU	13	5
31	MALUKU UTARA	7	128
32	PAPUA	9	22
33	PAPUA BARAT	5	32
JUMLAH		459	10.930

Per Oktober 2013

- b. Narapidana yang terserap dalam kegiatan kerja industry dan jasa pada tahun 2013 adalah 4.345 orang, dengan perincian sebagai berikut :

N O	KANTOR WILAYAH	JUMLAH UPT	KEGIATAN KERJA INDUSTRI		KEGIATAN KERJA JASA	
			JUMLAH TENAGA TERSERAP		JUMLAH TENAGA TERSERAP	
			WBP	PEG	WBP	PEG
1	Aceh	22	31	0	12	0
2	Sumatera Utara	37	203	4	30	0
3	Sumatera Barat	19	0	0	0	0
4	Riau	13	43	0	7	0
5	Kepulauan Riau	7	8	0	3	0
6	Jambi	10	203	2	21	0
7	Sumatera Selatan	19	44	19	15	1
8	Kep Bangka Belitung	5	119	60	8	4
9	Lampung	16	100	53	9	1
10	Bengkulu	4	34	8	2	0
11	Banten	11	188	8	15	1
12	DKI Jakarta	7	131	5	8	2
13	Jawa Barat	29	378	172	64	18
14	D.I Yogyakarta	7	83	7	17	1
15	Jawa Tengah	44	897	40	86	2
16	Jawa Timur	36	654	34	49	4
17	Kalimantan Barat	12	22	3	33	4
18	Kalimantan Tengah	9	18	0	6	0
19	Kalimantan Selatan	12	10	2	6	1
20	Kalimantan Timur	11	68	7	18	2
21	Sulawesi Utara	13	65	0	3	0
22	Gorontalo	2	0	0	0	0
23	Sulawesi Tengah	10	0	0	0	0
24	Sulawesi Selatan	24	97	9	27	8
25	Sulawesi Barat	5	43	1	4	0
26	Sulawesi Tenggara	6	43	8	12	3
27	Bali	9	142	17	11	2
28	Nusa Tenggara Barat	8	25	3	16	4
29	Nusa Tenggara Timur	18	119	5	26	3
30	Maluku	13	0	0	3	0
31	Maluku Utara	7	24	24	5	6
32	Papua	9	23	1	4	0
33	Papua Barat	5	9	0	1	0
TOTAL		459	3.824	492	521	67
Jumlah Narapidana Yang Terserap Dalam Kegiatan Kerja Industri Dan Jasa :						

4.345 ORANG

Per Oktober 2013

- c. Narapidana yang terserap dalam kegiatan kerja pertanian dan perkebunan padatahun 2013 adalah 2.353 orang dengan perincian sebagai berikut

No	UPT	Jumlah UPT	Pertanian		Perkebunan	
			WBP	PEG	WBP	PEG
1	NAD	22	5	0	3	0
2	SUMUT	37	14	6	10	8
3	SUMBAR	19	8	0	3	1
4	RIAU	13	6	0	7	0
5	KEPULAUAN RIAU	7	2	0	0	0
6	JAMBI	10	26	4	13	3
7	SUMSEL	19	7	3	0	0
8	BANGKA BELITUNG	5	6	5	4	0
9	LAMPUNG	16	90	13	9	0
10	BENGKULU	4	2	8	6	4
11	BANTEN	11	38	9	0	0
12	DKI	7	0	0	0	0
13	JABAR	29	589	19	532	3
14	D.I YOGYAKARTA	7	12	2	0	0
15	JATENG	44	123	8	37	1
16	JATIM	36	18	1	0	0
17	KALBAR	12	145	9	3	0
18	KALTENGAH	9	5	1	0	0
19	KALSEL	12	6	0	0	0
20	KALTIM	11	27	1	50	0
21	SULAWESI UTARA	13	0	0	1	0
22	GORONTALO	2	0	0	0	0
23	SULAWESI TENGAH	10	0	0	11	4
24	SULAWESI SELATAN	24	6	26	7	1
25	SULAWESI BARAT	5	2	0	0	0
26	SULAWESI TENGARA	6	5	0	5	1
27	BALI	9	10	1	4	0
28	N. T. B	8	0	0	0	0
29	NTT	18	67	15	418	74
30	MALUKU	13	0	0	0	0
31	MALUKU UTARA	7	7	35	0	0
32	PAPUA	9	0	0	0	0
33	PAPUA BARAT	5	4	1	0	0
Total		459	1.230	166	1.123	100

Jumlah Narapidana Yang Terserap Dalam Kegiatan Kerja Pertaniandan Perkebunan : 2.353 orang.

Per Oktober 2013

d. Narapidana yang terserap dalam kegiatan kerja perikanan dan peternakan pada tahun 2013 adalah 1.072 orang dengan perincian sebagai berikut :

Per Oktober 2013

e. M
e
l
a
k
s
a
n
k
e
p
e
m
b
i
n
a
n
k
e
p
r
i

N O	NAMA KANWIL	JUMLAH UPT	TENAGA KERJA YANG TERSERAP DI PERIKANAN		TENAGA KERJA YANG TERSERAP DI PETERNAKAN	
			WBP	PEG	WBP	PEG
1	NAD	22	11	3	11	3
2	SUMATERA UTARA	37	68	6	30	4
3	SUMATERA BARAT	19	12	2	4	0
4	RIAU	13	15	1	1	1
5	KEP. RIAU	7	1	0	1	1
6	JAMBI	10	15	5	11	4
7	SUMATERA SELATAN	19	5	3	9	2
8	KEP. BANGKA BELITUNG	5	8	6	3	0
9	LAMPUNG	16	10	1	3	2
10	BENGKULU	4	11	11	13	4
11	BANTEN	11	77	5	15	2
12	DKI JAKARTA	7	16	1	8	1
13	JAWA BARAT	29	62	11	50	11
14	D.I YOGYAKARTA	7	12	3	3	2
15	JAWA TENGAH	44	103	17	44	20
16	JAWA TIMUR	36	41	13	169	100
17	KALIMANTAN BARAT	12	13	4	3	3
18	KALIMANTAN TENGAH	9	5	3	6	1
19	KALIMANTAN SELATAN	12	1	1	0	0
20	KALIMANTAN TIMUR	11	3	0	5	2
21	SULAWESI UTARA	13	2	0	11	3
22	GORONTALO	2	0	0	0	0
23	SULAWESI TENGAH	10	2	0	5	2
24	SULAWESI SELATAN	24	15	5	29	10
25	SULAWESI BARAT	5	1	1	2	1
26	SULAWESI TENGGARA	6	1	1	13	2
27	BALI	9	15	5	8	4
28	NUSA TENGGARA BARAT	8	9	3	19	3
29	NUSA TENGGARA TIMUR	18	11	2	22	4
30	MALUKU	13	2	1	1	1
31	MALUKU UTARA	7	8	2	9	1
32	PAPUA	9	7	1	2	1
33	PAPUA BARAT	5	0	0	0	0
Jumlah		459	562	114	510	195
Jumlah Narapidana Yang Terserap Dalam Kegiatan Kerja Perikanan dan peternakan adalah 1.072 orang.						

badian di Lapas/Rutan

Jumlah Narapidana yang memperoleh pembinaan kepribadian Tahun 2013

Pembinaan Agama					Olah Raga	Kesenian	KejarPaket A,B,C	Pramuka
Islam	Katolik	Protestan	Hindu	Budha				
53.266	1.830	6.522	291	475	63.458	4.684	408	2.897

Per Oktober 2013

- f. Pelaksanaan pelatihan keterampilan kepada narapidana bekerjasama dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI.
- g. Pelaksanaan pelatihan keterampilan kepada narapidana bekerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.
- h. Pelaksanaan Pameran Hasil Karya Narapidana di Gedung SMESCO

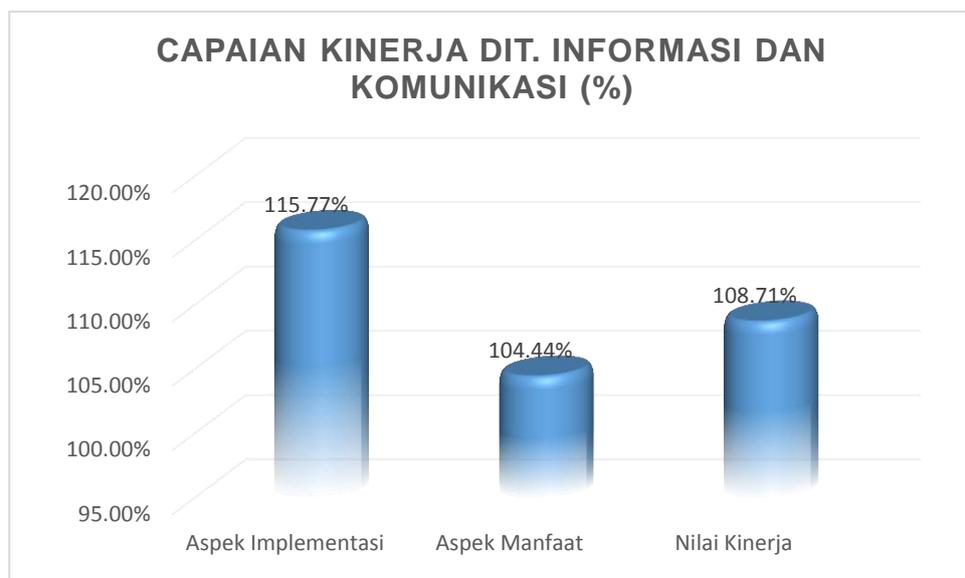
- i. Sosialisasi Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pembinaan di Lapas dan Rutan.
- j. Penyusunan Modul PelayananTahanan, Penyuluhan Hukum dan Bantuan Hukum.
- k. Pemetaan Kegiatan Kerja di Lapas/Rutan.
- l. Bimtek Sistem Aplikasi Registrasi Narapidana dan Tahanan
- m. Pengadaan Sistem Aplikasi Asimilasi, PB, CMB, dan CB dan pelaksanaan Bimtek.
- n. Pelaksanaan Tim Pengamat Pemasyarakatan Pusat.
- o. Monitoring dan Evaluasi di bidang Bina Narapidana dan PelayananTahanan

2. Direktorat Informasi Dan Komunikasi

Aspek Implementasi :

- a. Penyerapan anggaran presentasi realisasinya mencapai 96,71%
- b. Konsistensi antara perencanaan dan implementasi penyerapan Direktorat Informasi dan Komunikasi selama Tahun Anggaran 2013 adalah 68,71%
- c. Pencapaian Keluaran rata-rata presentase sebesar 119,62%
- d. Nilai Efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Informasi dan Komunikasi pada Tahun Anggaran 2013 adalah 85,52%

Dari capaian 4 Indikator di atas, maka nilai capaian aspek implementasi Direktorat Informasi dan Komunikasi secara total adalah sebesar 115,77%



3. Direktorat Bimbingan Masyarakat Dan Pengentasan Anak

- a. Melaksanakan registrasi dan klasifikasi terhadap anak didik masyarakat dan klien masyarakat

DATA TAHANAN ANAK DAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN (Per Desember 2013)

No	Satker	Tahanan Anak Laki-Laki	Tahanan Anak Perempuan	Jumlah	Napi Anak Negara	Napi Anak Sipil	Napi Anak Pidana	Jumlah
1	KANWIL ACEH	39	5	44	5	0	57	62
2	KANWIL BALI	16	0	16	4	0	44	48
3	KANWIL BANGKA BELITUNG	25	1	26	0	0	31	31
4	KANWIL BANTEN	66	2	68	13	0	220	233
5	KANWIL BENGKULU	30	0	30	0	0	74	74
6	KANWIL D.I. YOGYAKARTA	16	0	16	0	0	17	17
7	KANWIL DKI JAKARTA	126	16	142	0	0	79	79
8	KANWIL GORONTALO	10	0	10	0	0	30	30
9	KANWIL JAMBI	42	0	42	0	0	78	78
10	KANWIL JAWA BARAT	173	3	176	20	0	330	350
11	KANWIL JAWA TENGAH	107	0	107	11	0	222	233
12	KANWIL JAWA TIMUR	153	4	157	11	0	330	341
13	KANWIL KALIMANTAN BARAT	38	1	39	0	0	68	68
14	KANWIL KALIMANTAN SELATAN	62	6	68	1	0	60	61
15	KANWIL KALIMANTAN TENGAH	32	0	32	0	0	75	75
16	KANWIL KALIMANTAN TIMUR	62	6	68	0	0	46	46
17	KANWIL KEPULAUAN RIAU	27	1	28	0	0	52	52
18	KANWIL LAMPUNG	148	2	150	1	3	130	134
19	KANWIL MALUKU	22	0	22	1	3	39	43
20	KANWIL MALUKU UTARA	7	0	7	0	0	18	18
21	KANWIL NUSA TENGGARA BARAT	21	0	21	2	0	28	30
22	KANWIL NUSA TENGGARA TIMUR	20	0	20	0	0	68	68
23	KANWIL PAPUA	5	0	5	0	1	23	24
24	KANWIL PAPUA BARAT	2	0	2	0	0	6	6
25	KANWIL RIAU	72	0	72	0	0	169	169
26	KANWIL SULAWESI BARAT	12	3	15	0	0	12	12
27	KANWIL SULAWESI SELATAN	124	4	128	31	0	78	109
28	KANWIL SULAWESI TENGAH	30	0	30	0	0	29	29
29	KANWIL SULAWESI TENGGARA	46	0	46	0	0	64	64
30	KANWIL SULAWESI UTARA	31	0	31	0	0	15	15
31	KANWIL SUMATERA BARAT	28	0	28	12	0	70	82
32	KANWIL SUMATERA SELATAN	200	2	202	3	0	312	315
33	KANWIL SUMATERA UTARA	189	3	192	1	0	318	319

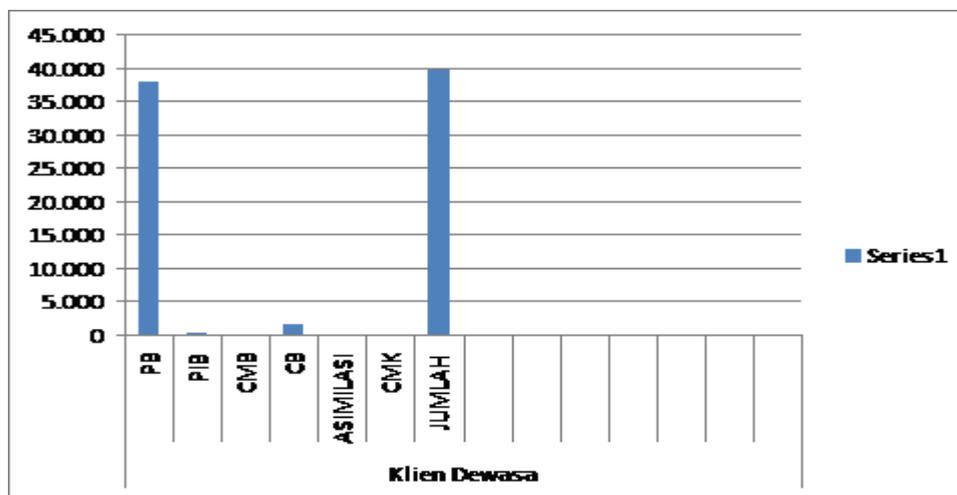
DATA KLIEN PEMASYARAKATAN (Desember 2013)

No	Satker	Klien Dewasa Laki - Laki	Klien Dewasa Perempuan	Jumlah	Klien Anak Laki-Laki	Klien Anak Perempuan	Jumlah
1	KANWIL ACEH	1307	51	1358	45	4	49
2	KANWIL BALI	566	92	658	33	3	36
3	KANWIL BANGKA BELITUNG	487	21	508	8	0	8
4	KANWIL BANTEN	1555	65	1620	74	4	78
5	KANWIL BENGKULU	750	42	792	104	0	104
6	KANWIL D.I. YOGYAKARTA	383	31	414	38	2	40
7	KANWIL DKI JAKARTA	3910	317	4227	108	3	111
8	KANWIL GORONTALO	277	27	304	15	0	15
9	KANWIL JAMBI	1040	48	1088	21	0	21
10	KANWIL JAWA BARAT	4558	180	4738	67	1	68
11	KANWIL JAWA TENGAH	3189	163	3352	99	5	104
12	KANWIL JAWA TIMUR	3881	281	4162	78	4	82
13	KANWIL KALIMANTAN BARAT	852	72	924	47	1	48
14	KANWIL KALIMANTAN SELATAN	378	7	385	5	0	5
15	KANWIL KALIMANTAN TENGAH	287	12	299	0	1	1
16	KANWIL KALIMANTAN TIMUR	940	28	968	5	1	6
17	KANWIL KEPULAUAN RIAU	16	1	17	8	2	10
18	KANWIL LAMPUNG	825	22	847	99	1	100
19	KANWIL MALUKU	208	5	213	30	1	31
20	KANWIL MALUKU UTARA	107	5	112	1	0	1
21	KANWIL NUSA TENGGARA BARAT	794	34	828	17	1	18
22	KANWIL NUSA TENGGARA TIMUR	831	25	856	19	0	19
23	KANWIL PAPUA	66	4	70	16	0	16
24	KANWIL PAPUA BARAT	54	2	56	3	0	3
25	KANWIL RIAU	79	12	91	24	0	24
26	KANWIL SULAWESI BARAT	180	8	188	3	0	3
27	KANWIL SULAWESI SELATAN	333	6	339	10	1	11
28	KANWIL SULAWESI TENGAH	661	25	686	15	0	15
29	KANWIL SULAWESI TENGGARA	391	36	427	6	0	6
30	KANWIL SULAWESI UTARA	644	36	680	2	0	2
31	KANWIL SUMATERA BARAT	795	39	834	18	0	18
32	KANWIL SUMATERA SELATAN	3102	37	3139	8	0	8
33	KANWIL SUMATERA UTARA	4251	196	4447	187	0	187
	Jumlah	37697	1930	39627	1213	35	1248

KLASIFIKASI KLIEN BERDASARKAN STATUS (per Desember 2013)

Klien Dewasa						
PB	PiB	CMB	CB	ASIMILASI	CMK	JUMLAH
37.829	180	27	1.580	11	0	39.627

Klien Anak						
PB	PIB	CMB	CB	AKOT	CMK	JUMLAH
890	72	84	111	28	63	1248



b. Melaksanakan pendampingan terhadap anak

**Rekapitulasi Hasil Pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan
Pelaksanaan Diversi dan Restorative Justice**

No.	Bulan	Jumlah Bapas	DIVERSI		PUTUSAN				Total	Jumlah Tahanan & Andikpas	Presentasi Pendampingan
			AKOT	Panti Sosial/ Lainnya	AKOT	Panti Sosial/ Lainnya	Pidana Bersyarat	Pidana			
1	Januari	68	25	5	33	17	65	398	543	5308	10,2%
2	Februari	67	27	19	20	5	44	264	379	5374	17,1%
3	Maret	67	33	2	38	5	54	332	464	5443	25,4%
4	April	67	22	2	35	5	54	336	456	5494	33,5%
5	Mei	66	47	3	38	5	60	319	472	5713	40,5%
6	Juni	66	10	1	31	9	56	322	429	5750	47,7 %
	Jumlah		132	31	138	37	275	1520	2133	5467	

c. Melaksanakan penyusunan Litmas Sidang anak

**DATA LITMAS ANAK SELURUH INDONESIA
(Per Desember 2013)**

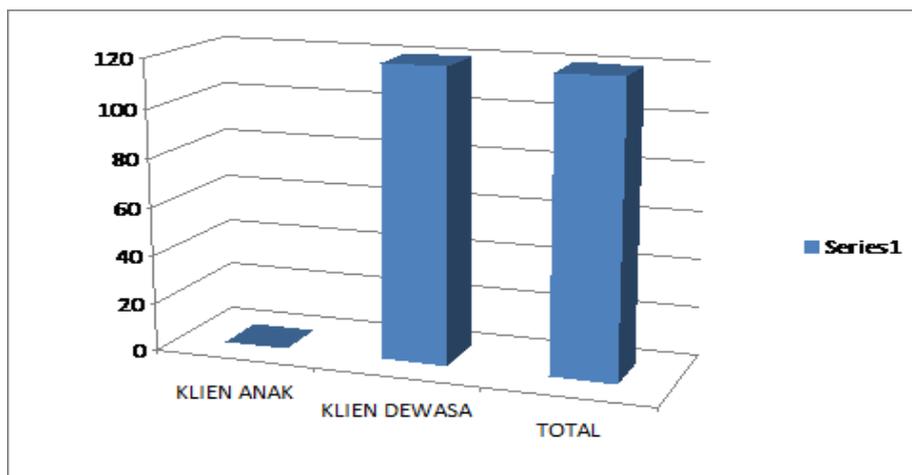
No	Satker	Litmas Anak	Litmas Dewasa	Litmas
1	KANWIL ACEH	71	284	355
2	KANWIL BALI	24	49	73

No	Satker	Litmas Anak	Litmas Dewasa	Litmas
3	KANWIL BANGKA BELITUNG	9	57	66
4	KANWIL BANTEN	28	110	138
5	KANWIL BENGKULU	26	150	176
6	KANWIL D.I. YOGYAKARTA	32	31	63
7	KANWIL DKI JAKARTA	53	431	484
8	KANWIL GORONTALO	10	74	84
9	KANWIL JAMBI	13	119	132
10	KANWIL JAWA BARAT	56	167	223
11	KANWIL JAWA TENGAH	88	368	456
12	KANWIL JAWA TIMUR	104	434	538
13	KANWIL KALIMANTAN BARAT	24	51	75
14	KANWIL KALIMANTAN SELATAN	20	69	89
15	KANWIL KALIMANTAN TENGAH	14	31	45
16	KANWIL KALIMANTAN TIMUR	16	73	89
17	KANWIL KEPULAUAN RIAU	10	72	82
18	KANWIL LAMPUNG	51	155	206
19	KANWIL MALUKU	103	81	184
20	KANWIL MALUKU UTARA		12	12
21	KANWIL NUSA TENGGARA BARAT	15	44	59
22	KANWIL NUSA TENGGARA TIMUR	26	107	133
23	KANWIL PAPUA	9	11	20
24	KANWIL PAPUA BARAT	2		2
25	KANWIL RIAU	20	55	75
26	KANWIL SULAWESI BARAT	18	15	33
27	KANWIL SULAWESI SELATAN	57	92	149
28	KANWIL SULAWESI TENGAH	22	10	32
29	KANWIL SULAWESI TENGGARA		10	10
30	KANWIL SULAWESI UTARA	29	16	45
31	KANWIL SUMATERA BARAT	21	49	70
32	KANWIL SUMATERA SELATAN	68	138	206
33	KANWIL SUMATERA UTARA	52	264	316

d. Melakukan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan

**KLIEN YANG MELAKUKAN PELANGGARAN
(PER DESEMBER 2013)**

KLIEN ANAK	KLIEN DEWASA	TOTAL
0	120	120



- e. Penyusunan Instrumen Resiko Terhadap Anak Bermasalah Hukum (ABH)
- f. Bimtek Dan Sosialisasi Pelaksanaan Assesement Resiko (Medan Dan Surabaya)
- g. Implementasi modul jarak jauh bagi PK
- h. Bimtek sop program pendidikan anak
- i. Penyusunan sop tenaga instruktur pendidikan bagi anak didik masyarakatan
- j. Penyusunan model pendidikan khusus anak didik masyarakatan
- k. Bimtek modul penyuluhan, penanganan ABH terkait diversi, restorative justice bagi petugas masyarakatan
- l. Bimtek penanganan anak berhadapan dengan hukum (ABH) melalui pendekatan diversi dan restoratif justice bagi pembimbing masyarakatan tahap II
- m. Penyusunan pedoman pola pembinaan anak di lapas/ rutan
- n. Bimtek model bimbingan keterampilan dan penyaluran kerja di bapas
- o. Bimtek sop pelaksanaan tugas di balai masyarakatan
- p. Penyusunan juklak dan juknis pembimbingan klien
- q. Bimtek modul pk dan model litmas online tahap II
- r. Pembuatan modul online diversi bagi Pembimbing Masyarakatan (PK)
- s. Penyusunan rencana strategis penguatan balai masyarakatan
- t. Sidang pengangkatan Pembimbing Masyarakatan (PK)

8. KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL

Pada awal tahun 2013 Direktorat Jenderal Masyarakatan telah melaksanakan Rapat Kerja Teknis Masyarakatan, hasil dari kegiatan tersebut menetapkan program aksi Direktorat Jenderal Masyarakatan Tahun 2013 yaitu :

a. Getting to zero HALINAR DI LAPAS/ RUTAN

Program ini merupakan jawaban atas tuntutan masyarakat terhadap semakin maraknya penggunaan Hand Phone (HP), praktek pungutan liar (pungli) dan peredaran Narkoba di Lapas dan Rutan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan Ketertiban di Lapas/rutan guna

mendukung peningkatan kinerja masyarakat. Kegiatan yang telah dilaksanakan antar lain :

- 1) Membuat Pedoman/Standar Pelaksanaan Lapas/Rutan bebas HP.
- 2) Menetapkan 50% Lapas/Rutan yang ada pada masing-masing wilayah sebagai Lapas/Rutan bebas HP, Pungli dan Narkoba (Halinar)
- 3) Melakukan rotasi/mutasi pejabat dan staf pada Lapas/Rutan yang menjadi pilot project, hal ini dimaksudkan guna mencegah adanya hubungan intensif yang terjalin antara petugas dengan narapidana/tahanan sehingga rentan terhadap terjadinya penyimpangan-penyimpangan.

b. Implementasi PP Nomor 99 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 merupakan Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat yang didalamnya mengatur tentang pengetatan syarat dan tata cara pemberian Remisi, Asimilasi, dan Pembebasan Bersyarat bagi pelaku tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, hal ini didasarkan karena kejahatan-kejahatan tersebut merupakan kejahatan luar biasa yang mengakibatkan kerugian yang besar bagi negara atau masyarakat atau korban yang banyak atau menimbulkan kepanikan, kecemasan, atau ketakutan yang luar biasa kepada masyarakat, maka dengan diterbitkannya PP ini diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Program implementasi PP Nomor 99 Tahun 2012 ini bertujuan untuk Meningkatkan kualitas penegakan hukum terhadap narapidana tindak pidana tertentu, adapun kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain :

- 1) Menyusun Permenkumham tentang mekanisme pemberian remisi, asimilasi, dan PB
- 2) Melakukan Sosialisasi PP 99 tahun 2012 beserta peraturan pelaksanaanya kepada Kadivpas dan UPT PAS

3) Melaksanakan pemberian remisi, asimilasi, dan PB sesuai dengan PP No. 99 tahun 2012 terhadap narapidana tertentu.

c. Pengendalian Isi Hunian Lapas/Rutan

Program ini bertujuan untuk mengendalikan isi hunian di Lapas dan Rutan yang setiap tahun selalu mengalami peningkatan sehingga mengakibatkan terjadinya over kapasitas pada sebagian besar Lapas dan Rutan. Adapun hal-hal yang dilakukan oleh Ditjen Pemasyarakatan dalam melaksanakan program iniantara lain :

- 1) Pemberian remisi bagi anak-anak yang masih dibawa umur.
- 2) Pemberian remisi bagi Lansia.
- 3) Pemberian remisi bagi penderita penyakit akut dan berkepanjangan.
- 4) Melakukan pemindahan narapidana dari Lapas/Rutan yang over kapasitas ke Lapas/Rutan yang tidak over kapasitas.

d. Pelaksanaan Layanan Pemasyarakatan berbasis IT

Program layanan Pemasyarakatan berbasis IT dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta sebagai salah satu upaya menghilangkan praktek pungli dalam pelaksanaan pemberian layanan pemasyarakatan di Lapas/Rutan. Hingga saat ini hal-hal yang telah dilakukan terkait pelaksanaan layanan pemasyarakatan berbasis IT yaitu :

- 1) Menyusun Standarisasi layanan kunjungan, informasi, dan pengaduan berbasis IT
- 2) Melakukan penyempurnaan modul layanan berbasis IT
- 3) Membentuk tim layanan informasi, layanan pengaduan dan layanan kunjungan berbasis IT di tingkat pusat .

Pelaksanaan layanan kunjungan berbasis IT ini terintegrasi dengan teknologi Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) yang aplikasinya telah terimplementasi di seluruh Lapas/Rutan se Indonesia.

e. Penguatan Pengawasan Internal Pemasyarakatan dan penegakan kode etik

Program ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan kepatuhan petugas pemasyarakatan terhadap kode etik dan profesi. Adapun hal-hal yang telah dilaksanakan sampai saat ini yaitu :

- 1) Membentuk Majelis Kode Etik di tingkat pusat.
- 2) Membentuk Majelis Kode Etik pada tiap-tiap wilayah.

3) Melakukan bimtek pengawasan internal bagi 33 petugas pemasyarakatan.

f. Implementasi Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak yang sedang bermasalah dengan hukum. Sampai dengan saat ini Ditjen Pemasyarakatan telah melaksanakan antara lain :

- 1) Penyusunan instrumen pengumpulan data sosialisasi UU SPPA
- 2) Pengumpulan dan pengolahan data lapangan mengenai permasalahan Bapas dan Lapas Anak seluruh Indonesia
- 3) Menyelenggarakan Bimtek Online tentang dasar-dasar Pembimbing Kemasyarakatan (PK) terhadap 160 orang.
- 4) Melakukan sosialisasi Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak

g. Getting to zero HIV/AIDS di Lapas, Rutan dan Bapas

Program ini bertujuan untuk memberikan penanganan yang komprehensif dan tidak diskriminatif bagi penderita HIV/AIDS di Lapas dan Rutan, tidak terjadi penularan baru HIV/AIDS di Lapas dan Rutan, melalui program ini diharapkan terjadi penurunan angka kematian akibat AIDS di Lapas dan Rutan. Adapun hal-hal yang telah dilaksanakan sampai saat ini yaitu :

- 1) Peningkatan kapasitas petugas pemasyarakatan dalam layanan konseling dasar tes HIV di 17 propinsi.
- 2) Bimbingan teknis program penanggulangan HIV dan penyalahgunaan narkoba bagi kanwil Kem. Hukum dan HAM di 25 propinsi dan pelaksanaan screening tes dasar WBP di UPT PAS.
- 3) Bimbingan teknis penanganan penyakit menular (HIV/AIDS) bagi petugas yang berasal dari 25 UPT PAS.

h. Bengkel Kerja Produktif

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pembinaan kemandirian kepada narapidana serta pengembangan potensi yang ada pada Lapas/Rutan. Sesuai dengan tujuannya, program ini telah melaksanakan berbagai kegiatan pelatihan bagi petugas pemasyarakatan dibidang kegiatan kerja di beberapa propinsi, dengan harapan dapat terbentuk tenaga instruktur yang terampil dalam membina Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Selain itu, Ditjen Pemasyarakatan juga telah menyusun Menyusun kriteria bengkel

kerja produktif, melakukan inventarisir MoU yang telah dibuat terkait dengan program bengkel produktif, serta melakukan tindak lanjut terhadap MoU tersebut.. Hasil-hasil yang telah dicapai dalam program ini antara lain yaitu :

- 1) Lapas Cirebon menghasilkan Bola sepak, tenun
- 2) Lapas Narkotika Cirebon menghasilkan Kursi anyaman, sandal jepit
- 3) Lapas Padang menghasilkan Tiang Listrik, dan panel listrik
- 4) Lapas Klas I Surabaya menghasilkan Speed Boat “ Lopa 1 “
- 5) Lapas Klas I Malang menghasilkan Jamur Tiram
- 6) Lapas Wanita Malang, Lapas Klas I Cipinang, dan Lapas Pamekasan menghasilkan Batik
- 7) Lapas Klas I Tangerang menghasilkan Replika Motor Harley Davidson terbuat dari Koran
- 8) Lapas Karawang menghasilkan Peternakan Lele, Patin dan Ikan Mas
- 9) Lapas di Nusakambangan kegiatan peternakan sapi

Dengan banyaknya jenis kegiatan kerja yang ada di Lapas dan Rutan, maka Warga Binaan Pemasyarakatan banyak terserap dan bekerja dibengkel kerja Lapas dan Rutan. Selain berbagai jenis kegiatan kerja di Lapas/Rutan, beberapa galeri yang memasarkan hasil karya narapidana telah dibuka di kantor pusat Kementerian Hukum dan HAM RI serta di setiap kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM, dan di Lapas/Rutan tertentu.

Berbagai usaha pemasaran hasil karya narapidana sebagai salah satu tindak lanjut bengkel kerja bangkit telah dilaksanakan. Salah satunya menggelar kegiatan Napi Craft pada bulan Desember Tahun 2013 bertempat di JCC (Jakarta Convention Centre) dengan memamerkan karya narapidana seluruh Indonesia.

- i. Optimalisasi peningkatan pengelolaan administrasi fisik basan dan baran di rupbasan

Program ini bertujuan agar terlaksananya tertib administrasi dan pengelolaan fisik basan dan baran di rupbasan. Sampai dengan saat ini hal-hal yang telah dilakukan oleh Ditjen Pemasyarakatan antara lain :

- 1) Melakukan FGD penyusunan strategi nasional penguatan Rupbasan
- 2) Pengumpulan data dan informasi terkait dengan penyusunan draft perubahan Permenkumham tentang Pengelolaan Basan dan Baran

- 3) Pengumpulan data untuk buku standarisasi penulisan satuan jenis dan jumlah basan baran
- 4) Menyusun permenkumham tentang pengelolaan basan dan baran.

9. KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SEPANJANG TAHUN 2013

NO	KONFERENSI PERS	TEMPAT	TANGGAL
1	Dibebaskannya kepada Terpidana Vincentius Amin Sutanto yang Menjadi <i>Justice Collaborator</i> dalam Kasus Kejahatan Pajak yang Melibatkan PT Asian Agri di Lapas Narkotika Cipinang	Lapas Narkotika Cipinang	29-Jan-13
2	Menkum HAM Meluruskan Pemberitaan Mengenai Penangkapan 3 WNA Sindikat Pengedar Narkoba dari Balik LP Cipinang dan Nusakambangan oleh Polda Metro Jaya. Menkumham Menegaskan, Tak Ada Penangkapan Melainkan Dipinjam Polisi	Kantor Pusat Ditjen Pemasyarakatan	29-Jan-13
3	Remisi Nyepi	Lapas Klas IIA Mataram	12-Mar-13
4	Hari Bhakti Pemasyarakatan	Ditjen Pemasyarakatan	27-Apr-13
5	Remisi Waisak	Lapas Klas IIA Pontianak	25-Mei-13
6	Remisi Hari Kemerdekaan	Lapas Anak Tangerang	17-Agu-13
7	Rapat Pimpinan Pemasyarakatan	Kantor Pusat Ditjen Pemasyarakatan	27-Agu-13
8	Karya Napi Indonesia Kembali Dipamerkan Melalui Napi Craft	JCC Senayan, Jakarta Pusat	11-Des-13
9	Pasca Rusuh, Lapas Palopo Kondusif	Lapas Palopo	15-Des-13

E. Bidang Imigrasi

1. Direktorat Dokumen Perjalanan, Visa Dan Fasilitas Keimigrasian

a. Berdasarkan Penyerapan Anggaran

Anggaran yang dialokasikan pada Direktorat Dokumen Perjalanan, Visa dan Fasilitas Keimigrasian berdasarkan DIPA Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp 411.457.436.000,- (empat ratus sebelas milyar empat ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah). Realisasi anggaran yang sudah digunakan adalah sebesar Rp 408.215.393.926,- (empat ratus delapan milyar dua ratus lima belas juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah). Pelaksanaan seluruh kegiatan diatas telah menyerap anggaran pada Direktorat Dokumen Perjalanan, Visa Dan Fasilitas Keimigrasian sebesar 99,21% (sembilan puluh sembilan koma dua puluh satu persen).

b. Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

1) Subdirektorat Visa

- a) Seksi Visa Kunjungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan koordinasi kebijakan, bimbingan teknis serta penelaahan dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka persetujuan

pemberian visa kunjungan. Pada seksi visa kunjungan pelaksanaan kegiatan periode Januari – 16 Desember 2013 telah menerbitkan permohonan visa kunjungan sebanyak 15.912 orang dan visa kunjungan beberapa kali perjalanan sebanyak 24.245 orang dengan total persetujuan sebanyak 40.157 orang.

No.	Periode	Visa Kunjungan	VKBP
1.	Januari	797	1484
2.	Pebruari	1330	2496
3.	Maret	1346	2214
4.	April	1555	2356
5.	Mei	1671	2381
6.	Juni	1539	1952
7.	Juli	1694	2177
8.	Agustus	1210	1924
9.	September	1546	2239
10.	Oktober	1517	2214
11.	November	996	1749
12.	Desember	711	1059
Total		15.912	24.245

b) Kunjungan Saat Kedatangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan koordinasi kebijakan, bimbingan teknis serta penelaahan dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka persetujuan pemberian visa kunjungan, visa singgah, dan visa tinggal terbatas saat kedatangan. pelaksanaan kegiatan periode Januari s.d Desember 2013 telah menerbitkan 253 surat persetujuan permohonan visa kunjungan saat kedatangan bagi negara yang bukan subjek VKSK berdasarkan pasal 95 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

- c) Seksi Visa Tinggal Terbatas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan koordinasi kebijakan, bimbingan teknis, serta penelaahan dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka persetujuan pemberian visa tinggal terbatas. Dalam periode Januari s.d Desember 2013, pelaksanaan tugas Seksi Visa Tinggal Terbatas disajikan sebagai berikut:

No.	Periode	Visa Tinggal Terbatas	Visa Tinggal Terbatas Saat Kedatangan
1.	Januari	4128	0
2.	Pebruari	8159	0
3.	Maret	6819	0
4.	April	7051	0
5.	Mei	7353	0
6.	Juni	7381	0
7.	Juli	9231	0
8.	Agustus	5410	1
9.	September	7070	1
10.	Oktober	7151	0
11.	November	5995	1
12.	Desember	4263	0
Total		40891	0

- d) Seksi Visa Untuk Negara Tertentu mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan koordinasi kebijakan, bimbingan teknis, serta penelaahan dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka persetujuan pemberian visa untuk negara tertentu. Dalam periode Januari s.d 16 Desember 2013, pelaksanaan tugas Seksi Visa Untuk Negara Tertentu dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

NO.	WARGA NEGARA	DISETUIJI					DITUNDA / DIJUNDANG / CEK					DITOLAK					TOTAL
		VS	VK	VKBP	VTT	JUMLAH	VS	VK	VKBP	VTT	JUMLAH	VS	VK	VKBP	VTT	JUMLAH	
1	AFGHANISTAN	9	79	0	11	99	1	200	6	24	231	1	65	2	8	76	
2	GUINEA	14	26	27	11	76	0	22	7	5	34	0	7	3	0	10	
3	IRAK	217	40	7	4	268	0	132	19	9	160	1	48	1	5	55	
4	ISRAEL	0	783	0	1	784	0	139	0	0	139	0	55	0	1	56	
5	KAMERUN	21	93	115	40	269	0	67	23	21	111	0	17	3	2	23	
6	KOREA UTARA	1	1	0	3	5	0	24	0	1	25	0	11	0	5	16	
7	LIBERIA	11	22	40	19	92	3	4	4	2	13	0	5	0	1	6	
8	NIGER	18	6	15	0	39	0	7	1	0	8	0	0	1	0	1	
9	NIGERIA	50	732	449	71	1302	28	739	160	55	982	2	205	18	22	247	
10	PAKISTAN	142	701	204	139	1186	74	1254	234	129	1691	0	417	31	42	490	
11	SOMALIA	1	137	24	22	184	0	74	20	5	99	4	30	3	3	40	
TOTAL						4304					3493					1020	51
JUMLAH PEMOHON																	8817

2) Subdirektorat Inmaslak dan TPI

1) Seksi Izin Masuk mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan koordinasi kebijakan dan bimbingan teknis dalam rangka persetujuan pemberian izin masuk, izin masuk kembali dan izin masuk darurat. Dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2013, Seksi Izin Masuk telah melaksanakan pemberian izin keimigrasian dibawah Seksi Izin Masuk yang dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Bulan	Perpanjangan Izin Masuk Kembali	Permohonan ERP	Koreksi
1	Januari	54	7	-
2	Pebruari	46	6	193
3	Maret	46	3	-
4	April	28	1	8
5	Mei	31	1	6
6	Juni	42	2	-
7	Juli	37	1	1
8	Agustus	29	2	1
9	September	39	1	3
10	Oktober	39	1	2
11	Nopember	23	1	3
12	Desember	30	1	2

2) Seksi Izin Bertolak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan koordinasi kebijakan dan bimbingan teknis dalam rangka persetujuan pemberian izin bertolak. Dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2013, Seksi Izin Masuk telah melaksanakan pemberian izin keimigrasian dibawah Seksi Izin Bertolak dalam kurun waktu periode Januari s.d Desember 2013 dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Bulan	Tanda Bertolak pada PP	EPO	Penundaaan keberangkatan
1	Januari	51	2	12
2	Pebruari	50	1	8

3	Maret	35	5	3
4	April	20	-	4
5	Mei	37	-	3
6	Juni	47	-	5
7	Juli	52	-	3
8	Agustus	50	-	2
9	September	55	-	6
10	Oktober	71	-	6
11	Nopember	48	-	5
12	Desember	40	-	4

- 3) Seksi Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Pos Lintas Batas (Seksi TPI dan PLB) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan koordinasi kebijakan dan bimbingan teknis serta pelaksanaan kebijakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan pengendalian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Pos Lintas Batas. Pelaksanaan tugas Seksi TPI dan PLB dalam mengoptimalkan TPI-TPI dan PLB-PLB diseluruh indonesia dirasa perlu senantiasa dilakukan monitoring dan evaluasi, adapun pelaksanaan monitoring dan evaluasi dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Tanggal	PROGRAM / KEGIATAN
1.	22 – 23 Januari 2013	Monitoring Mesin Autogate di TPI Soekarno-Hatta
2.	17 – 19 Pebruari 2013	Monitoring Bandara Fatmawati Soekarno, Bengkulu
3.	10 - 13 April 2013	Bimbingan Teknis Pemberian Izin Keimigrasian di Hotel Arya Duta, Jakarta
4.	22 – 24 Mei 2013	Peninjauan Lapangan Ke TPI Lembar dan Bandara Internasional Lombok;
5.	12 – 14 Juni 2013	Peninjauan ke TPI Ngurah Rai, Bali dalam rangka KTT APEC
6.	02 September 2013	Peninjauan Lapangan Terkait Penyampaian Nota Diplomatik Kedutaan Besar islam Iran di Jakarta Mengenai Kasus Warga Negara Iran Mr. Musa Khatam Shisheborg di Bandara Soekarno - Hatta
7.	6 – 8 Nop 2013	Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2011 tentang Kunjungan Kapal Wisata Asing (Yacht) ke Indonesia
8.	25 – 26 Nop 2013	Monitoring implementasi pelayanan paspor one stop service
9.	16 s/d 18 Sep 2013	Monitoring pelayanan ibadah haji Pada embarkasi haji, bandara internasional Lombok, Minakabau-Padang dan Sultan Iskandar Muda – NAD
10.	01 Nop – 25 Des 2013	Tenaga Perbantuan dan evaluasi Pemberian SPRI/ SPLP TKW di Jeddah Arab Saudi

3) Subdirektorat Surat Perjalanan

Adapun pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh setiap seksi pada Subdit. Surjal dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Seksi Pelayanan Paspor Biasa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan koordinasi kebijakan, bimbingan teknis serta pelaksanaan kebijakan dalam rangka pemberian/penerbitan paspor biasa dan pas lintas batas serta pengesahan surat perjalanan, Subdit. Surjal pada Tahun 2013 melaksanakan Endorsment sebanyak 2.266 dengan rincian perbulan seperti tabel dibawah ini:

Bulan	Endorsment
Januari	254
Februari	243
Maret	261
April	279
Mei	255
Juni	182
Juli	97
Agustus	82
September	91
Oktober	86
Nopember	187
Desember	249

- 2) Seksi Analisa Pemberian Paspor Biasa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan koordinasi kebijakan, bimbingan teknis serta pelaksanaan kebijakan dalam rangka pengendalian pemberian/penerbitan paspor biasa dan pas lintas batas serta penelaahan dalam rangka persetujuan pemberian/penerbitan paspor biasa dan pas lintas batas. Pelaksanaan tugas pada Seksi Analisa Pemberian Paspor Biasa periode Tahun Anggaran 2013 dicetak e-Paspor sebanyak 50.000 Blanko (Rp 10.540.750.000,-) dan Paspor RI 48 Halaman sebanyak 375.410 Blanko (Rp 29.459.173.520,-) dengan spesifikasi berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Spesifikasi Teknis Pengaman Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor.

4) Subdirektorat Surat Perjalanan Khusus TKI

- 1) Seksi Pelayanan Paspor Tenaga Kerja Indonesia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan koordinasi kebijakan, bimbingan teknis serta pelaksanaan kebijakan dalam rangka pemberian paspor khusus tenaga kerja Indonesia Timur Tengah. Pada periode Januari s.d Nopember 2013, telah dilaksanakan pemberian endorsment terhadap pemegang paspor TKI sebanyak 5.652 Paspor dengan data rincian perbulan sebagai berikut:

Bulan	Endorsment
Januari	408
Februari	442
Maret	555
April	649
Mei	692
Juni	475
Juli	508
Agustus	55
September	618
Oktober	624
Nopember	606

- 2) Seksi Analisa Pemberian Paspor Tenaga Kerja Indonesia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan koordinasi kebijakan, bimbingan teknis dalam rangka pengendalian pemberian surat perjalanan khusus tenaga kerja Indonesia Timur Tengah, serta analisa dan pemeriksaan paspor hilang, rusak dan penggandaan. Pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan pada periode Tahun Anggaran 2013 telah dilaksanakan perbantuan tenaga dalam rangka pemutihan Dokumen Perjalanan RI di KJRI Jeddah berdasarkan Keputusan Dirjen. Imigrasi Nomor IMI.1526.GR.01.01 Tahun 2013 dengan Periode penugasan 11 Juni s.d 07 Agustus 2013. Menjelang berakhirnya dan memasuki pasca dihentikannya amnesti Kerajaan Arab Saudi, Ditjen. Imigrasi melalui Direktorat Doklanvisfaskim kembali mengirimkan perbantuan tenaga dalam rangka pemutihan Dokumen Perjalanan RI di KJRI Jeddah berdasarkan Keputusan Dirjen. Imigrasi Nomor IMI-3643.GR.01.01 Tahun 2013 tentang

Pembentukan Tim Perbantuan Tenaga Dalam Rangka Pemutihan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah di KJRI Jeddah Kerajaan Arab Saudi Tahap II.

5) Subdirektorat Fasilitas Keimigrasian

1).Seksi Layanan Keagamaan pada periode Januari s.d Desember 2013

Seksi Layanan Keagamaan melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a) Agar pelaksanaan penyelesaian keimigrasian di beberapa TPI tersebut dapat merespon dengan cepat dan tepat setiap keluhan dan kendala dari Calon/Jamaah Haji yang berjumlah lebih dari 150.000 (seratus lima puluh ribu) orang, telah diterbitkan Instruksi Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI-993.PW.02.02 tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Keimigrasian dalam Rangka Embarkasi/Debarkasi Jamaah Calon/Jamaah Haji Tahun 1434H/2013M dan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : IMI-539.GR.01.01 Tahun 2013 Tanggal 22 Februari 2013 tentang Tim Monitoring Pelayanan Ibadah Haji Pada Embarkasi Tahun 2013;
- b) Kegiatan monitoring dilaksanakan pada 12 (dua belas) embarkasi pemberangkatan dan pemulangan Calon/Jamaah Haji di seluruh Indonesia oleh Satuan Petugas Pelaksanaan Pelayanan Calon/Jamaah Haji Tingkat Pusat Direktorat Jenderal Imigrasi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : IMI-539.GR.01.01 Tahun 2013 Tanggal 22 Februari 2013
- c) Pelaksanaan kegiatan monitoring dilaksanakan pada 12 (dua belas) tempat keberangkatan/kedatangan Haji yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor : 108 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor : 62 Tahun 2013 Tentang Penetapan Embarkasi dan Debarkasi Haji Tahun 1434 H/ 2013 M, yaitu:
 - Banda Aceh untuk melayani Calon/Jamaah Haji dari Provinsi NAD.
 - Medan untuk melayani Calon/jamaah dari Provinsi Sumatera Utara.

- Batam untuk melayani Calon/Jamaah dari Provinsi Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, dan Jambi.
- Padang untuk melayani Calon/Jamaah dari Provinsi Sumatera barat, Bengkulu, dan Jambi.
- Palembang untuk melayani Calon/Jamaah dari Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung.
- Jakarta untuk melayani Calon/Jamaah dari Provinsi DKI Jakarta, Lampung, dan Banten dan Jawa Barat.
- Surabaya untuk melayani Calon/Jamaah dari Provinsi Jawa Timur, Bali, dan NTT.
- Banjarmasin untuk melayani Calon/Jamaah dari Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.
- Balikpapan untuk melayani Calon/Jamaah dari Provinsi Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara.
- Makassar untuk melayani Calon/Jamaah dari Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
- Solo untuk melayani Calon/Jamaah dari Provinsi Jawa Tengah, DI Yogyakarta,
- Lombok untuk melayani Calon/Jamaah dari Provinsi Nusa Tenggara Barat.

2). Seksi Layanan Pendaratan di Atas Alat Angkut telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai berikut:

a) Pelaksanaan IoS dengan permintaan petugas melalui Subdit Fasilitas Keimigrasian Periode Januari - Desember 2013 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

JUMLAH KAPAL WISATA SELURUH NYA	AGEN PELAYARAN					PENUMPANG / CREW
	PT. PELNI	PT. TIRTA SAMUDERA CARAKA	PT. ANDHIK A GAC	HANAFIAH PONGGAWA	PT SPECTRA	
65	35	1	25	3	1	59.887 ORG / 23.175 ORG

b) Melakukan perjanjian Kerjasama Antara Ditjen Imigrasi Dengan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tentang Pemeriksaan Keimigrasian

Dalam Penerbangan dan Pengelolaan PNBP Atas Biaya VKSK. Pada tanggal 10 Januari 2013 telah ditandatangani Perjanjian Kerjasama Antara Ditjen Imigrasi Dengan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nomor : IMI-UM.01.01-560 Nomor : DS/PERJ/DZ-3013/2013 Nomor : B.12-DIR/HBL.1/01/ 2013 tentang Pemeriksaan Keimigrasian Dalam Penerbangan dan Pengelolaan PNBP Atas Biaya VKSK;

- c) Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : IMI-540.GR.01.01 Tahun 2013 tentang Tim Monitoring Pelaksanaan on Shipping pada TPI Tahun 2013, telah dilaksanakan monitoring IoS sebanyak 5 (lima) kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:
- d) Monitoring *Immigration on Shipping* (IoS) pada TPI Pelabuhan Laut Tanjung Mas di Semarang pada tanggal 26 s.d. 28 Maret 2013, selain ke TPI Pelabuhan Laut Tanjung Mas Tim Monitoring juga melakukan kunjungan ke TPI Bandara Ahmad Yani dengan kesimpulan bahwa pos Imigrasi Pelabuhan Laut Tanjung Mas tidak bisa ditempati lagi dikarenakan tergenang banjir ROB sejak tahun 2008 sehingga operasional dipindahkan ke Kanim Kelas I Semarang dan untuk layanan IoS setiap kapal pesiar yang datang, Kanim Kelas I Semarang mengirimkan 1 (satu) orang petugas dan untuk yang berangkat ditugaskan 3 (tiga) orang petugas untuk melakukan pemeriksaan keimigrasian;
- e) Monitoring IoS pada TPI Pelabuhan Laut Benoa di Bali pada tanggal 19 s.d. 21 Maret 2013, dengan kesimpulan bahwa TPI Pelabuhan Laut Benoa hanya diperuntukkan untuk kapal pesiar dengan kapasitas 500 (lima ratus) orang penumpang dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana seperti konter Imigrasi, petugas, dan tidak memiliki perangkat BCM serta untuk kapal pesiar yang besar tidak dapat bersandar di pelabuhan dikarenakan kurang dalamnya pelabuhan;
- f) Monitoring IoS pada Pos Imigrasi Pelabuhan Laut Lembar di Lombok pada tanggal 03 s.d. 05 April 2013, selain ke Pos Imigrasi Pelabuhan Laut Lembar Tim Monitoring juga mengunjungi

Bandara Internasional Lombok, dengan kesimpulan Pelabuhan Laut Lembar di Lombok belum merupakan TPI dengan fasilitas VKSK dan belum memiliki perangkat *Border Control Management* (BCM) serta pemeriksaan keimigrasian bagi kapal pesiar yang akan datang memakai mekanisme pengiriman petugas dari Ditjen Imigrasi dan keberangkatan kapal pesiar dilaksanakan oleh 4 (empat) orang petugas dari Kanim Kelas I Mataram dengan menggunakan cap Bandara Selaparang dengan menumpang kapal Bea dan Cukai;

- g) Monitoring IoS pada TPI Pelabuhan Laut Soekarno Hatta di Makassar pada tanggal 06 s.d. 08 Mei 2013, selain ke Pelabuhan Laut Soekarno Hatta Tim Monitoring juga mengunjungi Bandara Hasanuddin, dengan kesimpulan bahwa pos Imigrasi di Pelabuhan Laut Soekarno Hatta tidak layak ditempati dan butuh direnovasi dan masih kurangnya petugas teknis dan cap kedatangan dan keberangkatan;
- h) Monitoring los pada TPI Pelabuhan Laut Belawan pada tanggal 21 s.d. 23 Mei 2013.
- i) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan *Immigration on Board* (IoB):
- Monitoring pelaksanaan IoB di atas pesawat GA 713 tujuan Sydney-Jakarta dilaksanakan pada tanggal 15 s.d. 17 Maret 2013, dengan kesimpulan tentang teknis koordinasi petugas IoB dengan crew pesawat dan permasalahan terkait peralatan IOB. Disarankan agar penyusunan SOP IoB agar segera dilakukan sebagai pedoman pelaksanaan IoB;
 - Peresmian pelaksanaan IoB dengan rute penerbangan Shanghai-Jakarta pada tanggal 04 Mei 2013, sesuai dengan perjanjian kerjasama antara Ditjen Imigrasi dengan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dimungkinkan untuk penambahan pelaksanaan IoB pada rute penerbangan lain;
 - Monitoring pelaksanaan IoB pada Bandara Soekarno - Hatta dan Bandara Ngurah Rai pada tanggal 30 s.d. 31 Mei 2013 serta rapat koordinasi dengan Kanim Kelas I Khusus Ngurah

Rai, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dengan kesimpulan masih terdapat permasalahan terkait teknis transaksi voucher VoA, fasilitas petugas, tanggung jawab pelaksanaan, perangkat dan evaluasi pelaksanaan loB;

- Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan loB dalam rangka penyusunan *Standard Operating Procedure* (SOP) sebagai bagian dari Perjanjian Kerjasama antara Ditjen Imigrasi dengan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dilakukan pada tanggal 14 s.d. 16 Juni 2013 di atas pesawat GA 881 tujuan Tokyo Narita-Jakarta, dan pertemuan dengan pihak PT Garuda dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2013 di Tobu-Narita Hotel dengan kesimpulan bahwa ada 3 (tiga) tahapan penting dalam pelaksanaan loB yaitu: *pre-flight* (sebelum keberangkatan), *in-flight* (saat penerbangan), dan *post-flight* (setelah penerbangan). Status petugas dalam pelaksanaan loB adalah "supernumerary" yaitu seseorang yang berada dalam pesawat selain awak dan crew aktif ataupun penumpang dan bertugas melakukan kegiatan tertentu di pesawat yang merupakan bagian pelayanan pelanggan di kabin dan tidak terkait dengan keselamatan penerbangan. Terkait permasalahan teknis transaksi dan laporan rekonsiliasi pembayaran voucher VoA dan teknis peralatan loB. Secara umum koordinasi petugas loB dengan crew sudah berjalan dengan baik.
- Menindaklanjuti Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : IMI-543.GR.01.01 tahun 2013 tentang Tim Bimbingan Teknis Pemberian Faskim, maka pada tanggal 01 s.d. 04 Mei telah dilakukan Bimbingan Teknis Pemberian Faskim di Hotel Harmoni One Batam, pelaksanaan
- Bimtek ini merupakan yang pertama dilakukan oleh Subdit. Fasilitas Keimigrasian.

- Kegiatan lain yang telah dilakukan adalah monitoring pelaksanaan on Shipping pada TPI yang telah dilakukan pada:
 - TPI Benoa, Bali pada tanggal 19 s.d. 21 Maret 2013;
 - TPI Tanjung Perak, Surabaya pada tanggal 26 s.d. 28 Maret 2013;
 - TPI Mataram, NTB pada tanggal 03 s.d. 05 April 2013;
 - TPI Makassar, Sulawesi Selatan pada tanggal 06 s.d. 08 Mei 2013;
 - TPI Belawan, Sumatera Utara pada tanggal 21 s.d. 23 Mei 2013;
 - TPI Ngurah Rai, Bali pada tanggal 30 Mei s.d. 1 Juni 2013.

2. Direktorat Izin Tinggal Dan Status Keimigrasian

a. Berdasarkan Penyerapan Anggaran

Anggaran yang dialokasikan pada Direktorat Izin Tinggal Dan Status Keimigrasian berdasarkan DIPA Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp14.219.482.000 (empat belas miliar dua ratus sembilan belas juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah). Realisasi anggaran yang sudah digunakan adalah sebesar Rp 7.711.008.490,- (tujuh miliar tujuh ratus sebelas juta delapan ribu empat ratus sembilan puluh rupiah). Pelaksanaan seluruh kegiatan diatas telah menyerap anggaran pada Direktorat Izin Tinggal Dan Status Keimigrasian sebesar 54,22% (lima puluh empat koma dua puluh dua persen).

b. Pelayanan Izin Tinggal

REKAPITULASI PELAYANAN PADA SUBDIT IZIN TINGGAL

PERIODE 2013

NO.	JENIS KEGIATAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEP	OKT	NOV	DES	JUMLAH
1	Izin Tinggal Kunjungan :													0
	Visa Kunjungan Sosial Budaya	28	57	49	52	47	53	45	43	50	42	58	62	586
	Visa Kunjungan Usaha	22	27	31	44	31	27	48	46	53	57	45	26	457
	Visa Kunjungan Wisata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	VKUBP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
	Penolakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	JUMLAH	50	84	80	96	78	80	93	89	103	99	104	89	1045
2	Izin Tinggal Terbatas :													
	PERPANJANGAN ITAS	1240	1353	1558	1843	875	1775	1949	957	1801	1927	2670	1299	19247
	ALIH SPONSOR KITAS	50	25	10	25	7	5	8	0	14	26	94	28	292
	ALIH JABATAN ITAS	120	84	105	90	47	19	96	40	51	76	158	29	915
	ALIH SPONSOR & JABATAN	29	60	55	50	28	57	38	22	0	0	25	1	365
	RANGKAP JABATAN PEMB. & PERP. IT Khusus/TETO	27	30	20	25	5	14	10	3	10	8	13	0	165
	JUMLAH	1466	1552	1748	2033	962	1892	2101	1022	1880	2038	2980	1364	21038
3	Izin Tinggal Tetap :													
	PERPANJANGAN KITAP	33	64	65	65	64	63	61	45	74	70	54	68	726
	PERPANJANGAN KITAP EX IG	-	3	3	9	6	12	12	6	5	6	5	2	69
	PERPANJANGAN KITAS EX IG	2	1	-	-	1	-	-	-	1	1	0	0	6
	ALIH SPONSOR ALIH JABATAN & ALIH PENJAMIN KITAP	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	0	0	0
	ALIH JABATAN KITAP	2	-	5	3	5	-	3	-	9	16	4	2	49
	ALIH JABATAN KITAP	-	-	-	-	-	-	4	-	-	1	0	0	5
	ALIH PENJAMIN KITAP	8	15	6	17	12	13	14	15	-	0	0	24	124
	RANGKAP JABATAN	-	1	-	1	0	-	2	6	2	0	2	0	14
	PEMBERIAN KITAP BARU EX IG	4	2	-	-	0	-	-	-	1	0	0	0	7
	PEMBERIAN/PERPANJANGAN KITAS BARU EX IG	-	-	-	-	0	-	1	-	0	0	0	0	1
	PENGGANTIAN SKK/STP KE KITAP	-	-	-	-	0	-	-	-	0	0	0	0	0
PENOLAKAN	-	-	-	-	-	1	2	3	2	0	0	0	8	
	JUMLAH	49	86	79	95	88	88	99	75	94	94	65	96	1001

REKAPITULASI PELAYANAN

PADA SUBDIT IZIN TINGGAL

PERIODE 2013

NO.	JENIS KEGIATAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEP	OKT	NOV	DES	JUMLAH
4	Dahsuskim :													
	Baru	648	1003	2350	907	1146	850	870	904	1316	1029	831	786	12640
	Perpanjangan	1239	1298	2000	1046	1801	1115	2071	1526	2306	1977	1450	1026	18855
	Penambahan	975	925	741	802	896	747	939	840	909	981	875	789	10419
	Penggantian	68	47	57	43	87	85	96	44	26	29	12	11	605
	Penambahan Perpanjangan	10	18	11	34	39	28	47	36	27	26	66	46	388
	JUMLAH	2940	3291	5159	2832	3969	2825	4023	3350	4584	4042	3234	2658	42907

**REKAPITULASI PELAYANAN
PADA SUBDIT ALIH STATUS KEIMIGRASIAN
PERIODE 2013**

NO.	JENIS KEGIATAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUMLAH	KETERANGAN PENOLAKAN	
1	Izin Tinggal Kunjungan Menjadi ITAS :									
	Tenaga Kerja Asing	83	138	71	90	150	147			
	Rohaniawan Asing	0	0	0	0	0	0			
	Mahasiswa/Pelajar Asing	306	251	221	298	203	179			
	Penyatuan Keluarga	62	105	66	86	87	76			
	Memperoleh Kembali Kewarganegaraan RI	0	0	0	4	1	0			
	Wisatawan Lanjut Usia Mancanegara	0	0	1	0	0	3			
Pertimbangan Kemanusiaan	4	7	11	5	5	6				
JUMLAH		455	501	370	483	446	411	2666	2666	0
2	ITAS Menjadi ITAP :									
	Tenaga Kerja Asing	11	0	0	0	0	4			
	Penanam Modal	11	10	3	7	1	0		Jan, 2=Penolakan	
	Tenaga Kerja Asing Langka	0	0	0	0	0	12		Feb,3=Penolakan TKA	
	Top Manager	24	23	18	7	9	58			
	Rohaniawan Asing	2	1	2	1	1	9		Mei,1= Penolakan Penyatuan Keluarga	
	Penyatuan Keluarga	118	91	85	73	55	13		Feb,1= Penolakan Penyatuan Keluarga	
	Wisatawan Lanjut Usia Mancanegara	11	15	12	7	8	2		Jan, 1=Penolakan Penyatuan Keluarga	
	Pertimbangan Kemanusiaan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan RI	5	1	0	0	1	0			
JUMLAH	182	141	120	95	75	98	711	711	0	
3	Izin Tinggal Dinas Menjadi ITAS :									
	Setneg	32	31	48	29	17	59			
	Deplu/Diplomatik	1	0	21	3	4	3			
JUMLAH	33	31	69	32	21	62	248			

**REKAPITULASI PELAYANAN PADA SUBDIT ALIH STATUS KEIMIGRASIAN
PERIODE 2013**

NO.	JENIS KEGIATAN	JULI	AGUS	SEP	OKT	NOV	DES	JUMLAH	KETERANGAN PENOLAKAN	
1	Izin Tinggal Kunjungan Menjadi ITAS :									
	Tenaga Kerja Asing	124	78	201	154	169	64			
	Rohaniawan Asing	0	0	0	0	0	0			
	Mahasiswa/Pelajar Asing	137	55	257	297	388	150			
	Penyatuan Keluarga	127	81	73	123	109	39			
	Memperoleh Kembali Kewarganegaraan RI	4	2	1	2	4	1			
	Wisatawan Lanjut Usia Mancanegara	0	0	0	0	0	0			
Pertimbangan Kemanusiaan	11	8	7	7	7	4				
JUMLAH	403	224		583	677	258	4811	4811	0	

2	ITAS Menjadi ITAP :									
	Tenaga Kerja Asing	0	0	0	0	0	0			
	Penanam Modal	10	7	7	7	7	2			
	Tenaga Kerja Asing Langka	0	0	0	0	0	0			
	Top Manager	11	12	11	8	18	21			
	Rohaniawan Asing	2	5	5	5	2	1			
	Penyatuan Keluarga	125	0	69	149	138	128			
	Wisawatan Lanjut Usia Mancanegara	15	0	11	14	15	12			
	Pertimbangan Kemampuan Memperoleh Kembali	1	0	0	0	2	0			
	Kewarganegaraan RI	1	0	3	2	0	2			
JUMLAH	165	24	106	185	182	166	1539	1539	0	
3	Izin Tinggal Dinas Menjadi ITAS :									
	Setneg	30	30	113	582	93	25			
	Deplu/Diplomatik	11	10	98	174	35	20			
	JUMLAH	41	40	211	756	128	45	1469		

3. Direktorat Intelijen Keimigrasian

a. Berdasarkan Penyerapan Anggaran

Anggaran yang dialokasikan pada Direktorat Intelijen Keimigrasian berdasarkan DIPA Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp 11.216.986.000,- (sebelas miliar dua ratus enam belas juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah). Realisasi anggaran yang sudah digunakan adalah sebesar Rp 8.232.376.983,- (delapan miliar dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah). Pelaksanaan seluruh kegiatan diatas telah menyerap anggaran pada Direktorat Izin Tinggal Dan Status Keimigrasian sebesar 73.39% (tujuh puluh tiga koma tiga puluh sembilan persen).

b. Berdasarkan Tugas Dan Fungsi

- 1) Direktorat Intelijen Keimigrasian mampu meningkatkan kemampuan dan keterampilan tingkat manajer senior SDM dalam mengelola dan menganalisa masalah imigran ilegal;
- 2) Direktorat Intelijen Keimigrasian mampu meningkatkan kemampuan dan keterampilan operator yang akan menjalankan tugas E.base maupun PIU (Port Intelijen Unit) di kantor Imigrasi yang direncanakan;
- 3) Direktorat Intelijen bekerja sama dengan Bagian Kepegawaian dan BPSDM berhasil melaksanakan pembentukan personil berkualifikasi intelijen dasar bersama dengan Pusdiklat Intelstrat TNI;
- 4) Direktorat Intelijen Keimigrasian berhasil menginventarisir personil dan SDM berkualifikasi intelijen yang tersebar di seluruh Indonesia;



- 5) Telah terbangunnya kerja sama dan saling pengertian dan kemungkinan pengembangan atas tugas intelijen antara Imigrasi dengan BAIS TNI, meski secara riil belum dilakukan secara resmi;
- 6) Telah berhasil mengidentifikasi pelaku kejahatan penghilangan laminasi dan blanko paspor 24 halaman secara sengaja di Kantor Imigrasi Jakarta Timur;
- 7) Telah berhasil mengidentifikasi sebab masalah dalam TIM CH bagi warga negara asing *calling visa*;
- 8) Penyusunan pokok-pokok pikiran yang berkait dengan draft peraturan menteri tentang Pengawasan dan Intelijen Keimigrasian dan dalam rangka sosialisasinya ke daerah-daerah yang memiliki potensi pemikiran, wawasan dan wacana masalah dimaksud;
- 9) Telah dibuat rancangan permasalahan keimigrasian yang berkait dengan tindakan hukum (*due process*) tata peradilan di Indonesia, baik yang menyangkut PRA PERADILAN maupun beracara dalam Peradilan Tata Usaha Negara;
- 10) Menjajaki kembali kerja sama dalam kerangka pengamanan dan pembinaan personil Direktorat Jenderal Imigrasi dengan Inspektorat Jenderal;
- 11) Terpeliharanya kontak antar pribadi dengan personil IOM, UNHCR, UNODC maupun kedutaan Australia untuk memastikan perkembangan kerja sama di kemudian hari, setelah masalah bilateral antara Indonesia-Australia dapat diselesaikan dengan *win-win solutions*.

4. Direktorat Penyidikan Dan Penindakan Keimigrasian

a. Berdasarkan Penyerapan Anggaran

Anggaran yang dialokasikan pada Direktorat Intelijen Keimigrasian berdasarkan DIPA Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp 11.180.752.000,- (sebelas miliar seratus delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah). Realisasi anggaran yang sudah digunakan adalah sebesar Rp 7.849.143.007,- (tujuh miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta seratus empat puluh tiga ribu tujuh rupiah). Pelaksanaan seluruh kegiatan diatas telah menyerap anggaran pada Direktorat Izin Tinggal Dan Status Keimigrasian sebesar 70,20% (tujuh puluh koma dua puluh persen).

2. Berdasarkan Tugas Pokok dan fungsi

a. Subdit Penyidikan

1) kegiatan penyidikan yang terlaksana selama TA 2013:

Kegiatan	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	Jml
Penyidikan melalui proses peradilan	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pelanggaran keimigrasian WNA	6	5	3	4	2	3	1	0	1	0	0	0	25
Paspor hilang	40	36	45	48	49	45	56	55	54	85	49	40	602
JUMLAH	46	41	48	52	51	48	57	55	55	85	49	40	627

2) Tindakan Keimigrasian pendeportasian Januari s.d. Desember 2013

Bulan	Deportasi Dengan tanggal	Deportasi tanpa tanggal	Jumlah
Januari	4	2	6
Februari	3	2	5
Maret	2	1	3
April	2	2	4
Mei	1	1	2
Juni	3	0	3
Juli	0	1	1
Agustus	0	0	0
September	1	0	1
Oktober	0	0	0
Nopember	0	0	0
Desember	0	0	0
Jumlah	16	9	25

3) Bimbingan Teknis Penyidikan

Bimbingan teknis Penyidikan dilakukan sepanjang Tahun Anggaran 2013 mulai dari Februari sampai November 2013. Pelaksanaan Bimbingan Teknis ini dilakukan sebanyak 4 kali seperti yang telah direncanakan dalam rencana kerja tahun 2013. Pelaksanaan bimbingan teknis ini meliputi:

- Bimbingan Teknis Penyidikan Keimigrasian Tahap I diadakan di Mataram pada tanggal 25 s.d. 27 Februari 2013;
- Bimbingan Teknis Penyidikan Keimigrasian Tahap II diadakan di Palembang pada tanggal 06 s.d. 08 Mei 2013;
- Bimbingan Teknis Penyidikan Keimigrasian Tahap III diadakan di Papua pada tanggal 4 s.d. 6 September 2013;
- Bimbingan Teknis Penyidikan Keimigrasian Tahap IV diadakan di Bali pada tanggal 27 s.d. 29 November 2013. Pelaksanaan Bimbingan teknis ini melibatkan Unit Pelayanan Teknis (UPT) dari seluruh Indonesia secara bergiliran.

b. Subdit Penindakan Keimigrasian

1) Kegiatan pemeriksaan dan penindakan keimigrasian meliputi:

Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	Jml
Clearance Visa	57	79	57	63	51	42	20	45	53	49	63	36	615
Pendaftaran Artis Asing	157	394	216	220	421	156	154	237	422	342	325	137	3181
Pelanggaran Keimigrasian	133	47	89	154	126	223	110	45	123	165	160	78	1453
JUMLAH	347	520	362	437	598	421	284	327	520	521	547	251	5135

2) Tindakan Keimigrasian Pendeportasian Januari s.d. Desember 2013

Bulan	Deportasi Dengan Tangkal	Deportasi Tanpa Tangkal	Jumlah
Januari	54	79	133
Pebruari	34	13	47
Maret	83	6	89
April	146	8	154
Mei	118	8	126
Juni	207	16	223
Juli	92	18	110
Agustus	31	14	45
September	97	26	123
Oktober	19	146	165
Nopember	26	134	160
Desember	10	68	78
Jumlah	907	468	1375

3) Bimbingan Teknis Penindakan

Bimbingan teknis Penindakan dilakukan sepanjang Tahun Anggaran 2013 mulai dari Feberuari sampai Nopember 2013. Pelaksanaan Bimbingan Teknis ini dilakukan sebanyak 4 kali dalam satu tahun anggaran 2013, yang meliputi:

- a) Bimbingan Teknis Penindakan Keimigrasian Tahap I diadakan di Mataram pada tanggal 25 s.d. 27 Februari 2013;
- b) Bimbingan Teknis Penindakan Keimigrasian Tahap II diadakan di Palembang pada tanggal 06 s.d. 08 Mei 2013;
- c) Bimbingan Teknis Penindakan Keimigrasian Tahap III diadakan di Batam pada tanggal 16 s.d. 18 Oktober 2013;
- d) Bimbingan Teknis Penindakan Keimigrasian Tahap IV diadakan di Bali pada tanggal 13 s.d. 15 November 2013

Pelaksanaan Bimbingan teknis ini melibatkan Unit Pelayanan Teknis (UPT) dari seluruh Indonesia secara bergiliran.

c. Subdit Pencegahan dan Penangkalan

1) Penyebaran Daftar Pencegahan dan Penangkalan

Penyebarluasan data cegah tangkal dilaksanakan dengan pencetakan data cekal dalam bentuk aplikasi CD Cekal dan Buku Cekal yang dikirim ke semua kanim, kadv Imigrasi Kanwil Kemenkumham RI maupun di perwakilan RI di Luar Negeri. Pencetakan ini dibuat dalam bentuk 300 CD cekal yang diadakan setiap 3 bulan sebanyak 4 kali dalam setahun dan 300 Buku Cekal yang dicetak tiap semester (dua kali dalam setahun). Namun pada Tahun Anggaran 2013 Pencetakan dan Penyebarluasan CD

cekal masih dilakukan sebanyak tiga kali. Pada tahap ketiga yaitu bulan Oktober 2013 tidak dilakukan pencetakan CD cekal.

Kegiatan Pencegahan dan Penangkalan dari Januari s.d. Desember 2013 adalah sebagai berikut:

Dikenakan Tindakan Pencegahan Baru

Unit Kerja	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jml
Menkumham	5	6	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19
Menteri Keuangan	7	12	3	11	-	2	12	6	1	8	13	-	75
Kejaksaan Agung	9	19	19	24	32	3	16	3	26	11	28	-	190
Kapolri	137	180	30	121	56	161	145	152	20	12	78	-	408
KPK	15	15	3	15	13	-	7	9	2	11	13	-	86
BNN	-	-	10	3	-	1	-	-	-	1	-	-	4
Imigrasi	-	-	-	3	1	1	13	10	-	1	5	-	4
JUMLAH	137	232	73	157	102	168	193	180	49	44	137	-	811

Dikenakan Tindakan Perpanjangan Pencegahan

Unit Kerja	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	Jml
Menkumham	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Menteri Keuangan	1	6	17	13	4	5	1	1	1	2	-	-	51
Kejaksaan Agung	1	2	2	30	6	7	3	1	11	10	5	-	10
Kapolri	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	9
KPK	7	-	2	-	2	5	4	8	-	9	1	-	39
JUMLAH	2	11	26	19	15	14	1	6	3	4	-	-	109

Dikenakan Tindakan Pencabutan Pencegahan

Unit Kerja	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	Jml
Menkumham	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Menteri Keuangan	5	1	7	2	-	-	5	1	-	2	-	-	29
Kejaksaan Agung	2	1	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	56
Kapolri	6	2	1	-	1	1	2	2	2	2	2	3	24
KPK	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	14
BNN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
JUMLAH		6	14	7	10	6	6	18	7	14	16	7	125

Dikenakan Tindakan Penangkalan Baru

Unit Kerja	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	Jml
Menkumham	107	175	51	79	82	85	194	105	123	112	182	-	630
Instansi Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH	107	175	51	79	82	85	194	105	123	112	182	-	630

Dikenakan Tindakan Perpanjangan Penangkalan

Unit Kerja	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	Jml
Menkumham	1	-	-	-	-	-	1	-	-	105	65	-	172
Instansi Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH	1	-	-	-	-	-	1	-	-	105	65	-	172

Dikenakan Tindakan Pencabutan Penangkalan

Unit Kerja	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	Jml
Menkumham	4	6	9	10	7	4	3	5	12	3	6	-	69
Instansi Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH	4	6	9	10	7	4	3	5	12	3	6	-	69

2) Bimbingan Teknis Pendetensian dan cegah tangkal:

Bimbingan Teknis Pendetensian dan Cegah Tangkal telah dilaksanakan seluruhnya dari 4 kegiatan yang teralokasi dalam RKA-K/L 2013, Bimbingan teknis ini melibatkan pejabat struktural dan pegawai dari Unit Pelaksanaan Teknis yang ada di Indonesia yang dipanggil secara bergantian sehingga seluruhnya berkesempatan mengikuti kegiatan ini. Bimtek ini meliputi:

- a) Bimbingan Teknis Pendetensian dan Cegah Tangkal Tahap I diadakan di Solo pada tanggal 17 s.d. 19 Juni 2013
- b) Bimbingan Teknis Pendetensian dan Cegah Tangkal Tahap II diadakan di Medan pada tanggal 18 s.d. 20 September 2013
- c) Bimbingan Teknis Pendetensian dan Cegah Tangkal Tahap III diadakan di Surabaya pada tanggal 23 s.d. 25 Oktober 2013
- d) Bimbingan Teknis Penindakan Keimigrasian Tahap IV diadakan di Bali pada tanggal 27 s.d. 29 November 2013

3) Monitoring Pencegahan dan Penangkalan

Kegiatan monitoring pencegahan dan penangkalan selama periode Januari s.d. Desember 2013 telah dilaksanakan sebanyak 10 kegiatan monitoring cekat di dalam negeri yang telah direncanakan dan 2 kali kegiatan untuk monitoring data cekat ke luar negeri sesuai dengan rencana kerja yang dirumuskan dalam RKA-K/L TA 2013 yaitu :

NO	TANGGAL	TUJUAN	PETUGAS
1	09 - 08 Februari 2013	Kanim Polonia	Zaeroji Dan Ury Candra
2	21 - 22 Maret 2013	Kanim Bandung	Zaeroji Dan Gatot F.
3	25 - 27 Maret 2013	Kanim Makasar	Huntal H Dan Reza
4	10 - 12 April 2013	Kanim Sorong	Huntal H Dan Reza
5	21 - 23 April 2013	Kanim Semarang	Zaeroji Dan Novin
6	06 - 08 Mei 2013	Kanim Singaraja	Fahrul Novry Dan Reza Mutaqien
7	20 - 22 Mei 2013	Kanim Bitung	Huntal Dan Gatot F
8	03 - 05 Juni 2013	Kanim Jaya Pura	Fahrul Dan Sri Mulyani
9	10 - 14 September 2013	Guang Zhou	Sukadar Dan Fahrul
10	09 - 11 Oktober 2013	Palangkaraya	Telmaizul Syatri dan Bambang Triyudono

11	06 - 10 November 2013	Tokyo	Mirza Iskandar Dan Telmaizul
12	13 - 15 November 2013	Mataram	Sukadar dan Fahrul Novry

d. Sub Direktorat Detensi dan Deportasi

1) Pengadaan bahan makanan Deteni

Pelaksanaan tugas Pendetensian dan Pengadaan bahan makan dilakukan bagi deteni yang berada di ruang Detensi Direktorat Jenderal Imigrasi. Pengadaan bahan makan dilakukan setiap hari dari bulan Januari s.d. Desember 2013 yaitu sebagai berikut :

No	Bulan	Pengadaan	Jumlah (OH)
1	Januari	makan Deteni	1.641 OH
2	Februari	makan Deteni	301 OH
3	Maret	makan Deteni	128 OH
4	April	makan Deteni	325 OH
5	Mei	makan Deteni	193 OH
6	Juni	makan Deteni	192 OH
7	Juli	makan Deteni	1.137 OH
8	Agustus	makan Deteni	432 OH
9	September	makan Deteni	585 OH
10	Oktober	makan Deteni	789 OH
11	November	makan Deteni	1.281 OH
12	Desember	makan Deteni	3.814 OH
JUMLAH			10.818 OH

2) Penanganan Imigran Ilegal:

Kegiatan Penanganan Imigran Ilegal (Pemindahan Deteni/Imigran Ilegal) dari Januari s.d. Desember 2013:

No.	Bulan	Dari	Ke	Jumlah Deteni
1	Januari	Kanim Serang	Rudenim Pontianak	34
		Kanim Serang	Rudenim Manado	16
		Kanim Serang	Rudenim Makassar	25
2	Pebruari	R.Detensi Ditjenim	Penamp.Tangerang	5
		R.Detensi Ditjenim	Penamp. Jakarta	9
		Kanim Cilacap	Rudenim Tg. Pinang	22
		Penam. Jakarta	Penamp.Medan	13
3	Maret	-	-	-
4	April	Ruang Deteni Ditjenim	Rudenim Pontianak	6
		Kanim Lhokseumawe	Rudenim Denpasar	24
		Kanim Lhokseumawe	Rudenim Pekanbaru	20
5	Mei	Kanim Jember	Rudenim Pekanbaru	20
		Kanim Jember	Rudenim Balikpapan	14
		Kanim Jember	Rudenim Manado	20
6	Juni	Ruang Detensi Ditjenim	IOM Makassar	1
		Ruang Detensi Ditjenim	IOM Yogyakarta	1
		Ruang Detensi Ditjenim	Rudenim Makassar	1
7	Juli	Kanim Tasikmalaya	Rdnm Tg.Pinang	21
		Ruang Detensi Ditjenim	Penamp.Yogyakarta	
8	Agustus	Kanim Sukabumi	Rudenim Medan	35
		Kanim Cilacap	Rudenim Medan	22
9	September	Ruang Detensi Ditjenim	Penamp. Makasar	3

			Penamp. Medan	4
			Penamp. Medan	1
10	Oktober	Ruang Deteni Ditjenim	Penamp. Medan	1
11	November			
12	Desember			
JUMLAH				253

3) Pemulangan deteni/imigran ilegal Ditjenim

Selama periode Januari s.d. Desember 2013, kegiatan pemulangan deteni/pendeportasian adalah sebagai berikut :

NO	Bulan	Pendeportasian	Pengawalan (x Keg)	Pengawalan (Jml Deteni)
1	Januari	163	37	165
2	Pebruari	79	24	79
3	Maret	125	29	129
4	April	157	25	210
5	Mei	145	38	145
6	Juni	249	39	242
7	Juli	272	53	272
8	Agustus	193	44	193
9	Sept	161	34	161
10	Oktober	210	28	211
11	Nov	238	32	244
12	Des			
	JML	918	192	970

4) Pelatihan Menembak dan Psikotest bagi Pemegang Senjata api:

Kegiatan Pelatihan menembak dan Psikotest bagi pemegang senjata api dalam periode Tahun Anggaran 2013 telah dilaksanakan sebanyak 4 kali di Jakarta yaitu sebagai berikut:

- a) Tanggal 4 - 6 Maret 2013 untuk Tahap I
- b) Tanggal 6 - 8 Maret 2013 untuk Tahap II
- c) Tanggal 18 - 20 Maret 2013 untuk Tahap III
- d) Tanggal 20 - 22 Maret 2013 untuk Tahap IV

Peserta Pelatihan menembak dan psikotest untuk Tahun Anggaran 2013 ini diutamakan bagi Kepala Unit Pelaksana Teknis (KUPT) Imigrasi/Rudenim dan beberapa Pejabat di Lingkungan Divisi Imigrasi kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM serta Pejabat Struktural dan Pegawai dari Direktorat Jenderal Imigrasi.

5) Monitoring Deteni

Monitoring Deteni dilakukan untuk mengetahui secara dekat dan nyata kendala-kendala yang terjadi di lapangan yang berkaitan dengan masalah deteni/imigran ilegal baik mengenai jumlah sarana dan prasarana maupun permasalahan-permasalahan lain yang ada di lapangan.

Kegiatan Monitoring Deteni dari Januari s.d. Desember 2013 adalah sebagai berikut :

NO	TANGGAL	TUJUAN	PETUGAS
1	21-23 Juni 2013	Rudenim Denpasar	Keneth Rompas
2	29-31 Juli 2013	Rudenim Denpasar	Ida Bagus K. Adnyana
3	4-6 Oktober 2013	Rudenim Jayapura	Bambang Irawan Bayu Dewabrata
4	6 – 8 Nopember 2013	Rudenim Manado	Keneth Rompas I Putu Sukarna
5	13 – 15 November 2013	Rudenim Kupang	Boedi Prayitno Mochammad Taufik Ramdhany S.Kom
6	18 – 20 November 2013	Rudenim Pekanbaru	Bagus Putu Taufan Sugangga Sunyono Abdul Rochman

6) Bimbingan Teknis Perlindungan HAM bagi Deteni dan Petugas

Bimbingan Teknis Perlindungan HAM bagi deteni dan petugas telah dilaksanakan sebanyak 4 kali kegiatan dari jumlah keseluruhan 4 kegiatan yang teralokasi dalam RKA-K/L 2013. Pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

- a) Bimbingan Teknis Perlindungan HAM bagi deteni dan petugas Tahap I diadakan di Solo pada tanggal 17 s.d. 19 Juni 2013
- b) Bimbingan Teknis Perlindungan HAM bagi deteni dan petugas Tahap II diadakan di Medan pada tanggal 18 s.d. 20 September 2013
- c) Bimbingan Teknis Perlindungan HAM bagi deteni dan petugas Tahap III diadakan di Surabaya, pada tanggal 23 s.d. 25 Oktober 2013
- d) Bimbingan Teknis Perlindungan HAM bagi deteni dan petugas Tahap IV diadakan di Bali pada tanggal 27 s.d. 29 November 2013

5. Direktorat Lintas Batas Dan Kerjasama Luar Negeri Keimigrasian

a. Berdasarkan Penyerapan Anggaran

Anggaran yang dialokasikan pada Direktorat Lintas Batas Dan Kerjasama Luar Negeri Keimigrasian berdasarkan DIPA Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp11.745.498.000,- (sebelas milyar tujuh ratus empat puluh lima juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah). Realisasi anggaran yang sudah digunakan adalah sebesar Rp 10.172.420.905,- (sepuluh miliar seratus tujuh puluh dua juta empat ratus dua puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah). Pelaksanaan seluruh kegiatan diatas telah menyerap anggaran pada Direktorat Izin Tinggal Dan Status Keimigrasian sebesar 86,60% (delapan puluh enam koma enam puluh persen).

b. Berdasarkan Tugas dan Fungsi

1) Sub Direktorat Kerjasama Perbatasan Direktorat Lintas Batas dan Kerjasama Luar Negeri,

Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Perbatasan (Dalam Negeri).

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Perbatasan (Dalam Negeri) dilakukan terhadap Pos Lintas Batas / Tempat Pemeriksaan Imigrasi di wilayah Perbatasan RI. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Perbatasan (Dalam Negeri) dilaksanakan dalam kurun waktu antara 3-5 hari per lokasi dalam tahun anggaran 2013, yaitu sebagai berikut:

- a) PLB/TPI Liem Hie Djung (Kanim Klas II Nunukan) dan TPI Tengkeyu I (Kanim Klas II Tarakan) pada tanggal 13 s.d. 16 Februari 2013;
- b) PLB Sota, PLB Erambu, dan PLB Bupul (Kanim Klas I Jayapura) pada tanggal 25 Februari s.d. 1 Maret 2013;
- c) PLB Tanjung Batu, PLB Moro, PLB Meral (Kanim Klas II Tanjung Balai Karimun) pada tanggal 26 s.d. 28 Maret 2013;
- d) PLB/TPI Entikong (Kanim Klas II Entikong) pada tanggal 9 s.d. 12 April 2013;
- e) PLB Paloh, PLB Temajuk, PLB Aruk (Kanim Klas II Sambas) pada tanggal 30 April s.d. 3 Mei 2013;
- f) PLB Panipahan dan PLB Sinaboy (Kanim Klas II Bagan Siapiapi) pada tanggal 5 s.d. 9 Mei 2013;
- g) PLB Tanjung Medang dan PLB Sungai Pakning (Kanim Klas II Dumai) serta PLB Sungai Liong dan TPI Selat Baru (Kanim Klas II Bengkalis) pada tanggal 20 s.d. 24 Mei 2013;
- h) PLB Jagoi Babang (Kanim Klas II Singkawang) pada tanggal 11 s.d. 14 Juni 2013;
- i) PLB Wembi, PLB Hamadi, PLB/TPI Skouw (Kanim Klas I Jayapura) pada tanggal 17 s.d. 21 Juni 2013;
- j) PLB Tanjung Samak (Kanim Klas II Selat Panjang) pada tanggal 21 s.d. 23 Agustus 2013;
- k) PLB Segumon, PLB Bantan, PLB Gun Tembawang (Kanim Klas II Entikong) pada tanggal 7 s.d. 11 Oktober 2013;
- l) Peresmian PLB Temajuk (Kanim Klas II Sambas) pada tanggal 17 s.d. 20 Oktober 2013;
- m) PLB Kuala Enok, PLB Sungai Guntung (Kanim Klas II Tembilahan) pada tanggal 2 s.d. 6 Desember 2013.

2) Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Perbatasan (Luar Negeri)

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Perbatasan (Luar Negeri) dilakukan terhadap unsur keimigrasian pada Perwakilan RI di negara tetangga yang berbatasan langsung dengan Indonesia, seperti Malaysia, Philipina, Singapura, Republik Demokrat Timor Leste (RDTL), dan Papua New Guinea (PNG). Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Perbatasan (Luar Negeri) dilaksanakan dalam kurun waktu antara 5-7 hari per lokasi dalam tahun anggaran 2013, yaitu sebagai berikut:

- a) Pertemuan Persiapan Peresmian PLB Temajuk, dilaksanakan di Kuching – Malaysia, pada tanggal 11 s.d. 22 Juli 2013;
- b) Pertemuan dalam rangka Pengoperasian PLB Turiskain, dilaksanakan di Timor Leste, pada tanggal 23 s.d. 25 September 2013.

3) Sosialisasi dan Perumusan Kebijakan Kerjasama Perbatasan

- a) Senior Official Meeting (SOM) RI – RDTL, dilaksanakan di Bali, pada tanggal 6 s.d. 7 Mei 2013;
- b) Pendampingan Delegasi MPR RI pada kegiatan Peninjauan PLB Skouw di Jayapura, tanggal 16 s.d. 19 April 2013;
- c) Rapat Koordinasi Perbatasan 2013, dilaksanakan di Jakarta, pada tanggal 17 s.d. 20 September 2013;
- d) *Joint Committee on Security Cooperation Matters (JCSCM)* RI – PNG, dilaksanakan di Bogor, pada tanggal 24 s.d. 25 September 2013;
- e) Rapat Koordinasi Lintas Batas Negara (Tasbara), dilaksanakan di Surabaya, pada tanggal 13 Oktober 2013;
- f) Pendampingan Delegasi MPR RI pada kegiatan Peninjauan ke Kabupaten Natuna, tanggal 26 s.d. 28 November 2013;
- g) Rapat Persiapan Pertemuan *Cross Border Cooperation on Social Economic Malaysia Indonesia (SOSEK MALINDO)* 2013, dilaksanakan di Jakarta, pada tanggal 3 Desember 2013;
- h) Rapat Gugus Tugas Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan RI, dilaksanakan di Jakarta, pada tanggal 9 Desember 2013.

b. Sub Direktorat Kerjasama Antar Negara

1) Kerjasama Keimigrasian Internasional (Bilateral dan Multilateral)

- a) Pelaksanaan Initial Meeting antara Ditjenim dengan Biro Imigrasi Filipina 11 s.d. 13 Januari 2013;
- b) *ASEAN Border Leadership Exchange (ABLE)* Programme, Singapura 23 s.d. 28 Januari 2013;

- c) Pelaksanaan Kunjungan Imigrasi Lebanon 10 s.d. 14 Februari 2013;
- d) Pelatihan Bahasa Inggris (*English Language Training*) di University of Queensland, Brisbane, Australia I 18 Feb s.d. 10 Mei 2013, II : 7 Mei s.d. 26 Juli 2013;
- e) *ASEAN Training Award Checkpoints Competencies in Passenger Clearance*, Singapura, 11 s.d. 15 Maret 2013;
- f) Pelaksanaan Pelatihan *Single Country Training Workshop On Immigration Service Management*, Korea, 14 s.d. 29 Maret 2013;
- g) Pelaksanaan Kunjungan Delegasi *Korea Immigration Service (KIS)* 15 s.d. 19 April 2013;
- h) Pelaksanaan *The 3rd RI – Australia Bilateral Consular Consultation*, Darwin 31 April s.d.1 Mei 2013;
- i) Monitoring dan evaluasi penerima beasiswa program S2 (Master) di Adelaide, 2 s.d. 3 Mei 2013;
- j) Bilateral Meeting (Ditjen Imigrasi- *National Immigration Agency Taiwan*), Bali 19 s.d. 21 Mei 2013;
- k) Pelaksanaan Bilateral Meeting Ditjenim – Singapura *Immigration and Checkpoints Authority (ICA)* 28 s.d. 30 Mei 2013;
- l) Pelaksanaan Bilateral Meeting Ditjenim – Imigrasi Jerman, Berlin, 11 Juni 2013;
- m) Pelaksanaan Kunjungan Delegasi Aghanistan 24 s.d. 28 Juni 2013;
- n) Pelaksanaan *The 6th Indonesia Malaysia Thailand–Growth Triangle (IMT-GT) Post Summit Planning Meeting* tanggal 16 s.d.18 Juli 2013, Penang, Malaysia;
- o) Pelaksanaan Beasiswa Master di Flinders University;
- p) Pelaksanaan *Immigration and Checkpoints Competencies Training Programme (ICCTP)* 20 s.d. 29 Agustus 2013;
- q) *The 9th ASEAN Immigration Intelligence Forum (AIIF)* 28 Agustus 2013;
- r) Pelaksanaan *The 17th ASEAN Directors General of Immigration Departments and the Heads of Consular Affairs Divisions of The Ministries of Foreign Affairs (DGICM)* dan *The 9th DGICM + Australia Consultation, Ho Chi Minh City*, 29 s.d.30 Agustus 2013;
 - Pelaksanaan *Passenger Clearance Module (PCM) Training*:
 - Mataram, 1 s.d. 5 September 2013;
 - Batam 24 s.d. 29 November 2013.

- Pelaksanaan *ASEM 12th Conference of the Directors-General of Immigration and Management of Migratory Flows*, 9 s.d. 10 Oktober 2013;
- Pelaksanaan Kunjungan Imigrasi Timor Leste, Oktober 2013;
- *Joint Ministerial Meeting (JMC) RI – Selandia Baru*, 30 Oktober s.d. 1 November 2013;
- *JSP21 Asean Border Cooperation for Managers*, Singapura 18 s.d. 22 November 2013;
- *7th RI – China Consular Consultation Meeting*, 26 s.d. 28 November 2013;
- *2nd World Borderpol Congress*, 3 s.d. 4 Desember 2013;

2) Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penyusunan dan Perumusan Perjanjian Internasional

- a) Novotel Pangkalpinang; 26 Februari s.d. 1 Maret 2013
- b) Aston Kuta, Bali, 21 s.d. 24 Mei 2013

c. Sub Direktorat Kerjasama Perwakilan

Sub Direktorat Perwakilan sampai saat ini sudah melaksanakan program kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Monitoring pelayanan Keimigrasian di Perwakilan RI di Luar Negeri, dilaksanakan pada:
 - a) Kamar Dagang dan Industri Indonesia di Taiwan, tanggal 19 s.d. 23 Pebruari 2013
 - b) Konsulat Jenderal RI di Guangzhou, tanggal 24 s.d. 27 Juni 2013
- 2) Sosialisasi / Diseminasi peraturan Keimigrasian, dilaksanakan di Vietnam pada:
 - a) Kedutaan Besar RI di Hanoi, tanggal 08 s.d. 09 Maret 2013
 - b) Konsulat Jenderal RI di Ho Chi Minh, tanggal 10 Maret 2013
- 3) Bimbingan Teknis Manajemen Konferensi Internasional
 - a) Bimbingan Teknis Manajemen Konferensi Internasioanal untuk wilayah barat dilaksanakan di Hotel Grand Angkasa Internasional Medan, tanggal 15 s.d. 17 Mei 2013
 - b) Bimbingan Teknis Manajemen Konferensi internasioanal untuk wilayah tengah dan timur dilaksanakan di Hotel Aston Bali, tanggal 01 s.d. 03 Juli 2013
- 4) Pembekalan Keimigrasian bagi Pejabat Kementerian Luar Negeri dan Imigrasi yang akan ditempatkan di Perwakilan RI di Luar Negeri yang pelaksanaannya sebagai berikut:

- a) Pembekalan Keimigrasian bagi Pejabat Kemenlu yang akan ditempatkan diperwakilan RI di luar negeri dilaksanakan di Ruang Audiovisual Ditjenim, tanggal 14 Maret 2013
- b) Pembekalan bagi Pejabat Imigrasi yang akan ditempatkan di perwakilan RI di luar negeri dilaksanakan di di Ruang Audiovisual Ditjenim, tanggal 22 s.d. 23 Juli 2013
- 5) Rapat Koordinasi dengan Perwakilan Asing yang ada di Indonesia.
Rapat Koordinasi dengan Perwakilan Asing yang ada di Indonesia untuk Tahun Anggaran 2013 dilaksanakan di Hotel Aryaduta Jakarta, pada tanggal 23 April 2013 dengan peserta Rakor adalah seluruh Perwakilan Asia Pasifik dan Afrika.

d. Sub Direktorat Kerjasama Organisasi Internasional

Sub Direktorat Perwakilan sampai saat ini sudah melaksanakan program kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Pembahasan Prosedur Visa dan Ijin Tinggal bagi Relawan dan Tenaga Asing, Ruang Rapat Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri Kementerian Sekretariat Negara, 22 Januari 2013;
- 2) Pertemuan dengan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) terkait proyek bantuan *Port Intelligent Unit* (PIU), Ruang Rapat Direktur Lintas Batas dan Kerjasama Luar Negeri Keimigrasian, 25 Januari 2013;
- 3) Pertemuan dengan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) terkait Proyek Kerjasama *Coordination and Analysis Unit* (CAU), Ruang Rapat Direktur Lintas Batas dan Kerjasama Luar Negeri Keimigrasian 11 Februari 2013;
- 4) Diseminasi bagi Petugas Imigrasi dan Pejabat Pemerintah mengenai Penyelundupan Manusia dan *Statelessness* di Indonesia, Solo 12 s.d. 15 Februari 2013;
- 5) Seminar Nasional Menuju *The Fifth Bali Regional Ministerial Conference on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime (BRMC) V Jakarta 14 Februari 2013*;
- 6) *The Anti Smuggling Training Course* di *Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation (JCLEC)* Semarang 18 s.d.22 Februari 2013;
- 7) *26th Bali Process steering Group Meeting* dan *7th Adhoc Senior officials meeting Sydney* 04 s.d. 05 Maret 2013;
- 8) Diseminasi Bagi Petugas Imigrasi dan Pejabat Pemerintah mengenai Penyelundupan Manusia dan *Statelessness*, di Indonesia, Manado 12 s.d.15 Maret 2013;

- 9) Kegiatan Sosialisasi, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama dengan Organisasi Internasional Belawan 21 s.d.22 Maret 2013;
- 10) *The Fifth Bali Regional Ministerial Conference on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime (BRMC)* Bali 1 s.d. 2 April 2013;
- 11) Kunjungan meninjau ruangan yang direncanakan menjadi lokasi penempatan *Port intelligence Unit (PIU)*, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam 2 s.d. 4 April 2013;
- 12) Diseminasi Bagi Petugas Imigrasi dan Pejabat Pemerintah Mengenai Penyelundupan Manusia dan *Statelessness*, di Indonesia Banda Aceh 09 s.d. 12 April 2013;
- 13) Sosialisasi, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama dengan Organisasi Internasional Makasar 17 s.d.18 April 2013;
- 14) Pertemuan Teknis Persiapan Posisi Services dalam rangka *Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE-CEPA)* Bogor 18 s.d.19 April 2013;
- 15) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama dengan Organisasi Internasional Lampung 06 s.d.08 April 2013;
- 16) Rapat harmonisasi 3 (tiga) RUU, Ruang Rapat B Ditjen PP, Kemenkumham 10 Mei 2013;
- 17) Pertemuan ke-7 Perundingan Perundingan Indonesia-*EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE-CEPA)* Solo 12 s.d.16 Mei 2013;
- 18) Peresmian Port Intelligence Unit hasil kerja sama *Cambodian National Police* dengan UNODC, Kamboja 22 s.d. 24 Mei 2013;
- 19) Diseminasi bagi petugas Imigrasi dan pejabat pemerintah mengenai penyelundupan manusia dan *statelessness* di Indonesia, Bali 28 s.d.30 Mei 2013
- 20) Border Enforcement Workshop, Kendari 29 s.d. 30 Mei 2013;
- 21) Monitoring dan Evaluasi hasil kerjasama dengan Organisasi Internasional tentang proyek pengelolaan dan perawatan Imigran Non-Reguler Tahap II, Rudenim Balikpapan 12 s.d. 14 Juni 2013;
- 22) *Regional Liaison Offices Network (RILON)*, Malaysia 20 Juni 2013;
- 23) Lokakarya Antar-Instansi Pemerintah mengenai Hukum Pengungsi Internasional dan peran UNHCR di Indonesia, Surabaya 25 s.d. 28 Juni 2013;

- 24) Pertemuan teknis persiapan posisi service pada *Intersessional Meeting Working Group on Trade In Services Indonesia-EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement*, Bogor 5 s.d. 6 Juli 2013;
- 25) Sosialisasi dan Monitoring hasil kerjasama dengan organisasi internasional, Manado 3 s.d. 5 Juli 2013;
- 26) Persiapan Konferensi tingkat Menteri *World Trade Organization* (KTM WTO IX) Auditorium Kemendag 10 Juli 2013;
- 27) *Focus Group Discussion (FGD)* Penanggulangan Perdagangan Manusia (*Trafficking in Person*) dalam Kerangka ASEAN, Bogor 23 s.d. 25 Agustus 2013;
- 28) Sosialisasi bagi petugas Rudenim Kerjasama dengan Organisasi Internasional, Pontianak 4 Juli 2013;
- 29) Rapat persiapan Forum Konsultasi Bilateral (FKB) RI-UE, Ruang Rapat Kementerian Luar Negeri 16 Juli 2013;
- 30) Perundingan putaran keempat Indonesia-Korea *Comprehensive Economic Partnership Agreement*, Bali 18 s.d. 22 Juli 2013;
- 31) Persiapan Penyelenggaraan "*Special Conference on Irregular Movement of Persons*" Kemenlu 23 Juli 2013;
- 32) Rapat Persiapan Konferensi Tingkat Menteri *World Trade Organization* (WTO ke-9) Kementerian Perdagangan 25 Juli 2013;
- 33) Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Kerjasama dengan Organisasi Internasional, Rudenim Balikpapan 29 s.d. 30 Juli 2013;
- 34) *The First VRS-MSRC (voluntary reporting System on Migrant Smuggling and Related conduct)*, Bangkok 3 s.d. 4 September 2013;
- 35) Pertemuan dengan Pihak Pemkab Tasikmalaya terkait Rencana Sosialisasi Bagi Masyarakat Pesisir tentang Penyelundupan Manusia, Tasikmalaya 8 s.d. 10 September 2013;
- 36) Rapat Persiapan Ratifikasi *ASEAN Agreement on The Movement of Natural Person* (MNP) 11 s.d. 12 September 2013, Bogor 11 s.d. 12 September 2013
- 37) Fasilitator Pada Sosialisasi Dalam Rangka Koordinasi Antar Instansi di Wilayah Kota Depok Untuk Penanganan Imigran Gelap dan Pencari Suaka, Bogor 11 s.d. 13 September 2013;
- 38) Rapat Koordinasi Penyusunan Peraturan Presiden dan Prosedur Tetap tentang Penanganan Orang Asing Pencari Suaka dan Pengungsi, Hotel Akmani Jakarta 17 September 2013;

- 39) Lokakarya Antar-Instansi Pemerintah mengenai Hukum Pengungsi Internasional & Peran UNHCR di Indonesia, Hotel Quality Makassar 17 s.d. 20 September 2013;
- 40) *Training of Trainers* dan Observasi Langsung Proses Registrasi Pencari Suaka, Kantor UNHCR Indonesia 26 September 2013;
- 41) Bimbingan Teknis Pengusulan *Plan of Action Cooperation and Capacity Building (CCB)* Sektor Jasa Forum Indonesia-Korea CEPA, Semarang 26 September 2013;
- 42) *Regional Workshop on ASEAN Common Visa*, Hotel Le Meridien Jakarta 30 Sep-1 Okt 2013;
- 43) Pertemuan Teknis Persiapan Posisi Indonesia pada Perundingan ke-8 WG TIS IE-CEPA, Bogor 1 s.d. 2 Okt 2013;
- 44) Rapat Bersama Kemenlu Pembahasan Tentang Penanganan Orang Asing Pencari Suaka dan Pengungsi di Indonesia dan Peran Organisasi Internasional, Ruang Rapat Dirjenim 16 Oktober 2013;
- 45) Fasilitator pada Kegiatan Briefing for *Immigration Officials on Protection of Refugee and Assylum Seeker in Indonesia*, Rudenim Kupang 16-18 Okt 2013;
- 46) *FGU terkait Domestic Regulation*, Yogyakarta 17 s.d. 19 Oktober 2013;
- 47) Lokakarya tentang Penyelundupan Manusia dan *Statelessness*, Yogyakarta 21 s.d. 24 Oktober 2013;
- 48) Rapat Ditjenim dengan *Department of Immigration and Border Protection (DIBP)*-Australia dan IOM, Ruang Rapat Dirjenim 24 Oktober 2013;
- 49) Pelatihan Penentuan Status Pengungsi (*Refugee Status Determination*) Bandung 28 s.d. 31 Oktober 2013;
- 50) Penyelundupan Manusia, Hotel Sentul 1 s.d. 3 November 2013;
- 51) *Second Session of Working Group on smuggling Migrants* oleh UNODC, Wina, Austria 11 s.d.13 November 2013;
- 52) Indonesia-Korea Ceba, Bali 4 s.d. 8 November 2013;
- 53) Indonesia-Australia CEPA, Bali 11 s.d. 13 November 2013;
- 54) Analisis Penyelundupan Manusia, Bandung 11 s.d. 22 November 2013;
- 55) *Course on Refugee Law*, Sanremo Italy 24 November s.d. 2 Desember 2013;
- 56) Workshop Potensi Pergerakan Profesional Provinsi Jawa Tengah Dalam Pemanfaatan Perdagangan Int. Moda 4, Semarang 28 s.d.30 Nov 2013
- 57) *Desk Immigration* KTT WTO, Bali 29 Nov-5 Desember 2013

- 58) Kampanye Pencegahan Penyelundupan Manusia, Tasikmalaya 6 Desember 2013
- 59) Lokakarya Mengenai Prosedur Suaka dan Perlindungan Pengungsi Di Indonesia Bagi Pejabat Pemerintah, Hotel Ibis Arcadia Jakarta 11 Desember 2013.

6. Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian

a. Berdasarkan Penyerapan Anggaran

Anggaran yang dialokasikan pada Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian berdasarkan DIPA Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp274.842.997.000,- (dua ratus tujuh puluh empat miliar delapan ratus empat puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah). Realisasi anggaran yang sudah digunakan adalah sebesar Rp 245.393.784.097,- (dua ratus empat puluh lima miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu sembilan puluh tujuh rupiah). Pelaksanaan seluruh kegiatan diatas telah menyerap anggaran pada Direktorat Izin Tinggal Dan Status Keimigrasian sebesar 89.28% (delapan puluh sembilan koma dua puluh delapan persen), dengan penjelasan kegiatan sebagai berikut :

b. Sub Direktorat Perencanaan Dan Pengamanan

1) Pengembangan Sistem *Border Control Management* (BCM), Cekal, Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian

Hal-hal yang tercakup dalam kegiatan tersebut meliputi:

- a) Pengembangan Sistem Border Control Management (BCM), Cekal, Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian;
- b) Peningkatan (*Upgrade*) Sistem Aplikasi Autogate Paspor Elektronik pada TPI Soetta

Kegiatan yang dilakukan meliputi *upgrade* sistem autogate paspor elektronik pada TPI Soekarno-Hatta dengan melakukan penambahan berupa pembacaan sistem perlintasan autogate yang semula hanya dapat digunakan untuk paspor elektronik ditambah dengan pembacaan untuk paspor non elektronik.

c) Implementasi Sistem Autogate di Ngurah Rai dan Penambahan Perangkat Pendukung Operasional di Kuala Namu;

Kegiatan yang dilakukan meliputi penerapan/pemasangan sistem *autogate* di Bandara Ngurah Rai yang merupakan perluasan dari sistem autogate yang telah ada dan diterapkan di Bandara Soekarno-Hatta. Di samping itu dilakukan pula kegiatan penambahan/pengadaan perangkat kesisteman

untuk sistem perlintasan di Bandara Kuala Namu berupa antara lain PC dan server.

- d) Instalasi Jaringan Komunikasi Sistem Autogate di Ngurah Rai;
Kegiatan yang dilakukan adalah penyediaan jaringan komunikasi data untuk sistem *autogate* yang terpasang di Bandara Ngurah Rai.
- e) Pemindahan Sistem Pendaftaran Autogate pada Bandara Soekarno-Hatta;
Secara keseluruhan untuk program kegiatan Aplikasi Sistem Informasi Keimigrasian yang Online dari alokasi anggaran sebesar Rp 13.789.869.000 telah dipergunakan anggaran sebesar Rp 13.559.554.800 dengan prosentase sebesar 98,33%.

2) Peremajaan Sistem Penerbitan Dokumen Perjalanan

Hal-hal yang tercakup dalam kegiatannya meliputi:

- 1) Pengadaan Konsultan Perencana dan Pengawas/Pendamping;
- 2) Pengembangan Sistem Penerbitan SPRI;
Kegiatan Pengembangan Sistem Penerbitan SPRI merupakan kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk peningkatan sistem pelayanan paspor. Adapun pengembangan yang dilaksanakan pada tahun ini mencakup penerapan pelayanan/penerbitan paspor berbasis *one stop service* (OSS).
- 3) Pengadaan Perangkat Peningkatan Utilitas Sistem dan Perangkat Pencetakan Paspor
Secara keseluruhan untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 57.863.355.000 dengan penyerapan/penggunaan anggaran sebesar Rp 57.265.076.000 dengan prosentase sebesar 98,97%.

3) Pengembangan Fasilitas Monitoring Infrastruktur dan Pengujian Sistem

Sebagai bagian dari proses kelanjutan pengembangan kesisteman yang telah dilakukan Direktorat Jenderal Imigrasi pada tahun sebelumnya, maka dilakukan pengembangan Fasilitas Monitoring Infrastruktur dan Pengujian Sistem pada tahun ini. Kegiatan pengembangan Fasilitas Monitoring Infrastruktur dan Pengujian Sistem pada tahun ini mencakup kegiatan pengadaan pengamanan di sisi jaringan sistem monitoring, pengembangan aplikasi, dan pengadaan perangkat pendukung di Pusat Data Keimigrasian. Untuk kegiatan ini dialokasi anggaran sebesar Rp 9.940.419.000 dengan penyerapan/penggunaan anggaran sebesar Rp 8.860.000.000 dengan prosentase sebesar 88,68%.

4) Sertifikasi Bidang Informasi Teknologi bagi Petugas IT

Program kegiatan sertifikasi bidang informasi teknologi ini disusun dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keahlian petugas yang bertanggungjawab dalam operasionalisasi masing-masing kesisteman yang terpusat di Pusat Data Keimigrasian pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Imigrasi. Untuk dapat lebih mengetahui dan memahami bidang tugas masing-masing maka perlu upaya adanya pelatihan di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Adapun penyelenggaraan pelatihan di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang dilaksanakan pada tahun 2013 meliputi :

- 1) Pelatihan di bidang *Web Master Specialist*;
- 2) Pelatihan di bidang *System and Network Specialist*;
- 3) Pelatihan di bidang *Information Security Specialist*;

Untuk kegiatan ini dialokasi anggaran sebesar Rp 713.700.000 dengan penyerapan/penggunaan anggaran sebesar Rp 128.865.000 dengan prosentase sebesar 18,06%.

5) Pengembangan Sistem Visa dan Ijin Tinggal Keimigrasian

Kegiatan pengembangan Sistem Visa dan Ijin Tinggal Keimigrasian dilakukan dalam rangka upaya untuk terus meningkatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat. Kegiatan pengembangan yang dilakukan pada tahun ini meliputi:

- 1) Peningkatan (*upgrade*) implementasi Aplikasi Sistem Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian di Perwakilan RI dan Kanim Kediri, Pamekasan dan Takengon;

Kegiatan yang dilakukan meliputi kegiatan *upgrade* aplikasi sistem Visa dan implementasinya dengan memperluas/menambah lokasi penerapannya di 8 perwakilan RI di Kuala Lumpur, Beijing, Davao City, Johor Bahru, Tawao, Kuching, Guangzhou dan Hongkong. Di samping itu terdapat pelaksanaan kegiatan implementasi sistem ijin tinggal di Kanim Kediri, Pamekasan dan Takengon.

- 2) Pengadaan Perangkat Keras Sistem Visa dan Ijin Tinggal Keimigrasian di Perwakilan dan Kanim Kediri, Pamekasan dan Takengon;

Kegiatan yang dilakukan meliputi pengadaan perangkat pendukung pelayanan visa di 8 perwakilan RI di Kuala Lumpur, Beijing, Davao City, Johor Bahru, Tawao, Kuching, Guangzhou dan Hongkong dan pengadaan perangkat pendukung pelayanan ijin tinggal di Kanim Kediri, Pamekasan dan Takengon

- 3) Pengadaan Sistem Ijin Tinggal Keimigrasian pada Kanim Labuan Bajo;
Kegiatan yang dilakukan meliputi implementasi aplikasi sistem ijin tinggal dan pengadaan perangkat pendukung pelayanan ijin tinggal di Kanim Labuan Bajo.
- 4) Jasa Konsultan Pengembangan Sistem Visa dan Ijin Tinggal.
Kegiatan ini merupakan kegiatan pengadaan jasa konsultan perencana untuk kegiatan pengembangan Sistem Visa dan Ijin Tinggal.
Untuk kegiatan ini dialokasi anggaran sebesar Rp 15.010.306.000 dengan penyerapan/penggunaan anggaran sebesar Rp 13.915.770.000 dengan prosentase sebesar 92,71%.
- 6) Peningkatan Kapasitas *Storage* Pusdakim
Berbagai kegiatan pengadaan dan pengembangan kesisteman telah banyak dilakukan Direktorat Jenderal Imigrasi. Jumlah peningkatan pelayanan keimigrasian baik terkait pelayanan paspor bagi warganegara Indonesia, pelayanan visa/dahsuskim/ijin tinggal maupun perpanjangan semakin meningkat. Seiring terjadinya peningkatan volume pelayanan mengakibatkan kapasitas media penyimpanan data keimigrasian semakin berkurang. Untuk itu diperlukan penambahan kapasitas *storage* yang saat ini telah dilakukan penambahan dari semula sebesar 40 Tb.
Untuk kegiatan ini dialokasi anggaran sebesar Rp 3.000.000.000 dengan penyerapan/penggunaan anggaran sebesar Rp 2.495.699.910 dengan prosentase sebesar 83,91%.
- 7) Peningkatan Kapasitas *Storage* DRC Keimigrasian
Pada prinsipnya DRC keimigrasian merupakan *backup* dari Pusat Data Keimigrasian. Dengan memegang fungsi yang sama, maka seiring dengan penambahan volume data keimigrasian maka diperlukan penambahan kapasitas *storage* yang berada di DRC Keimigrasian sebesar 40 Tb.
Untuk kegiatan ini dialokasi anggaran sebesar Rp 3.000.000.000 dengan penyerapan/penggunaan anggaran sebesar Rp 2.640.000.000 dengan prosentase sebesar 88%.
- 8) Pengembangan Sistem Border Control Management (BCM), Cekal, Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian (tunggakan tahun 2012)
Kegiatan ini merupakan kegiatan tambahan yang dilaksanakan oleh karena adanya pekerjaan yang belum terselesaikan namun harus dilakukan kelanjutannya pada tahun ini.

Untuk kegiatan ini dialokasi anggaran sebesar Rp 4.782.320.000 dengan penyerapan/penggunaan anggaran sebesar Rp 4.782.320.000 dengan prosentase sebesar 100%.

9) Jasa Pendampingan Pengembangan Sistem Penerbitan SPRI

Kegiatan ini merupakan kegiatan tambahan yang dilaksanakan oleh karena adanya pekerjaan yang belum terselesaikan namun harus dilakukan kelanjutannya pada tahun ini.

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 965.000.000 dengan penyerapan/penggunaan anggaran sebesar Rp 962.156.215 dengan prosentase sebesar 99,71%.

3. Sub Direktorat Pelaporan dan Pemeliharaan

Adapun rencana program kerja yang terlaksana, yaitu:

1) Pengelolaan DRC Keimigrasian

Jaminan atas ketersediaan layanan dan data untuk mendukung operasional pelayanan keimigrasian menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Oleh karenanya ketersediaan dan keberlangsungan pelayanan keimigrasian pun tidak dapat diganggu apabila Pusdakim mengalami kegagalan fungsi baik oleh karena hambatan teknis maupun bencana alam. Untuk itu DRC Keimigrasian memegang peranan yang sama pentingnya dalam memback-up layanan kesisteman yang dilakukan oleh Pusdakim sehingga diharapkan operasional pelayanan Keimigrasian masih tetap dapat berlangsung dan berjalan lancar.

Fungsi-fungsi yang terdapat dalam DRC Keimigrasian juga merupakan fungsi-fungsi yang ada dalam Pusdakim sehingga perlu untuk dilakukan pemantauan dan pengawasan agar dapat memberikan layanan yang optimal dalam ketersediaan layanan dan data keimigrasian.

Untuk tahun 2013, kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 1.703.995.000 dan sampai dengan saat ini telah dilaksanakan anggaran sebesar Rp 832.254.499 dengan prosentase penyerapan 48,84%.

2) Pemantauan dan Pengendalian Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian, Penggunaan Dokumen Keimigrasian dan Kartu Elektronik

Bahwa penggelaran dan pembangunan SIMKIM atas teknologi informasi dan komunikasi yang telah diimplementasikan, dikembangkan dan dipelihara baik di Kantor Pusat, Divisi Keimigrasian pada Kantor Wilayah, Kantor Imigrasi maupun TPI dan Rudenim serta Atase Imigrasi di Perwakilan RI, tentunya perlu untuk dilakukan adanya kegiatan evaluasi ataupun pemantauan untuk mengetahui *progress* maupun pelaksanaan kegiatannya. Hal ini ditujukan agar dapat mengetahui keadaan riil mengenai situasi dan kondisi pelaksanaan

aplikasi yang diimplementasikan, kondisi perangkat maupun jaringan serta hambatan dalam penerapannya.

Di samping itu dilakukan pula peninjauan terhadap infrastruktur, sarana dan prasarana yang menyangkut kelistrikan, penempatan perangkat, maupun perangkat pendukung lainnya serta ketersediaan sumber daya manusia. Di samping itu dilakukan pula kegiatan *troubleshoot*/penanganan permasalahan apabila dimungkinkan atau diinventaris permasalahan untuk selanjutnya akan didiskusikan dan ditangani di pusat.

Dalam kegiatan kunjungan tersebut pula dilakukan kegiatan sosialisasi dengan tujuan dapat menambah pengetahuan terhadap berbagai hal baru terkait kesisteman dan penggunaannya. Media diskusi terhadap para pimpinan/pejabat maupun pegawai/petugas yang terlibat langsung dalam pelayanan keimigrasian menjadi bagian dalam kegiatan tersebut. Sehingga diharapkan koordinasi dan komunikasi antara pusat dan daerah dari hasil kegiatan kunjungan dimaksud baik mengenai perkembangan di lapangan, kendala/permasalahan yang timbul, dan masukan/usulan dapat menjadi bahan evaluasi bagi tolak ukur atas pencapaian kegiatan yang dilakukan dan sebagai dasar bagi perencanaan dan pengembangan ke depan.

Hingga saat ini telah dilaksanakan kegiatan pengendalian ke sekitar 85 lokasi termasuk Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah, Kantor Imigrasi dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Dalam setiap kunjungannya, Tim Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi dilakukan oleh 1 (satu) orang Pejabat yang didampingi oleh 2 (dua) orang anggota Tim Teknologi Informasi Keimigrasian dan 1 (satu) orang pegawai.

Untuk tahun 2013, kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 4.775.595.000 dan sampai dengan saat ini telah dilaksanakan anggaran sebesar Rp 2.267.714.998 dengan prosentase penyerapan 47,49%.

3) Pemeliharaan Perangkat Keras Sistem Keimigrasian

Dengan kondisi implementasi yang telah lama dipergunakan dan terus secara kontinue dipergunakan untuk pelayanan keimigrasian tentunya perangkat kesisteman sangat mungkin mengalami kerusakan baik yang disebabkan oleh proses kerja dari perangkat dan aplikasi itu sendiri maupun hal-hal lainnya antar lain *human error*, bencana alam (tersambar petir), tegangan listrik yang tidak stabil, relokasi perangkat akibat pemindahan lokasi kantor, dan masa operasionalisasi (keausan) perangkat.

Untuk itu guna menjaga keberlangsungan fungsi operasionalisasi perangkat keras masing-masing kesisteman dalam mendukung pelayanan keimigrasian

maka perlu untuk diteruskan dilakukan pemeliharaannya secara berkesinambungan.

Adapun perangkat keras yang dilakukan pemeliharaan meliputi perangkat keras yang diadakan dari pengembangan kesisteman sebelumnya seperti Sistem E-Office (Visa dan Ijin Tinggal Keimigrasian), Sistem Penerbitan SPRI/DPRI, Sistem BCM, Cekal dan Nyiddakim.

Untuk tahun 2013, kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 34.992.505.000 dan sampai dengan saat ini telah dilaksanakan anggaran sebesar Rp 32.276.146.278 dengan prosentase penyerapan 92,24%.

4) Pemeliharaan Aplikasi Sistem Border Control Management (BCM), Cekal dan Nyiddakim

Aplikasi Sistem BCM merupakan aplikasi yang terus menerus selama 24 jam beroperasi dalam mendukung layanan pemeriksaan keimigrasian di TPI yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di samping itu sistem perlintasan merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan keimigrasian yang tentunya harus diperhatikan.

Untuk menjamin keberlangsungan sistem BCM, Cekal dan Nyiddakim agar dapat tetap berfungsi optimal dalam mendukung proses pemeriksaan dimaksud tentunya hal-hal terkait timbulnya permasalahan/kendala dalam kesisteman harus dapat ditangani dengan baik. Perbaikan/penanganan terhadap kerusakan/*error* kesisteman harus ditangani dengan tepat dan perawatannya harus terus dilakukan secara berkesinambungan sehingga diperlukan upaya pemeliharaan kesisteman agar pelayanan keimigrasian dapat tetap optimal.

Untuk kegiatan pemeliharaan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 10.048.866.000 dan sampai dengan saat ini telah dilaksanakan anggaran sebesar Rp 9.999.000.000 dengan prosentase penyerapan 99,5%.

5) Pemeliharaan Aplikasi Sistem Penerbitan Dokumen Perjalanan

Bahwa untuk memastikan sistem penerbitan SPRI dapat berfungsi dengan baik, maka diperlukan jaminan terhadap keberlangsungan fungsi dan operasionalisasi kesisteman dimaksud agar tetap berjalan dengan lancar dalam rangka proses pemberian pelayanan paspor kepada warganegara Indonesia.

Di samping itu, aplikasi Sistem Penerbitan SPRI membutuhkan perawatan dan perbaikan modul-modul aplikasi untuk menjaga kehandalan dan stabilitas aplikasi dalam pelayanan penerbitan paspor kepada Warga Negara Indonesia.

Dengan pertimbangan tersebut di atas, maka kegiatan pemeliharaan secara rutin terhadap Sistem Penerbitan SPRI diperlukan guna mendukung operasionalisasi proses pelayanan keimigrasian.

Untuk kegiatan pemeliharaan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 11.956.500.000 dan telah dilaksanakan anggaran sebesar Rp 11.766.275.095 dengan prosentase penyerapan sebesar 98,41%.

6) Pemeliharaan Aplikasi Sistem E-Office

Sistem E-Office telah dibangun sejak tahun 2007 melalui kegiatan pembangunan teknologi dan mikro elektronika keimigrasian yang kemudian pada tahun-tahun berikutnya dilakukan pengembangan Sistem E-Office secara berkelanjutan. Penggelarannya diimplementasikan di lokasi Kantor Pusat Ditjen Imigrasi, Divisi Keimigrasian, Kantor Imigrasi, Akademi Imigrasi dan Atase Imigrasi di Perwakilan RI.

Untuk menjaga keberlangsungan fungsi dan operasionalisasi dari aplikasi kesisteman dalam rangka mendukung kelancaran proses pemberian pelayanan keimigrasian, maka pemeliharaan rutin terhadap Sistem E-Office sangat diperlukan.

Untuk kegiatan pemeliharaan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 8.847.374.000 dan sampai dengan saat ini telah dilaksanakan anggaran sebesar Rp 8.798.515.000 dengan prosentase penyerapan 99,45%.

7) Pemeliharaan Gedung DRC Keimigrasian

Pembangunan Gedung DRC Keimigrasian telah dibangun sejak tahun 2010 dan telah dilakukan pengadaan perangkat pendukung operasionalisasi gedung untuk dapat melengkapi fungsi DRC Keimigrasian sebagai *back up* Pusat Data Keimigrasian.

Untuk dapat nantinya gedung DRC Keimigrasian secara baik dapat difungsikan dan dioperasikan sebagai *back up* Pusat Data Keimigrasian, maka terhadap fisik gedung, perangkat pendukung serta sarana dan prasarana perlu dilakukan pemeliharaan secara rutin.

Untuk kegiatan pemeliharaan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 600.000.000 dan sampai dengan saat ini telah dilaksanakan anggaran sebesar Rp 316.930.716 dengan prosentase penyerapan 52,82%.

8) Pemeliharaan Data Warehouse Keimigrasian

Bahwa Sistem *Data Warehouse* digunakan sebagai media yang dapat mengolah dan menyajikan data keimigrasian. Hasil pengolahan dan penyajian data dapat dimanfaatkan sebagai referensi dan pengambilan keputusan bagi pimpinan dalam rangka menciptakan kebijakan baru. Di samping itu sistem

data warehouse itu sendiri dapat dimanfaatkan dan digunakan sebagai media pertukaran data oleh karena permintaan/pengambilan data yang dilayani tidak mengganggu sistem/aplikasi pelayanan keimigrasian yang sedang berjalan. Agar kinerja sistem *data warehouse* dapat terjaga maka diperlukan kegiatan perawatan dan pemeliharaan terhadap sistem dimaksud.

Untuk kegiatan pemeliharaan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 9.457.546.000 dan sampai dengan saat ini telah dilaksanakan anggaran sebesar Rp 5.586.669.000 dengan prosentase penyerapan 59,07%.

9) Pemeliharaan Sistem Pengawasan Visual Pelayanan Keimigrasian

Bahwa sistem pengawasan visual dimaksud dapat pula dipergunakan sebagai pengawasan dalam rangka memperoleh hasil operasional pelayanan keimigrasian. Di samping itu untuk mendukung pembinaan sumber daya manusia dalam rangka operasional tugas dan fungsi keimigrasian serta melindungi asset-aset kantor khususnya terkait kesisteman, diperlukan fasilitas pengawasan dalam bentuk visual. Untuk itu pemeliharaan terhadap sistem pengawasan visual keimigrasian dimaksud diperlukan dalam rangka menjamin keberlangsungan fungsi aplikasi dan perangkat didalamnya sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 9.222.008.000 dan telah dilaksanakan anggaran sebesar Rp 9.096.300.000 dengan prosentase penyerapan 93,93%.

10) Sewa Jaringan Komunikasi Sistem Keimigrasian

Jaringan Komunikasi Data merupakan saluran untuk mengirim dan menerima data bagi setiap Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Pusat Data Keimigrasian (PUSDAKIM) pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Imigrasi. Didalamnya berjalan alur pertukaran data dan akses sistem aplikasi pelayanan keimigrasian. Ketersediaan layanan maupun data untuk mendukung operasional keimigrasian merupakan kebutuhan yang sangat penting. Untuk itu diperlukan jaminan ketersediaan jaringan komunikasi yang dapat memberikan layanan data dan akses kesisteman.

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 38.910.000.000 dan telah dilaksanakan anggaran sebesar Rp 36.549.750.928 dengan prosentase penyerapan 93,93%.

11) Pengadaan Tinta Printer Sistem Penerbitan SPRI

Bahwa salah satu unsur penunjang operasional perangkat printer pelayanan keimigrasian adalah tinta printer. Ketersediaan kebutuhan tinta printer yang merupakan barang habis pakai harus dapat tercukupi agar pelaksanaan

proses pelayanan keimigrasian dapat tetap berjalan lancar. Kualitas tinta printer perlu diperhatikan oleh karena akan digunakan untuk pencetakan dokumen keimigrasian yang dapat diverifikasi dan secara sah dapat digunakan. Untuk itu perlu dilakukan pengadaan/penyediaan tinta printer dimaksud guna menunjang pelayanan keimigrasian.

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 16.941.475.000 dan telah dilaksanakan anggaran sebesar Rp 16.654.099.154 dengan prosentase penyerapan 98,09%.

12) Pembayaran Lisensi dan *Support Biometric Identification System dan Keesing Document*

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 3.508.800.000 dan telah dilaksanakan anggaran sebesar Rp 3.467.970.000 dengan prosentase penyerapan 98,84%.

13) Workshop Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian

Kegiatan workshop ditujukan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman petugas di masing-masing Unit Pelaksana Teknis dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya terkait bidang teknologi dan informasi keimigrasian. Kegiatan ini telah dilaksanakan di Jakarta dan diikuti oleh seluruh perwakilan petugas dari masing-masing Kantor Imigrasi yang berjumlah 120 orang.

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 904.110.000 dan telah dilaksanakan anggaran sebesar Rp 802.152.000 dengan prosentase penyerapan 88,72%.

14) Peremajaan Sistem Fasilitas Keimigrasian

Kegiatan ini merupakan kegiatan tambahan yang dilaksanakan oleh karena adanya pekerjaan yang belum terselesaikan namun harus dilakukan kelanjutannya pada tahun ini.

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 220.220.000 dengan penyerapan/penggunaan anggaran sebesar Rp 220.220.000 dengan prosentase sebesar 100%.

4. Sub Direktorat Kerjasama Teknologi Informasi dan Penyebaran Informasi Keimigrasian

Kegiatan koordinasi ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti kerjasama yang telah disepakati antara Direktorat Jenderal Imigrasi dengan instansi/lembaga pemerintah terkait. Adapun kerjasama yang dilakukan mengenai permintaan data dan informasi keimigrasian yang meliputi antara lain data perlintasan, data Warga Negara Asing (WNA), dan data Warga

Negara Indonesia (WNI). Kegiatan koordinasi ini dilaksanakan melalui agenda rapat/pertemuan/ koordinasi. Untuk kegiatan ini dialokasi anggaran sebesar Rp 215.736.000 dengan penyerapan/penggunaan anggaran sebesar Rp 140.302.000 dengan prosentase sebesar 65,03%.

5. Sub Direktorat Dokumen Keimigrasian dan Kartu Elektronik

Adapun rencana program kerja Subdit Dokumen Keimigrasian dan Kartu Elektronik yang telah dilaksanakan merupakan kegiatan yang secara rutin mencakup penanganan, penggunaan dan distribusi dokumen keimigrasian serta layanan ABTC yang merupakan tugas operasional rutin. Adapun secara rinci atas pelaksanaan kegiatan masing-masing sebagai berikut:

a. Pencetakan/Penerbitan Dokumen Keimigrasian

Dokumen Keimigrasian merupakan salah satu komponen pemberian pelayanan keimigrasian sehingga akan secara rutin dilaksanakan pengadaaannya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan keimigrasian. Mekanisme pemberian pelayanan keimigrasian dan penerbitannya diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis yaitu Kantor Imigrasi. Untuk itu pemenuhan dokumen keimigrasian harus dapat dipenuhi agar pelayanan keimigrasian tetap dapat dilaksanakan. Untuk pelaksanaan pengadaan/pencetakannya dilakukan dengan melalui proses kegiatan pengadaan barang/jasa terlebih dahulu.

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 2.967.500.000 dan telah dipergunakan anggarannya sebesar Rp 1.749.861.200 dengan prosentase penyerapan sebesar 58,97%.

b. Pengelolaan Layanan Kiriman Kartu ABTC

Kartu ABTC adalah salah satu upaya forum APEC di bidang Fasilitasi Perdagangan untuk memberikan kemudahan mobilitas bisnis bagi para pengusaha di negara/ekonomi anggota forum APEC. Dengan memiliki kartu ABTC, para pengusaha tidak perlu lagi mengajukan visa ke perwakilan negara/ekonomi anggota APEC mengingat kartu ABTC tersebut berfungsi sebagai visa elektronik dan menikmati fasilitas *multiple short entry* ke 17 negara/ekonomi anggota APEC selama 3 (tiga) tahun. Dalam mekanisme penerbitan Kartu ABTC, permohonan diajukan di masing-masing negara dan negara peserta APEC akan melakukan analisa dan pemberian persetujuan. Setelah mendapatkan persetujuan seluruh negara anggota APEC, maka kartu akan dicetak di Australia dan berlaku 3 tahun atau minimum paspor. Setelah kartu dicetak, maka kartu ABTC akan dikirimkan ke negara pemohon melalui jasa antar layanan Pos/DHL.

Untuk itu pelaksanaan pengiriman Kartu ABTC ini dianggarkan alokasi biaya sebesar Rp 24.000.000 dan telah dipergunakan anggaran sebesar Rp 5.077.000 dengan prosentase sebesar 21,15 %.

c. Pengelolaan Distribusi Dokumen Keimigrasian

Kegiatan pengelolaan ini dilakukan guna memastikan ketersediaan kebutuhan terhadap blanko dokumen keimigrasian dari masing-masing Unit Pelaksana Teknis dapat terpenuhi dan dapat terdistribusikan dan terkoordinasikan dengan baik.

Untuk itu pelaksanaan kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 45.336.000 dan telah dipergunakan anggaran sebesar Rp 34.040.000 dengan prosentase sebesar 75,08 %.

d. Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Pengiriman Dokumen Keimigrasian

Dalam proses pengiriman dokumen keimigrasian perlu diperhatikan terkait dengan media/perlengkapan yang digunakan untuk melindungi dokumen keimigrasian dari kesalahan penanganan pengiriman atau sebab lain yang berakibat pada kerusakan dokumen keimigrasian.

Untuk meminimalisasi terjadinya kerusakan dokumen keimigrasian, maka pengadaan perlengkapan khusus dilakukan untuk menjamin fisik blanko dokumen keimigrasian dimaksud, seperti tas khusus dokumen keimigrasian, segel pengaman dan label alamat yang dilaminasi perlu.

Untuk pelaksanaan kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 302.940.000 dan telah dipergunakan anggaran sebesar Rp 187.638.000 dengan prosentase sebesar 61,94 %.

e. Sosialisasi Layanan ABTC

Fasilitas penggunaan dan manfaat kartu ABTC belum sepenuhnya diketahui dan dipahami oleh banyak para pebisnis yang ada di dalam negeri khususnya di daerah. Untuk itu melalui kegiatan sosialisasi mengenai kartu ABTC diharapkan dapat memberikan pengetahuan, wawasan dan pemahaman yang luas kepada masyarakat khususnya para pebisnis dalam hal manfaat/kemudahan yang dapat diperoleh dari fasilitas kartu ABTC dan prosedur/persyaratan serta mekanisme layanan kartu ABTC dimaksud.

Pada tahun ini telah terselenggara 2 (dua) kegiatan Sosialisasi yaitu di Surabaya dan Medan dengan mengundang dan dihadiri oleh para pebisnis yang merupakan para anggota Kantor Dagang dan Industri Indonesia ataupun asosiasi pengusaha lain di area lokal setempat.

Dari alokasi anggaran sebesar Rp 172.100.000 telah dipergunakan anggaran sebesar Rp 156.378.650 dengan prosentase penyerapan sebesar 90,86%.

6. Sub Bagian Tata Usaha

a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Sisinfokim

Perumusan kebijakan teknis merupakan upaya penyusunan peraturan, penerapan kebijakan/aturan, SOP, norma maupun kaidah yang dilaksanakan oleh Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian dalam rangka menyelaraskan tugas dan fungsinya di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini sejalan dengan pengembangan/pengadaan kesisteman yang telah dilaksanakan sehingga diperlukan perubahan/penyelarasan dengan kebijakan/peraturan yang ada maupun yang baru dan penerapan/implementasi kesisteman sebagai pedoman pelaksanaan kegiatannya.

Adapun telah dirumuskan 2 (dua) draft peraturan Menteri Hukum dan HAM RI yang dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan konsinyering di Jakarta dan Bogor.

Dari alokasi anggaran yang tersedia sebesar Rp 253.360.000 telah dipergunakan anggaran sebesar Rp 114.664.500 dengan prosentase penyerapan sebesar 45,26%.

b. Rapat Bidang Sistem Informasi Keimigrasian

Dalam rangka mendukung dan memfasilitasi seluruh kegiatan koordinasi dan komunikasi baik secara internal maupun eksternal di bidang sistem dan teknologi informasi keimigrasian telah diselenggarakan rapat/pertemuan yang secara rutin telah dilaksanakan sejak awal tahun sampai dengan saat ini.

Dari alokasi anggaran yang tersedia sebesar Rp 451.852.000 telah dipergunakan anggaran sebesar Rp 153.352.773 dengan prosentase penyerapan sebesar 33,94%.

F. Bidang Hak Kekayaan Intelektual

Pada tahun 2013 sasaran strategis DJHKI berdasarkan Penetapan Kinerja terdiri atas tiga (3) pilar utama, dimana ketiga hal ini menjadi *core business* DJHKI selaku pelayan publik di bidang Hak Kekayaan Intelektual. Adapun 3 pilar utama tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan dan penegakan hukum atas kekayaan intelektual masyarakat;
2. Permohonan hak kekayaan intelektual yang mendapat kepastian hukum; dan
3. Layanan Hak Kekayaan Intelektual yang bisa diakses masyarakat secara online dengan sistem aplikasi dan basis data yang akurat.

Indikator ini digunakan untuk mengukur kinerja DJHKI di bidang perlindungan dan penegakan hukum atas Hak Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar pada DJHKI. Penetapan kinerja ini diukur berdasarkan 2 (dua) indikator utama, yakni penindakan atas pengaduan tindak pidana di bidang HKI dan kelengkapan berkas administrasi perkara tindak pidana di bidang HKI yang sesuai standar. Yang dimaksud dengan penindakan atas pengaduan tindak pidana di bidang HKI sesuai standar adalah pengaduan pelanggaran bidang hak kekayaan intelektual yang dilaporkan oleh masyarakat, untuk kemudian dilakukan penyidikan setelah pelapor melengkapi semua persyaratan yang diperlukan. Pada tahun 2013, Direktorat Penyidikan menerima dan melakukan penyidikan terhadap 19 pengaduan pelanggaran HKI (95%) yang dilaporkan oleh masyarakat, dimana ditargetkan jumlah pengaduan yang dilakukan penyidikan sebanyak 20 pengaduan (100%).

Berdasarkan hal tersebut terjadi penurunan jumlah penindakan atas pengaduan tindak pidana jika dibandingkan dengan tahun 2012 telah diterima pengaduan dan dilakukan penyidikan terhadap 22 pengaduan. Namun penurunan jumlah pengaduan ini tidak dapat dijadikan patokan bahwa terjadi penurunan kinerja DJHKI di bidang Penegakan Hukum atas pelanggaran HKI, hal ini dikarenakan jumlah penindakan pengaduan yang diterima adalah pengaduan yang didasarkan atas delik aduan. Sementara untuk penindakan atas delik Undang-undang (Hak Cipta), DJHKI terus melakukan upaya sosialisasi maupun pemeriksaan, pengeledahan dan penyitaan pada beberapa mall di beberapa provinsi di Indonesia.

Sementara itu yang dimaksud dengan kelengkapan berkas administrasi perkara tindak pidana di bidang HKI yang sesuai standar adalah berkas perkara yang telah dilengkapi dengan surat perintah tugas penyidikan, Surat Pemberitahuan Dimulainya penyidikan (SPDP), berita acara pemeriksaan pelapor, berita acara pemeriksaan saksi-saksi, berita acara pemeriksaan saksi ahli, berita acara pemeriksaan tersangka, surat perintah tugas pengeledahan, berita acara pengeledahan, surat perintah tugas penyitaan, berita acara

penyitaan, surat ijin penetapan pengadilan atas penyitaan dan berita acara serah terima barang bukti. Selama tahun 2013 telah dinyatakan sebanyak 9 berkas pengaduan (90%) yang lengkap berkas administrasinya dengan target sebanyak 10 berkas (100%). Sementara pada tahun 2012 berkas yang dinyatakan lengkap adalah sebanyak 38 berkas pengaduan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan capaian kinerja perlindungan dan penegakan hukum atas kekayaan intelektual masyarakat adalah sebesar 92.5% (95% ÷ 90%). Sementara itu, jika mengacu kepada target yang ditetapkan dalam renstra IKU DJHKI adalah pengaduan pelanggaran bidang HKI yang dilakukan penyidikan, dimana dalam hal ini penyidikan hanya dilakukan terhadap pelaporan yang dilakukan oleh masyarakat. Namun, DJHKI tetap berupaya untuk meningkatkan pelayanannya dibidang penegakan hukum dengan menambah IKU DJHKI menjadi perlindungan dan penegakan hukum atas kekayaan intelektual masyarakat. Hal ini dikarenakan amanat Undang-Undang DJHKI tidak hanya berpatokan kepada HKI yang dinyatakan perlindungan berdasarkan pendaftaran (Desain Industri, Paten dan Merek), namun juga termasuk perlindungan HKI yang didasarkan pada pengumuman (Hak Cipta). Adapun realisasi capaian kinerja DJHKI setiap tahunnya berhasil mencapai target yang ditetapkan.

Sasaran kedua dari DJHKI pada tahun 2013 adalah permohonan hak kekayaan intelektual yang mendapat kepastian hukum. Sebagai pelaksana kebijakan HKI nasional, DJHKI dituntut untuk dapat memberikan kepastian hukum terhadap permohonan pendaftaran HKI yang telah diterimanya. Hal ini sangat penting, karena kepastian hukum inilah menjadi kebutuhan utama pemohon. Adanya kepastian hukum menjadikan pemohon di bidang HKI dapat mengetahui secara jelas mengenai status permohonannya tersebut diterima atau ditolak. Selain itu, adanya kepastian hukum juga akan memberikan kepastian bagi dunia usaha, utamanya dalam mendukung iklim persaingan dunia usaha untuk berkompetisi secara sehat sehingga dapat terhindar dari adanya praktik-praktik persaingan usaha yang tidak sehat dan melanggar HKI. Pada tahun 2013 DJHKI menargetkan jumlah permohonan HKI yang memperoleh kepastian hukum adalah sebagai berikut :

Jenis HKI	Target	Realisasi	Capaian (%)
Hak Cipta	4.800	5.071	105.65
Desain Industri	4.400	5.011	113.89
Paten	3.000	2.552	85.07
Merek	42.000	34.264	81.58
Jumlah	54.200	46.898	86.52

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa pada tahun 2013 target penyelesaian permohonan hak kekayaan intelektual yang mendapat kepastian hukum adalah sebesar 54.200 (100%) permohonan (Hak Cipta, Desain Industri, Paten dan Merek). Adapun

besarnya realisasi yang berhasil dicapai adalah sebanyak 46.898 (86.52%) Permohonan. Hal ini diperoleh dari perbandingan antara jumlah permohonan HKI yang memperoleh kepastian hukum pada tahun 2013 dibandingkan dengan target pada tahun 2013. Adapun capaian kinerja DJHKI berdasarkan IKU dalam Renstra Kemenkumham adalah permohonan HKI yang memperoleh perlindungan hukum, namun dalam Penetapan Kinerja DJHKI 2013 IKU ini ditambah menjadi permohonan HKI yang memperoleh kepastian hukum. Hal ini didasarkan kepada kebutuhan masyarakat terhadap HKI tidak hanya terhadap permohonan HKI yang dinyatakan dilindungi (didaftarkan) secara hukum, namun juga termasuk permohonan HKI yang ditolak karena tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sasaran strategis terakhir dari DJHKI adalah memberikan layanan Hak Kekayaan Intelektual yang bisa diakses masyarakat secara online dengan sistem aplikasi dan basis data yang akurat. Dimana dalam hal ini DJHKI dituntut untuk dapat memberikan informasi terkait HKI kepada masyarakat secara tepat, cepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk mengakomodir hal tersebut diatas pada website DJHKI (www.dgip.go.id) telah disediakan berbagai informasi HKI yang dibutuhkan oleh masyarakat dan dapat diakses secara *online* 24 jam. DJHKI sendiri pada tahun 2013 menargetkan dapat memberikan informasi kepada 500.000 pengunjung website DJHKI, dimana hal ini dihitung berdasarkan jumlah akses masyarakat di website DJHKI. Adapun realisasi pada *hit counter* pada website DJHKI adalah sebanyak 1.097.547 kali akses atau 219.50% dari yang ditargetkan.

1. Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang

Selama kurun waktu 2013 Direktorat HC,DI,DTLST dan RD menerima permohonan pendaftaran Hak Cipta sebanyak 5137 permohonan (102.74%) dan telah menyelesaikan sebanyak 4204 (146.04%) permohonan Hak Cipta dalam bentuk pemberian sertifikat hak cipta. Selain itu juga telah dilakukan penolakan terhadap 394 permohonan (78.80%) hak cipta karena saat dilakukan penelusuran dianggap tidak memenuhi syarat untuk diberikan surat pendaftaran ciptaan. Dibidang pelayanan hukum terkait hak cipta, DJHKI juga telah memberikan 12 surat pendapat hukum (20%) dibidang hak cipta.

Sementara itu pada Desain Industri telah diterima permohonan pendaftaran sebanyak 3640 permohonan (81.80%) dan menyelesaikan permohonan pendaftaran sebanyak 4373 permohonan (99.39%) dimana penyelesaian tersebut tidak hanya meliputi permohonan tahun 2013. Hal ini dikarenakan penyelesaian permohonan desain industri memerlukan waktu penyelesaian yang berbeda-beda

satu sama lain, dimana suatu permohonan dapat memakan waktu yang lebih lama dikarenakan alasan adanya kekurangan persyaratan, sanggahan dari pemilik desain industri lain ataupun terhambat karena adanya pertanyaan dari pemeriksa desain industri yang belum memperoleh tanggapan dari pihak pemohon. Selain itu juga telah diberikan keputusan penolakan terhadap 1487 permohonan (212.43%).

Pada bidang pelayanan hukum, DJHKI juga telah memberikan 10 surat pendapat hukum (16.67%) dibidang desain industri. Pencapaian di bidang pelayanan hukum memang belum mencapai target yang ditetapkan diawal tahun, hal ini dikarenakan penargetan diawal tahun didasarkan pada *trend* tahun sebelumnya. Namun dari segi kualitas dalam melakukan pelayanan hukum di bidang Hak Cipta, Desain Industri, DTLST dan Rahasia Dagang telah diselesaikan seluruh permohonan pelayanan hukum yang dimintakan oleh masyarakat ataupun pihak terkait dibidang HKI.

2. Direktorat Paten

Dalam kurun waktu 2013, Direktorat Paten telah melakukan penerimaan permohonan sebanyak 5635 permohonan (102.45%) dan telah menyelesaikan permohonan pendaftaran paten sebanyak 2552 permohonan (85.07%), capaian ini memang belum mencapai target yang ditetapkan karenapenyelesaian permohonan tidak hanya terhadap permohonan yang masuk tahun 2013 namun juga permohonan yang masuk pada tahun sebelumnya. Hal ini dimungkinkan karena untuk mencapai tahap pemeriksaan permohonan memerlukan waktu lebih dari 1 tahun setelah permohonan pendaftaran diterima. Selama tahun 2013 juga telah dilakukan pemeriksaansubstantif tahap akhir terhadap 2590 (88.82%), Capaian kinerja terkait hal ini juga belum mencapai target yang telah ditetapkan, hal ini dikarenakan tingkat kesulitan yang cukup tinggi dalam melakukan pemeriksaan substantif paten dan diperlukannya ketelitian dan kehati-hatian dalam memahami klaim yang diajukan. Selain itu hal ini juga dikarenakan adanya kekurangan sumber daya jumlah pemeriksa substantif paten yang ada saat ini.

Sementara dibidang pelayanan hukum, telah diberikan sebanyak 259 surat pendapat hukum (148.00%) dibidang paten. Pencapaian di bidang pelayanan hukum memang belum mencapai target yang ditetapkan diawal tahun, hal ini dikarenakan penargetan diawal tahun didasarkan pada *trend* tahun sebelumnya. Namun dari segi kualitas dalam melakukan pelayanan hukum di bidang paten DJHKI telah menyelesaikan seluruh permohonan pelayanan hukum yang dimintakan oleh masyarakat ataupun pihak terkait dibidang HKI.

3. Direktorat Merek

Direktorat Merek selama kurun waktu 2013 telah menerima permohonan HKI sebanyak 54176 permohonan merek (83.35%) dan telah menyelesaikan sebanyak 34264 permohonan merek (81.58%). Namun penyelesaian permohonan ini tidak hanya terhadap permohonan yang masuk tahun 2013 saja, hal ini dikarenakan untuk mencapai tahap pemeriksaan permohonan memerlukan waktu lebih dari 1 tahun setelah permohonan pendaftaran diterima. Pencapaian terkait penyelesaian permohonan merek juga belum mencapai target yang ditetapkan diawal tahun, hal ini disebabkan beberapa persoalan diantaranya kekosongan sumber daya manusia pada unit terkait, serta adanya pula kendala kendala teknis lainnya. Sedangkan permohonan pendaftaran indikasi geografis sebanyak 8 permohonan (114.29%).Dibidang pelayanan hukum, Direktorat Merek telah mengeluarkan sebanyak 277 surat pendapat hukum (100.73%), raihan persentase di bidang Pelayanan Hukum ini telah melampaui target yang ditetapkan di awal tahun.Selain itu, Direktorat Merek melalui Komisi Banding Merek juga telah menerima sebanyak 626 permohonan banding (208.67%) dan telah melakukan pemeriksaan banding sebanyak 626 permohonan banding (208.67%).

4. Direktorat Kerja Sama dan Promosi

Direktorat Kerja Sama dan Promosi memiliki tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kerja sama dan promosi hak kekayaan intelektual. Dalam pelaksanaan tugasnya tersebut Direktorat Kerja Sama dan Promosi telah melakukan kegiatan materi promosi dan sosialisasi sebanyak 4 kali (10.00%). Selain itu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Direktorat Kerja Sama dan Promosi ini juga telah mengadakan aktifitas kerja sama luar negeri di bidang HKI sebanyak 41 kegiatan (107.89%) dan aktifitas kerja sama dalam negeri di bidang HKI sebanyak 41 kegiatan (113.89%).

Adapun *outcome* yang berhasil dicapai oleh Direktorat Kerja Sama dan Promosi adalah tergambar dari jumlah permohonan HKI yang telah diterima. Dimana hal ini berkaitan erat dengan fungsi Direktorat Kerja Sama dan Promosi melalui serangkaian kerja sama, sosialisasi, promosi maupun sertifikasi konsultan HKI yang telah dilakukan.

5. Direktorat Teknologi Informasi

Dalam rangka peningkatan kualitas layanan HKI yang dapat diakses masyarakat secara *on line* dengan sistem aplikasi dan basis data yang akurat selama tahun 2013 Direktorat Teknologi Informasi telah melaksanakan beberapa kegiatan

strategis, diantaranya adalah pengembangan fasilitas teknologi informasi (hardware dan software) di bidang HKI, pemutakhiran database dan aplikasi serta laporan pelaksanaan kegiatan, penataan, pengelolaan, dan pengalihmediaan dokumentasi HKI serta laporan layanan dokumentasi HKI dan kepustakaan HKI, serta perangkat pengolah data dan komunikasi. Seluruh kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam rangka mencapai *outcome* untuk memberikan informasi mengenai HKI pada umumnya dan DJHKI pada khususnya kepada masyarakat melalui *website* resmi DJHKI. Adapun jumlah akses masyarakat ke website DJHKI (www.dgip.go.id) mencapai 1.097.547 kali akses atau 219.50% dari yang ditargetkan.

6. Direktorat Penyidikan

Direktorat Penyidikan memiliki tugas untuk melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyidikan tindak pidana Hak Kekayaan Intelektual. Pada tahun 2013 sasaran utama Direktorat Penyidikan adalah penyelesaian penerimaan pengaduan dan penyidikan tindak pidana di bidang HKI serta penyelesaian koordinasi penindakan, pemantauan dan evaluasi tindak pidana di bidang HKI. Dalam penyelesaian penerimaan pengaduan dan penyidikan tindak pidana di bidang HKI, telah diterima laporan pengaduan sebanyak 19 kasus pelanggaran HKI (95.00%) dimana pada tahun ini ditarget sebesar 20 kasus. Sementara raihan angka dalam penyelesaian koordinasi penindakan, pemantauan dan evaluasi tindak pidana di bidang HKI yang dilakukan oleh Direktorat Penyidikan selama tahun 2013 adalah sebanyak 9 (90.00%) berkas pengaduan yang telah dinyatakan lengkap dari 10 berkas yang ditargetkan.

G. Bidang Hak Asasi Manusia

1. Direktorat Jenderal HAM

Sampai dengan akhir tahun 2013 penyerapan anggaran dan capaian fisik (per akhir Desember 2013) pelaksanaan program dan kegiatan secara keseluruhan adalah sebagai berikut :

No.	Nama Program / Kegiatan	DIPA (Rp.)	Capaian per Desember 2013	% Keuangan	% Fisik
1.	Program Pemenuhan dan Perlindungan HAM	31.949.586.000	28.639.736.186	89,64	99,75
	a Pelayanan Komunikasi Masyarakat	1.600.000.000	1.459.299.352	92,21	100,00
	b Kerja Sama HAM	2.350.000.000	2.098.335.400	89,29	99,76
	c Informasi HAM	1.600.000.000	1.443.499.817	90,22	99,63

d	Diseminasi HAM	2.100.000.000	1.899.810.544	90,47	100,00
e	Penguatan HAM	2.750.000.000	2.475.936.800	90,03	100,00
f	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya	21.549.586.000	19.262.854.273	89,40	98,49

Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa capaian realisasi keuangan dan fisik pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia sampai dengan akhir desember tahun anggaran 2013 adalah Realisasi Keuangan sebesar 89,64% dan realisasi Fisik sebesar 99,75%.

Realisasi per jenis Belanja

MAK	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%
51	Belanja Pegawai	11.288.722.000	10.249.928.444	90,80
52	Belanja Barang	18.478.546.000	16.631.552.942	90,00
53	Belanja Modal	2.182.318.000	1.758.254.800	80,57
	Jumlah	31.949.586.000	28.639.736.186	89,64

2. Direktorat Pelayanan Komunikasi Masyarakat

Rincian pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Pelayanan Komunikasi Masyarakat sampai dengan akhir tahun anggaran 2013 adalah realisasi penyerapan anggaran sebesar 91,21%, sedangkan realisasi fisik mencapai 100,00%, yang tergambar dalam matrik sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	KEUANGAN			FISIK		
		DIPA	REALISASI	%	TARGET	CAPAIAN	% BOBOT FISIK
1.	Penanganan pengaduan kasus HAM Wilayah I	408.433.000	374.759.250	91,76	40 laporan	40 laporan	100
2.	Penanganan pengaduan kasus HAM Wilayah II	331.599.000	322.286.775	97,19	40 laporan	40 laporan	100
3.	Penanganan pengaduan kasus HAM Wilayah III	480.488.000	434.153.577	90,36	40 laporan	40 laporan	100
4.	Penanganan pengaduan kasus HAM dari luar negeri dan HAM aktual di dalam negeri (wilayah khusus)	379.480.000	328.099.750	86,46	40 laporan	40 laporan	100
	JUMLAH	1.600.000.000	1.459.299.352	91,21			100

a. Pelaksanaan penanganan pengaduan HAM pada wilayah I dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan penanganan pengaduan HAM pada wilayah I telah mencapai target sebanyak 52 (lima puluh dua) target fisik proses kegiatan dan sudah menyelesaikan 1 (satu) laporan bimbingan teknis pelayanan komunikasi masyarakat, 11 (sebelas) kegiatan koordinasi dan konsultasi yankomas dan 40

(empat puluh) laporan penelaahan. Rekapitulasi pencapaian fisik berdasarkan rincian pelaksanaan kegiatan :

NO	SUB KOMPONEN	FISIK		
		TARGET	CAPAIAN	% BOBOT FISIK
1.	Penelaahan Komunikasi Masyarakat	40	40	100
2.	Koordinasi dan Konsultasi Yankomas	11	11	100
3.	Bimtek Pelayanan Komunikasi Masyarakat	1	1	100

Dengan demikian capaian fisik pelaksanaan program dan kegiatan penanganan kasus pengaduan HAM pada wilayah I Direktorat Pelayanan Komunikasi Masyarakat dapat mencapai 100%.

- b. Rincian pelaksanaan penanganan pengaduan HAM pada wilayah II dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan penanganan pengaduan HAM pada wilayah II telah mencapai target 55 (lima puluh lima) proses kegiatan, telah melaksanakan sebanyak 40 (empat puluh) laporan penelaahan, 11 (sebelas) kegiatan koordinasi dan konsultasi yankomas dan 4 (empat) kegiatan audiensi. Rekapitulasi pencapaian fisik berdasarkan rincian pelaksanaan kegiatan :

NO	SUB KOMPONEN	FISIK		
		TARGET	CAPAIAN	% BOBOT FISIK
1.	Penelaahan Komunikasi Masyarakat	40	40	100
2.	Koordinasi dan Konsultasi Yankomas	11	11	100
3.	Audiensi	4	4	100

Dengan demikian capaian fisik pelaksanaan program dan kegiatan penanganan kasus pengaduan HAM pada wilayah II Direktorat Pelayanan Komunikasi Masyarakat dapat mencapai 100%.

Rincian pelaksanaan penanganan pengaduan HAM pada wilayah III dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan penanganan pengaduan HAM pada wilayah III telah mencapai 55 (lima puluh lima) target fisik proses kegiatan, telah melaksanakan sebanyak 40 (empat puluh) laporan penelaahan, 11 (sebelas) kegiatan koordinasi dan konsultasi yankomas, serta 4 (empat) penyusunan laporan komunikasi masyarakat. Rekapitulasi pencapaian fisik berdasarkan rincian pelaksanaan kegiatan :

NO	SUB KOMPONEN	FISIK		
		TARGET	CAPAIAN	% BOBOT FISIK
1.	Penelaahan Komunikasi Masyarakat	40	40	100
2.	Koordinasi dan Konsultasi Yankomas	11	11	100
3.	Penyusunan Laporan Komunikasi Masyarakat	4	4	100

Dengan demikian capaian fisik pelaksanaan program dan kegiatan penanganan kasus pengaduan HAM pada wilayah III Direktorat Pelayanan Komunikasi Masyarakat dapat mencapai 100%.

Rincian pelaksanaan penanganan pengaduan HAM khusus dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan penanganan pengaduan HAM pada wilayah khusus telah melebihi 55 (lima puluh lima) target fisik proses kegiatan yaitu 58 proses kegiatan, telah melaksanakan sebanyak 40 (empat puluh) laporan penelaahan, dapat menyelesaikan 14 (empat belas) laporan koordinasi dan konsultasi, 4 (empat) laporan FGD. Rekapitulasi pencapaian fisik berdasarkan rincian pelaksanaan kegiatan :

NO	SUB KOMPONEN	FISIK		
		TARGET	CAPAIAN	% BOBOT FISIK
1.	Penelaahan Komunikasi Masyarakat	40	40	100,00
2.	Koordinasi dan Konsultasi Yankomsus	11	14	127,28
3.	Forum Diskusi Terfokus	4	4	100,00

Dengan demikian capaian fisik pelaksanaan program dan kegiatan penanganan kasus pengaduan HAM pada wilayah khusus Direktorat Pelayanan Komunikasi Masyarakat melebihi target 100%.

3. Direktorat Kerja Sama HAM

Rincian pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Kerja Sama HAM sampai dengan akhir tahun anggaran 2013 adalah realisasi penyerapan anggaran sebesar 89,29%, sedangkan realisasi fisik mencapai 100,00%, yang tergambar dalam matrik sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	KEUANGAN			FISIK		
		DIPA	REALISASI	%	TARGET	CAPAIAN	% BOBOT FISIK
1.	Melaksanakan Kerja sama implementasi HAM/RANHAM di dalam negeri (48 K/L dan 33 Pemprov)	1.117.371.000	1.026.310.700	91,85	81 dokumen	81 dokumen	100,00
2.	Melakukan Rapat Koordinasi Harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan yang berspektif HAM	470.472.000	433.588.900	92,16	36 laporan	36 laporan	100,00
3.	Melaksanakan Kerjasama pemajuan HAM dengan pihak luar negeri	383.724.000	312.765.400	81,51	14 dokumen	14 dokumen	100,00
4.	Pemantauan implementasi ratifikasi instrumen HAM Internasional	378.433.000	325.670.400	86,06	10 laporan	10 laporan	100,00
	JUMLAH	2.350.000.000	2.098.335.400	89,29			100,00

a. Rincian pelaksanaan kerja sama implementasi HAM/RANHAM di dalam negeri dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan Kerja sama implementasi HAM/RANHAM di dalam negeri (48 K/L dan 33 Pemprov) telah mencapai 25 target fisik proses kegiatan, telah melaksanakan sebanyak 12 rapat kesekretariatan RANHAM,

Rapat Koordinasi Panrahanas sebanyak 2 kegiatan, Penyusunan Laporan RANHAM Tahun 2012 1 kegiatan, penyusunan Draft Ranham IV Tahun 2015-2019 sebanyak 1 kegiatan, Rapat Pokja RANHAM Kementerian Hukum dan HAM sebanyak 1 kegiatan, Rapat Koordinasi Panranham Provinsi sebanyak 1 kegiatan, Rapat Koordinasi Pokja K/L dalam rangka Evaluasi RANHAM dan dalam rangka penyusunan RANHAM IV masing-masing sebanyak 1 kegiatan, Rapat Koordinasi Pokja K/L dengan Mitra Pemerintah (LSM) sebanyak 1 kegiatan, serta Pembinaan Panranham Provinsi pada 3 Provinsi. Rekapitulasi pencapaian fisik berdasarkan rincian pelaksanaan kegiatan :

NO	SUB KOMPONEN	FISIK		
		TARGET	CAPAIAN	% BOBOT FISIK
1.	Kesekretariatan Ranham	12	12	100
2.	Rakor Panitia Ranham Nasional	2	2	100
3.	Penyusunan Laporan Ranham 2012 Oleh Setpanranhamnas	1	1	100
4.	Penyusunan Draft Ranham IV (2015-2019) Oleh Setpanranhamnas	1	1	100
5.	Rapat Pencermatan Rancangan Ranham IV (2015-2019) Oleh Setpanranhamnas	1	1	100
6.	Rakor Pokja Ranham Kementerian Hukum Dan HAM	1	1	100
7.	Rapat Koordinasi Panranham Provinsi Dalam Rangka Implementasi Ranham	1	1	100
8.	Rakor Pokja K/L Dalam Rangka Evaluasi Ranham	1	1	100
9.	Rakor Pokja K/L Dalam Rangka Penyusunan Ranham IV	1	1	100
10.	Rakor Pokja K/L Dengan Mitra Pemerintah (LSM)	1	1	100
11.	Pembinaan Panitia Ranham Provinsi	3	3	100

Dengan demikian capaian fisik pelaksanaan program dan kegiatan kerja sama implementasi HAM/RANHAM di dalam negeri dapat memenuhi target 100%.

- b. Rincian pelaksanaan Rapat Koordinasi Harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan yang berspektif HAM dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan Rapat Koordinasi Harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan yang berspektif HAM dapat mencapai 36 target fisik proses kegiatan, telah melaksanakan FGD Harmonisasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang harmonis dengan HAM dan Rakor Harmonisasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang harmonis dengan HAM di tingkat Pusat masing-masing 1 kegiatan, Rapat Koordinasi membahas Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Penilaian Kab/Kota Peduli HAM sebanyak 3 kegiatan (di Provinsi D.I.Yogyakarta, Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan), Penyusunan Telaahan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan dan evaluasi Perda sebanyak 2 kegiatan, Verifikasi Data Kabupaten / Kota Peduli HAM Dalam Rangka Penentuan Kabupaten / Kota Peduli HAM sebanyak 1 kegiatan, FGD Harmonisasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang tidak harmonis dengan HAM Tingkat Pusat sebanyak 1 kegiatan, serta Rakor Pelaksanaan Peraturan Bersama Menteri Hukum Dan Ham Dengan Menteri Dalam Negeri Tentang Parameter Ham Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah di 2

Provinsi (Banten dan Sumatera Barat), Rekapitulasi pencapaian fisik berdasarkan rincian pelaksanaan kegiatan :

NO	SUB KOMPONEN	FISIK		
		TARGET	CAPAIAN	% BOBOT FISIK
1.	FGD Harmonisasi Rancangan Peraturan Per-UU-an Yang Harmonis Dengan HAM	9	9	100
2.	Rapat Koordinasi Harmonisasi Rancangan Peraturan Per-UU-an Harmonis Dengan HAM di Tkt. Pusat	9	9	100
3.	Rapat Koordinasi Dalam Rangka Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Tentang Penilaian Kab/Kota Peduli HAM Di Prov. D.I Yogyakarta	1	1	100
4.	Rapat Koordinasi Peraturan Menteri Hukum Dan HAM tentang Penilaian Kabupaten / Kota Peduli HAM di Prov. Sumatera Utara	1	1	100
5.	Rapat Koordinasi Peraturan Menteri Hukum Dan HAM tentang Penilaian Kabupaten / Kota Peduli HAM di Prov. Sulawesi Selatan	1	1	100
6.	Penyusunan Telaahan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan dan Evaluasi Perda	2	2	100
7.	Verifikasi Data Kabupaten/Kota Peduli HAM dalam rangka Penentuan Kabupaten/Kota Peduli HAM	1	1	100
8.	FGD Evaluasi Peraturan Daerah Yang Tidak Harmonis Dengan HAM di Tingkat Pusat	9	9	100
9.	Rakor Pelaksanaan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM dengan Menteri Dalam Negeri Tentang Parameter HAM dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah di Prov. Sumatera Barat	1	1	100
10.	Rakor Pelaksanaan Peraturan Bersama Menteri Hukum Dan HAM dengan Menteri Dalam Negeri Tentang Parameter HAM dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah di Prov. Banten	1	1	100
11.	Rakor Pelaksanaan Peraturan Bersama Menteri Hukum Dan HAM dengan Menteri Dalam Negeri Tentang Parameter HAM dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah di Prov. Jawa Barat	1	1	100

Dengan demikian capaian fisik pelaksanaan program dan kegiatan Rapat Koordinasi Harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan yang berspektif HAM dapat memenuhi target 100%.

- c. Rincian pelaksanaan Kerjasama pemajuan HAM dengan pihak luar negeri dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan Kerjasama pemajuan HAM dengan pihak luar negeri dapat mencapai target 14 fisik proses kegiatan, telah melaksanakan Koordinasi dalam rangka Kerja Sama HAM antar negara sebanyak 2 kegiatan, Persiapan Dialog dalam rangka Kerja Sama Antar Negara sebanyak 2 kegiatan, Koordinasi dalam rangka Kerja Sama dengan Organisasi Internasional non PBB sebanyak 5 kegiatan serta Koordinasi dalam rangka Kerja Sama dengan Badan Badan Khusus PBB sebanyak 5 kegiatan. Rekapitulasi pencapaian fisik berdasarkan rincian pelaksanaan kegiatan :

NO	SUB KOMPONEN	FISIK		
		TARGET	CAPAIAN	% BOBOT FISIK
1.	Koordinasi Dalam Rangka Kerja Sama HAM Antar Negara	2	2	100
2.	Persiapan Dialog Dalam Rangka Kerja Sama Antar Negara	2	2	100
3.	Koordinasi Dalam Rangka Kerjasama Dengan Organisasi Internasional Non PBB	5	5	100
4.	Koordinasi Dalam Rangka Kerjasama Dengan Badan-Badan Khusus PBB	5	5	100

Dengan demikian capaian fisik pelaksanaan program dan kegiatan Kerjasama pemajuan HAM dengan pihak luar negeri dapat memenuhi target 100%.

- d. Rincian pelaksanaan Pemantauan implementasi ratifikasi instrumen HAM Internasional dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan Pemantauan implementasi

ratifikasi instrumen HAM Internasional mencapai 9,90 proses kegiatan dari 10 target fisik proses kegiatan dengan rincian kegiatan sebagai berikut : Laporan FGD Pengumpulan Data dan Informasi Implementasi Kovenan Hak Sipil, namun kegiatan kunjungan keluar negeri tidak dapat dilaksanakan, sudah menyelesaikan laporan Evaluasi Implementasi Kovenan Hak Ekosob, Kovenasi Anti Penyiksaan, Implementasi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, Implementasi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, Laporan Evaluasi Implementasi Konvensi Anak, serta Laporan Rapat Koordinasi Penyandang Disabilitas, Konvensi Perlindungan Hak Pekerja, Laporan rapat-rapat dalam pembahasan Protokol Opsional Konvensi Anti Penyiksaan, serta laporan rapat-rapat pembahasan materi Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional, Rekapitulasi pencapaian fisik berdasarkan rincian pelaksanaan kegiatan :

NO	SUB KOMPONEN	FISIK		
		TARGET	CAPAIAN	% BOBOT FISIK
1.	FGD Pengumpulan Data dan Informasi Implementasi Kovenan Hak Sipil	1	1	100
2.	Evaluasi Implementasi Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya	1	1	100
3.	Evaluasi Implementasi Konvensi Menentang Penyiksaan	1	1	100
4.	Evaluasi Implementasi Kovenan Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial	1	1	100
5.	Evaluasi Implementasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan	1	1	100
6.	Evaluasi Implementasi Konvensi Hak Anak	1	1	100
7.	Rapat Koordinasi Implementasi Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (Jawa Barat)	1	1	100
8.	Rapat Koordinasi Implementasi Konvensi Perlindungan Hak Pekerja Migran (Jawa Barat)	1	1	100
9.	Protokol Opsional Konvensi Anti Penyiksaan	1	1	100
10.	Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional	1	1	100

Dengan demikian capaian fisik pelaksanaan program dan kegiatan Pemantauan implementasi ratifikasi instrumen HAM Internasional mencapai 100,00%.

4. Direktorat Informasi HAM

Rincian pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Informasi HAM sampai dengan akhir tahun anggaran 2013 adalah realisasi penyerapan anggaran sebesar 90,22%, sedangkan realisasi fisik mencapai 100,00%, yang tergambar dalam matrik sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	KEUANGAN			FISIK		
		DIPA	REALISASI	%	TARGET	CAPAIAN	% BOBOT FISIK
1.	Informasi HAM	723.456.000	669.198.142	92,50	80 laporan	80 laporan	100
2.	Evaluasi dan Pelaporan	233.492.000	222.420.350	95,26	80 laporan	80 laporan	100
3.	Pengembangan Sistem dan Jejaring	338.657.000	280.902.200	82,95	4 kegiatan	4 kegiatan	100
4.	Publikasi dan Dokumentasi	304.395.000	270.979.125	89,02	8 kegiatan	8 kegiatan	100
	JUMLAH	1.600.000.000	1.443.499.817	90,22			100

- a. Rincian pelaksanaan informasi HAM dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan Informasi HAM telah mencapai 82 target fisik proses kegiatan, dapat menyelesaikan 1 laporan Penyusunan Pedoman, dan 33 laporan Pengumpulan data implementasi HAM/RANHAM dan 48 laporan Pengumpulan data implementasi HAM/RANHAM pada Kementerian/ Lembaga, Rekapitulasi pencapaian fisik berdasarkan rincian pelaksanaan kegiatan :

NO	SUB KOMPONEN	FISIK		
		TARGET	CAPAIAN	% BOBOT FISIK
1.	Penyusunan Pedoman Pengumpulan Dan Pengolahan Data Informasi Implementasi Ham	1	1	100
2.	Pengumpulan Dan Pengolahan Data Informasi Implementasi Ham	33	33	100
3.	Pengumpulan Dan Pengolahan Data Informasi Ham Pada K/L	48	48	100

Dengan demikian capaian fisik pelaksanaan program dan kegiatan Informasi HAM dapat memenuhi target 100%.

- b. Rincian pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan evaluasi dan pelaporan mencapai 5 target fisik proses kegiatan, telah melaksanakan dan menyelesaikan 4 kegiatan konsinyering dan 1 workshop penyusunan laporan evaluasi implementasi HAM, rekapitulasi pencapaian fisik berdasarkan rincian pelaksanaan kegiatan :

NO	SUB KOMPONEN	FISIK		
		TARGET	CAPAIAN	% BOBOT FISIK
1.	Konsinyering Penyusunan Laporan Evaluasi Dan Implementasi Ham	4	4	100
2.	Workshop Penyusunan Laporan Evaluasi Implementasi Ham	1	1	100

Dengan demikian capaian fisik pelaksanaan program dan kegiatan evaluasi dan pelaporan Implementasi HAM dapat memenuhi target 100%.

- c. Rincian pelaksanaan Pengembangan Sistem dan Jejaring dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan Pengembangan Sistem dan Jejaring dapat mencapai 21 target fisik proses kegiatan, telah melaksanakan sebanyak 4 paket kegiatan Pengembangan Sistem Pengelolaan Data Elektronik secara terpusat, telah melaksanakan Bimtek Sistem Pengelolaan Data Elektronik Secara Terpusat Bagi Administrator Direktorat Dan Bimtek Sistem Pengelolaan Data Elektronik Secara Terpusat Bagi Pegawai Ditjen HAM masing-masing 1 kegiatan, telah menyelesaikan Pedoman Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Ditjen HAM, melaksanakan Pengembangan Website Ditjen HAM dan Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem dan jaringan teknologi Informasi masing-masing 1 kegiatan, dan secara rutin melaksanakan Pengelolaan Website dan pengembangan Kapasitas, Rekapitulasi pencapaian fisik berdasarkan rincian pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

NO	SUB KOMPONEN	FISIK		
		TARGET	CAPAIAN	% BOBOT FISIK
1.	Pengembangan Sistem Pengelolaan Data Elektronik Secara Terpusat	4	4	100
2.	Bimtek Sistem Pengelolaan Data Elektronik Secara Terpusat Bagi Administrator Direktorat	1	1	100
3.	Bimtek Sistem Pengelolaan Data Elektronik Secara Terpusat Bagi Pegawai Ditjen Ham	1	1	100
4.	Penyusunan Pedoman Pengelolaan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Ditjen Ham	1	1	100
5.	Pengembangan Wbsite Ditjen Ham	1	1	100
6.	Pemeliharaan Dan Pengembangan Sistem Dan Jaringan Teknologi Informasi	1	1	100
7.	Pengelolaan Wbsitw Dan Pengembangan Kapasitas	12	12	100

Dengan demikian capaian fisik pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan system dan jejaringan dapat memenuhi target 100%.

- d. Rincian pelaksanaan Publikasi dan dokumentasi dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan Publikasi dan Dokumentasi telah mencapai 20 target fisik proses kegiatan, dengan rincian sudah menyelesaikan 1 kegiatan penerbitan jurnal, 1 kegiatan penerbitan majalah mediasi dan 1 paket, kegiatan pembinaan perpustakaan (selama 12 bulan), sudah menyelesaikan 1 paket Pembuatan Film Dokumenter HAM, telah melaksanakan kegiatan Publisitas Melalui Media Elektronik yang disiarkan secara live TVRI pada tanggal 6 Desember 2013, rekapitulasi pencapaian fisik berdasarkan rincian pelaksanaan kegiatan :

NO	SUB KOMPONEN	FISIK		
		TARGET	CAPAIAN	% BOBOT FISIK
1.	Penerbitan Jurnal HAM	2	2	100
2.	Penerbitan Majalah Mediasi	4	4	100
3.	Pengelolaan Dan Pemeliharaan Bahan Pustaka Untuk Perpustakaan Ditjen HAM	12	12	100
4.	Pembuatan Film Semi Dokumenter HAM	1	1	100
5.	Publisitas Melalui Media Elektronik	1	1	100

Dengan demikian capaian fisik pelaksanaan program dan kegiatan publikasi dan dokumentasi mencapai 100,00%.

5. Direktorat Diseminasi HAM

Rincian pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Diseminasi HAM sampai dengan akhir tahun anggaran 2013 adalah realisasi penyerapan anggaran sebesar 90,47%, sedangkan realisasi fisik mencapai 100,00%, yang tergambar dalam matrik sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	KEUANGAN			FISIK		
		DIPA	REALISASI	%	TARGET	CAPAIAN	% BOBOT FISIK
1.	Diseminasi HAM	1.362.844.000	1.219.206.934	89,46	49 Kab/Kot	49 Kab/Kot	100
2.	Bimbingan Teknis Penyuluh HAM	460.510.000	423.416.825	91,95	150 org	150 org	100
3.	Evaluasi dan Pengembangan Diseminasi HAM	120.222.000	110.064.150	91,55	3 laporan	3 laporan	100

4.	Bahan dan Metodologi Diseminasi HAM	156.424.000	147.122.635	94,05	4 bahan	4 bahan	100
JUMLAH		2.100.000.000	1.899.810.544	90,47			100

- a. Rincian pelaksanaan Diseminasi HAM dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan Diseminasi HAM dapat mencapai 49 target fisik kegiatan, Rekapitulasi pencapaian fisik berdasarkan rincian pelaksanaan kegiatan :

NO	SUB KOMPONEN	FISIK		
		TARGET	CAPAIAN	% BOBOT FISIK
1.	Diseminasi HAM	49	49	100

Dengan demikian capaian fisik pelaksanaan Diseminasi HAM mencapai 100,00%.

- b. Rincian pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Penyuluh HAM dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan Bimbingan Penyuluhan HAM dapat mencapai 5 target fisik kegiatan, Rekapitulasi pencapaian fisik berdasarkan rincian pelaksanaan kegiatan :

NO	SUB KOMPONEN	FISIK		
		TARGET	CAPAIAN	% BOBOT FISIK
1.	Penyuluh HAM	5 keg	5 keg	100

Dengan demikian capaian fisik pelaksanaan Penyuluh HAM mencapai 100,00%.

- c. Rincian pelaksanaan Evaluasi dan Pengembangan Diseminasi HAM dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan Evaluasi dan Pengembangan Diseminasi HAM telah mencapai 16 target fisik proses kegiatan, dengan rincian : telah melaksanakan kegiatan evaluasi pelaksanaan diseminasi HAM dan pelaksanaan bimbingan teknis penyuluh HAM masing-masing 1 kegiatan, melaksanakan rapat koordinasi evaluasi 1 kegiatan dan sudah menyelesaikan 1 dokumen penyusunan instrumen evaluasi. Rekapitulasi pencapaian fisik berdasarkan rincian pelaksanaan kegiatan :

NO	SUB KOMPONEN	FISIK		
		TARGET	CAPAIAN	% BOBOT FISIK
1.	Penyusunan Instrumen Evaluasi	1	1	100
2.	Evaluasi Pelaksanaan Diseminasi HAM	4	4	100
3.	Evaluasi Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penyuluh HAM	4	4	100
4.	Rapat Koordinasi Evaluasi	1	1	100
5.	Rapat Koordinasi Pengembangan Diseminasi HAM	6	6	100

Dengan demikian capaian fisik pelaksanaan Evaluasi dan Pengembangan Diseminasi HAM mencapai 100,00%.

- d. Rincian pelaksanaan Bahan dan Metodologi Diseminasi HAM dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan Bahan dan Metodologi Diseminasi HAM mencapai 18 target fisik proses kegiatan, telah melaksanakan sebanyak 15 proses kegiatan

Penyusunan Bahan dan Metodologi Diseminasi HAM antara jauari s.d Juni 2013, dan menyelesaikan workshop bahan diseminasi HAM di daerah 2 kegiatan dan 1 kegiatan workshop metodologi Diseminasi HAM. Rekapitulasi pencapaian fisik berdasarkan rincian pelaksanaan kegiatan :

NO	SUB KOMPONEN	FISIK		
		TARGET	CAPAIAN	% BOBOT FISIK
1.	Penyusunan Bahan dan Metodologi Diseminasi HAM	15	15	100
2.	Workshop Bahan Diseminasi HAM di Daerah	2	2	100
3.	Workshop Metodologi Diseminasi HAM	1	1	100

Dengan demikian capaian fisik pelaksanaan Bahan dan Metodologi Diseminasi HAM mencapai 100,00%.

6. Direktorat Penguatan HAM

Rincian pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Penguatan HAM sampai dengan akhir tahun anggaran 2013 adalah realisasi penyerapan anggaran sebesar 90,03%, sedangkan realisasi fisik mencapai 100,00%, yang tergambar dalam matrik sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	KEUANGAN			FISIK		
		DIPA	REALISASI	%	TARGET	CAPAIAN	% BOBOT FISIK
1.	Penyusunan Bahan Ajar HAM dan pelatihan HAM bagi fasilitator	509.970.000	449.211.175	88,09	5 bahan ajar	5 bahan ajar	100
2.	Melaksanakan Pelatihan HAM bagi Panitia RANHAM Kab/Kota Wilayah I	775.350.000	688.909.100	88,85	4 keg	4 keg	100
3.	Melaksanakan Pelatihan HAM bagi Panitia RANHAM Kab/Kota Wilayah II	632.255.000	590.612.500	93,41	4 keg	4 keg	100
4.	Melaksanakan Pelatihan HAM bagi Panitia RANHAM Kab/Kota Wilayah III	832.425.000	747.204.025	89,76	4 keg	4 keg	100
	JUMLAH	2.750.000.000	2.475.936.800	90,03			100

a. Rincian pelaksanaan Penyusunan Bahan Ajar HAM dan pelatihan HAM bagi fasilitator dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan Penyusunan Bahan Ajar HAM dan pelatihan HAM bagi fasilitator dapat mencapai 18 target fisik proses kegiatan, telah melaksanakan sebanyak 4 kegiatan FGD, 4 kegiatan Workshop dan 4 kegiatan Penyusunan Bahan masing-masing : untuk Modul Pelatihan HAM bagi Satpol PP, Bahan Ajar Pelatihan HAM Bagi Guru dan Bahan Ajar Pelatihan HAM untuk Tenaga Kesehatan, serta panduan HAM Bagi TKI. Telah selesai melaksanakan Penyelenggaraan Pelatihan HAM bagi Pelatih HAM serta Pembentukan Jaringan Alumni Pelatihan HAM. Rekapitulasi pencapaian fisik berdasarkan rincian pelaksanaan kegiatan :

NO	SUB KOMPONEN	FISIK		
		TARGET	CAPAIAN	% BOBOT FISIK
1	FGD Modul Pelatihan HAM Bagi Satpol PP (Prov.Sulsel)	1	1	100

2	Penyusunan Modul Pelatihan HAM Bagi Satpol PP	1	1	100
3	Workshop Modul Pelatihan HAM Bagi Satpol PP	1	1	100
4	FGD Bahan Ajar Pelatihan HAM Bagi Guru (Prov. Diy)	1	1	100
5	Penyusunan Bahan Ajar Pelatihan Bagi Guru	1	1	100
6	Workshop Bahan Ajar Pelatihan HAM Bagi Guru	1	1	100
7	FGD Bahan Ajar Pelatihan HAM Bagi Tenaga Kesehatan (Prov. Sumut)	1	1	100
8	Penyusunan Bahan Ajar Pelatihan Bagi Tenaga Kesehatan	1	1	100
9	Workshop Bahan Ajar Pelatihan HAM Bagi Tenaga Kesehatan	1	1	100
10	FGD Panduan HAM Bagi TKI (Prov. NTB)	1	1	100
11	Penyusunan Panduan HAM Bagi TKI	1	1	100
12	Workshop Panduan HAM Bagi TKI	1	1	100
13	Persiapan Pelatihan HAM Bagi Pelatih HAM/Fasilitator	1	1	100
14	Penyelenggaraan Pelatihan HAM Bagi Pelatih HAM/ Fasilitator	1	1	100
15	Pelaporan Pelatihan HAM Bagi Pelatih HAM/Fasilitator	1	1	100
16	Persiapan Rapat Koordinasi Pembentukan Jaringan Alumni	1	1	100
17	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pembentukan Jaringan Alumni	1	1	100
18	Pelaporan Rapat Koordinasi Pembentukan Jaringan Alumni	1	1	100

Dengan demikian capaian fisik pelaksanaan Penyusunan Bahan Ajar HAM dan pelatihan HAM bagi fasilitator mencapai 100,00%.

- b. Rincian pelaksanaan Pelatihan HAM bagi Panitia RANHAM Kab/Kota Wilayah I dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan Pelatihan HAM bagi Panitia RANHAM Kab/Kota Wilayah I sudah mencapai 8 target fisik kegiatan, dengan rincian telah melaksanakan 4 kegiatan pra pelatihan dan 4 kegiatan penguatan HAM pada 4 Provinsi. Rekapitulasi pencapaian fisik berdasarkan rincian pelaksanaan kegiatan

NO	SUB KOMPONEN	FISIK		
		TARGET	CAPAIAN	% BOBOT FISIK
1	Penguatan HAM Bagi PANRANHAM Kab/Kota Provinsi Jawa Timur	2	2	100
2	Penguatan HAM Bagi PANRANHAM Kab/Kota Provinsi Bali	2	2	100
3	Penguatan HAM Bagi PANRANHAM Kab/Kota Provinsi Papua Barat	2	2	100
4	Penguatan HAM Bagi PANRANHAM Kab/Kota Provinsi Sumatera Barat	2	2	100

Dengan demikian capaian fisik pelaksanaan Pelatihan HAM bagi Panitia RANHAM Kab/Kota Wilayah I sudah mencapai 100,00%.

- c. Rincian pelaksanaan Pelatihan HAM bagi Panitia RANHAM Kab/Kota Wilayah II dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan Pelatihan HAM bagi Panitia RANHAM Kab/Kota Wilayah II sudah mencapai 8 target fisik kegiatan, telah melaksanakan sebanyak 4 kegiatan pra pealtihan dan 4 kegiatan penguatan HAM pada 4 Provinsi. Rekapitulasi pencapaian fisik berdasarkan rincian pelaksanaan kegiatan

NO	SUB KOMPONEN	FISIK		
		TARGET	CAPAIAN	% BOBOT FISIK
1	Penguatan HAM Bagi PANRANHAM Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah	2	2	100
2	Penguatan HAM Bagi PANRANHAM Kab/Kota Provinsi Aceh	2	2	100
3	Penguatan HAM Bagi PANRANHAM Kab/Kota Provinsi Lampung	2	2	100
4	Penguatan HAM Bagi PANRANHAM Kab/Kota Provinsi DKI Jakarta	2	2	100

Dengan demikian capaian fisik pelaksanaan Pelatihan HAM bagi Panitia RANHAM Kab/Kota Wilayah II sudah mencapai 100,00%.

- d. Rincian pelaksanaan Pelatihan HAM bagi Panitia RANHAM Kab/Kota Wilayah III dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan Pelatihan HAM bagi Panitia RANHAM Kab/Kota Wilayah III sudah mencapai 8 target fisik kegiatan, telah

melaksanakan sebanyak 4 kegiatan pra pealtihan dan 4 kegiatan penguatan HAM pada 3 Provinsi, karena penyelenggaraan Kegiatan Penguatan HAM bagi Kadiv Seluruh Indonesia dilaksanakan di Provinsi Jawa Barat. Rekapitulasi pencapaian fisik berdasarkan rincian pelaksanaan kegiatan :

NO	SUB KOMPONEN	FISIK		
		TARGET	CAPAIAN	% BOBOT FISIK
1	Penguatan HAM Bagi PANRANHAM Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah	2	2	100
2	Penguatan HAM Bagi PANRANHAM Kab/Kota Provinsi Aceh	2	2	100
3	Penguatan HAM Bagi PANRANHAM Kab/Kota Provinsi Lampung	2	2	100
4	Penguatan HAM Bagi Kadiv Yankumham seluruh Indonesia di Provinsi Jawa Barat	2	2	100

Dengan demikian capaian fisik pelaksanaan Pelatihan HAM bagi Panitia RANHAM Kab/Kota Wilayah III sudah mencapai 100,00%.

H. Bidang Pengawasan

1. Inspektorat Wilayah I

Capaian kegiatan pada Inspektur Wilayah I Tahun 2013 adalah sebagai berikut :

Pada Tahun 2013 melakukan beberapa kegiatan, berikut perinciannya:

- a) Pengawasan Audit Kinerja Pada Inspektorat Wilayah I Periode Januari s.d Desember 2013 sebanyak 71 (tujuh puluh satu) Unit Pelaksana Teknis
 - b) Pengawasan Audit Khusus pada Inspektorat Wilayah I Periode Januari s.d Desember 2013 terdapat 5 (lima) kegiatan
 - c) Kegiatan penanganan surat tanggapan selesai dan pengaduan Pada Inspektorat Wilayah I Periode Januari s.d Mei 2013 terdapat 3 (tiga) tanggapan pengaduan
- Capaian Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama tahun 2013 yang memuat realisasi dan persentase capaian kinerja atas target yang diperjanjikan tahun 2013. Capaian Kinerja Inspektorat Jenderal dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :

Sasaran Strategis			
Peningkatan Kualitas Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1. Persentase unit kerja yang berhasil mencapai standard pelayanan dan target kinerja yang ditetapkan	50%	72,22%	144,44%
2. Persentase unit kerja yang menyelenggarakan akuntabilitas keuangan sesuai standard untuk mendapatkan Opini BPK yang WTP	85%	100%	117,65%

3. Persentase unit kerja yang menyelenggarakan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai ketentuan	50%	100%	200%
4. Jumlah unit kerja yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal kategori 'B'	18 unit kerja	11 unit kerja	61,11%

Penyebab belum tercapainya target tersebut adalah berkaitan dengan penilaian unit kerja dengan akuntabilitas kinerja minimal B, baru dilakukan penilaian pada 11 unit eselon I, belum dilakukan penilaian pada tingkat Kantor Wilayah.

Beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja antara lain :

- a) Anggaran Pengawasan Inspektorat Jenderal Tahun 2013 sebesar Rp.29.744.554.000,-. Hal ini dirasa kurang mencukupi dalam melakukan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
- b) Unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang dilakukan pengawasan berjumlah 779 unit kerja, dan tersebar di 11 unit eselon I serta 33 Kantor Wilayah.
- c) Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan tugas pengawasan internal di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM terhadap 779 unit kerja, didukung dengan Sumber Daya Manusia Jabatan Fungsional Auditor sebanyak 98 (Sembilan puluh delapan).

Berdasarkan atas penyebab, kendala dan hambatan diatas, diusulkan untuk dapat dilakukan perbaikan pada periode mendatang diantaranya lebih dikuatkan Sistem Pengendalian Intern dan komitmen bersama dalam meningkatkan kinerja serta perlu adanya revisi target maupun indikator kinerja yang dituangkan dalam Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. Untuk menunjang pengawasan internal dan berdasarkan analisa perhitungan formasi Jabatan Fungsional Auditor, masih memerlukan 43 (empat puluh tiga) Jabatan Fungsional Auditor.

Pengelompokan temuan audit kinerja tahun 2013 sebagai berikut :

No	Sub Kelompok Temuan	Jumlah	%
I.	Temuan Ketidapatuhan Terhadap Peraturan		
1	Kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah	146	17,63

2	Potensi kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah	19	2,29
3	Kekurangan penerimaan negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah	41	4,95
4	Administrasi	622	75,12
5	Indikasi tindak pidana	0	
	SUB TOTAL	828	
II. Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern			
1	Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan	566	39,11
2	Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja	216	14,93
3	Kelemahan struktur pengendalian intern	665	45,96
	SUB TOTAL	1447	
III. Temuan 3 E			
1	Ketidakhematan/pemborosan/ketidakekonomisan	4	2,28
2	Ketidakefisienan	1	0,57
3	Ketidakefektifan	170	97,14
	SUB TOTAL	175	
	JUMLAH TOTAL	2.450	

Indikator keberhasilan sasaran berikut target dan realisasinya sebagai berikut:

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah unit kerja yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal kategori 'B'	18 unit kerja	11 unit kerja	61,11%

Indikator "Jumlah unit kerja yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal kategori 'B' Indikator ini mengukur hasil evaluasi dan penilaian atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (LAKIP) pada unit eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan target 18 unit kerja".

Realisasi sebesar 11 unit kerja dihitung dengan formulasi *jumlah unit kerja yang nilai akuntabilitasnya "B"*. Capaian yang dihasilkan adalah sebesar 61,11% dari target.

Berdasarkan Laporan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pusat Tahun 2012 dan 2013 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Hukum dan HAM mendapat **nilai "B"**.

Untuk meningkatkan dan memperbaiki kelemahan dalam meningkatkan akuntabilitas dalam tahun 2014 Inspektorat akan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- Mendorong seluruh unit eselon I untuk segera menyusun renstra yang sesuai dengan renstra Kementerian Hukum dan HAM yang telah disempurnakan.
- Melakukan bimbingan dan pembinaan penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja,
- Melakukan bimbingan dan pembinaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di unit kerja terutama dalam penyusunan Penetapan Kinerja dan rencana kegiatan dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

2. Inspektorat Wilayah II

Inspektorat Wilayah II pada Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Berdiri sejak bulan Januari 2011, yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan;
- b) Pelaksanaan pengawasan intern melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya;
- c) Pelaksanaan urusan administrasi Inspektorat Jenderal;
- d) Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- e) Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan intern, pengawasan ekstern dan atau instansi penegak hukum terkait.

Sebagai upaya memaksimalkan peranan Inspektorat Wilayah II selain melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, juga melakukan kegiatan terhadap evaluasi LAKIP, evaluasi PMPRB, Reuiu Laporan Keuangan, melakukan Audit dengan tujuan tertentu (Audit Khusus) serta melakukan Pembinaan/Pendampingan dan Pemeriksaan Audit Kinerja dilingkungan Unit Eselon I dan Kantor Wilayah, yaitu pada :

- a) Badan Penelitian dan Pengembangan HAM.
- b) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat.
- c) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara
- d) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat

- e) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah
- f) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau.
- g) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku.
- h) Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan.

- STRUKTUR DAN PETA JABATAN INSPEKTORAT WILAYAH II

▪ Jabatan Struktural :

- Eselon II : Inspektur 1 (satu) Orang
- Eselon IV : Kasub Tata Usaha 1 (satu) Orang
- JFU Staff Tata Usaha 1 (satu) Orang

▪ Jabatan Fungsional Auditor

- Auditor Ahli Madya 3 (tiga) Orang
- Auditor Muda 3 (tiga) Orang
- Auditor Ahli Pertama 8 (delapan) Orang
- Auditor Penyelia 2 (satu) Orang
- Auditor Pelaksana 1 (satu) Orang.

Jumlah Personil keseluruhan : 20 (dua puluh) Orang

- Wilayah Kerja dan Jumlah Obyek Pemeriksaan

No	Eselon I /Propinsi	UPT				JUMLAH
		KANWIL	IMI	PAS	BHP	
1	Balitbang HAM	-	-	-	-	1
2	Pusjianbang	-	-	-	-	1
3	Riau	1	8	18	-	27
4	Jawa Barat	1	8	36	-	45
5	Kalimantan Tengah	1	2	13	-	16
6	NTB	1	2	12	-	15
7	Sulawesi Tenggara	1	1	9	-	11
8	Maluku	1	2	15	-	18
TOTAL						134

- Pelaksanaan Kegiatan Audit :

- Audit sesuai PKPT periode Januari s/d Desember 2013, terdiri dari:
 - Audit pengelolaan Keuangan : 2 Kanwil, dan 11 UPT
 - Audit Kinerja :36 UPT
 - Audit Barang dan Jasa : 3 Kanwil, dan 3 UPT
 - Audit Kinerja dengan fokus PNBK : 18 UPT
 - Audit Kinerja dan Pemantauan Tindak Lanjut BPK : 6 UPT

Total : 79 Obrik Pemeriksaan atau 58,95% dari jumlah keseluruhan Obrik (134 Obrik) Rincian pelaksanaan audit berdasarkan PKPT Tahun 2013:

BULAN	WILAYAH AUDITAN	JENIS AUDIT
JANUARI	RIAU (1 Kanwil)	AUDIT PENGELOLAAN KEUANGAN
	JAWA BARAT (1 Kanwil)	AUDIT PENGELOLAAN KEUANGAN
FEBRUARI	JAWA BARAT (6 UPT)	AUDIT KINERJA
MARET	NUSA TENGGARA BARAT (6 UPT)	AUDIT KINERJA
APRIL	RIAU (6 UPT)	AUDIT KINERJA
MEI	MALUKU (6 UPT)	AUDIT KINERJA
JUNI	RIAU (1 Kanwil, 1 UPR))	AUDIT PENGADAAN BARANG DAN JASA
	NUSA TENGGARA BARAT (1 Kanwil, 1 UPT)	AUDIT PENGADAAN BARANG DAN JASA
	SULAWESI TENGGARA (1 Kanwil, 1 UPT)	AUDIT PENGADAAN BARANG DAN JASA
JULI	JAWA BARAT (6 UPT)	AUDIT KINERJA DG FOKUS PNBP
AGUSTUS	RIAU (2 UPT)	AUDIT KINERJA DG FOKUS PNBP
	NUSA TENGGARA BARAT (2 UPT)	AUDIT KINERJA DG FOKUS PNBP
	KALIMANTAN TENGAH (2 UPT)	AUDIT KINERJA DG FOKUS PNBP
SEPTEMBER	MALUKU (6 UPT)	AUDIT KINERJA DAN PEMANTAUAN TL BPK
OKTOBER	RIAU (6 UPT)	AUDIT KINERJA DG FOKUS PNBP
NOPEMBER	JAWA BARAT (6 UPT)	AUDIT KINERJA
DESEMBER	KALIMANTAN TENGAH (6 UPT)	AUDIT KINERJA

- Audit non PKPT , berupa Kegiatan Reviu, Evaluasi dan Kegiatan Pengawasan Lainnya Tahun 2013, adalah sebagai berikut :
 - Reviu Laporan Keuangan:
 - ✓ Semester II 2012bulan Januari 2013 di Solo
 - ✓ Semester I 2013 bulan Juli 2013 di Batam
 - Reviu RKA K/L Unit eselon I dan seluruh Kantor Wilayah;
 - Evaluasi LAKIP;
 - Sosialisasi PMPRB;
 - Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK, BPKP dan Itjen;
 - Pendampingan:
- BPKP pada Kanim Batam
- BPK pada LP dan RUTAN se-DKI Jakarta;
 - Tim Verifikasi Rencana Pembangunan Lapas dan Rutan Tahun 2014 di Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Riau, Kalimantan Tengah.
 - Tim Penilaian Kantor Wilayah
 - Evaluasi WBK dan WBBM pada Kanim Kelas I Bandung dan Lapas Kelas IIA Ambon;

- Program Penandatanganan PPG dan Sosialisasi Permen Nomor 24 Tahun 2013, yang semula direncanakan pelaksanaannya pada Kanwil Jawa Barat, Riau, NTB, Maluku, Sulawesi Tenggara, namun Maluku dan Sulawesi Tenggara dibatalkan pelaksanaannya.
- Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Penerimaan CPNS;
- Sidak Absensi sebelum dan setelah hari raya Idul Fitri;
- Audit Khusus 7 kasus.

3. Inspektorat Wilayah III

Laporan Pertanggungjawaban Inspektorat Wilayah III ini disusun berdasarkan kinerja Inspektorat Wilayah III pada Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan data ini terhimpun dari rekap hasil dari Inspektorat Wilayah III selama kurun waktu dua belas bulan yang terhitung dari bulan Januari sampai dengan Desember 2012 dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.55-UM.06.05 Tahun 2003 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Kegiatan pengawasan yang telah dilakukan pada Inspektorat Wilayah III adalah sebagai berikut :

Kegiatan Pendampingan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) terdiri dari 4 (empat) UPT;

- a) Tindak Lanjut Temuan Inspektorat Jenderal, BPK dan BPKP terdiri yang meliputi 2 (dua) Kantor Wilayah;
- b) Penanganan Pengaduan Masyarakat, terdiri dari 17 (tujuh belas) pengaduan yang telah ditindaklanjuti;
- c) Audit Pengelolaan Keuangan, terdiri dari 28 (dua puluh delapan) UPT;
- d) Audit Pengadaan Barang dan Jasa (Probit Audit), terdiri dari 4 (empat) UPT;
- e) Audit Pengelolaan PNBK, terdiri dari 3 (tiga) UPT;
- f) Reviu Laporan Keuangan dan Reviu RKA-K/L
- g) Pendampingan, Penilaian dan Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMRB), terdiri dari 16 (enam belas) UPT;
- h) Evaluasi AKIP Kementerian
- i) Evaluasi AKIP Eselon I
- j) Audit kinerja, dengan 60 (enam puluh) UPT

4. Inspektorat Wilayah IV

Unit Kerja dan cakupan wilayah yang menjadi objek pengawasan pada Inspektorat Wilayah IV, meliputi 2 (dua) unit eselon 1 serta 5 (lima) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI

a) Kegiatan Pengawasan Inspektorat Wilayah IV

PELAKSANAAN PEMERIKSAAN / AUDIT RUTIN TAHUN 2013			
INSPEKTORAT WILAYAH IV			
NO	BULAN	PROPINSI PEMERIKSAAN	JENIS AUDIT
1	JANUARI	Kanwil Bangka Belitung Kanwil Bali	Audit Pengelolaan Keuangan Reviu Laporan Keuangan
2	FEBRUARI	Jawa Tengah	Audit Kinerja
3	MARET	Jawa Tengah	Audit Kinerja
4	APRIL	Kalimantan Timur	Audit Kinerja
5	MEI	Jawa Tengah	Audit Kinerja
6	JUNI	Bali	Audit PNPB dan Barjas
7	JULI	Jawa Tengah	Audit Kinerja
8	AGUSTUS	Kalimantan Timur & Sulawesi Barat	Audit Keuangan
9	SEPTEMBER	Jawa Tengah	Audit Kinerja
10	OKTOBER	Bangka Belitung	Audit Keuangan
11	NOPEMBER	Unit Eselon I Sekretariat Jenderal (SETJEN)	Audit Keuangan
12	DESEMBER	Jawa Tengah	Audit Kinerja

Wilayah IV telah melaksanakan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2013, Reviu Laporan Keuangan, Evaluasi Akip dan Pembinaan Pengawasan Luar Negeri serta Total biaya keseluruhan yang dibutuhkan, sebagai berikut :

Sasaran	Indikator Kinerja	Rencana		Realisasi		Capaian	
		Satker	Anggaran (Rp)	Satker	Anggaran	Satker	Anggaran
Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima	Persentase unit kerja Inspektorat Wilayah IV yang berhasil mencapai standar pelayanan dan target kinerja yang ditetapkan.	74 unit Kerja	1,276,522,000.00	67 unit kerja		89,33 %	

dan mencapai target kinerja dengan administrasi yang akuntabel	Persentase unit kerja Inspektorat Wilayah IV yang menyelenggarakan akuntabilitas keuangan sesuai standar untuk mendapatkan Opini WTP dari BPK.	6 unit Kerja	311,218,000.00	6 unit kerja	311,218,000.00	100%	
	Persentase unit kerja wilayah IV yang menyelenggarakan pelaksanaan Reformasi birokrasi sesuai ketentuan.	2 unit Kerja	4,160,000,-	2 unit kerja	4,160,000,-	100%	
	Jumlah Unit kerja Wilayah IV yang mendapat nilai akuntabilitas minimal kategori "B".	1 unit Kerja	39,500,000,-	1 unit kerja	39,500,000,-	100%	
	Persentase pengaduan dan kasus yang dituntaskan secara tepat waktu pada unit kerja Inspektorat Wilayah IV.	25	--	7		28%	

b) Realisasi Kegiatan Tahun Anggaran 2013

Inspektorat Wilayah IV pada Tahun anggaran 2013 telah melakukan Program Kegiatan Pemeriksaan Tahunan pada 67 satuan kerja atau 89,33% dari 122 unit kerja yang terbagi menjadi :

No.	Eselon I/ Kanwil	Satuan Kerja (SATKER)						Jumlah
		Eselon I	BHP	Kanwil	LAPAS/ Rutan/ /Bapas	Kanim /Rudenim	Rupbasan	
1	Setjen	2	-	-	-	-	-	2
2	BPHN	1	-	-	-	-	-	1
3	Bangka	-	-	2	3	1	1	7

	Belitung							
4	Jawa Tengah	-	1	-	32	3	-	36
5	Bali	-	-	3	1	3	-	7
6	Kalimantan Timur	-	-	1	5	5	-	11
7	Sulawesi Barat	-	-	1	1	1	-	3

3) Audit Khusus (Investigasi)

Inspektorat Wilayah IV telah melakukan Audit Khusus (Investigasi) dari Bulan Januari s.d Desember 2013, sebagai berikut :

NO	NAMA UNIT / WILAYAH	JUMLAH	KET.
1	Sekretariat Jenderal (Setjen)	4	Tuntas
2	Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)	1	Tuntas
3	Bangka Belitung	0	Tuntas
4	Jawa Tengah	1	Tuntas
5	Bali	1	Tuntas
6	Kalimantan Timur	0	--
7	Sulawesi Barat	0	--

5. KEGIATAN REVIU LAPORAN KEUANGAN

Kegiatan reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM RI, Semester 1 (satu) Tahun Anggaran 2013 yang dilaksanakan pada tanggal 15 – 18 juli 2013 (tabel 3).

6. KEGIATAN EVALUASI AKIP

Kegiatan Evaluasi SAKIP dan Evaluasi Kementerian Hukum dan HAM RI pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2013 bertempat di Hotel Sahid Jaya, Jakarta.

7. KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI (RB)

Kegiatan Reformasi Birokrasi (RB) pada tanggal 21 – 23 Januari 2013 bertempat di Tapos, Bogor.

8. ADMINISTRASI PERSURATAN

Kegiatan administrasi persuratan pada Tahun 2013, Tata Usaha Inspektorat Wilayah IV telah menerima surat sebanyak **507** yang terdiri dari :

Surat Tanggapan/	Surat Undangan	Surat Umum Lainnya
------------------	----------------	--------------------

	Telaahan		
Jumlah	61	48	398

SURAT UNDANGAN

NO	ASAL SURAT	JUMLAH
INTERNAL		
1.	INSPEKTORAT JENDERAL (ITJEN)	14
2.	SEKRETARIAT JENDERAL (SETJEN)	21
3.	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL (BPHN)	2
4.	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (ITJEN)	1
5.	DITJEN HAM	1
6.	DITJEN IMIGRASI	1
TOTAL		40
EKSTERNAL		
1.	KEMENTERIAN KEUANGAN	3
2.	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)	1
3.	LAIN –LAIN	4
TOTAL		8

TANGGAPAN / TELAAHAN

Surat Telaahan/Tanggapan yang telah diperiksa dan ditanggapi dari Bulan Januari s/d Desember 2013, yaitu :

NO.	UNIT / KANWIL	JUMLAH
1	SEKRETARIAT JENDERAL	11
2	BPHN	1
3	JAWA TENGAH	22
4	KALIMANTAN TIMUR	15
5	BALI	7
6	SULAWESI BARAT	1
7	BANGKA BELITUNG	4

Inspektorat Wilayah IV pada Tahun Anggaran 2013 telah

melakukan Program Kegiatan Pemeriksaan Tahunan pada 67 satuan kerja atau 89,33% dari 122 unit kerja yang terbagi menjadi :

No.	Eselon I/	Satuan Kerja (SATKER)	Jumlah
-----	-----------	-----------------------	--------

	Kanwil	Eselon I	BHP	Kanwil	LAPAS/ Rutan/ /Bapas	Kanim /Rudenim	Rupbasan	
1	Setjen	2	-	-	-	-	-	2
2	BPHN	1	-	-	-	-	-	1
3	Bangka Belitung	-	-	2	3	1	1	7
4	Jawa Tengah	-	1	-	32	3	-	36
5	Bali	-	-	3	1	3	-	7
6	Kalimant an Timur	-	-	1	5	5	-	11
7	Sulawesi Barat	-	-	1	1	1	-	3
Jumlah		3	1	7	42	13	1	67

Pengukuran tingkat capaian kinerja Inspektorat Wilayah IV dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Inspektorat Jenderal dengan realisasinya, sebagai berikut :

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerja dengan administrasi yang akuntabel dan terdistribusi merata	Persentase unit kerja Inspektorat Wilayah IV yang berhasil mencapai standar pelayanan dan target kinerja yang ditetapkan.	72	67	93,05%
	Persentase unit kerja Inspektorat Wilayah IV yang menyelenggarakan akuntabilitas keuangan sesuai standar untuk mendapatkan Opini WTP dari BPK.	6	6	100%
	Persentase unit kerja wilayah IV yang menyelenggarakan pelaksanaan Reformasi birokrasi sesuai ketentuan.	2	2	100%
	Jumlah Unit kerja Wilayah IV yang mendapat nilai akuntabilitas minimal kategori "B".	1	1	100%
	Persentase pengaduan dan kasus yang dituntaskan secara tepat waktu pada unit kerja Inspektorat Wilayah IV.	25	7	28%

analisa data dan realisasi di lapangan berdasarkan capaian indikator kinerja, sebagai berikut :

9. INDIKATOR KINERJA UTAMA UNIT KERJA YANG BERHASIL MENCAPAI STANDAR PELAYANAN DAN TARGET YANG DITETAPKAN (WBK) DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT WILAYAH IV

NO	PROGRAM AKSI	REALISASI JUMLAH
----	--------------	------------------

		SATKER
1.	PENGUATAN/ PELAKSANAAN EVALUASI AKIP KEMENKUMHAM	67
2.	PENGUATAN SATUAN KERJA MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK)	6
3.	PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SESUAI KETENTUAN	2
4.	PERCEPATAN TINDAK LANJUT TEMUAN ITJEN, BPK dan BPKP	1
5.	PENANGANAN LAPORAN PENGADUAN DI LINGKUNGAN KEMENKUMHAM	7

10. INDIKATOR KINERJA UTAMA UNIT KERJA YANG MENYELENGGARAKAN AKUNTABILITAS KEUANGAN SESUAI STANDAR (OPINI WTP) DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT WILAYAH IV

NO	PROGRAM AKSI	REALISASI JUMLAH SATKER
1.	AUDIT PENGELOLAAN KEUANGAN	15
2.	AUDIT PENGADAAN BARJAS (<i>PROBITY AUDIT</i>)	4
3.	AUDIT PENGELOLAAN PNPB	5
4.	REVIU LAPORAN KEUANGAN	2
5.	REVIU RKA-KL	2

11. INDIKATOR KINERJA UTAMA UNIT KERJA YANG MENYELENGGARAKAN REFORMASI BIROKRASI SESUAI KETENTUAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT WILAYAH IV

NO	PROGRAM AKSI	REALISASI JUMLAH SATKER
1.	PELAKSANAAN PENILAIAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KEMENKUMHAM	2

12. INDIKATOR KINERJA UTAMA UNIT KERJA YANG MENDAPAT NILAI AKUNTABILITAS KINERJA MINIMAL KATEGORI "B" DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT WILAYAH IV

NO	PROGRAM AKSI	REALISASI JUMLAH SATKER
1	PELAKSANAAN PENGUATAN EVALUASI AKIP KEMENKUMHAM	1

5. Inspektorat Wilayah V

Inspektorat Wilayah V pada Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, telah membuat Rencana Kerja Audit

berbasis Kinerja Tahunan pada Bulan Januari sampai dengan Desember 2013, Reviu Laporan Keuangan, Evaluasi LAKIP, Pembinaan Pengawasan Luar Negeri dengan realisasi kegiatan Audit Kinerja yang dilaksanakan Inspektorat Wilayah V selama kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2013 sebanyak 69 (enam puluh sembilan) UPT.

Surat Telaahan/Tanggapan yang telah diperiksa dan ditanggapi dari Januari sampai dengan Desember 2013, yaitu :

NO.	KANWIL	PERIODE JAN-DES	SUDAH DITANGGAPI	BELUM DITANGGAPI	TOTAL
1	SUMATERA UTARA	79	43	5	79
2	SUMATERA SELATAN	35	31	4	35
3	D.I YOGYAKARTA	12	12	-	12
4	NUSA TENGGARA TIMUR	23	12	11	23
5	MALUKU UTARA	6	4	2	6
6	DITJEN HKI	23	13	10	23
7	DITJEN PP	6	6	-	-
GRAND TOTAL		184	121	63	184

Jumlah Surat Masuk dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2013 terdiri dari :

NO	BULAN	WILAYAH							JUMLAH
		SUMATERA UTARA	SUMATERA SELATAN	DIY	NTT	MALUKU UTARA	DITJEN PP	DITJEN HKI	
1	JANUARI	101	62	44	101	32	11	21	372
2	FEBRUARI	83	51	54	62	8	4	29	291
3	MARET	67	48	23	58	8	1	37	242
4	APRIL	92	35	33	48	17	2	19	246
5	MEI	66	35	21	44	13	2	28	209
6	JUNI	88	38	15	54	29	5	41	270
7	JULI	77	33	29	60	11	1	34	245
8	AGUSTUS	47	30	23	31	11	1	7	150
9	SEPTEMBER	47	32	29	41	16	1	10	176
10	OKTOBER	63	30	13	42	26	6	6	186
11	NOPEMBER	75	42	8	64	22	1	14	226
12	DESEMBER	29	6	2	31	1	0	8	77
TOTAL SURAT MASUK TAHUN 2013									2690

6. Inspektorat Wilayah VI

Tugas pokok dan fungsi Inspektorat Wilayah VI adalah melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Inspektorat Jenderal dalam mewujudkan Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM RI sesuai dengan target kinerja dengan indikator kinerja yang telah tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-01.PR.01.01 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI tahun 2010-2014.

Inspektorat Wilayah VI selaku unsur pembantu pada Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI, yaitu membantu pelaksanaan tugas Inspektur Jenderal atas petunjuk Menteri dalam hal melaksanakan persiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, dan pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya, serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri dan penyusunan laporan hasil pengawasan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Jawa Timur, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Bengkulu, Papua Barat dan unit pusat yang terdiri dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (ITJEN), Akademi Ilmu Pemasarakatan (AKIP), Akademi Imigrasi (AIM).

a. KINERJA BIDANG KETATAUSAHAAN

Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat Wilayah VI mempunyai tugas dan fungsi melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat Wilayah VI. Mulai dari surat masuk, surat keluar hingga pengarsipan. Untuk kelancaran tugas dan fungsi Inspektorat Wilayah VI dan memaksimalkan kinerja Sub Bagian Tata Usaha disusun Rencana Program Kerja untuk tahun 2013 guna memaksimalkan kinerja Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat Wilayah VI yang bertujuan untuk :

- 1) Meningkatkan Kinerja Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat Wilayah VI khususnya di bidang administrasi substantif guna lebih tertib pengadministrasian tata persuratan;
- 2) Menghasilkan data kearsipan yang cepat, tepat dan akurat guna pengefisienan waktu dalam mencari berkas;
- 3) Menghasilkan nomor surat yang teratur sesuai dengan pola klarifikasi arsip Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2006.

4) Rekapitulasi Surat Masuk dan Keluar serta Tanggapan/Telaahaan Pada Inspektorat Wilayah VI Periode 01 Januari 2013 s/d Desember 2013 adalah:

a) Surat – surat buril yang diterima pada bagian Sub Tata Usaha Inspektorat wilayah VI sejumlah 4.111 (empat ribu seratus sebelas) Surat, yang terdiri dari :

- Bengkulu berjumlah 670 (enam ratus tujuh puluh)
- Sulawesi Tengah berjumlah 143 (seratus empat puluh tiga)
- Lampung berjumlah 429 (empat ratus dua puluh sembilan)
- Jawa Timur berjumlah 640 (enam ratus empat puluh)
- Gorontalo berjumlah 271 (dua ratus tujuh puluh satu)
- Administrasi Hukum Umum berjumlah 192 (seratus Sembilan puluh dua)
- ITJEN berjumlah 1766 (seribu tujuh ratus enam puluh enam)
- AKIP berjumlah 0 (nol)
- AIM berjumlah 0 (nol)

b) Berkas-berkas yang berdisposisi berupa tanggapan atau telaahan yang diterima sejumlah 97 (sembilan puluh tujuh) berkas dan pengaduan sejumlah 46 (empat puluh enam) berkas, dengan rincian surat yang telah ditanggapi dan di telaah oleh para auditor sejumlah 85 (delapan puluh lima) dan yang belum ditanggapi oleh para auditor untuk tanggapan dan telaahan berjumlah 12 (dua belas) surat yang bersifat pengaduan yang telah ditanggapi berjumlah 32 (tiga puluh dua) berkas dan berkas dan surat yang bersifat pengaduan yang belum ditanggapi berjumlah 14 (empat belas) berkas.

I. Bidang Pembinaan Hukum Nasional

Realisasi Capaian Kinerja Badan Pembinaan Hukum Nasional dapat dilihat secara rinci, sebagai berikut :

Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Teknis, Perencanaan Pembangunan Hukum, Analisa dan Evaluasi dan Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Perundang-Undangan Serta Kerjasama Bidang Hukum dalam rangka pembinaan dan pengembangan hukum.

a. Penyusunan PPHN

Target penyusunan PPHN pada TAPKIN tahun 2013 adalah 1 (satu) dokumen Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional (PPHN) sebagai bahan *background study* RPJMN III (2015-2019) Bidang Hukum, dengan tahapan :

- 1) Penyusunan PPHN yang berdimensi nasional
- 2) Penyusunan PPHN yang berdimensi Internasional

b. Penyusunan Prolegnas, Proleg PP dan Perpres.

Penyusunan Prolegnas dilaksanakan dengan beberapa kegiatan pendukung, yaitu :

- 1) Rapat Tim Pengarah dan Antar kementerian.
- 2) Konsinyasi Penyusunan Prolegnas di Bogor
- 3) Konsinyasi Penyusunan Prolegnas di Bogor pada tanggal 2 sd 4 Oktober 2013.
- 4) Pembahasan Tahunan Prolegnas di Bogor pada tanggal 21 sd 23 Oktober 2013.
- 5) Forum Koordinasi Penyusunan Prioritas Prolegnas dilaksanakan pada tanggal 9 sd 10 Desember 2013
- 6) Tim Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Prolegnas
- 7) Sosialisasi Penyusunan Prolegnas dengan Masyarakat.

c. Penyusunan Prolegda

5 (lima) sub kegiatan yang menunjang kegiatan penyusunan Prolegda di BPHN, yaitu :

- 1) Inventarisasi Program Legislasi Daerah , telah diperoleh data Prolegda dari 23 provinsi
- 2) Forum Komunikasi Regulasi Daerah FKRD di Yogyakarta, pada tanggal 20 sd 22 Februari 2013
- 3) Fasilitasi Teknik Penyusunan Prolegda di 4 (empat) daerah.
- 4) Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Prolegda di seluruh provinsi, telah dilakukan pengiriman kuesioner perkembangan Prolegda di 33 Prov. Sudah diterima data perkembangan Prolegda dari 23 Provinsi
- 5) Konsinyasi penyusunan prolegda di Bogor pada tanggal 14 sd 16 Nopember 2013.

d. Penyusunan Naskah Akademik.

Naskah Akademik pada tahun anggaran 2013 dilaksanakan sebanyak 11 (sebelas) Pokja, yang terdiri dari :

- 1) Pokja RUU tentang Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer.
- 2) Pokja RUU tentang Hukum Dagang.
- 3) Pokja RUU tentang Senjata Api dan Bahan Peledak.
- 4) Pokja RUU tentang Konvensi Jual Beli Barang Internasional PBB (United Nations Convention on Contracts for the International sale of Goods)
- 5) Pokja RUU tentang Pembatasan Transaksi Tunai,
- 6) Pokja RUU tentang Desain Industri,
- 7) Pokja RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman,
- 8) Pokja RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular,
- 9) Pokja RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal,
- 10) Pokja RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Pemasyarakatan.

Pokja RUU tentang Hukum kontrak (Lanjutan) Untuk kegiatan NA Tahun 2013 selain 11 (sebelas) NA yang dilaksanakan oleh BPHN ada 10 (sepuluh) kegiatan NA lainnya, yang dilaksanakan diluar BPHN, sebagai berikut :

- a) NA RUU tentang Keamanan Nuklir (Bappeten)
- b) NA RUU Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (BSN)
- c) NA RUU Pengumpulan Uang dan Barang (Kemensos)
- d) NA RUU Ratifikasi OPCAT (Kemenkumham)
- e) NA Perda tentang Pembentukan Dana Cadangan Kabupaten Meranti (Kep. Riau)
- f) NA Perda tentang Sampah (Meranti-Kab. Riau)
- g) NA Perda Sumbangan Pihak Ketiga (Dumai)
- h) NA Perda Sistem Pengelolaan Pembangunan Partisipatif Kabupaten Indragiri Hulu.
- i) NA Perda Pengelolaan BMD (Meranti - Kep. Riau)
- j) NA Jabatan Fungsional Perencana Hukum.

e. Penyusunan Analisis Dan Evaluasi

Penyusunan Analisis dan Evaluasi tahun 2013 dilaksanakan dengan membentuk 7 (tujuh) Tim Kerja :

- 1) Tim Kerja Penyusunan Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Perumahan Rakyat :

- Rapat Pokja di Jakarta, pada tanggal 25 November 2013.
 - 2) Tim Kerja Penyusunan Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Minerba di Kawasan Hutan Lindung :
 - Rapat Pokja di Jakarta, pada tanggal 21 Oktober 2013
 - 3) Tim Kerja Penyusunan Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Pajak dan Retribusi
 - Rapat Pokja di Jakarta pada tanggal 01 Agustus 2013
 - 4) Tim Kerja Penyusunan Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Kekearifan
 - Rapat Pokja di Jakarta pada tanggal 19 Juni 2013
 - 5) Tim Kerja Penyusunan Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Investasi Daerah
 - 6) Tim Kerja Penyusunan Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Yayasan :
 - Rapat Pokja AE tentang Yayasan di Jakarta pada tanggal 25 November 2013.
 - 7) Tim Kerja Penyusunan Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Ketenaganukliran
1. Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Teknis, Pengkajian dan Penelitian dan Pertemuan Ilmiah dalam rangka pengembangan Sistem Hukum Nasional.
- a. Tim Pengkajian dan Penelitian Hukum sebanyak 18 (delapan belas) tim, yaitu :
- 1) Tim Penelitian dan Pengkajian Hukum Bidang Substansi Hukum sebanyak 6 (enam) tim :
- a) Pemaparan Proposal :
- Efektifitas Pembentukan Komisi Informasi Di Daerah Berdasarkan UU KIP dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2013
 - Efektifitas Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Mendorong Iklim Yang Kondusif Bagi Investasi Di Daerah dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2013
 - Pengaruh Praktek Courtroom Television Terhadap Independensi Putusan Peradilan dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2013
- b) Pemaparan Hasil :
- Efektifitas Pembentukan Komisi Informasi Di Daerah Berdasarkan UU KIP dilaksanakan pada tanggal 29 November 2013;

- Efektifitas Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Mendorong Iklim Yang Kondusif Bagi Investasi Di Daerah dilaksanakan pada tanggal 29 November 2013;
 - Pengaruh Praktek Courtroom Television Terhadap Indepedensi Putusan Peradilan dilaksanakan pada tanggal 25 November 2013.
- c) Pelaksanaan FGD :
- Pembaharuan Hukum Agraria Dalam Memperoleh Hak Serta Akses Untuk Mendapatkan Manfaat Dari Tanah Dan Sumber Daya Alam Di Dalamnya dilaksanakan pada tanggal 4 September 2013.
- a) Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2013.
- Perlindungan Kepada Masyarakat Dalam Sengketa Lingkungan Hidup dilaksanakan pada tanggal 10 September 2013
- d) Penelitian Kelembagaan dan Penegakan Hukum sebanyak 6 (enam) tim :
- a) Pemaparan Proposal :
- Penegakkan Hukum di Daerah Konflik dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2013
 - Penegakan Hukum Di Perairan Indonesia dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2013
 - Peran Serta PPNS Kehutanan Dalam Pemberantasan Pembalakan Liar dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2013
- b) Pemaparan hasil :
- Penegakkan Hukum di Daerah Konflik dilaksanakan pada tanggal 18 November 2013
 - Penegakan Hukum Di Perairan Indonesia dilaksanakan pada tanggal 13 November 2013
 - Peran Serta PPNS Kehutanan Dalam Pemberantasan Pembalakan Liar dilaksanakan pada tanggal 18 November 2013
- c) Melaksanakan Focus Group Discussion (FGD):
- Penegakan Hukum Kejahatan Ringan dilaksanakan pada 17 Juni 2013.
 - Lembaga Penempatan Anak Sementara dilaksanakan pada 4 Juni 2013.
 - Lembaga Penyitaan Dan Pengelolaan Barang Hasil Kejahatan dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2013.

- e) Penelitian dan pengkajian Budaya Hukum sebanyak 6 (enam) tim :
- d) Pemaparan Proposal :
- Penelitian Hukum tentang Peran Masyarakat Hukum Adat Dalam Penanggulangan Pembalakan liar dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2013.
 - Efektifitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 Tentang Undian Dalam Memenuhi Keperluan Sosial dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2013.
 - Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2013.
- e) Pemaparan hasil :
- Penelitian Hukum tentang Peran Masyarakat Hukum Adat Dalam Penanggulangan Pembalakan liar dilaksanakan pada tanggal 18 November 2013.
 - Efektifitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 Tentang Undian Dalam Memenuhi Keperluan Sosial dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2013.
 - Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dilaksanakan pada tanggal 19 November 2013
- f) Focus Group Discussion (FGD):
- Peluang Peradilan Adat Dalam Menyelesaikan Sengketa Antara Masyarakat Hukum Adat Dengan Pihak Luar dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 24 Oktober 2013.
 - Perilaku Masyarakat Terhadap Hukum Berlalu Lintas dilaksanakan di Jakarta, pada tanggal 24 September 2013
 - Perilaku Koruptif Penegak Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan dilaksanakan di Jakarta, pada tanggal 29 Oktober 2013
- b. Salah satu indikator pada kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Teknis, Pengkajian dan Penelitian dan Pertemuan Ilmiah dalam rangka pengembangan Sistem Hukum Nasional adalah Jumlah fungsional peneliti hukum Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki kompetensi dan kualifikasi sesuai bidang dengan administrasi yang akuntabel, untuk mencapai target tersebut dilakukan tahapan-tahapan sbb :
- Membuat usulan para peneliti pertama dengan diikuti sertakan melalui diklat peneliti di BPSD dan instansi terkait lainnya, maka untuk tahun 2013 ditargetkan sebanyak 5 (lima) orang peneliti pertama didapat 12 (dua belas) peneliti pertama dalam lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI, yaitu :

NO	NAMA	PANGKAT/GOL. RUANG (TMT)	JABATAN/TMT	UNIT
1	Teguh Imansyah S.IP.,M.SI.	Penata Muda Tk.1-III/b 1-10-2012	Peneliti Pertama (III/a) 1-8-2013	BPHN
2	Tilawarman Sudrajat, S.H.	Penata Muda Tk.1-III/a 1-12-2010	Peneliti Pertama (III/a) 1-8-2013	BPHN
3	Benedictus Sahat Partogi, S.H.	Penata Muda Tk.1-III/a 1-12-2010	Peneliti Pertama (III/a) 1-8-2013	BPHN
4	Nevey Farida Ariani S.H.	Penata Muda Tk.1-III/a 1-12-2010	Peneliti Pertama (III/a) 1-8-2013	BPHN
5	Eko Noer Kristiyanto S.H.	Penata Muda Tk.1-III/a 1-12-2010	Peneliti Pertama (III/a) 1-8-2013	BPHN
6	Trisapto Wahyudi Agung, S.S.		Peneliti Pertama (III/a) 1-8-2013	Pusjianbang
7	Abdurrahman, S.H	Penata Muda III/a 1-12-2010	Peneliti Pertama (III/a) 01-05-2013	Balitbangham
8	Insan Firdaus, S.H.	Penata Muda III/a 1-12-2009	Peneliti Pertama (III/a) 01-05-2013	Balitbangham
9	Nicken Sarwo Rini, S.H.	Penata Muda Tk.1 III/b 1-4-2010	Peneliti Pertama (III/a) 01-05-2013	Balitbangham
10	Andi Rahmansyah, S.E.,M.M.	Penata Muda Tk.1 III/b 1-12-2012	Peneliti Pertama (III/b) 01-05-2013	Balitbangham
11	Josephin Mareta, S.H.	Penata Muda III/a 1-12-2010	Peneliti Pertama (III/a) 01-05-2013	Balitbangham
12	Harison Citrawan, S.H.	Penata Muda III/a 1-12-2010	Peneliti Pertama (III/a) 01-05-2013	Balitbangham

Dalam rangka menunjang pencapaian target kinerja pada kegiatan Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Teknis, Pengkajian dan Penelitian dan Pertemuan Ilmiah dalam rangka pengembangan Sistem Hukum Nasional, dilakukan juga subkegiatan, sebagai berikut :

- 1) Kompendium Hukum, sebanyak 3 (tiga) tim Kompendium Hubungan Luar Negeri
- 2) Kompendium Lembaga Perdamaian
- 3) Kompendium Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Hukum Adat

c. Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum, sebanyak 2 (dua) judul dengan tahapan telah menyelesaikan penulisan :

- 1) Penulisan Karya Ilmiah Tentang *Citizen Law Suit* di Beberapa Negara dan Kemungkinan Pengaturannya di Indonesia

Oleh: Mas Achmad Santosa, S.H., LL.M

2) Penulisan Karya Ilmiah Tentang Penerapan Mekanisme *Small Claim Court* dalam Sistem Hukum Nasional (Perspektif Hukum Pidana)

Oleh: Dr. Chairul Huda, S.H, M.H.

d. Pertemuan Ilmiah, dilaksanakan sebanyak 4 (empat) pertemuan seminar yang mengangkat tema sebagai berikut :

- Seminar tentang Perlindungan Aset Pemegang Hak Di Bidang HKI Sebagai Bukti Kolateral Dalam Sistem Hukum Nasional, Bandung, 26 – 28 Februari 2013;
- Seminar tentang Arah Otonomi Daerah Di Indonesia, Manado, 24 sd 26 April 2013;
- Seminar tentang Arah Peradilan Adat Dalam Sistem Hukum Nasional, Surabaya, 19 sd 21 Juni 2013;
- Seminar tentang Peran Regulasi dan Kepemerintahan Dalam Peningkatan Daya Saing Produk Nasional, Jakarta, 28 sd 30 Agustus 2013.

e. Forum Dialog Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum Dalam pembentukan Huukum, dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali, yaitu :

- Ternate - Maluku Utara pada tanggal 20 sd 22 Maret 21013;
- Samarinda – Kalimantan Timur, pada tanggal 15 sd 17 Mei 2013;
- Bali, 13 Juni 2013;
- Provinsi Lampung, 11 sd 13 September 2013;

f. Penilai Jabatan Fungsional Peneliti Hukum merupakan bagian dari Program pengembangan hukum dalam rangka pembangunan sistem hukum nasional, yang memiliki tugas memeriksa hasil kerja, menilai dan menetapkan angka kredit bagi Pejabat Fungsional Peneliti Hukum di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI; Memproses usulan kenaikan pangkat, dan; pemberhentian para Peneliti Hukum sesuai prosedur yang berlaku.

g. Penulisan Artikel Jurnal *Rechysvinding* Vol 2 Nomor 1 Tahun 2013 Sebanyak 9 Judul, Sbb :

- 1). Implementasi Pengadilan Masyarakat Berbasis Access To Justice Pada Lembaga Bantuan Hukum Kampus Negeri Pasca Pemberlakuan UU Bantuan Hukum;
- 2). Menakar Pengawasan Pemberian Bantuan Hukum Dalam Pandangan Richard A Posner;
- 3). Pengaruh Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin : Meninjau UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum;

- 4).Mendorong Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Bantuan Hukum Di Propinsi Sumatera Utara;
 - 5).Efektifitas Pos Bantuan Hukum Di Pengadilan : Studi Pada Posbankum Pengadilan Agama Sleman Tahun 2011 – 2012;
 - 6) Peran Penelitian Hukum Yang Dilaksanakan Oleh Organisasi Bantuan Hukum Dalam Menunjang Pembangunan Hukum
 - 7).Membangun Akuntabilitas Organisasi Bantuan Hukum;
 - 8).Bantuan Hukum Melalui Mekenisme Monlitigasi Sebagai Saluran Penguatan Peradilan Informasi Bagi Masyarakat Adat;
 - 9).Sinergisitas Peran Dan Tanggung Jawab Advokat Dan Negara Dalam Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma.
- h.** Penulisan Artikel Jurnal Rechysvinding Vol 2 Nomor 2 Tahun 2013 Sebanyak 9 Judul, Sbb :
- 1).Keadilan Restoratif Sebagai Kritik Inheren Terhadap Pengadilan Legal – Konvensional;
 - 2).Peradilan Adat Dan Keadilan Restoratif;
 - 3).Akses Keadilan Korban Pelanggaran HAM Berat Pasca Putusan MK No.006/Puu-lv/2006;
 - 4).Ambiguitas Penerapan Restorative Justice Terhadap Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menimbulkan Korban Jiwa;
 - 5).Menuju Penyelesaian Perkara Pidana Yang Fleksible : Keseimbangan Antara Pelaku Dan Korban Dalam Restorative Justice;
 - 6).Analisis Konsep Restorative Justice Melalui Sistem Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia;
 - 7).Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Melalui Pendekatan Restorative Hustice Dalam Sistem Hukum Nasioal;
 - 8).Restorative Justice : Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia;
 - 9).Urgensi Rekonseptualisasi Dan Legislasi Keadilan Restoratif Di Indonesia.
2. Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Teknis, Publikasi, Pengolahan Data Hukum dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional untuk merealisasikan target capaian kegiatan penyelenggaraan pelayanan teknis, publikasi, pengolahan data hukum dan pengembangan jaringan dokumentasi dan

informasi hukum nasional dilakukan dengan tahapan pelaksanaan subkegiatan (dengan membentuk tim kerja) sebagai berikut :

g. Pembinaan dan Pengembangan JDIHN

Kegiatan Pembinaan dan pengembangan JDIHN dilaksanakan dengan :

- 1). Mengadakan rapat tim
- 2). Melaksanakan kegiatan konsinyasi pembinaan dan pengembangan JDIHN di Bogor tanggal 21 – 23 Maret 2013
- 3). Melaksanakan Sosialisasi Pengelolaan JDIHN, di 6 (enam) Daerah, sbb :
 - a) Yogyakarta – Provinsi Jawa Tengah (13 – 15 Maret 2013)
 - b) Bengkulu, 26 – 28 Maret 2013
 - c) Kepulauan Riau, 2 – 4 April 2013
 - d) Nusa Tenggara Barat, 10 – 12 Juni 2013
 - e) Gorontalo, 13 – 15 Juni 2013
 - f) Maluku Utara, 17 – 19 Juni 2013

b. Penerbitan Hasil Kegiatan BPHN/majalah Hukum/jurnal penelitian hukum/jurnal hukum bahasa Inggris, dilakukan dengan tahapan, sbb :

- a) Melaksanakan rapat tim
- b) Melaksanakan Publikasi hukum
- c) Menerbitkan Hasil kegiatan BPHN sebanyak 25 judul
- d) Majalah Hukum sebanyak 2 kali terbit @285eks
- e) Jurnal Hukum Berbahasa Inggris (Indonesian Law Journal/ILJ) sebanyak 1 kali penerbitan
- f) Pendistribusian hasil penerbitan.

c. Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan Database Informasi Hukum Berbasis Teknologi CD ROM, 6 (enam) tim, dengan tahapan :

Pembentukan Peraturan, dengan capaian (1619) Peraturan.

- a) Pembentukan DB Naskah Lengkap Peraturan Pusat Tahun 2013, telah menghasilkan 168 peraturan
- b) Pembentukan DB Naskah Lengkap Peraturan Menteri Kehutanan dan Per.Men Pendidikan Nasional, terealisasi sebanyak 153 (Pembentukan DB Naskah Lengkap Peraturan Menteri Kehutanan) dan 112 (Per.Men Pendidikan Nasional)
- c) Pembentukan DB Naskah Lengkap Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan, dengan tercapainya target capaian kinerja sebesar 95 (Pembentukan DB Naskah Lengkap Peraturan Menteri Perindustrian) dan 70 (Pembentukan DB Naskah Lengkap Peraturan Menteri Perdagangan).
- d) Pembentukan Perda 5 (lima) provinsi :

- Perda Prov, Aceh : 157 data
- Perda Prov. Kalimantan Timur : 105 data
- Perda Prov Sulawesi Barat : 107 data
- Perda Prov. Bali : 128 data
- Perda Prov. NTT : 271 data
- Perda Prov. Papua : 253 data

d. Peningkatan dan Pengembangan Layanan TIK Melalui Portal Situs Web *bphn.go.id.*, ada 6 (enam) tim, dengan tahapan, sbb :

Kegiatan Tim Pelayanan TIK melalui Situs web , dengan capaian 700 peraturan perundangan-undangan dan 2 dokumen

a. Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Teknis, Pengembangan Penyuluhan Hukum dan Pembudayaan Kesadaran Hukum.

Pada Kegiatan ini ada 3 (tiga) Indikator Utama, serta untuk merealisasikan target capaian Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Teknis, Pengembangan Penyuluhan Hukum dan Pembudayaan Kesadaran Hukum dilakukan dengan tahapan pelaksanaan subkegiatan (dengan membentuk tim kerja) sebagai berikut :

a. Inventarisasi dan pemetaan Desa Sadar Hukum di provinsi Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu, Sulawesi Tengah, dan Nusa Tenggara Timur.

b. Kegiatan evaluasi desa sadar hukum sampai pertengahan bulan Desember 2013 dalam tahap pembuatan instrument evaluasi desa sadar hukum yang bekerja sama dengan *United Nations Development Programme* (UNDP). Tahap pembuatan instrument tersebut sudah sampai pada pemilihan desa pada 5 (lima) provinsi dan pembuatan kuesioner. Lima provinsi sebagai sampel pembuatan instrument yaitu :

- Provinsi Bali;
- Sumatera Barat;
- Kalimantan Tengah;
- Sulawesi Tengah; dan
- Banten.

c. Temu Sadar Hukum (TSH)

Kegiatan Temu Sadar Hukum pada tahun 2013 diprogramkan sebanyak 11 (sebelas) kali. Sampai akhir sampai pertengahan bulan Desember 2013 telah dilaksanakan sebanyak 11 (sebelas) kegiatan (terlampiran)

d. Lomba Kadarkum Tingkat Pusat

Lomba Kadarkum Tingkat Pusat tahun 2013 diprogramkan sebanyak 1 (satu) kali kegiatan, dan telah dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2013 sampai dengan 29 Agustus 2013 di Ruang Simorangkir Gedung Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI.

- e. Peresmian desa sadar hukum. Peresmian desa/kelurahan sadar hukum tersebut pada tahun 2013 diprogramkan sebanyak 12 (dua belas) kegiatan dan telah melaksanakan 10 (9 Peresmian Desa Sadar Hukum dan 1 Temu Sadar Hukum di Daerah) kegiatan terdiri atas 393 DSH. (terlampiran)
- f. Liputan dan Penayangan Desa Sadar Hukum.

Kegiatan Liputan dan Penayangan Desa Sadar Hukum tahun anggaran 2013 sampai pertengahan bulan Desember 2013 telah dilaksanakan liputan di provinsi Jawa Barat dan Maluku serta penayangan tanggal 12 Desember 2013.

Pada Bidang Pengembangan Penyuluhan Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengembangan metode penyuluhan hukum, pengembangan penyuluh hukum serta mempersiapkan sarana kegiatan penyuluhan hukum.

Kegiatan yang telah dilaksanakan, sebagai berikut :

- a. Membuat rancangan desain dan substansi materi modul penyuluhan hukum, diprogramkan sebanyak 6 desain sedang dalam proses, yang terdiri dari :
 - 1). Pembuatan kalender meja;
Pembuatan Kalender meja tahun 2013, yang diprogramkan sebanyak 500 (lima ratus) eksemplar. Sampai pertengahan bulan Desember 2013 tahun anggaran 2013 kegiatan pembuatan kalender telah dilaksanakan.
 - 2). Pembuatan kalender dinding;
Pembuatan Kalender dinding dibuat dalam bentuk kalender tahun 2013, yang diprogramkan sebanyak 3.000 (tiga ribu) eksemplar sampai pertengahan bulan Desember 2013 kegiatan pembuatan kalender meja sudah dilaksanakan.
 - 3). Pembuatan kalender poster;
Pembuatan kalender poster dalam bentuk kalender tahun 2013 tahun anggaran 2013 diprogramkan sebanyak 5.940 (lima ribu sembilan empat puluh) eksemplar sampai pertengahan bulan Desember 2013 telah dilaksanakan.
 - 4). Pembuatan buku implementasi Bantuan Hukum;

Pembuatan Pencetakan Buku implementasi Bantuan Hukum, yang diprogramkan sebanyak 900 (sembilan ratus) eksemplar dan sampai pertengahan bulan Desember 2013 sudah dilaksanakan.

5). Pembuatan poster Bantuan Hukum;

Pembuatan poster Bantuan Hukum pada tahun anggaran 2013 diprogramkan sebanyak 3.100 (tiga ribu seratus) eksemplar. sampai pertengahan bulan Desember 2013 sudah dilaksanakan.

6). Spanduk;

Kegiatan pembuatan spanduk untuk tahun anggaran 2013 diprogramkan sebanyak 10 (sepuluh) buah. Sampai pertengahan bulan Desember 2013 telah dicetak 10 (sepuluh) buah spanduk (lampiran IV).

7). Membuat modul penyuluhan hukum berupa film pendek dan film dokumenter.

b. Penyuluhan hukum berupa film dokumenter dan film pendek diprogramkan sebanyak 10 (sepuluh) kegiatan. Sampai pertengahan bulan Desember 2013 sudah dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kegiatan film dokumenter pada tanggal 14 Agustus 2013 sampai dengan 16 Agustus 2013, 7 (tujuh) kegiatan film pendek pada tanggal 22 Oktober 2013, 22 Oktober 2013, 31 Oktober 2013, 01 November 2013, 15 November 2013, 18 November 2013, dan 19 November 2013.

c. Penyusunan Kebijakan Teknis Pembentukan Tenaga Fungsional Penyuluhan Hukum dan angka kreditnya, kegiatan tersebut telah diprogramkan sebanyak 3 (tiga) kali konsinyasi, dan sampai pertengahan bulan Desember 2013 telah melaksanakan 3 (tiga) kali konsinyasi pada tanggal 18-20 April 2013, 16–18 September 2013 dan 2-4 Desember 2013 di Hotel Mirah – Bogor. Uji kelayakan pembentukan PH sampai akhir 2013 telah dilaksanakan pada tanggal 27-29 Juni 2013.

Pada Bidang Pembudayaan mempunyai tugas ugas melaksanakan penyiapan pemberdayaan unit pelayanan hukum, pelaksanaan penyuluhan hukum langsung dan penyuluhan hukum tidak langsung, diantaranya melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan langsung :

a. Ceramah Penyuluhan Hukum

Jumlah kegiatan ceramah untuk tahun 2013 diprogramkan sebanyak 50 (lima puluh) kegiatan dan sampai pertengahan bulan Desember

2013 telah dilaksanakan kegiatan ceramah sebanyak 50 (lima puluh) kali. (terlampir)

Kegiatan ceramah ini dilaksanakan bekerjasama dengan instansi pemerintah maupun non pemerintah, lembaga pendidikan, ormas dan instansi lainnya berdasarkan permintaan.

b. Kegiatan Pameran Penyuluhan Hukum

Pada tahun anggaran 2013 pameran penyuluhan hukum diprogramkan sebanyak 2 (dua) kegiatan, sampai pertengahan bulan Desember 2013 telah dilaksanakan 2 (dua) kegiatan yaitu tanggal 27-29 Oktober 2013 di Graha Pengayoma Kemenkumham Kuningan Jakarta dan 6-8 November 2013 di Manggalawana Bakti Rimbawan II Jl. Gatot Subroto Jakpus.

c. Konsultasi Hukum

Konsultasi Hukum diberikan sebagai wujud kepedulian pemerintah dalam membantu masyarakat yang mempunyai masalah dengan hukum, kegiatan Konsultasi Hukum diprogramkan sebanyak 370 kegiatan, sampai pertengahan bulan Desember 2013 telah dilaksanakan 370 (tiga ratus tujuh puluh) kasus (lampiran VII).

Kegiatan konsultasi di BPHN diprogramkan menangani 185 kasus, kegiatan konsultasi ini dilaksanakan bekerjasama dengan Universitas Indonesia sebanyak 50 kasus, Kowani sebanyak 30 kasus, Universitas Pelita Harapan sebanyak 30 kasus, LBH Jakarta sebanyak 40 kasus, LBH APIK sebanyak 35 kasus.

d. Penyuluhan Hukum Keliling

Kegiatan penyuluhan hukum keliling pada tahun anggaran 2013 diprogramkan sebanyak 48 (empat puluh delapan) kali. Sampai pertengahan bulan Desember 2013 telah dilaksanakan sebanyak 48 (empat puluh delapan) kali. (terlampiran)

2. Penyuluhan Hukum Tidak Langsung

Subbidang Penyuluhan Hukum Tidak Langsung melaksanakan kegiatan Penyusunan Substansi/Materi :

a. Iklan Layanan Masyarakat

Iklan Layanan Masyarakat sosialisasi pengurangan BBM sampai pertengahan bulan Desember 2013 telah dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2013 di Koran Rakyat Merdeka, Koran Media Indonesia, dan Koran Jurnal Nasional.

- b. Iklan Informasi Layanan Masyarakat (PSA) dan Penayangan Iklan di Bandara.
Kegiatan Iklan Informasi Layanan Masyarakat (PSA) di Bandara sampai pertengahan bulan Desember 2013 sudah dilaksanakan.
- c. Iklan Informasi Layanan Masyarakat (PSA) dan Penayangan Iklan di TV Kereta Api.
Kegiatan Iklan Informasi Layanan Masyarakat (PSA) dan Penayangan Iklan di TV Kereta Api sampai pertengahan bulan Desember 2013 sudah dilaksanakan.
- d. Pembuatan Fragmen Penyuluhan Hukum di TVRI
Kegiatan Pembuatan Fragmen Penyuluhan Hukum di TVRI pada tahun anggaran 2013 diprogramkan sebanyak 6 (enam) kegiatan, sampai dengan sampai pertengahan bulan Desember 2013 telah dilaksanakan 6 (enam) kegiatan.
- e. Dialog Perbincangan/Talkshow di Radio Swasta
Kegiatan Perbincangan Penyuluhan Hukum di Radio Swasta pada tahun anggaran 2013 diprogramkan 7 (tujuh) kegiatan, sampai pertengahan bulan Desember 2013 telah dilaksanakan.
- f. Kegiatan Dialog Perbincangan/Talkshow Penyuluhan Hukum melalui Radio Republik Indonesia
Kegiatan Dialog/Wawancara Penyuluhan Hukum melalui Radio Republik Indonesia pada tahun anggaran 2013 diprogramkan sebanyak 6 (enam) kegiatan. sampai pertengahan bulan Desember 2013 telah dilaksanakan 6 (enam) kegiatan.
- g. Informasi Layanan Masyarakat (PSA) di Radio
Kegiatan penyiaran Informasi Layanan Masyarakat (PSA) tahun anggaran 2013 diprogramkan sebanyak 26 (dua puluh enam) kali, sampai pertengahan bulan Desember 2013 sudah dilaksanakan pada tanggal 18-21 September 2013.

Pada indikator ketiga adalah Jumlah orang yang mendapat penyuluhan hukum, sosialisasi hukum serta penerima konsultasi hukum dan bantuan hukum, untuk mencapai teget kinerja tersebut telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. Ceramah Penyuluh Hukum, 50 kegiatan :
Pelaksanaan Ceramah Penyuluhan Hukum telah dilaksanakan sebanyak 50 kegiatan.
(50 kegiatan x 50 orang /kegiatan = 2500 orang)
- b. Pameran Penyuluhan Hukum, 2 kegiatan :

Pameran Penyuluhan Hukum telah dilaksanakan sebanyak 2 kegiatan.

(2 kegiatanx 100 orang /kegiatan = 200 orang)

- c. Iklan layanan sosialiasi BBM masyarakat di 3 (tiga) surat kabar
(2 kegiatan x 300.000 orang = 900.000 orang).
- d. Kegiatan Penayangan Informasi Masyarakat di TV Swasta
Kegiatan Penayangan Informasi Masyarakat di TV Swasta telah dilaksanakan.
(1 kegiatan x 1.000.000 orang = 1.000.000 orang)
- e. Penayangan Informasi Iklan Penyuluhan Hukum di Bandara dan Kereta Api
- f. Penayangan Informasi Iklan Penyuluhan Hukum di Bandara dan Kereta Api sudah dilaksanakan.
(1 kegiatan x 1.000.000 orang = 1.000.000 orang)
- g. Bantuan Hukum
Pemberian Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin = 1.290 orang
Pelaksanaan Penyelenggaraan Bantuan Hukum tahun 2013:
 - 1). Sosialisasi UU NO.16 tahun 2011 (dibiayai oleh minta kerja)
 - Di provinsi kalimantan Tengah tgl 7-9 Januari 2013
 - 2). Rapat Pembentukan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri (dibiayai oleh minta kerja)
 - Rapat lanjutan harmonisasi, pembulatan dan pementapan konsep RPP tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana bantuan Hukum tgl 14 Januari 2013
 - Rapat konsinyasi lanjutan IV Rpermen Standar Bantuan Hukum tgl 17-18 Januari 2013
 - Rapat konsinyasi lanjutan V Rpermen Standar Bantuan Hukum tgl 17-18 Januari 2013
 - 3). Pengumuman pendaftaran Organisasi Bantuan Hukum (OBH) tanggal 18 Februari – 8 Maret 2013 di website Kumham dan Mitra Kerja Pemerintah, RRI, 41 koran lokal dan kompas
 - 4). Verifikasi/Akreditasi Organisasi Bantuan Hukum yang sudah mendaftar (dibiayai oleh Mitra Kerja Pemerintah):
 - Workshop dan briefing verifikasi/ akreditasi, tanggal 4 Maret s/d 7 Maret 2013 di Sari Pan Pasific Jakarta
 - Verifikasi administrasi dan faktual, tanggal 13 Maret s/d 18 April 2013 (tahap I)

- Verifikasi administrasi dan faktual, tanggal 19 April s/d 15 Mei 2013 (tahap II)
 - Finalisasi rekapitulasi hasil verifikasi faktual OBH tanggal 22-24 Mei 2013 di Hotel Morisey Jakarta
 - Finalisasi rekapitulasi hasil verifikasi faktual OBH (lanjutan) tanggal 28-30 Mei 2013 di Hotel J.S.Luwansa Jakarta
- 5). Pengumuman hasil verifikasi OBH
Dilaksanakan tanggal 31 Mei 2013 di website Kemenkumham
- 6) Kunjungan terkait dengan Sistem Bantuan Hukum (dibiayai oleh Mitra Kerja)
- Kunjungan tentang Bantuan Hukum ke Melbourne Australia tgl 29 Juni – 16 Juli 2013
 - Kunjungan terkait dengan Sistem Bantuan Hukum ke Sydney Australia tgl 23 November 2013 - 1 Desember 2013
- 7). Rapat Kerja dan Rapat Konsinyasi
- Rapat konsinyasi penyusunan rancangan Ka. BPHN tentang petunjuk pelaksanaan pelaporan anggaran program bantuan hukum tgl 15-16 juli 2013 di hotel santika bogor (dibiayai oleh Mitra Kerja)
 - Rapat konsinyasi penyusunan rancangan Ka. BPHN tentang pengelolaan anggaran program bantuan hukum Tgl 19-20 juli di hotel arya duta tangerang (dibiayai oleh Mitra Kerja)
 - Rakernas tentang bantuan hukum dgn OBH/LBH yang sudah diverifikasi tanggal 25-27 Juli 2013 di Hotel Sultan Jakarta, dibuka oleh Presiden R.I di Istana Presiden, penandatanganan kontrak dengan 310 OBH yang lulus verifikasi (terakreditasi), penandatanganan Pakta Integritas. (dibiayai oleh Mitra Kerja)
 - Rapat persiapan Bantuan Hukum di BPHN 3 kali (dibiayai oleh DIPA BPHN)
 - Rapat konsinyasi penyusunan rancangan petunjuk pelaksanaan tentang Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum tgl 5-6 september 2013 (dibiayai oleh Mitra Kerja)
 - Rapat konsinyasi lanjutan penyusunan rancangan petunjuk pelaksanaan tentang Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan

- Pemberian Bantuan Hukum tgl 13 september 2013 (dibiayai oleh Mitra Kerja)
- Rapat konsinyasi lanjutan tentang pengelolaan anggaran program bantuan hukum tgl 13 Sept 2013 di Hotel Sahid Jakarta (dibiayai oleh Mitra Kerja)
 - Juklak/juknis terkait alur proses mekanisme pembayaran dan pengawasan pelaksanaan Bantuan Hukum (dibiayai oleh Mitra Kerja)
 - Rapat koordinasi Pelaksanaan Persiapan Bantuan Hukum dengan 33 Kantor wilayah yang dihadiri oleh para Kepala Bidang Pelayanan Hukum dan Kepala Subbidang Penyuluhan hukum dan Bantuan Hukum, tanggal 26-28 september 2013 di Hotel Park Jakarta (daftar hadir terlampir). (dibiayai oleh DIPA BPHN)
- 8). Technical Meeting Bantuan Hukum (dibiayai oleh Mitra Kerja Pemerintah) :
- Technical Meeting Bantuan Hukum di Sulawesi Tengah tgl 18-20 September 2013
 - Technical Meeting membangun Implementasi Bantuan Hukum bagi OBH di provinsi Maluku dan Maluku Utara tgl 01-07 Oktober 2013
 - Technical Meeting Penyaluran Dana Bantuan Hukum dan Website Aplikasi Bantuan Hukum di Provinsi NTB tgl 16-18 Oktober 2013
 - Technical Meeting Membangun Efektifitas Implementasi Bantuan Hukum bagi OBH di provinsi Aceh tgl 24-25 Oktober 2013
 - Technical Meeting Membangun Efektifitas Implementasi Bantuan Hukum bagi OBH di provinsi Kalimantan Tengah tgl 31 Oktober 2013- 1 November 2013
 - Technical Meeting Lanjutan Membangun Efektifitas Implementasi Bantuan Hukum bagi OBH di provinsi Aceh tgl 18-19 November 2013
 - Pembahasan draft juklak kompetensi paralegal tgl 5 -6 Desember 2013

- Rakernas pengawasan bantuan hukum tgl 19 – 20 Desember 2013
- Rapat Pembuatan Laporan Penyelenggaraan Bantuan Hukum, dilaksanakan pada tgl 2-4 Desember 2013.

9). REGULASI

- Telah terbit PP NO.42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum
- Permenkumham No.3 tahun 2013 tentang Verifikasi/Akreditasi Bantuan Hukum
- Terbitnya Permenkumham: Permen No.22 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Permen standar bantuan hukum diganti nama)
- Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-03.HN.03.03 Tahun 2013 tentang Besarab Biaya Bantuan Hukum Litigasi dna Non Litigasi Menkumham RI.
- Surat Keputusan Pembentukan Tim monitoring dan evaluasi pelaksanaan Bantuan Hukum di seluruh provinsi yang terdiri dari wakil Kanwil dan Pemda. (Pengawasan langsung pelaksanaan Bantuan Hukum dilaksanakan di Kantor Wilayah Kemenkuham RI).

5. Kegiatan Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPHN

Untuk merealisasikan target capaian kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BPHN dilakukan dengan tahapan pelaksanaan sebagai berikut :

a. Bagian Program dan Pelaporan

Kegiatan yang dilakukan guna menunjang tugas dan fungsi Badan Pembinaan Hukum Nasional, Bagian Program dan Pelaporan telah melaksanakan :

- 1) Menginventarisasi kegiatan BPHN;
- 2) Mengolah, menata, menyimpan, membuat data/bahan aplikasi, serta menyajikan data//bahan kegiatan BPHN serta memberikan informasi kegiatan BPHN yang digunakan sebagai bahan aktual dari BPHN;
- 3) Membuat rencana kegiatan Bagian Program dan Pelaporan sesuai dengan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- 4) Menyusun RKA-KL BPHN;
- 5). Menyusun Rencana Kerja Tahun berjalan dan membuat SK Kegiatan;
- 6). Menyusun Laporan Triwulan pertama, Triwulan kedua (tengah tahun), Triwulan ketiga dan laporan tahunan BPHN dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) BPHN;
- 7) Memantau/ memonitoring dan mengevaluasi kegiatan yang sedang berjalan sampai dengan akhir Maret (Triwulan pertama) 2013 yang telah dilaksanakan dalam rangka inventarisasi masalah aktual;
- 8) Kegiatan penunjang lainnya adalah membuat pelaporan tentang Progsi BPHN dan Bankum, selain itu juga melaksanakan kegiatan terkait dengan Reformasi Birokrasi, Penyusunan RAKA-KL dan LAKIP BPHN.

b. Bagian Umum

Kegiatan yang dilakukan guna menunjang tugas dan fungsi Badan Pembinaan Hukum Nasional, Bagian Umum telah melaksanakan :

1). Pencatatan, pengolahan dan pendistribusian terkait dengan : **Surat Masuk**

Dari bulan Januari s.d Desember 2013 (sampai disusunnya laporan ini) surat masuk sebanyak **5.738** surat, baik surat yang bersifat Fasilitatif maupun Substantif serta surat elektronik (TNDE);

Terkait dengan hal ini surat telah digandakan dan di scan sebagai back up, surat asli dan lampirannya telah didistribusikan dengan cepat dan akurat kepada alamat yang dituju di lingkungan BPHN.

Surat Keluar

Pemberian nomor surat pada surat keluar selama 12 bulan, sampai dengan bulan Desember 2013 berjumlah **4.915** surat dengan perincian :

- Kepala BPHN (PHN) = 920 nomor
- Sekretariat (PHN.1) = 2803 nomor
- Puslitbangkum (PHN.2) = 365 nomor
- Pusrenkumnas (PHN.3) = 247 nomor
- Pusedokkumnas (PHN.4) = 330 nomor
- Pusluhkum (PHN.5) = 250 nomor

2). Melaksanakan pengiriman surat keluar untuk instansi diluar BPHN sebanyak 382 surat yang langsung diserahkan ke instansi terkait maupun melalui Pos;

3). Pengelolaan Arsip, dilakukan dengan bentuk, sbb :

a) Arsip fasilitatif,

Surat masuk, dilaksanakan kegiatan sbb :

- Scan surat masuk dari bulan Januari s.d Desember 2013

- Menata hasil fotocopy surat masuk dari bulan Januari s.d Desember 2013
- Pengetikan daftar pertelaan surat masuk dari bulan Januari s.d Desember 2013

Surat keluar dilaksanakan kegiatan sbb :

- Menyusun dan menata arsip surat keluar dari bulan Januari s.d Desember 2013 kedalam filing kabinet arsip dalam bentuk klasifikasi menurut kode klasifikasi arsip yang berlaku
- Pengetikan Pertelaan Arsip surat keluar dari bulan Januari s.d Desember 2013

b) Arsip Substantif

- Inventarisasi daftar kegiatan tahun 2012
- Pengumpulan arsip substantif hardcopy dan softcopy kegiatan tahun 2012
- Penyimpanan arsip substantif BPHN tahun 2012 kedalam box arsip
- Pengetikan Daftar Pertelaan Arsip Substantif tahun 2012

c) Penyerahan arsip in aktif BPHN tahun 2000 - 2006 kepada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) melalui Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI

4). Penggandaan

Dari bulan Januari s.d Desember 2013 telah melaksanakan penggandaan untuk kepentingan sekretariat maupun dukungan kegiatan pada pusat - pusat di BPHN sebanyak 38.578 lembar.

5). Mengadakan perawatan dan perbaikan :

- Perawatan 10 unit pompa pendorongan artesis air bersih gedung annex, gedung SJDJ dan gedung induk, perawatan dan perbaikan dua unit Elevator Lift; perbaikan/ perawatan AC Central, Perbaikan/ penggantian saluran pembuangan air kotor, Perbaikan Komputer (CPU) sebanyak 35 buah, Perbaikan printer sebanyak 16 buah, Perbaikan dan perawatan jaringan internet Gedung BPHN, Perawatan kendaraan dinas, Perawatan gedung BPHN, Perbaikan/ penyiapan ruang Verifikasi Bantuan Hukum, Perbaikan kamar mandi Gedung Induk, Annex, dan gedung SJDJ, renovasi pos keamanan dan kantin, perbaikan dan penggantian lampu penerangan kantor BPHN, Perawatan/ Pengecatan Mobil Toyota Fortuner, Perbaikan Mobil Toyota Camry B 2941 JQ, Mobil Toyota Kijang B 2940 JQ, Mobil Toyota Kijang B 7401 JQ dan Mobil L300 B 1377 TQA, mengadakan service/ perawatan AC Split dan melakukan pengurusan Roof Tank;

- Memberikan pelayanan kesehatan bagi seluruh pegawai BPHN, pengamanan sarana dan prasana kantor BPHN, menyiapkan air bersih, ruang rapat, pengecekan instalasi dan Test Merger Gedung Induk, test panel penerangan, menambah jaringan internet dan telepon di ruang Verifikasi Bantuan Hukum dan ruang bendahara;
- Memberikan informasi pelaksanaan kegiatan BPHN baik yang dilaksanakan di intern maupun ekstern BPHN;
- Meliput kegiatan CLE, Sosialisasi, Seminar, Diskusi Publik, FGD, Konsinyasi, TOT Penyusunan NA, Kegiatan Rapat, Lomba KADARKUM, Upacara dan Apel Pegawai, Capacity Building, MOU antara BPHN dengan Universitas Esa Unggul, Kunjungan Mahasiswa, Kunjungan Kerja DPRD, Halal Bi Halal;
- Mempublikasikan beberapa kegiatan Humas pada Web www.bphn.go.id
- Menerbitkan leaflet, dan Warta BPHN (edisi 8, 9, dan 10 tahun ke-II 2013), Mengirim Naskah Pemberitaan ke Biro Humas dan KLN melalui beritahumas@kemenkumham.go.id dan Pengurusan Visa/ Paspas atas nama : Bambang Palasara, SH., C. Kristomo, S.S.

Selain itu guna menunjang tercapainya target kinerja, bagian umum sekretariat BPHN melaksanakan 2 (dua) subkegiatan, yaitu :

a. Tim Kerja Penerbitan Warta BPHN

Warta BPHN terbit setiap tiga bulan sekali, untuk tahun 2013 warta BPHN telah terbit empat kali (edisi 8, 9, 10, dan 11 tahun ke-II), sedangkan isi dari warta BPHN adalah liputan dari kegiatan BPHN tahun 2013.

b. Tim Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik

Kegiatan tim Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPHN Nomor PHN-13-HM.01.04 Tahun 2013 tanggal 29 April 2013, yang bertugas menyiapkan sarana dan prasarana serta informasi yang diperlukan oleh publik.

Kegiatan tim ini telah menyiapkan sarana dan prasarana serta telah menyiapkan informasi tentang BPHN berupa laporan kegiatan BPHN, laporan tahunan BPHN, laporan keuangan BPHN, Laporan BMN dan Informasi kepegawaian BPHN serta telah mengelompokkan jenis informasi baik informasi setiap saat dan informasi berkala.

5. Pelaksanaan Kegiatan Temu Sadar Hukum

- Pelaksanaan Temu Sadar Hukum, telah dilaksanakan sebanyak 10 (sepuluh) kegiatan.
- Pada tahun anggaran 2013 Desa/Kel KADARKUM telah di resmikan sebanyak 393 Desa/Kel di 9 (sembilan) Provinsi, yang terdiri dari :

1. Peresmian Desa Sadar Hukum dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2013 di Provinsi Sumatera Utara (Medan) sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) Desa/Kel KADARKUM, terdiri dari :

NO.	DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM	KECAMATAN	KABUPATEN/KOTA
1	Kel. Kedai Durian	Medan Johor	Kota Medan
2	Kel. Kota Matsum III	Medan Kota	Kota Medan
3	Kel. Sekip	Medan Petisah	Kota Medan
4	Kel. Simpang Tanjung	Medan Sunggal	Kota Medan
5	Kel. Rengas Pulau	Medan Marelan	Kota Medan
6	Kel. Helvetia Timur	Medan Helvetia	Kota Medan
7	Kel. Sei Rengas II	Medan Area	Kota Medan
8	Kel. Sukadamai	Medan Polonia	Kota Medan
9	Kel. Pandau Hilir	Medan Perjuangan	Kota Medan
10	Kel. Jati	Medan Maimun	Kota Medan
11	Kel. Petisah Hulu	Medan Baru	Kota Medan
12	Kel. Timbang Galung	Siantar Barat	Kota Pematang Siantar
13	Kel. Sigulung-gulung	Siantar Utara	Kota Pematang Siantar
14	Kel. Pardamean	Siantar Marihat	Kota Pematang Siantar
15	Kel. Bukit Sofa	Siantar Sitalasari	Kota Pematang Siantar
16	Desa Selampuyung	Siantar	Kabupaten Simalungun
17	Desa Merek Raya	Raya	Kabupaten Simalungun
18	Desa Dolok Jilir I	Dolok Batu Naggar	Kabupaten Simalungun
19	Desa Marjandi	Panombeian Panei	Kabupaten Simalungun
20	Desa Janggir Leto	Panei	Kabupaten Simalungun
21	Desa Sionom Hudon Sibulbulon	Parlilitan	Kab. Humbang Hasundutan
22	Desa Hutasoit I	Lintongnihuta	Kab. Humbang Hasundutan
23	Desa Pardomuan	Pollung	Kab. Tapanuli Utara Kota Padang Sidimpuan
24	Desa Silait-Lait	Siborongborong	Kota Padang Sidimpuan
25	Kel. Hutaimbaru	Padang Sidimpuan Hutaimbaru	Kota Tanjung Balai
26	Kel. Panyanggar	Padang Sidimpuan Utara	Kota Tanjung Balai
27	Kel. KualaSilau Bestari	Tanjungbalai Utara	Kab. Toba Samosir
28	Kel. Selat Tanjung Medan	Datuk Bandar Timur	Kab. Deli Serdang
29	Desa Silalahi Pagar Batu	Balige	Kab. Deli Serdang
30	Desa Sambirejo Timur	Percut Sei Tuan	Kab. Deli Serdang
31	Desa Cinta Rakyat	Percut Sei Tuan	Kab. Nias Barat
32	Desa Tengah	Pantai Labu	Kota Gunungsitoli
33	Desa Sari Labajahe	Biru – Biru	
34	Desa Simae'asi	Mandrehe	Kabupaten Dairi
35	Desa Lalewonu Niko'otano Desa Buntu Raja	Gunung Sitoli	Kabupaten Karo
36	Desa Mulawari	Siempat Nempu	
37		tigapanah	

2. Peresmian Desa Sadar Hukum dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2013 di Provinsi Sulawesi Tengah (Palu) sebanyak 10 (sepuluh) Desa/Kel KADARKUM, terdiri dari :

NO.	DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM	KECAMATAN	KABUPATEN/KOTA
1	Kelurahan Palupi	Tatanga	Kota Palu
2	Kelurahan Tanamodindi	Mantikulore	Kota Palu
3	KelurahaTalise	Mantikulore	Kota Palu

4	Kel. Birobuli Selatan	Palu Selatan	Kota Palu
5	Kel. Birobuli Utara	Palu Selatan	Kota Palu
6	Kel. Besusu Barat	Palu timur	Kota Palu
7	Desa Baliara	Palu Barat	Kab. Parigi Moutong
8	Desa Lolo Oge	Bonawa	Kab. Donggala
9	Kelurahan Nalu	Baolan	Kab. Toli – Toli
10	Kel. Moengko Baru	Poso Kota	Kab. Poso

3. Peresmian Desa Sadar Hukum dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2013 di Provinsi Jambi sebanyak 7 (tujuh) Desa/Kel KADARKUM, terdiri dari :

NO.	DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM	KECAMATAN	KABUPATEN/KOTA
1	Desa Sumur Anyir	Sungai Penuh	Kota Sungai Penuh
2	Desa Mekar Jaya	Tanah Kampung	Kota Sungai Penuh
3	Desa Kumun Hilir	Kumun Debai	Kota Sungai Penuh
4	Desa Koto Keras	Pesisir Bukit	Kota Sungai Penuh
5	Desa Maliki Air	Hamparan Rawang	Kota Sungai Penuh
6	Desa Bakung	Maro Sebo	Kabupaten Muaro Jambi
7	Desa Niaso	Maro Sebo	Kabupaten Muaro Jambi

4. Desa sadar Huukum dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2013 di Kalimantan Tengah (Palangkaraya) pada tanggal 04 Juli 2013 sebanyak 21 (dua puluh satu) Desa/Kel KADARKUM, terdiri dari :

NO.	DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM	KECAMATAN	KABUPATEN/KOTA
1	Desa Babai	Karau Kuala	Kab. Barito Selatan
2	Kelurahan Bangkuang	Karau Kuala	Kab. Barito Selatan
3	Kelurahan Hilir Sper	Dusun Selatan	Kab. Barito Selatan
4	Desa Sambu Katung	Katingan Tengah	Kab. Katingan
5	Desa Batu Badinding	Katingan Tengah	Kab. Katingan
6	Desa Jaya Makmur	Katingan Kuala	Kab. Katingan
7	Desa Tri Tunggal	Sematu Jaya	Kab. Lamandau
8	Desa Kujan	Bulik	Kab. Lamandau
9	Desa Tapen	Kapuas Tengah	Kab. Kapuas
10	Desa Timpah	Timpah	Kab. Kapuas
11	Desa Pantai Harapan	Cempaka Hulu	Kab. Kotawaringin Timur
12	Desa Penda Pilang	Kurun	Kab. Gunung Mas
13	Desa Tumbang Malahui	Ruangan	Kab. Gunung Mas
14	Desa Kantan Atas	Pandih Batu	Kab. Pulau Pisau
15	Desa Sungai Kuning	Pangkalan Banteng	Kab. Kotawaringin Barat
16	Desa Sulung	Arut Selatan	Kab. Kotawaringin Barat
17	Kel. Kotawaringin Hilir	Kotawaringin Lama	Kab. Kotawaringin Barat
18	Kelurahan Sabaru	Sabangau	Kota Palangkaraya
19	Kelurahan Sei Gobong	Bukit Batu	Kota Palangkaraya
20	Kelurahan Panjehang	Rakumpit	Kota Palangkaraya
21	Kelurahan Padang	Sukamara	Kab. Sukamara

5. Peresmian Desa Sadar Hukum dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2013 di Provinsi DI. Yogyakarta sebanyak 52 (lima puluh dua) Desa/Kel KADARKUM, terdiri dari :

NO.	DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM	KECAMATAN	KABUPATEN/KOTA
1	Kelurahan Sorosulan	Umbulharjo	Kota Yogyakarta
2	Kelurahan Bener	Tegalrejo	Kota Yogyakarta
3	Kelurahan Warungboto	Umbulharjo	Kota Yogyakarta
4	Kelurahan Ngampilan	Mantrijeron	Kota Yogyakarta
5	Kelurahan Gedongkiwo	Ngampilan	Kota Yogyakarta

6	Desa Tirtomulya	Kretek	Kabupaten Bantul
7	Desa Parangtritis	Kretek	Kabupaten Bantul
8	Desa Gadingsari	Sanden	Kabupaten Bantul
9	Desa Gadingharjo	Sanden	Kabupaten Bantul
10	Desa Poncosari	Srandakan	Kabupaten Bantul
11	Desa Caturharjo	Pandak	Kabupaten Bantul
12	Desa Sumbermulyo	Bambanglipuro	Kabupaten Bantul
13	Desa Srihardono	Pundong	Kabupaten Bantul
14	Desa Selopamiro	Imogiri	Kabupaten Bantul
15	Desa Kebonagung	Imogiri	Kabupaten Bantul
16	Desa Patalan	Jetis	Kabupaten Bantul
17	Desa Canden	Jetis	Kabupaten Bantul
18	Desa Guwosari	Pajangan	Kabupaten Bantul
19	Desa Mangunan	Dligo	Kabupaten Bantul
20	Desa Palbapang	Bantul	Kabupaten Bantul
21	Desa Ringinhardjo	Bantul	Kabupaten Bantul
22	Desa Argomulyo	Sedayu	Kabupaten Bantul
23	Desa Bangunjiwo	Kasihani	Kabupaten Bantul
24	Desa Pendowoharajo	Swon	Kabupaten Bantul
25	Desa Sitimulyo	Piyungan	Kabupaten Bantul
26	Desa Wonokromo	Pleret	Kabupaten Bantul
27	Desa Banguntapan	Banguntapan	Kabupaten Bantul
28	Desa Jambidan	Banguntapan	Kabupaten Bantul
29	Desa Siraman	Wonosari	Kab. Gunung Kidul
30	Desa Karangasem	Paliyatan	Kab. Gunung Kidul
31	Desa Ngeposari	Semanu	Kab. Gunung Kidul
32	Desa Umbulharjo	Ponjong	Kab. Gunung Kidul
33	Desa Kalitekuk	Semin	Kab. Gunung Kidul
34	Desa Kemadang	Tanjungsari	Kab. Gunung Kidul
35	Desa Petir	Rongkop	Kab. Gunung Kidul
36	Desa Sendangsari	Pengasih	Kab. Kulon Progo
37	Desa Hargomulyo	Kokap	Kab. Kulon Progo
38	Desa Banguncipto	Sentolo	Kab. Kulon Progo
39	Desa Wahtyharjo	Lendah	Kab. Kulon Progo
40	Desa Tanjungharjo	Naggulan	Kab. Kulon Progo
41	Desa Banjarrarum	Kalibawang	Kab. Kulon Progo
42	Kel Wates	Wates	Kab. Kulon Progo
43	Desa Sumber Rahayu	Moyodan	Kabupaten Sleman
44	Desa Sendangsari	Minggir	Kabupaten Sleman
45	Desa Sidokarto	Godean	Kabupaten Sleman
46	Desa Ambarketawang	Gamping	Kabupaten Sleman
47	Desa Margodadi	Seyegan	Kabupaten Sleman
48	Desa Sumberadi	Mlati	Kabupaten Sleman
49	Desa Trimulyo	Sleman	Kabupaten Sleman
50	Desa Minomartani	Ngaglik	Kabupaten Sleman
51	Desa Condongcatur	Depok	Kabupaten Sleman
52	Desa Tambakrejo	Tempel	Kabupaten Sleman

6. Peresmian Desa Sadar Hukum dilaksanakan pada tanggal 24 September 2013 di Provinsi Jawa Barat (Bandung) sebanyak 32 (tiga puluh) Desa/Kel KADARKUM, terdiri dari :

NO.	DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM	KECAMATAN	KABUPATEN/KOTA
1	Kelurahan Sekamaju Baru	Kecamatan Tepos	Kota Depok
2	Kelurahan Subangjaya	Kecamatan Cikole	Kota Sekabumi
3	Kelurahan Lembur Situ	Kecamatan Lembur Situ	Kota Sukabumi
4	Desa Batujajar Timur	Kecamatan Batujajar	Kab. Bandung Barat
5	Desa Batu Layangh	Kecamatan Cililin	Kab. Bandung Barat
6	Desa Singajaya	Kecamatan Cihampelas	Kab. Bandung Barat
7	Seda Laksana Mekar	Kecamatan Padalarang	Kab. Bandung Barat
8	Desa Jati	Kecamatan Saguling	Kab. Bandung Barat
9	Kelurahan Pasirkaliki	Kecamatan Cimahi Utara	Kota Cimahi
10	Kelurahan Cibeureum	Kecamatan Cimahi	Kota Cimahi
11	Kelurahan Cimahi	Selatan	Kota Cimahi
12	Desa Jatimulya	Kecamatan Cimahi	Kab. Subang
13	Kelurahan Situbarur	Tengah	Kota Banjar
14	Desa Gandawesi	Kecamatan Compreng	Kab. Majalengka
15	Desa Cibogor	Kecamatan Banjar	Kab. Majalengka
16	Desa Salawangi	Kecamatan Ligung	Kab. Majalengka

17	Desa Silihwangi	Kecamatan Ligung	Kab. Majalengka
18	Desa Palasah	Kecamatan Bantarrujeg	Kab. Majalengka
19	Desa Salodo	Kecamatan Bantarrujeg	Kab. Majalengka
20	Desa Gancas	Kecamatan Palasah	Kab. Majalengka
21	Desa Sukadana	Kecamatan Talaga	Kab. Majalengka
22	Desa Sukasari Kidul	Kecamatan Talaga	Kab. Majalengka
23	Desa Malausna	Kecamatan Argapura	Kab. Majalengka
24	Desa Banyusari	Kecamatan Argapura	Kab. Majalengka
25	Desa Rajagaluh Lor	Kecamatan Malausma	Kab. Majalengka
26	Desa Rajagaluh Kidul	Kecamatan Malausma	Kab. Majalengka
27	Desa Rancaputat	Kecamatan Rajagaluh	Kab. Majalengka
28	Desa Soguling	Kecamatan Rajagaluh	Kab. Ciamis
29	Desa Sukasenang	Kecamatan Sumberjaya	Kab. Garut
30	Desa Canguang	Kecamatan Baregbeg	Kab. Garut
31	Desa Cigedug	Kecamatan Bayongbong	Kab. Garut
32	Desa Keduanan	Kecamatan Leles	Kab. Cirebon
		Kecamatan Cigedug	
		Kecamatan Depok	

7. Peresmian Desa Sadar Hukum dilaksanakan pada tanggal 11 November 2013 di Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 21 (dua puluh satu) Desa/Kel KADARKUM, terdiri dari :

NO.	DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM	KECAMATAN	KABUPATEN/KOTA
1	Desa Babai	Karau Kuala	Kab. Barito Selatan
2	Kel. Bangkuang	Karau Kuala	Kab. Barito Selatan
3	Kel. Hilir Sper	Dusun Selatan	Kab. Barito Selatan
4	Desa Samba Katung	Katingan Tengah	Kab. Katingan
5	Desa Batu Badinding	Katingan Tengah	Kab. Katingan
6	Desa Jaya Makmur	Katingan Tengah	Kab. Katingan
7	Desa Tri Tunggal	Sematu Jaya	Kab. Lamandau
8	Desa Kujan	Bulik	Kab. Lamandau
9	Desa Tapen	Kapuas Tengah	Kab. Kapuas
10	Desa Timpah	Timpan	Kab. Kapuas
11	Desa Pantai Harapan	Cempaka Hulu	Kab. Kotawaringin Timur
12	Desa Penda Pilang	Kurun	Kab. Gunung Mas
13	Desa Tumbang Malahui	Ruangan	Kab. Gunung Mas
14	Desa Kantan Atas	Pandih Batu	Kab. Pulang Pisau
15	Desa Sungai Kuning	Pangkalan Banteng	Kab. Kotawaringin Barat
16	Desa Sulung	Arut Selatan	Kab. Kotawaringin Barat
17	Kel. Kotawaringin Hilir	Kotawangin Lama	Kab. Kotawaringin Barat
18	Kel. Sabaru	Sangau	Kota Palangkaraya
19	Kel. Sei Gobong	Bukit Batu	Kota Palangkaraya
20	Kel. Panjehang	Rakumpit	Kota Palangkaraya
21	Kel. Padang	Sukamara	Kab. Sukamara

8. Peresmian Desa Sadar Hukum dilaksanakan pada tanggal 12 November 2013 di Provinsi DKI Jakarta sebanyak 42 (empat puluh dua) Desa/Kel KADARKUM, terdiri dari :

NO.	DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM	KECAMATAN	KABUPATEN/KOTA
1	Kel. Halim Perdana Kusuma	Makasar	Kota Jakarta Timur
2	Kel. Kebon Pala	Makasar	Kota Jakarta Timur
3	Kel. Rawamangun	Pulo Gadung	Kota Jakarta Timur
4	Kel. Pulo Gadung	Pulo Gadung	Kota Jakarta Timur
5	Kel. Kramat Jati	Kramat Jati\Kramat Jati	Kota Jakarta Timur
6	Kel. Dukuh	Cakung	Kota Jakarta Timur
7	Kel. Eara Ternate	Duren Sawit	Kota Jakarta Timur
8	Kel. Malaka Jaya	Pasar rebo	Kota Jakarta Timur
9	Kel. Gedong	Ciracas	Kota Jakarta Timur
10	Kel. Susukan	Jatinegara	Kota Jakarta Timur
11	Kel. Balimester	Setiabudi	Kota Jakarta Timur
12	Kel. Setiabudi	Setia Budi	Kota Jakarta Selatan
13	Kel. Kuningan Timur	Kebayoran Baru	Kota Jakarta Selatan
14	Kel. Senayan	Kebayoran baru	Kota Jakarta Selatan
15	Kel. Kramat Pulo	Tebet	Kota Jakarta Selatan

16	Kel. Tebet Barat	Tebet	Kota Jakarta Selatan
17	Kel. Tebet Timur	Mampang Prapatan	Kota Jakarta Selatan
18	Kel. Bangka	Mampang prapatan	Kota Jakarta Selatan
19	Kel. Kuningan Barat	Pancoran	Kota Jakarta Selatan
20	Kel. Duren Tiga	Pancoran	Kota Jakarta Selatan
21	Kel. Cikoko	Pasar Minggu	Kota Jakarta Selatan
22	Kel. Pejaten Barat	Kebayoran Lama	Kota Jakarta Selatan
23	Kel. Pondok Pinang	Tambora	Kota Jakarta Selatan
24	Kel. Roa Malaka	Tamansari	Kota Jakarta Barat
25	Kel. Mangga Besar	Grogol Petamburan	Kota Jakarta Barat
26	Kel. Tanjung Duren Utara	Palmerah	Kota Jakarta Barat
27	Kel. Slipi	Kembangan	Kota Jakarta Barat
28	Kel. Kembangan Selatan	Cengkareng	Kota Jakarta Barat
29	Kel. Cengkareng Barat	Senen	Kota Jakarta Barat
30	Kel. Bungur	Senen	Kota Jakarta Pusat
31	Kel. Kwitang	Kemayoran	Kota Jakarta Pusat
32	Kel. Sumur Batu	Gambir	Kota Jakarta Pusat
33	Kel. Petojo Utara	Tanah Abang	Kota Jakarta Pusat
34	Kel. Karet Tengsin	Menteng	Kota Jakarta Pusat
35	Kel. Pegangsaan	Tanjung Priok	Kota Jakarta Pusat
36	Kel. Sungai Bambu	Kelapa Gading	Kota Jakarta Utara
37	Kel. Kelapa Gading Barat	Koja	Kota Jakarta Utara
38	Kel. Rawa Badak Selatan	Koja	Kota Jakarta Utara
39	Kel. Tugu Selatan	Koja	Kota Jakarta Utara
40	Kel. Koja	Kep. Seribu Selatan	Kota Jakarta Utara
41	Kel. Pulau Pari	Kep. Seribu Utara	Kab. Kepulauan Seribu
42	KelPulau Harapan		Kab. Kepulauan Seribu

8. Peresmian Desa Sadar Hukum dilaksanakan pada tanggal 05 Desember 2013 di Provinsi Bengkulu sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) Desa/Kel KADARKUM, terdiri dari :

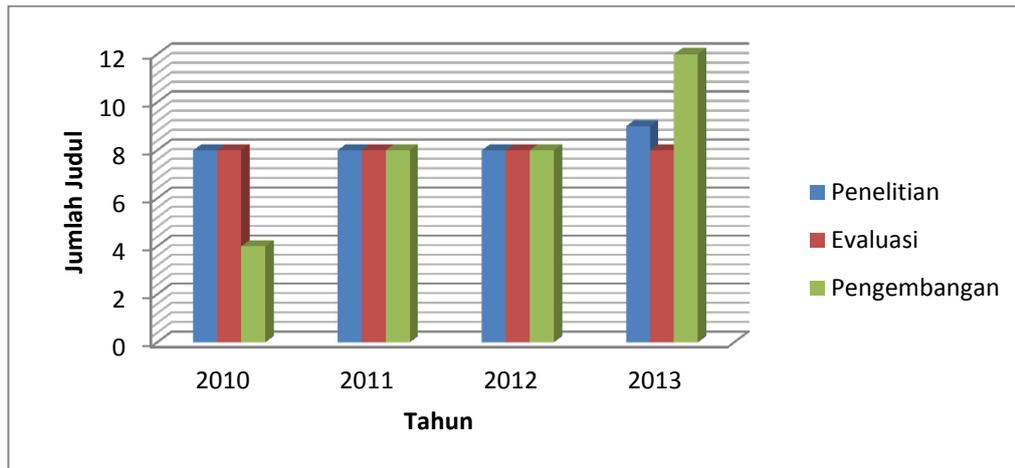
NO.	DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM	KECAMATAN	KABUPATEN/KOTA
1	Kelurahan Sawah Lebar	Ratu Agung	Kota Bengkulu
2	Kel. Cempaka Permai	Gading Cempaka	Kota Bengkulu
3	Kel. Padang Scrai	Kampung Melayu	Kota Bengkulu
4	Kel. Tanjung Jaya	Sungai Serut	Kota Bengkulu
5	Kel. Sumur Jaya	Selebar	Kota Bengkulu
6	Kel. Bentiring	Muara Bangkahulu	Kota Bengkulu
7	Kel. Tengah Padang	Teluk Segara	Kota Bengkulu
8	Kel. Anggut Atas	Ratu Samban	Kota Bengkulu
9	Kel. Sukamerindu	Teluk Segara	Kota Bengkulu
10	Kel. Rawa Makmur	Muara Bangkahulu	Kota Bengkulu
11	Desa Suka Maju	Air Nipis	Kab. Bengkulu Selatan
12	Desa Maras	Air Nipis	Kab. Bengkulu Selatan
13	Desa Suka Bandung	Air Nipis	Kab. Bengkulu Selatan
14	Desa Tanjung Beringin	Air Nipis	Kab. Bengkulu Selatan
15	Desa Air Sulau	Kedurang Ilir	Kab. Bengkulu Selatan
16	Desa Suka Jaya	Kedurang Ilir	Kab. Bengkulu Selatan
17	Desa Karang Cahya	Kedurang Ilir	Kab. Bengkulu Selatan
18	Desa Bumi Agung	Kedurang	Kab. Bengkulu Selatan
19	Desa Batu kuning	Ula Manna	Kab. Bengkulu Selatan
20	Kel. Belakang Gedung	Pasar Manna	Kab. Bengkulu Selatan
21	Kel. Kayu Kuniyit	Manna	Kab. Bengkulu Selatan
22	Desa Pasar Pino	Perwakilan Kelutum	Kab. Bengkulu Selatan
23	Kel. Kampung Baru	Manna	Kab. Bengkulu Selatan
24	Kel. Pasar Baru	Manna	Kab. Bengkulu Selatan
25	Desa Kota Titik	Pematang Tiga	Kab. Bengkulu Tengah
26	Desa Harapan Makmur	Pondok Kubang	Kab. Bengkulu Tengah
27	Desa Taba Jambu	Pondok Kubang	Kab. Bengkulu Tengah
28	Desa Talang Boseng	Pondok Kelapa	Kab. Bengkulu Tengah
29	Desa Talang Pauh	Pondok kelapa	Kab. Bengkulu Tengah
30	Desa Rindu Hati	Taba Penanjung	Kab. Bengkulu Tengah
31	Desa Kertapati	Pagar Jati	Kab. Bengkulu Tengah
32	Desa Sekayun Mudik	Bang Haji	Kabupaten Seluma
33	Kel. Napal	Seluma	Kabupaten Seluma
34	Desa Selingsingan	Seluma Utara	Kab. Rejang Lebong
35	Desa Karang jaya	Selupu Rejang	Kab. Rejang Lebong
36	Kel. Talang Benih	Curup	Kab. Rejang Lebong
37	Desa Sami Rejo	Napal Putih	Kab. Bengkulu Utara

38	Desa Tanjung Harapan	Napal Putih	Kab. Bengkulu Utara
39	Desa Bukit Berlin	Napal Putih	Kab. Bengkulu Utara
40	Desa Air Lelang	Napal Putih	Kab. Bengkulu Utara
41	Desa Air Tanang	Napal Putih	Kab. Bengkulu Utara
42	Desa Tanjung Dalam	Napal Putih	Kab. Bengkulu Utara
43	Desa Teluk Anggung	Napal Putih	Kab. Bengkulu Utara
44	Desa Talang Curup	Kerkap	Kab. Bengkulu Utara
45	Desa Serumbang	Kerkap	Kab. Bengkulu Utara
46	Desa Perbo	Kerkap	Kab. Bengkulu Utara
47	Desa Banyu Baru	Kerkap	Kab. Bengkulu Utara
48	Desa Magelang	Kerkap	Kab. Bengkulu Utara
49	Desa Padang Jaya	Padang Jaya	Kab. Bengkulu Utara
50	Desa Marga Sakti	Padang Jaya	Kab. Bengkulu Utara
51	Desa Sido Mukti	Padang Jaya	Kab. Bengkulu Utara
52	Desa Air Baus II	Hulu Palik	Kab. Bengkulu Utara
53	Desa Air Baus I	Hulu palik	Kab. Bengkulu Utara
54	Desa Air Banai	Hulu palik	Kab. Bengkulu Utara
55	Desa Taba Padang Kol	Hulu Palik	Kab. Bengkulu Utara
56	Desa Air Petai	Putri Hijau	Kab. Bengkulu Utara
57	Desa Karang Pulau	Putri Hijau	Kab. Bengkulu Utara
58	Desa Diso urit	Arga Makmur	Kab. Bengkulu Utara
59	Desa Sumber Agung	Arga Makmur	Kab. Bengkulu Utara
60	Desa Marga Bhakti	Ketahun	Kab. Bengkulu Utara
61	Desa Tebing Kaning	Kota Arga Makmur	Kab. Bengkulu Utara
62	Desa Gunung Terang	Kinal	Kabupaten Kaur
63	Desa Lebong Tambang	Lebong Utara	Kabupaten Lebong
64	Kel. Kampung Jawa	Lebong Utara	Kabupaten Lebong
65	Desa Tirta Mulya	Air Manjuto	Kab. Mukomuko
66	Desa Karang Jaya	Teras Terujung	Kab. Mukomuko
67	Desa Karya Mulya	Pondok Suguh	Kab. Mukomuko
68	Desa Sukamerindu	Kepahiang	Kabupaten Kepahiang
69	Desa Bukit Sari	Kabawetan	Kabupaten Kepahiang
70	Desa Meranti Jaya	Ujan Mas	Kabupaten Kepahiang
71	Desa Air Selimang	Seberang Musi	Kabupaten Kepahiang
72	Desa Lubang Penyamun	Marigi	Kabupaten Kepahiang
73	Desa Taba Saling	Tebat Kurai	Kabupaten Kepahiang

10. Peresmian Desa Sadar Hukum dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2013 di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sebanyak 119 (seratus sembilan belas) Desa/Kel KADARKUM, terdiri dari :

NO	DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM	KECAMATAN	KABUPATEN/KOTA
1	Kelurahan Fatukoa	Maulafa	Kota Kupang
2	Kelurahan Belo	Maulafa	Kota Kupang
3	Kelurahan Naimata	Maulafa	Kota Kupang
4	Kelurahan Kelapa Lima	Kelapa Lima	Kota Kupang
5	Kelurahan Oesapa Barat	Kelapa Lima	Kota Kupang
6	Kelurahan Tuak Daun Merah	Oebobo	Kota Kupang
7	Kelurahan Liliba	Oebobo	Kota Kupang
8	Kelurahan Liliba	Alak	Kota Kupang
9	Kelurahan Mantasi	Alak	Kota Kupang
10	Kelurahan Batuplat	Kupang Timur	Kabupaten Kupang
11	Desa Pukdale	Kupang Timur	Kabupaten Kupang
12	Desa Nunkurus	Kupang Timur	Kabupaten Kupang
13	Desa Oelatimo	Kupang Timur	Kabupaten Kupang
14	Desa Tanah Putih	Kupang Tengah	Kabupaten Kupang
15	Kelurahan Tarus	Kupang Tengah	Kabupaten Kupang
16	Desa Noelbaki	Kupang Barat	Kabupaten Kupang
17	Desa Sumlili	Kupang Barat	Kabupaten Kupang
18	Desa Lifuleo	Nekmese	Kabupaten Kupang
19	Desa Oenif	Nekmese	Kabupaten Kupang
20	Desa Bone	Teluk Mutiara	Kabupaten Alor
21	Kelurahan Wetabua	Kabola	Kabupaten Alor
22	Desa Pante Deere	Alor Selatan	Kabupaten Alor
23	Desa Subo	Pantar Tengah	Kabupaten Alor
24	Desa Tubbe	Alor Barat Daya	Kabupaten Alor
25	Desa Morba	Komodo	Kabupaten Manggarai

26	Desa Batu Cermin	Komodo	Barat
27	Desa Gorontalo	Komodo	Kabupaten Manggarai
28	Desa Golo Bilas	Komodo	Barat Kabupaten
29	Kelurahan Wae Kelambu	Boleng	Manggarai Barat
30	Desa Mbut	Boleng	Kabupaten Manggarai
31	Desa Golo Sepang	Boleng	Barat Kabupaten
32	Desa Sepang	Boleng	Manggarai Barat
33	Desa Golo Lujang	Mbeliling	Kabupaten Manggarai
34	Desa Liang Dara	Mbeliling	Barat Kabupaten
35	Desa Tiwu Riwing	Sano Nggoang	Manggarai Barat
36	Desa Golo Leleng	Sano Nggoang	Kabupaten Manggarai
37	Desa Nampar Macing	Lembor	Barat Kabupaten
38	Desa Daleng	Lembor	Manggarai Barat
39	Desa Poco Rutang	Lembor	Kabupaten Manggarai
40	Kelurahan Tangge	Lembor Selatan	Barat Kabupaten
42	Desa Munting	Lembor Selatan	Manggarai Barat
43	Desa Nangalili	Lembor Selatan	Kabupaten Manggarai
44	Desa Surunumbeng	Kecamatan Welak	Barat Kabupaten
45	Desa Pengka	Kecamatan Welak	Manggarai Barat
46	Desa Semang	Kecamatan Welak	Kabupaten Manggarai
47	Desa Watu Umpu	Kecamatan Welak	Barat Kabupaten
48	Desa Dunta	Kuwus	Manggarai Barat
50	Desa Sama	Kuwus	Kabupaten Manggarai
49	Kelurahan Nantal	Kuwus	Barat Kabupaten
50	Desa Golo Lewe	Ndoso	Manggarai Barat
51	Desa Tentang	Ndoso	Kabupaten Manggarai
52	Desa Waning	Ndoso	Barat Kabupaten
53	Desa Ndoso	Macang Pacar	Manggarai Barat
54	Desa Rego	Macang Pacar	Kabupaten Manggarai
55	Desa Compang	Macang Pacar	Barat Kabupaten
56	Desa Nanga Kantor	Lamaknen Selatan	Manggarai Barat
57	Desa Lakmaras	Lamaknen	Kabupaten Manggarai
58	Desa Kewar	Ranhat	Barat Kabupaten
59	Desa Tobe	Lasiolat	Manggarai Barat
60	Desa Baudaok	Tasifeto Timur	Kabupaten Manggarai
61	Desa Tulakadi	Kota Atambua	Barat Kabupaten
62	Kelurahan Tenukiik	Atambua Barat	Manggarai Barat
63	Kelurahan Tulamale	Atambua Selatan	Kabupaten Manggarai
64	Kelurahan Manuman	Kakuluk Mesak	Barat Kabupaten
65	Kelurahan Leosama	Tasifeto Barat	Manggarai Barat
66	Kelurahan Naekasa	Nanaet Dubesi	Kabupaten Manggarai
67	Desa Nakaenoe	Raimanuk	Barat Kabupaten
68	Desa Tasain	Malaka Timur	Manggarai Barat
69	Desa Kusa	Laen Manen	Kabupaten Manggarai
70	Desa Bisesmus	Io Kufeu	Barat Kabupaten
71	Desa Fatoin	Sasitamean	Manggarai Barat
72	Desa Beaneno	Botin Leobe	Kabupaten Belu
73	Desa Babotin Maemina	Malaka Tengah	Kabupaten Belu
74	Desa Kletek	Kobalima	Kabupaten Belu
75	Desa Babulu Selatan	Kobalima Timur	Kabupaten Belu
76	Desa Alas Utara	Wewiku	Kabupaten Belu
77	Desa Webe	Weliman	Kabupaten Belu
78	Desa Taaba	Malaka Barat	Kabupaten Belu
79	Desa Loefoun	Rinhat	Kabupaten Belu
80	Desa Weain	Lobalain	Kabupaten Belu
81	Desa Kolobolon	Lobalain	Kabupaten Belu
82	Desa Kuli	Lobalain	Kabupaten Belu
83	Desa Haloama	Rote Tengah	Kabupaten Belu
84	Desa Suebela	Rote Selatan	Kabupaten Belu
85	Desa Dodaek	Pantai Baru	Kabupaten Belu
86	Kelurahan Olafulihaan	Rote Timur	Kabupaten Belu
87	Desa Mukekuku	Rote Barat Daya	Kabupaten Belu
88	Desa Lalukoen	Rote Barat	Kabupaten Belu
89	Desa Nemberala	Landuloko	Kabupaten Belu
90	Desa Bolatena	Sabu Barat	Kabupaten Belu
91	Desa Menia	Sabu Barat	Kabupaten Belu
92	Desa Teriwu	Sabu Barat	Kabupaten Belu
93	Desa Titinalede	Sabu Liae	Kabupaten Belu
94	Desa Deme	Sabu Timur	Kabupaten Belu
95	Desa Keliha	Sabu Tengah	Kabupaten Belu
96	Desa Loboaju	Hawu Mehara	Kabupaten Rote Ndao
97	Desa Moke	Raijua	Kabupaten Rote Ndao
98	Kelurahan Ledenuu	Satar Mese	Kabupaten Rote Ndao
99	Desa Wewo	Lewolema	Kabupaten Rote Ndao
100	Desa Lewobelen	Titihena	Kabupaten Rote Ndao
101	Desa Dua Tana	Tanjung Bunga	Kabupaten Rote Ndao



Kegiatan penelitian, evaluasi dan pengembangan tahun 2013 sebanyak 29 judul yang telah dalam tahap finalisasi akhir, dan hasilnya telah dituangkan kedalam Laporan Akhir masing-masing kegiatan penelitian, evaluasi dan pengembangan. Rekomendasi yang dilaporkan di Laporan Akhir ini dijadikan salah satu bahan dalam perumusan kebijakan yang disampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM R.I.

2. IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI

Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM telah melaksanakan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi sejak tahun 2010. Pada tahun 2011 telah dibentuk Tim Reformasi Birokrasi Badan Penelitian dan Pengembangan HAM berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Nomor : PHM-58.OT.01.03 Tahun 2011 dan Tim Penyusun Dokumen Reformasi Birokrasi Badan Litbang HAM tahun 2011 sesuai Keputusan Kepala Badan Nomor PHM-109.OT.01.03 Tahun 2011, tanggal 30 Mei 2011. Tim ini diperbaharui dengan Keputusan Kepala Badan Nomor PHM-24.OT.01.03 Tahun 2012, tanggal 17 Januari 2012.

Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi pada Badan Penelitian dan Pengembangan HAM sejak tahun 2010 telah dilaksanakan serangkaian kegiatan berupa : 1) Usul penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Badan Litbang HAM, 2) Penyempurnaan uraian tugas dan fungsi sesuai dengan organisasi dan tatalaksana terbaru, 3) Penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP), 4) Pembuatan Sasaran Kerja Pegawai (SKP), 5) Evaluasi Jabatan, 6) Analisa Jabatan dan lain-lain. Untuk memantapkan dan meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada tahun 2013, Balitbang HAM memprioritaskan agenda program melalui 8 area perubahan Reformasi Birokrasi sesuai dengan Peraturan Presiden No.81 tahun 2010 dengan agenda sebagai berikut :

a. Organisasi dengan melakukan :

Dalam rangka mewujudkan penataan organisasi yang tepat fungsi, sesuai dengan usulan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, dilakukan restrukturisasi dengan penggabungan fungsi penelitian ke dalam suatu wadah, di mana Sekretariat Jenderal mengusulkan penyatuan Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional BPHN dan Pusjianbang menjadi satu. Dalam perkembangan pembahasan, Balitbang HAM dan BPHN mengusulkan penggabungan pada unit Balitbang HAM dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, sementara struktur Pusjianbang secara keseluruhan tergabung pada struktur Balitbang HAM. Nomenklatur yang diusulkan adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, dengan draft struktur unit kerja eselon II sebagai berikut :

1. Sekretariat Balitbang Hukum dan HAM;
2. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum;
3. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Hukum dan HAM;
4. Pusat Data, Informasi dan Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM.

b. Penyusunan Tata Laksana Balitbang HAM, dengan melakukan Penyempurnaan dan implementasi SOP Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi. Pada tahun 2013, seluruh unit eselon 1 pada Kementerian Hukum dan HAM RI diminta untuk menyempurnakan SOP yang telah ada dengan :

- Membuat SOP yang memiliki kesamaan langkah berdasarkan sifat dan muatan kegiatannya dibuat menjadi SOP Generik,
- Menambah SOP yang sekiranya perlu dibuat, dan
- Merubah/merevisi SOP yang telah ada agar sesuai dengan kebutuhan dan pelaksanaan.

Dengan demikian jumlah SOP Balitbang HAM untuk tahun 2013 sebanyak 681, dengan perincian sebagai berikut :

1. Sekretariat

- | | |
|---------------------------------|-------|
| a. Bagian Program dan Pelaporan | = 110 |
| b. Bagian Keuangan | = 19 |
| c. Bagian Kepegawaian | = 80 |
| d. Bagian Umum | = 41 |
| e. Bagian Humas dan Informasi | = 7 |

2. Puslitbang Hak Asasi Manusia pada Balitbang HAM (SOP Generik)

- | | |
|---|------|
| a. Bidang Penelitian (4 pusat x 19 SOP) | = 76 |
|---|------|

b. Bidang Pengembangan (4 pusat x 45 SOP) = 180

c. Bidang Evaluasi (4 Pusat x 42 SOP) = 168

- c. Penataan Peraturan Perundang-Undangan dengan melakukan Penyusunan Regulasi Baru dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dan dalam rangka Reformasi Birokrasi seperti halnya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.DL.08.01 tahun 2009 tentang Panduan Penelitian di bidang Hak Asasi Manusia yang menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan penelitian dan evaluasi dari tahap persiapan sampai tahap pelaporan dan melakukan implementasi Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam setiap tahapan kegiatan penelitian, evaluasi dan pengembangan oleh setiap Pusat-pusat Litbang dalam lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan HAM.

Untuk memperkuat Sumber Daya Manusia setiap tahun dilakukan usulan recruitment pegawai, dan dalam rangka perwujudan peningkatan sumber daya manusia aparatur yang berintegritas netral, kompeten, capable dan profesional juga pemberian pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat dan peningkatan pola pikir birokrasi dengan integritas dan kinerja tinggi, maka dilakukan kegiatan-kegiatan seperti : *capacity building* yang bermuatan peningkatan disiplin, kegiatan peningkatan kemampuan fungsional peneliti dan fungsional umum dengan Bimbingan teknis metodologi penelitian, bimbingan teknis penulisan karya ilmiah, bimbingan teknis penanganan HAM dan Bimbingan teknis lainnya; selain itu Balitbang HAM juga mengirim pegawai-pegawai di lingkungan Balitbang HAM untuk mengikuti diklat-diklat yang diselenggarakan baik di lingkup Kementerian maupun di luar Kementerian Hukum dan HAM. Sebagai contoh, *capacity building* HAM dilaksanakan pada tanggal 26 – 28 Februari 2013 di Hotel Royal Safari Garden – Cisarua, Bogor Jl. Raya Puncak 601 - Cisarua, Bogor yang diikuti oleh seluruhnya pejabat dan staf yaitu 135 pegawai Balitbang HAM; Seiring dengan adanya tunjangan kinerja melalui sistem remunerasi Kementerian Hukum dan HAM Balitbang HAM telah menerapkan sistem pembayaran remunerasi berdasarkan rekap absensi pegawai, dengan pengawasan kehadiran pegawai dapat lebih terpantau secara continue.

- d. Penguatan Pengawasan dilakukan melalui :
- 1) Penataan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang dilaksanakan oleh sebuah Tim sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Litbang HAM Nomor : PHM.07-KU.03.01 tahun 2012 tanggal 11 Januari 2012 tentang Pembentukan

Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam mewujudkan peningkatan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi Balitbang HAM.

- 2) Peningkatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
- 3) Peningkatan pengawasan melekat (waskat) atasan langsung.

e. Penguatan Akuntabilitas Kinerja dilakukan melalui :

- 1) Penguatan Akuntabilitas Kinerja Peneliti dan staf pendukung program penelitian dan pengembangan dilakukan melalui perencanaan penelitian, pengembangan dan evaluasi yang baik agar menghasilkan laporan penelitian, pengembangan dan evaluasi yang berkualitas.
- 2) Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Balitbang HAM memuat tentang capaian kinerja yang dapat terukur.
- 3) Pengembangan Sistem Manajemen Kinerja Organisasi terutama dalam melakukan pengukuran capaian kinerja dilakukan melalui penyebaran kuesioner untuk memperoleh tanggapan, data dan masukan dari masyarakat dan stakeholders tentang hasil penelitian, pengembangan dan evaluasi yang telah dilaksanakan oleh Balitbang HAM selama periode 3 (tiga) tahun terakhir.
- 4) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Balitbang HAM.

Dalam rangka optimalisasi hasil penelitian dan pengembangan dan peningkatan akuntabilitas kinerja peneliti, Balitbang HAM telah menjalin kerjasama dengan pemangku kepentingan, yaitu Kementerian Negara Riset dan Teknologi dan beberapa Pemerintah Daerah untuk melaksanakan penelitian dan pengkajian atas isu aktual yang sedang berkembang serta masalah pemenuhan HAM yang terjadi di daerah. Hasil penelitian dari kerjasama tersebut telah dipublikasikan dan disampaikan kepada stakeholders terkait yang sudah barang tentu secara tidak langsung berdampak pada implementasi reformasi birokrasi.

- f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik melalui Penerapan Standar Pelayanan antara lain melalui kegiatan penelitian, evaluasi, pengkajian dalam penanganan kasus/isu aktual yang sedang terjadi di masyarakat, kegiatan pengembangan dengan penyelenggaraan Seminar/Lokakarya, workshop, website, pameran, dan lain-lain. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, tahun 2013 Balitbang HAM melaksanakan 9 (sembilan) kegiatan penelitian, 12 (duabelas) kegiatan pengembangan, 8 (delapan) kegiatan evaluasi dan 68 (enam puluh delapan) kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.

Sampai dengan akhir bulan Desember 2013 pelaksanaan kegiatan tersebut telah mencapai 100 %.

Sebagai upaya merealisasikan aksesibilitas terhadap masyarakat sekaligus memperingati hari HAM sedunia, Badan Penelitian dan Pengembangan HAM telah menyelenggarakan 2 (dua) kegiatan yaitu: Penganugerahan Bung Hatta Award untuk Hak Asasi Manusia yang diberikan kepada Pemerintahan Daerah Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, dan Lomba menulis artikel populer Hak Asasi Manusia bagi Pelajar SLTA atau sederajat se wilayah DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

- g. Perubahan pola pikir (mindset) dan budaya kerja (culture set) aparatur dengan penegakan disiplin kerja, penyelesaian tugas pekerjaan tepat waktu, pembudayaan bekerja dengan kreasi dan secara improvisasi tanpa harus menunggu perintah dari atasan. Secara khusus, mengenai Pola Pikir (mindset) dan Budaya Kerja (culture set) dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahapan yaitu perumusan rencana, tahap pelaksanaan pola pikir dan budaya kerja serta penguatan hasil perubahan.

Tahap perumusan dimulai dengan pemetaan terhadap pemangku kepentingan, mengidentifikasi resistensi atau penolakan, mengenali besaran perubahan yang diinginkan, melakukan assesmen kesiapan organisasi untuk berubah, mengembangkan strategi perubahan, mengembangkan strategi komunikasi, merumuskan dan mengidentifikasi struktur yang baru. Tahap kedua adalah tahap pelaksanaan pola pikir dan budaya kerja, yaitu dengan mengintegrasikan program kerja, mengelola resistensi/penolakan, sedangkan tahap ketiga adalah penguatan hasil perubahan dengan jalan mengukur tingkat keberhasilan, mengumpulkan dan menganalisa umpan balik, mendiagnosa kesenjangan, mengimplementasikan tindakan perbaikan, serta memberikan penghargaan bagi pegawai yang berhasil. Sosialisasi dan internalisasi pola pikir dan budaya kerja dilaksanakan sejak tahun 2011. Sasarannya adalah seluruh pegawai Balitbang HAM, pemangku kepentingan pendukung, pemangku kepentingan kunci, dengan komunikator Pimpinan unit eselon II Balitbang HAM, Tim Reformasi Birokrasi Balitbang HAM dengan menggunakan media yang disesuaikan dengan materi antara lain melalui rapat pimpinan, sosialisasi, bimbingan teknis, pengarahan pada saat capacity building, rapat kerja tahunan, website Balitbang HAM, rapat-rapat insidental, dan rapat bulanan Balitbang HAM.

K. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia

1. Realisasi Anggaran

Berdasarkan hasil laporan keuangan yang dikeluarkan oleh Bagian Keuangan maka realiasi anggaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan HAM per 31 Desember 2013 sebesar Rp. **71.778.537.713,-** atau telah mencapai **88,90%** dari anggaran yang terdapat dalam DIPA BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp.80.656.908.000,-. Berikut perinciannya:

Realisasi Anggaran BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2013

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	Pusat Pengembangan Fungsional dan HAM	Rp. 7.000.000.000,-	Rp.6.609.761.379,-	94,43
2	Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen	Rp. 8.155.000.000,-	Rp. 7.550.734.060,-	92,59
3	Pusat Pengembangan Teknis	Rp. 7.400.000.000,-	Rp. 6.756.544.239,-	91,30
4	Dukungan Manajemen	Rp. 31.004.394.000,-	Rp. 28.893.293.162,-	91,47
5	AKIP	Rp. 13.512.703.000,-	Rp. 12.228.996.215,-	90,50
6	AIM	Rp. 13.001.213.000,-	Rp. 9.739.208.658,-	74,91
Total		Rp.80.656.908.000,-	Rp.71.778.537.713,-	88,90

Sumber : Laporan SAI BPSDM Hukum dan HAM, Tanggal 31 Desember 2013

Berikut penjelasannya .

- Pusat Pengembangan Fungsional dan HAM melakukan penyerapan sebanyak 94,43% atau Rp. 6.609.761.379,- dari anggaran yang terdapat dalam DIPA BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp.7.000.000.000,-.
- Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen melakukan penyerapan sebanyak 92,59% atau Rp. 7.550.734.060,- dari anggaran yang terdapat dalam DIPA BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp.8.155.000.000,-.
- Pusat Pengembangan Teknis melakukan penyerapan sebanyak 91,30% atau Rp. 6.756.544.239,- dari anggaran yang terdapat dalam DIPA BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp. 7.400.000.000,-.
- Dukungan Manajemen melakukan penyerapan sebanyak 91,47% atau Rp. 28.893.293.162,- dari anggaran yang terdapat dalam DIPA BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp. 31.587.992.000,-.
- Akademi Ilmu Pemasarakatan melakukan penyerapan sebanyak 90,50% atau Rp. 12.228.996.215,- dari anggaran yang terdapat dalam DIPA BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp. 13.512.703.000,-.

f. Akademi Imigrasi melakukan penyerapan sebanyak 74,91% atau Rp.9.739.208.658,- dari anggaran yang terdapat dalam DIPA BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp. 13.001.213.000,-.

2. Pencapaian Output DIKLAT DIPA BPSDM Hukum dan HAM.

a. Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen.

Capaian kegiatan pada Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut :

1) Bidang Program

Bidang Program Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen pada Tahun 2013 melakukan 3 (Tiga) kegiatan, berikut perinciannya:

NO	Kegiatan	Output
1	FGD Pengembangan Kurikulum dan Modul Diklat Manajemen Publik	Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; Kebijakan Pelayanan Publik Dilingkungan Kemenkumham RI; Standar Pelayanan Publik dan Indeks Kepuasan Masyarakat; Pola Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kemenkumham; Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Dilingkungan Kemenkumham.
2	FGD Pengembangan Kurikulum dan Modul Diklat Administrasi Perkantoran Berbasis Teknologi Informasi	Manajemen Arsip Modern; Komunikasi dan Kerjasama; Manajemen Perkantoran Modern; Komunikasi dan Kerjasama; Tata Cara Pembuatan Laporan; Teknologi Informasi utk Perkantoran Modern; Manajemen Persuratan.
3	FGD Penyusunan Jenjang dan Kurikulum, Standarisasi, Rencana dan Program Diklat Kepemimpinan	Peraturan Kepala LAN Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tk.III; Peraturan Kepala LAN Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tk IV; Peraturan Kepala LAN Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Prajabatan Golongan I dan II; Peraturan Kepala LAN Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Prajabatan Golongan III.

2) Bidang Penyelenggaraan Diklat

Bidang Penyelenggaraan Diklat Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen pada Tahun 2013 menyelenggarakan 15 (Lima Belas) Pendidikan dan Pelatihan dengan jumlah lulusan sebanyak 1.212 orang, dengan perincian sebagai berikut:

DIPA BPSDM HUKUM DAN HAM

NO	DIKLAT	TANGGAL PELAKSANAAN	OUTPUT		
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Training Of Course (TOC)	04 s.d 15 Februari 2013	16	14	30
2	Management Of Training (MOT)	06 s.d 21 Februari 2013	16	14	30
3	Kepemimpinan	01 April s.d 17 Mei 2013	28	12	40

	Tk.III/2013 Gel 1				
4	Kepemimpinan Tk.III/2013 Gel 2	26 Mei s.d 13 Juli 2013	31	9	40
5	Kepemimpinan Tk.III/2013 Gel 3	26 Agust s.d 11 Okt 2013	30	10	40
6	Kepemimpinan Tk.IV/2013 Gel 1	01 April s.d 07 Mei 2013	28	12	40
7	Kepemimpinan Tk.IV/2013 Gel 2	23 April s.d 28 Mei 2013	28	11	39
8	Kepemimpinan Tk.IV/2013 Gel 3	2 Juni s/d 8 Juli 2013	29	11	40
9	Kepemimpinan Pasca Assesment Pelatihan Peningkatan Kompetensi Manajerial Level III	1 s/d 4 Oktober 2013	25	7	32
10	Kepemimpinan Pasca Assesment I Pelatihan Peningkatan Kompetensi Manajerial Level IV	7 s.d 9 Okt 2013	30	7	37
11	Kepemimpinan Pasca Assesment II Pelatihan Peningkatan Kompetensi Manajerial Level IV	10 s.d 12 Okt 2013	29	4	33
12	Bimtek Keuangan	12 s/d 14 Juni 2013	20	10	30
13	Training of Trainer (TOT)	19 sd 24 Desember 2013	22	8	30
14	Penguatan Kapasitas	12 sd 23 Desember 2013	14	2	16
15	Kepemimpinan Tk. II	Februari s/d Des 2013	19	6	25
TOTAL			365	137	502

DIPA Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

NO	DIKLAT / BIMTEK	TANGGAL PELAKSANAAN	OUTPUT		
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Kepemimpinan Tk.III/2013 (AHU)	27 Okt s.d 14 Des 2013	27	9	36
2	Kepemimpinan Tk.IV/2013 (AHU)	5 Nov s.d 11 Des 2013	23	17	40
Total Peserta			50	26	76

DIPA DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

NO	DIKLAT / BIMTEK	TANGGAL PELAKSANAAN	OUTPUT		
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Kepemimpinan Tk.III/2013 (Imigrasi)	13 Nov s.d 31 Des 2013	34	5	39
Total Peserta			34	5	39

DIPA SEKRETARIAT JENDERAL

NO	DIKLAT / BIMTEK	TANGGAL PELAKSANAAN	OUTPUT		
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Prajabatan Golongan III (gelombang I)	15 Sept s.d 16 Okt 2013	75	124	199
2	Prajabatan Golongan III (gelombang II)	10 Nov s.d 3 Des 2013	75	124	199

NO	DIKLAT / BIMTEK	TANGGAL PELAKSANAAN	OUTPUT		
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah
3	Prajabatan Golongan III (gelombang III)	10 Nov s.d 3 Des 2013	84	113	197
	Total Peserta		234	361	595

- Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen Tahun 2013 menghasilkan 1.212 orang lulusan Diklat dengan rincian sebagai berikut :
 - 502 orang lulusan diklat melalui anggaran DIPA BPSDM Hukum dan HAM;
 - 39 orang lulusan diklat melalui anggaran PNPB Direktorat Jenderal Imigrasi;
 - 76 orang lulusan diklat melalui anggaran PNPB Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
 - 595 orang lulusan diklat melalui anggaran DIPA Sekretariat Jenderal

3) Bidang Evaluasi dan Laporan

Bidang Evaluasi dan Laporan Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen pada Tahun 2013 melakukan 2 (dua) kegiatan, berikut perinciannya:

No	Kegiatan	Output
1	Evaluasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Alumni Diklat Kepemimpinan dan Manajemen	95% peserta alumni Diklat Kepemimpinan dan Manajemen meningkat kinerjanya dan 5% tidak meningkat kinerjanya dilihat dari: <ul style="list-style-type: none"> ➢ Perubahan perilaku sikap dan peningkatan kualitas dalam pelaksanaan tugas; ➢ Peningkatan pengetahuan dan wawasan; ➢ Peningkatan kepuasan kerja dari atasan, rekan sejawat, maupun staf dibawahnya.
2	Evaluasi dan Penyusunan Laporan Per Kegiatan Diklat Kepemimpinan dan Manajemen (11 Laporan)	Tersusunnya Dokumen Laporan hasil Evaluasi terhadap 15 Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan dan Manajemen di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM

- ❖ Dari ketiga Bidang yang ada pada Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen, yaitu Bidang Program, Bidang Penyelenggaraan Diklat dan Bidang Evaluasi dan Laporan pada Tahun 2013 Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen melakukan penyerapan anggaran sebesar Rp. 7.550.734.060,- atau 92,59% dari anggaran yang terdapat dalam pagu anggaran BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp. 8.155.000.000,- Hal ini disebabkan adanya penghematan dalam perjalanan dinas peserta pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen;

b. Pusat Pengembangan Fungsional dan HAM.

Capaian kegiatan pada Pusat Pengembangan Fungsional dan HAM Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut :

1) Bidang Program

Bidang Program Pusat Pengembangan Fungsional dan HAM pada Tahun 2013 melakukan 9 (Sembilan) kegiatan, berikut perinciannya:

No	Kegiatan	Output
1	Penyusunan Kurikulum Diklat HAM tingkat Dasar	Menghasilkan Kurikulum : 1. Konsep Dasar HAM 2. Instrumen Nasional HAM 3. Instrumen – Instrumen Internasional HAM 4. Badan-Badan HAM 5. Pelanggaran HAM dan Mekanisme Penanganannya 6. Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara 7. Implementasi Pemenuhan HAM
2	Penyusunan Kurikulum Diklat Pemeriksa HKI Tingkat pertama	Menghasilkan Kurikulum : 1. Pemeriksa Substantif Paten 1 2. Pemeriksa Substantif Paten 2 3. Pemeriksa Substantif Merek 1 4. Pemeriksa Substantif Merek 2 5. Pemeliharaan, Mutasi dan Lisensi Paten 6. Klasifikasi dan Penelusuran Paten 7. Klasifikasi Barang dan Jasa Merek 8. Litigasi Paten 9. Litigasi Merek 10. Waralaba 11. Transfer Teknologi
3	Penyusunan Modul diklat Pengelolaan Perpustakaan	Menghasilkan 8 Modul : 1. Praktik Kerja Perpustakaan 2. Pengantar Teknologi Informasi 3. Perawatan Bahan Pustaka 4. Katalogisasi 5. Layanan Perpustakaan 6. Pengembangan Koleksi 7. Promosi Perpustakaan 8. Klasifikasi dan Tajuk Subjek
4	Penyusunan Modul diklat Bendaharawan	Menghasilkan 8 Modul : 1. Etika Profesi Bendaharawan

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Bahan Ajar Perpajakan Bendaharawan Pengeluaran 3. Peraturan Terbaru Terkait Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara 4. Pengelolaan uang persediaan 5. Sistem penerimaan dan pengeluaran Negara 6. Pelaporan dan pertanggungjawaban bendahara Pengeluaran 7. Pengajuan dan Pembayaran Tagihan 8. Pembukuan Bendahara Pengeluaran
5	Penyusunan Modul diklat HAM angkatan II	<p>Menghasilkan 9 Modul :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinamika kelompok di dalam dan di ruang terbuka 2. Konsep Dasar HAM 3. Instrumen-instrumen internasional hak-hak Asasi Manusia 4. Kewajiban dan Tanggungjawab Negara 5. Badan-Badan Hak Asasi Manusia 6. Pelanggaran HAM dan Mekanisme Penanganannya 7. Implementasi Pemenuhan HAM 8. Instrumen Nasional Hak Asasi Manusia 9. Pedoman Penyelenggaraan Diklat HAM
6	Penyusunan Modul diklat dasar-dasar HKI	<p>Menghasilkan 10 Modul :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan dan Penegakan Hukum Sistem HKI di Indonesia 2. Perlindungan dan Perkembangan Desain Industri dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu 3. Dasar Perlindungan dan Perkembangan Paten 4. Perlindungan dan Perkembangan Merek dan Indikasi Geografis 5. Perlindungan dan Perkembangan Hak Cipta dan Rahasia Dagang 6. Membangun Hubungan Kerja 7. Dinamika Kelompok di Dalam dan Diruang Terbuka 8. Isu Aktual Bidang HKI I 9. Isu Aktual Bidang HKI II 10. Pedoman Penyelenggaraan Diklat Dasar-Dasar HKI
7	Judul Modul & Pedoman Standarisasi Diklat Pemeriksa HKI Pertama	<p>Menghasilkan 27 Modul :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konvensi Internasional Di Bidang Desain Industri 2. Litigasi Desain Industri 3. Klasifikasi Barang Berdasarkan Locarno Agreement dan Pemakaiannya di Indonesia 4. Penelusuran Desain Industri 5. Permohonan Pendaftaran Desain Industri 6. Drafting Desain Industri 7. Pengantar Hukum Desain Industri 8. Pemeriksaan Substantif Desain Industri 9. Pedoman Standarisasi Desain Industri 10. Pengantar Hukum Paten 11. Persyaratan Administrasi dan Pemeriksaan Fisik Permohonan Paten 12. Litigasi Paten

		<ul style="list-style-type: none"> 13. Pemeliharaan, Mutasi, dan Lisensi Paten 14. Pemeriksaan Substantif Paten II (kebaruan, langkah inventif keterterapan dalam industri) 15. Konvensi Internasional di Bidang Paten 16. Pemeriksaan Substantif Paten (kejelasan, invensi, satu kesatuan invensi dan amandemen) 17. Pemeriksaan Substantif Paten Untuk Klasifikasi dan Penelusuran 18. Pedoman Standarisasi Paten 19. Prosedur Pemeriksaan Substantif Merek 20. Sistem dan Lingkup Permohonan Merek 21. Teknik Pemeriksaan Substantif Merek 22. Klasifikasi Barang dan Jasa 23. Jangka Waktu Perlindungan dan Perpanjangan Merek Terdaftar 24. Konvensi Internasional Tentang Merek 25. Litigasi Merek 26. Pengantar Hukum Merek 27. Pedoman Standarisasi Merek
8	at Penguatan Tenaga Perancang	<p>Menghasilkan 9 Modul :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Jenis, Fungsi dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan 2. Pengharmonisan, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Peraturan Perundang-Undangan 3. Membangun Team 4. Metodologi Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan 5. Proses Litigasi Perundang-Undangan 6. Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 7. Dasar-Dasar Konstitusi 8. Proses Penyusunan Peraturan Daerah 9. Pedoman Standarisasi Diklat
9	Judul Modul Diklat Analisis Kepegawaian	<p>Menghasilkan 13 Modul :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Formasi PNS 2. Pemberhentian PNS 3. Pendidikan dan Pelatihan PNS 4. Pengembangan Budaya Kerjas PNS 5. Pensiun PNS 6. Pengadaan PNS 7. Kompensasi PNS 8. Pembinaan Jiwa Korps & Kode Etik PNS 9. Sasaran Kinerja Pegawai 10. Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS 11. Kenaikan Pangkat PNS 12. Disiplin PNS 13. Himpunan Peraturan tentang Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian

2) Bidang Penyelenggaraan Diklat

Bidang Penyelenggaraan Diklat Pusat Pengembangan Fungsional dan HAM pada Tahun 2013 menyelenggarakan 29 (Dua puluh sembilan) Pendidikan dan Pelatihan dengan jumlah lulusan sebanyak **885** orang, dengan perincian sebagai berikut:

DIPA BPSDM HUKUM DAN HAM

NO	DIKLAT / BIMTEK	TANGGAL PELAKSANAAN	OUTPUT		
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Bimtek Penulisan Karya Ilmiah	06 s.d 08 Februari 2013	15	15	30
2	Dasar-dasar Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Angkatan I	13 s.d 26 Februari 2013	18	12	30
3	Peningkatan Kapasitas HAM bagi Petugas Pemasarakatan di Kanwil Yogyakarta	20 s.d 22 Februari 2013	20	10	30
4	HAM Angkatan I	17 s.d 23 Februari 2013	20	10	30
5	Peningkatan Kapasitas Teknis Penyusunan PERDA bagi Aparatur PEMPROV Jawa Timur	26 s.d 28 Maret 2013	18	12	30
6	HAM Angkatan II	12 s.d 18 May 2013	12	18	30
7	Dasar-dasar Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Angkatan II	15 s.d 28 May 2013	18	12	30
8	Penguatan Tenaga Perancang	30 Juni s.d 9 Juli 2013	20	10	30
9	Peningkatan Kapasitas Teknis Penyusunan PERDA bagi Aparatur PEMPROV Bali	29 s.d 31 Mei 2013	18	12	30
10	Analisa Kepegawaian Keahlian	16 s.d 29 Juni 2013	17	13	30
11	Peningkatan Kapasitas HAM bagi Petugas Pemasarakatan di Kanwil Kalimantan Barat	20 s.d 22 Juni 2013	24	6	30
12	Pemeriksa HKI	23 Juni s.d 06 Juli 2013	18	12	30
13	Peningkatan Kapasitas HAM bagi Petugas Pemasarakatan di Kanwil Nusa Tenggara Barat	26 s.d 28 Juni 2013	21	9	30
14	Peningkatan Kapasitas Teknis Penyusunan PERDA bagi Aparatur PEMPROV Sumater Utara	04 s.d 06 Juli 2013	14	16	30
15	HAM Angkatan III	08 - 14 September 2013	12	18	30
16	Bendaharawan Gelombang I	17 Sept s.d 07 Okt 2013	18	12	30
17	Bendaharawan Gelombang II	01 Okt s.d 21 Okt 2013	18	12	30
18	Bendaharawan Gelombang III	23 Okt s/d 12 Nov 2013	17	12	29
19	Pengelola Perpustakaan	08 Okt s.d 28 Okt 2013	18	8	26
20	Peningkatan Kapasitas HAM bagi petugas PAS Kanwil Kepri	25 s/d 27 Sept 2013	24	6	30
21	Peningkatan Kapasitas HAM Bagi Petugas PAS Kanwil Sulawesi Tengah	31 Okt s/d 2 Nov 2013	24	1	25
22	Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan (Tk.I)	6 Mei sd 19 Juli 2013	25	15	40
23	Diklat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (e-AKIP)	18 s/d 22 Nop 2013	18	12	30
24	Peningkatan Kapasitas HAM Bagi Petugas PAS Kanwil Banten (Serang)	13 s/d 15 Nop 2013	21	4	25
TOTAL			448	267	715

DIPA Direktorat Jenderal Imigrasi

NO	DIKLAT / BIMTEK	TANGGAL PELAKSANAAN	OUTPUT		
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Bendaharawan (PNBP Imigrasi)	27 Agst s.d 16 Sept 2013	18	12	30
2	PPNS gel I (PNBP Imigrasi)	30 Sept s.d 28 Nov 2013	28	2	30
3	PPNS gel II (PNBP Imigrasi)	07 Okt s.d 07 Nov 2013	28	2	30
	Total Peserta		74	16	90

DIPA Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU)

NO	DIKLAT / BIMTEK	TANGGAL PELAKSANAAN	OUTPUT		
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Diklat Audit Pengadaan Barang dan Jasa	25 Nov s/d 6 Des 2013	23	17	40
2	Diklat Pelayanan Publik	4 s/d 17 Des 2013	29	11	40
	Total Peserta		52	28	80

- Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dan HAM Tahun 2013 menghasilkan 885 orang lulusan Diklat dengan rincian sebagai berikut :
 - 715 orang lulusan diklat melalui anggaran DIPA BPSDM Hukum dan HAM;
 - 90 orang lulusan diklat melalui anggaran PNBP Direktorat Jenderal Imigrasi;
 - 80 orang lulusan diklat melalui anggaran PNBP Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU)

3) Bidang Evaluasi dan Laporan

Bidang Evaluasi dan Laporan Pusat Pengembangan Fungsional dan HAM pada Tahun 2013 melakukan 3 (tiga) kegiatan, berikut perinciannya:

No	Kegiatan	Output
1	Evaluasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Alumni Diklat Fungsional dan HAM	96,6% (170 orang dari 179 orang alumni yang di ambil datanya sedangkan yang tidak meningkat sebanyak 3,4% atau 5 orang) peserta alumni Diklat Fungsional dan HAM meningkat kinerjanya dilihat dari : <ul style="list-style-type: none"> ➢ Perubahan perilaku sikap dan peningkatan kualitas dalam pelaksanaan tugas; ➢ Peningkatan pengetahuan dan wawasan;

		➤ Peningkatan kepuasan kerja dari atasan, rekan sejawat, maupun staf dibawahnya.
2	Evaluasi dan Penyusunan Laporan Per Kegiatan Diklat Fungsional dan HAM (11 Laporan)	Tersusunnya Dokumen Laporan hasil Evaluasi terhadap 24 Penyelenggaraan Diklat Fungsional dan HAM di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM

- ❖ Dari ketiga Bidang yang ada pada Pusat Pengembangan Fungsional dan HAM, yaitu Bidang Program, Bidang Penyelenggaraan Diklat dan Bidang Evaluasi dan Laporan pada Tahun 2013 Pusat Pengembangan Fungsional dan HAM melakukan penyerapan anggaran sebesar Rp. 6.609.761.379,- atau 94,43% dari anggaran yang terdapat dalam pagu anggaran BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp. 7.000.000.000,- Hal ini disebabkan adanya penghematan dalam perjalanan dinas peserta pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan Fungsional dan HAM;

c. Pusat Pengembangan Teknis

Capaian kegiatan pada Pusat Pengembangan Teknis Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut :

1) Bidang Program

Bidang Program Pusat Pengembangan Teknis pada Tahun 2013 melakukan 6 (Enam) kegiatan, berikut perinciannya:

No	Kegiatan	Output
1	Penyusunan Modul Diklat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Tersusunnya 5 Modul Diklat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum : 1. Pengadaan Peraturan Perundang-undangan dan Bahan Dokumentasi Hukum Lainnya 2. Katalogisasi Monografi Hukum 3. Pembuatan Indeks Artikel majalah Dan Koran di Bidang Hukum 4. Aplikasi Perpustakaan Hukum Online 5. Pelayanan Informasi Hukum
2	Penyusunan Draft Permenkumham Teknis	Peraturan Menteri Hukum dan HAM berkaitan dengan Diklat Teknis

2) Bidang Penyelenggaraan Diklat

Bidang Penyelenggaraan Diklat Pusat Pengembangan Teknis pada Tahun 2013 menyelenggarakan 30 (Tiga puluh) Pendidikan dan Pelatihan dengan jumlah lulusan sebanyak **1.036** orang, dengan perincian sebagai berikut:

DIPA BPSDM Hukum dan HAM

NO	DIKLAT / BIMTEK	TANGGAL PELAKSANAAN	OUTPUT		
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Administrasi Pemasarakatan	21 Februari s.d 06 Maret 2013	32	8	40
2	Jasa Hukum	25 April s.d 07 Mei 2013	22	18	40
3	Sistem Informasi Keimigrasian	25 April s.d 07 Mei 2013	31	8	39
4	Bimtek Penyusunan Anggaran	02 s.d 04 Mei 2013	13	16	29
5	Disiplin bg Petugas PAS Angkatan 1	06 s.d 19 Juni 2013	36	4	40
6	Disiplin bg Petugas PAS Angkatan 2	06 s.d 19 Juni 2013	35	5	40
7	Intelijen Imigrasi Lanjutan	09 Juni s.d 08 Juli 2013	30	1	31
8	Bimtek Kehumasan	10 s.d 14 Juni 2013	19	10	29
9	PK BAPAS Angkatan I (Kelas A)	17 Juni s.d 04 Juli 2013	30	10	40
10	PK BAPAS Angkatan II (Kelas B)	24 Juni s.d 11 Juli 2013	36	3	39
11	PK BAPAS Angkatan III	20 Agustus s.d 6 September 2013	31	9	40
12	Balai Harta Peninggalan	20 Juni s.d 3 Juli 2013	19	21	40
13	RUPBASAN	21 Agustus s.d 03 Sept 2013	27	3	30
14	Pembinaan Narapidana Kasus Terorisme	27 Agustus s.d 9 September 2013	38	2	40
15	Penyuluh Hukum	11 s.d 24 September 2013	27	12	39
16	Pencegahan Peredaran Narkoba di Lapas dan Rutan	11 s.d 24 September 2013	36	4	40
17	RUDENIM	25 Sept s.d 8 Okt 2013	34	3	37
18	Kurator	17 s.d 29 Oktober 2013	17	9	26
19	Pelatihan Dasar Pemasarakatan (PDP)	17 s.d 29 Oktober 2013	34	4	38
20	Diklat Pengelola Jaringan dan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH)	17 s/d 30 Okt 2013	22	15	37
TOTAL			569	165	734

DIPA Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

NO	DIKLAT / BIMTEK	TANGGAL PELAKSANAAN	OUTPUT		
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Teknis Kurator Gelombang II	7-20 November 2013	22	18	40
2	Protokoler Gelombang I	21 sd 31 Oktober 2013	27	11	38
3	Protokoler Gelombang II	14 s.d 23 Nov 2013	22	18	40
4	Teknis Fidusia	17-30 Nov 2013	25	14	39
5	Pelayanan Hukum Terpadu Angkatan I	8 s/d 28 Desember 2013	25	7	32
6	Pelayanan Hukum Terpadu Angkatan II	8 s/d 28 Desember 2013	20	6	26
Total Peserta			119	56	175

DIPA Direktorat Jenderal Imigrasi

NO	DIKLAT / BIMTEK	TANGGAL PELAKSANAAN	OUTPUT		
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Pemeriksa Dokumen Keimigrasian (PNBP Imigrasi)	22 Agustus s.d 03 Sept 2013	38	2	40
2	Intelijen Gelombang II (PNBP Kanim Jakarta Selatan)	6 Nov s.d 5 Des 2013	30	1	31
	Total Peserta		68	3	71

DIPA Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia

NO	DIKLAT / BIMTEK	TANGGAL PELAKSANAAN	OUTPUT		
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	ABH (Anak Bermasalah Hukum) gel 1	26 Mei s.d 12 Juni 2013	16	10	26
2	ABH (Anak Bermasalah Hukum) gel 2	28 Agustus s.d 13 September 2013	17	13	30
	Total Peserta		33	23	56

- Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dan HAM Tahun 2013 menghasilkan **1.036** orang lulusan Diklat dengan rincian sebagai berikut :
 - 734 orang lulusan diklat melalui anggaran DIPA BPSDM Hukum dan HAM;
 - 175 orang lulusan diklat melalui anggaran PNBP Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
 - 71 orang lulusan diklat melalui anggaran PNBP Direktorat Jenderal Imigrasi;
 - 56 orang lulusan diklat melalui anggaran PNBP Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia (HAM)

3) Bidang Evaluasi dan Laporan

Bidang Evaluasi dan Laporan Pusat Pengembangan Teknis pada Tahun 2013 melakukan 3 (tiga) kegiatan, berikut perinciannya:

No	Kegiatan	Output
1	Evaluasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Alumni Diklat Teknis	95,7% peserta alumni Diklat Teknis meningkat kinerjanya atau 225 orang sedangkan yang tidak meningkat kinerjanya sebanyak 4,3% atau 10 orang dari jumlah sampling 235 orang dilihat dari : <ul style="list-style-type: none"> ➢ Perubahan perilaku sikap dan peningkatan kualitas dalam pelaksanaan tugas;

		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Peningkatan pengetahuan dan wawasan; ➤ Peningkatan kepuasan kerja dari atasan, rekan sejawat, maupun staf dibawahnya.
2	Evaluasi dan Penyusunan Laporan Per Kegiatan Diklat Teknis (11 Laporan)	Tersusunnya Dokumen Laporan hasil Evaluasi terhadap 20 penyelenggaraan Diklat Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM

- ❖ Dari ketiga Bidang yang ada pada Pusat Pengembangan Teknis, yaitu Bidang Program, Bidang Penyelenggaraan Diklat dan Bidang Evaluasi dan Laporan pada Tahun 2013 Pusat Pengembangan Teknis melakukan penyerapan anggaran sebesar Rp.6.756.544.239,- atau 91,30% dari anggaran yang terdapat dalam pagu anggaran BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp.7.400.000.000,-. Hal ini disebabkan adanya penghematan dalam perjalanan dinas peserta pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan Teknis;

d. Akademi Ilmu Pemasarakatan (AKIP).

Akademi Ilmu Pemasarakatan pada Tahun 2013 melakukan 2 (dua) kegiatan, adapun capaian kegiatan pada Sekolah Kedinasan Akademi Ilmu Pemasarakatan (AKIP) pada Tahun Anggaran 2013 dapat dilihat dari kegiatan di bawah ini:

No	Kegiatan	Output
1	Pendidikan Kedinasan	
A	Layanan Perkantoran	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Terlaksananya pembayaran gaji, dan tunjangan bagi 29 orang pegawai AKIP dan 257 Taruna AKIP; ✓ Tersedianya kebutuhan ATK AKIP Tahun 2013 melalui belanja barang; ✓ Terpeliharanya peralatan dan mesin dalam rangka menunjang tugas dan fungsinya.
B	Pendidikan Kedinasan AKIP	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tersedianya kebutuhan ATK dalam rangka menunjang Kegiatan belajar mengajar bagi 257 Taruna AKIP;

		✓ 63 orang Taruna AKIP dinyatakan lulus dan menguasai Ilmu dan Keahlian Teknis Pemasaryakatan.
--	--	--

e. Akademi Imigrasi (AIM)

Akademi Imigrasi pada Tahun 2013 melakukan 2 (dua) kegiatan, adapun capaian kegiatan pada Sekolah Kedinasan Akademi Imigrasi (AIM) pada Tahun Anggaran 2013 dapat dilihat dari kegiatan di bawah ini:

No	Kegiatan	Output
1	Pendidikan Kedinasan	
A	Layanan Perkantoran	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Terlaksananya pembayaran gaji, dan tunjangan bagi 25 orang pegawai AIM dan 190 Taruna AIM; ✓ Tersedianya kebutuhan ATK AIM Tahun 2013 melalui belanja barang; ✓ Terpeliharanya peralatan dan mesin dalam rangka menunjang tugas dan fungsinya.
B	Pendidikan Kedinasan AIM	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tersedianya kebutuhan ATK dalam rangka menunjang Kegiatan belajar mengajar bagi 127 Taruna AIM dan 63 orang peserta Diklat Khusus Keimigrasian; ✓ 63 orang Taruna AIM dan 63 orang Diklat Khusus Keimigrasian dinyatakan lulus dan menguasai Ilmu dan Keahlian Teknis Imigrasi.

g. Pencapaian Output DIKLAT menggunakan Anggaran PNBP Direktorat Jenderal Imigrasi.

Total capaian kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang menggunakan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Jenderal Imigrasi adalah 6 Pendidikan dan Pelatihan dengan total capaian 200 orang pegawai, berikut perinciannya:

NO	DIKLAT/BIMTEK	TGL PELAKSANAAN	OUTPUT		
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Kepemimpinan Tk.III/2013 (Imigrasi)	13 Nov s.d 31 Des 2013	34	5	39
2	Bendaharawan (PNBP Imigrasi)	27 Agst s.d 16 Sept 2013	18	12	30
3	PPNS gel I (PNBP Imigrasi)	30 Sept s.d 28 Nov 2013	28	2	30
4	PPNS gel II (PNBP Imigrasi)	07 Okt s.d 07 Nov 2013	28	2	30
5	Pemeriksa Dokumen Keimigrasian (PNBP Imigrasi)	22 Agustus s.d 03 Sept 2013	38	2	40
6	Intelijen Gelombang II (PNBP Kanim Jakarta Selatan)	6 Nov s.d 5 Des 2013	30	1	31
Total			176 orang	24 orang	200 orang

d. Pencapaian Output diklat Menggunakan Anggaran PNBP Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia

Total capaian kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang menggunakan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia adalah 2 Pendidikan dan Pelatihan dengan total capaian 56 orang pegawai, berikut perinciannya:

DIPA Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia

NO	DIKLAT / BIMTEK	TANGGAL PELAKSANAAN	OUTPUT		
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	ABH (Anak Bermasalah Hukum) gel 1	26 Mei s.d 12 Juni 2013	16	10	26
2	ABH (Anak Bermasalah Hukum) gel 2	28 Agustus s.d 13 September 2013	17	13	30
Total Peserta			33	23	56

i. Pencapaian Output DIKLAT menggunakan Anggaran PNBP Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU).

Total capaian kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang menggunakan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) adalah 10 Pendidikan dan Pelatihan dengan total capaian 371 orang pegawai, berikut perinciannya:

NO	DIKLAT/BIMTEK	TGL PELAKSANAAN	OUTPUT		
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Teknis Kurator Gelombang II	7-20 November 2013	22	18	40
2	Protokol Gelombang I	21 sd 31 Oktober 2013	27	11	38
3	Protokol Gelombang II	14 s.d 23 Nov 2013	21	19	40
4	Teknis Fidusia	17-30 Nov 2013	25	14	39
5	Kepemimpinan Tk.III/2013 (AHU)	27 Okt s.d 14 Des 2013	27	9	36
6	Kepemimpinan Tk.IV/2013 (AHU)	5 Nov s.d 11 Des 2013	23	17	40
7	Diklat Audit Pengadaan Barang Dan jasa	25 Nov s/d 6 Des 2013	23	17	40
8	Diklat Pelayanan Publik	4 s/d 17 Des 2013	29	11	40
9	Pelayanan Hukum Terpadu Angkatan I	8 s/d 28 Desember 2013	25	7	32
10	Pelayanan Hukum Terpadu Angkatan I	8 s/d 28 Desember 2013	20	6	26
Total			242 orang	129 Orang	371 orang

j. Pencapaian Output DIKLAT menggunakan DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI.

Total capaian kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang menggunakan DIPA Kantor Wilayah adalah 39 Pendidikan dan Pelatihan dari 25 Kantor Wilayah dengan total capaian **1.359** orang pegawai, berikut perinciannya:

NO	KANTOR WILAYAH	KEGIATAN	PESERTA		
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JML
1	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	Diklat Bendaharawan	24	6	30
		Diklat Fisik, Mental, dan Disiplin CPNS Tahun 2013	75	20	95
2	SUMATERA UTARA	Diklat Bendaharawan Angk. I	21	9	30
3	BANGKA BELITUNG	Pelatihan Kesamaptaaan	29	1	30
		Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa	24	6	30
4	KEPULAUAN RIAU	Rapat Koordinasi Penyusunan Anggaran 2014	47	10	57
		Bimtek Protokol dan MC	18	12	30
		Diklat Kesamaptaaan Tahun 2013	37	1	38
5	RIAU	Pelatihan Bendahara dan Pengelolaan Keuangan			
6	LAMPUNG	Bimtek Penyusunan Laporan	21	9	30
7	BANTEN	Pel. Mind Setting	80	40	120
		Bimtek Penyusunan Program dan RKA/KL	21	9	30
		Bimtek & Sosialisasi Bidang Keamanan dan Ketertiban Kanwil Banten	22	3	25
8	DKI JAKARTA	Tidak ada laporan			0
9	JAWA BARAT	Tidak ada laporan			0
10	JAWA TENGAH	Manajemen Perubahan	60	10	70
11	D.I YOGYAKARTA	Tidak ada laporan			0
12	JAWA TIMUR	Diklat Pengadaan Barjas	54	12	66
		Diklat Pim IV	-	-	40
13	KALIMANTAN BARAT (Pontianak)	Sosialisasi Penertiban Pengurus	-	-	0
		Rapat Tim Penanganan Imigran Ilegal	30	5	35
14	KALIMANTAN TENGAH (Palangkaraya)	Kesamaptaaan			30
		Barang dan Jasa			30
15	KALIMANTAN SELATAN (Banjarmasin)	Diklat Pengadaan Barjas	33	7	40
16	KALIMANTAN TIMUR (Samarinda)	Bimtek SPIP	17	13	30
		Diklat Barang dan Jasa Pemerintah	24	6	30
17	SULAWESI TENGAH	Diklat Pembimbing Kemasyarakatan	22	8	30
18	SULAWESI SELATAN	Tidak ada laporan			0
19	SULAWESI TENGGARA (KENDARI)	Rapat Koordinasi Penyusunan Program dan RKA Tahun 2014	33	4	37
20	SULAWESI BARAT	Tidak ada laporan			0
21	GORONTALO	Bimtek Pengadaan Barjas	23	7	30
		Mind Setting	25	5	30
22	BALI	Bimbingan Teknis SPIP	42	8	50
		Diklat Bendahara Pengeluaran Kanwil	21	9	30
		Bimtek Laporan Penyusunan Kantor Wilayah			0
23	NUSA TENGGARA TIMUR	Diklat SAI/SABMN/RKA-KL	20	7	27
		Bimtek Inteldak Sisinfokim	8	7	15
		Laporan Triwulan I / 2013			0
		bimtek pengadaan secara elektronik	26	4	30



24	PAPUA	Bimtek Bidang Kesehatan Perawatan Masalah HIV AIDS dan TBC	22	8	30
25	PAPUA BARAT	Diklat Prajabatan Golongan II TA.2013	69	15	84
		Bimtek HAM bagi Masyarakat dan Aparatur Pemerintah			40
		Pelatihan Dasar Konsultan HKI			40
		Monitoring dan Evaluasi Sistem Evaluasi Management Kepegawain (SIMPEG)			
JUMLAH					1.359

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja agar menjadi pemahaman untuk kemudahan dalam mencapai sasaran kinerja yang lebih baik serta melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal. Adapun permasalahan yang ada yang sering kali ditemukan adalah :

1. Sisa kontrak yang tidak dapat dioptimalisasikan, karena tidak disetujuinya usulan optimalisasi anggaran di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM oleh Ditjen Anggaran;
2. Masih adanya kantor / UPT tidak dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal penarikan dana yang telah ditetapkan dalam DIPA UPT terkait;
3. Adanya anggaran bertanda blokir yang tidak diusulkan pencairannya;
4. Masih kurangnya tenaga administrasi yang menguasai bidang komputer;
5. Kurangnya sarana dan prasarana kerja untuk menunjang, yaitu komputer dan laptop;
6. Terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sebagai tenaga pengajar;
7. Jumlah sumber daya manusia yang belum memadai serta penempatan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan latar belakang pendidikan;
8. Aplikasi Teknologi Informasi yang terintegrasi belum tersedia sepenuhnya;
9. Tidak komitmennya penguatan sistem dan prosedur pelaksanaan tugas.

A. Penutup

Laporan Tahunan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2013 adalah pertanggungjawaban Institusi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada publik terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2013. Laporan Tahunan ini menggambarkan upaya keras Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam merubah dan memperbaiki diri agar dapat mengikuti dan menjalankan program pemerintah untuk memenuhi kepuasan publik.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai institusi pemerintahan berupaya mewujudkan sistem hukum nasional dalam menjamin tegaknya supremasi hukum, kepastian hukum dan hak asasi manusia yang berdasarkan keadilan dan kebenaran, terutama dalam memberikan layanan prima kepada masyarakat sebagai implementasi tugas dan fungsi yang diembannya seperti terus melakukan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya sesuai aturan perundang-undangan. Pola kerja yang mengedepankan profesionalisme dan akuntabilitas terus-menerus di realisasikan melalui serangkaian Standar Operasional Prosedur (SOP).

Diharapkan ada kesamaan gerak dan kesatuan langkah segenap aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan kewenangan sehingga mencapai target yang telah ditetapkan. Laporan ini terlalu singkat untuk menjelaskan kinerja dan upaya keras Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjawab keinginan masyarakat selama Tahun 2013. Kami menyadari masih banyak kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

B. Saran

- a. Perlu penguatan koordinasi internal pada level Unit Eselon I, Kantor Wilayah dan Satuan Kerja secara berkala mengenai implementasi kebijakan terkait kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan cara mengirimkan Laporan secara tepat waktu, *uptodate* dan akuntabel.
- b. Peningkatan disiplin pegawai baik disiplin waktu bekerja, disiplin atas atribut dan pakaian sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor : M.HH-02.KP.07.02 tahun 2011 tentang atribut dan pakaian Pegawai dilingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- c. Peningkatan sumber daya manusia pegawai dilingkungan Kementerian Hukum dan hak Asasi manusia harus terus dilakukan, dengan menambah kemampuan dan keterampilan pegawai dengan cara pemberian bimtek secara kontinyu dan berkelanjutan terutama dalam bidang teknologi informasi.

- d. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai salah satu institusi yang menjadi contoh Wilayah Bebas Korupsi maka perlu meningkatkan sistem dan mekanisme kegiatan pemberantasan korupsi sesuai dengan kriteria penilaian Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dengan melakukan pelayanan publik yang jujur dan transparan melalui penguatan Sistem pengawasan Intern pemerintah (SPIP).
- e. Pemberian layanan prima kepada masyarakat dengan cara dengan cara memberikan pelayanan sesuai dengan Maklumat dan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan.